

XVI/2004 ISSN: 1410 - 1298

Dewan Redaksi Tetap
Mansour Fakih
Roem Topatimasang
Eko Prasetyo

Redaktur Tamu
Hendro Sangkoyo

Redaktur Pelaksana
Fitria Agustina

Artistik & Desain Grafis
Andy Seno Aji
Darmawan

Ilustrasi
Sebikom

Abstrak Artikel
Eko Prasetyo
Jessica Champagne

Marketing & Distribusi
Aand Anshory
N.Kusuma
Ririen

Akuntan
Astri Unun Pratiwi

insist PRESS

Pogung Lor C-145
Yogyakarta 55284 Indonesia
Telp/Faks. +62 274 519513
insistpress@eudoramail.com
www.insist.or.id\press

Daftar Isi

■ **PENGANTAR**

Pengerahan Menuju Demokrasi: Politik Pembiayaan Tindakan Kolektif di Indonesia
Hendro Sangkoyo ❑ 3 - 10

■ **KAJIAN**

Ekonomi-Politik Pendanaan Pengerahan Sosial di Indonesia
Hendro Sangkoyo ❑ 11 - 18

Politik, Norma-Norma Internasional, dan Pertumbuhan NGO-NGO Sedunia
Kim D. Reimann ❑ 19 - 86

Dari Bawah ke Atas: Masyarakat Sipil
Thomas Carothers ❑ 87 - 122

Imperialisme dan NGO-NGO
James Petras ❑ 123 - 142

Pengerahan Sosial dari Utara ke Selatan: Kebun Binatang dan Eksperimen Sosial?
Pantoro Tri Kuswardono ❑ 143 - 164

■ **KASUS**

Interaksi Donor-Ornop Kalimantan Timur
Koesnadi Wirasapoetra ❑ 165 - 172

Bergelut Melawan Bayangan Sendiri: Pengalaman Yayasan Wisnu dalam Membangun Basis Logistik
IBK Yoga Atmaja ❑ 173 - 184

Penggalangan Dana bagi Perubahan Sosial
Longgena Ginting ❑ 185 - 204

■ **BUKU**

Teknik Yang Papa Mengemis kepada Yang Kaya
Hary Prabowo ❑ 205 - 212

■ **REFERENSI**

Daftar Akronim ❑ 213 - 216

Daftar Hibah Sejumlah Lembaga ❑ 217 - 231

wacana mengundang Anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan peran masyarakat. Tulisan Anda diharapkan 10-15 halaman kuarto, dilengkapi dengan pustaka acuan dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. Untuk tulisan yang dimuat akan disediakan honorarium yang pantas.


GIMANA KALO KITA BIKIN LSM: INSTITUT TRANSPORTASI SOSIAL?
6
JOMBOR - SALAM
Ismail '03

Pengerahan Menuju Demokrasi:
Politik Pembiayaan Tindakan Kolektif di Indonesia

Hendro Sangkoyo[1]

"...marilah kita berdoa sesuai dengan funding kita masing-masing..."

Wacana edisi ini membicarakan pembiayaan tindakan kolektif—sebuah persoalan besar bukan saja bagi organisasi kenegaraan dan perusahaan, tapi juga bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan.[2] Tidak seperti pembiayaan badan-badan negara dan perusahaan, pembiayaan perhimpunan-perhimpunan kemasyarakatan umumnya tidak menarik perhatian publik, kecuali ketika tertib tata-buku, legalitas, atau ikatan politik pembiayaan dipersoalkan oleh pihak lain. Pada zaman Soeharto, perhatian datang terutama dari elite politik rezim, untuk mencegah perhimpunan-perhimpunan tersebut menjadi gerakan politik yang membahayakan rezim. Dalam lima tahun terakhir ini, perhatian pada tanggung-gugat perhimpunan non-pemerintah khususnya dalam urusan pembiayaan, terutama justru datang dari kalangan organisasi kemasyarakatan sendiri. Dari mana datangnya perhatian baru akan alir dana pembiayaan itu? Kenapa, sekali lagi, tekanan terbesar datang lebih dulu dari perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah di negeri-negeri Utara?

---

[1] Hendro Sangkoyo, pelajar teori perencanaan dan politik komparatif Asia Tenggara.

[2] Dalam edisi ini, istilah perhimpunan kemasyarakatan digunakan secara bergantian dengan organisasi kemasyarakatan, perhimpunan non-pemerintah, organisasi non-pemerintah (Ornop), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non-Governmental Organization (NGO), dan Civil Society Organization (CSO). Hal ini mencerminkan keragaman citra diri yang diinginkan oleh pelakunya. Di tahun 1990-an, bahkan perbedaan istilah itu merupakan ekspresi tegangan di antara kelompok-kelompok dominan dalam gerakan kemasyarakatan di Indonesia.

Persoalan pembiayaan tindakan kolektif dari perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah bukan saja urusan para pekerja perhimpunan, tetapi juga banyak orang biasa yang bekerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan tersebut, para penggalang dana yang punya masalah dan kerepotannya sendiri, dan karena ikatan-ikatan politik yang berpotensi mengguncang kemapanan kekuasaan, juga aparatus negara. Pada zaman di mana perusahaan trans-nasional terlibat di semua lini urusan publik, mudah dibayangkan bahwa penggalangan dana pun menjadi salah satu garis depan perluasan operasinya, baik untuk kepentingan pengurangan pajak di negara asalnya, misi kemasyarakatan, atau asuransi sosial dan politik di wilayah operasinya di negeri-negeri Selatan.

Persoalan pembiayaan yang pada masa ini dialami oleh perhimpunan-perhimpunan kemasyarakatan sesungguhnya unik untuk zamannya. Lahir, tumbuh, dan rontoknya perhimpunan-perhimpunan 'modern' di kepulauan pada tiga puluh tahun pertama abad yang lalu tidak berurusan dengan ada/tidaknya kontrak baru dan perpanjangan bantuan dari donor, atau agenda donor yang hendak dipasarkan di sini. Lebih jauh daripada itu, program dan tindakan kolektif dari perhimpunan-perhimpunan tersebut pada umumnya merupakan hasil rumusan persoalan tanah air dengan pikiran sendiri, termasuk pertengkaran tentangnya, bukan pemasaran kesimpulan-kesimpulan yang dirumuskan di negara-negara kaya tentang bagaimana membantu negara miskin dan mengatasi kemiskinan.

Demikian pula halnya, walaupun inisiatif penguatan kesejahteraan masyarakat pedesaan telah mulai dirintis dan dipraktekkan sejak 1950-an, bagi kegiatan perhimpunan non-pemerintah di dalam negeri, tradisi untuk memberikan atau memperoleh dukungan pembiayaan kegiatan perhimpunan lewat mekanisme hibah baru berkembang luas sejak 1980-an. Pada saat yang kurang-lebih bersamaan, badan-badan dari negara-negara Utara yang berwenang memutuskan bantuan luar negeri serta badan-badan kredit internasional secara sistematis mulai menekan negara-negara Selatan agar membuka ruang politik bagi warga negara, di samping, tentu saja, membebaskan proses alir modal, melancarkan pembelaan kepentingan pasar, menciutkan aset publik yang dikelola oleh pengurus-negara, serta menciutkan peran pengurus-negara melayani kepentingan publik lewat perencanaan alokasi sumberdaya.

Dunia korporasi maupun negara industri maju tidak mungkin melakukan sendiri pengerahan sosial untuk mengelola proses pengurusan publik atau mengambil alih peran-peran negara yang hendak diciutkan di negeri-negeri Selatan. Begitu pula, rakyat banyak—yang

dalam kasus kepulauan Indonesia sebagian besar adalah warga kampung pedesaan dan perkotaan yang tak punya cara pengerahan diri yang tangguh—tidak dapat diperhitungkan sebagai pelaku dan mekanisme tandingan untuk menjalankan pengurusan publik. Pilihan jatuh pada perhimpunan non-pemerintah, yang menawarkan kemudahan-kemudahan yang tak dimiliki baik oleh perusahaan maupun rakyat banyak yang serba kekurangan.

Dari sisi kepentingan rakyat di negeri-negeri Selatan, siasat menggandeng perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah tersebut harus dibaca dalam konteks bangunan kemasyarakatan masing-masing negeri. Di Indonesia, organisasi non-pemerintah sampai saat ini masih didominasi oleh lapisan tipis kelas menengah yang sebagian besar berpangkalan di perkotaan, dengan jarak sosial yang cukup besar dengan rakyat kebanyakan. Peran sosial-politik yang baru beserta cara pembiayaan bagi perhimpunan-perhimpunan tersebut, walaupun telah ikut memperkenalkan perubahan-perubahan penting dalam pengurusan negara, belum terbukti menguatkan kemampuan rakyat untuk bersuara dan bertindak kolektif.

Meskipun susah ditarik kesimpulan yang berlaku umum, moda pembiayaan kegiatan yang sangat bahkan sepenuhnya bergantung pada sumber dana hibah dari luar organisasi dapat kita gambarkan sebagai berwajah dua. Pertama, kebiasaan bergantung pada tetangga atau pihak lain berkembang menjadi tradisi, dan belakangan, menjadi syarat gerakan atau kelangsungan perhimpunan. Kurang-lebih situasinya adalah seperti seseorang atlit Olimpiade yang khawatir meninggal kalau tidak ada tetangga yang mengantar tiga kali makan setiap hari. Sisi kedua adalah bahwa ketika persoalan pembiayaan untuk bertindak ditaruh sebagai persoalan logistik semata, ikatan politik dan ikatan kuasa dari transaksi pembiayaan diabaikan.



Walaupun inisiatif penguatan kesejahteraan masyarakat pedesaan telah mulai dirintis dan dipraktekkan sejak 1950-an, bagi kegiatan perhimpunan non-pemerintah di dalam negeri, tradisi untuk memberikan atau memperoleh dukungan pembiayaan kegiatan perhimpunan lewat mekanisme hibah baru berkembang luas sejak 1980-an. (Sumber: Hendro Sangkoyo, 2003)

Bagaimana kaitan antara pertumbuhan jumlah perhimpunan dengan kenaikan jumlah dana yang disalurkan lewat mereka? *Pertama*, dapat kita katakan bahwa pembesaran aliran dana lewat perhimpunan non-pemerintah internasional berkorelasi positif dengan pemekaran lapangan kerja non-pemerintah. Dari sekitar 37 ribu perhimpunan non-pemerintah internasional yang ada sekarang (1914: seribu), seperlimanya berdiri di tahun 1990-an. Tahun lalu, aliran dana hibah ke negara Selatan lewat perhimpunan-perhimpunan itu berjumlah 7,2 milyar dolar, kenaikan luar biasa dari 1 milyar dolar pada 1990 (UNDP, 2000, 2002). *Kedua*, bidang kekhususan perhimpunan tumbuh mengikuti pola yang menarik. Dari sebelas bidang kegiatan, perhimpunan yang bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan advokasi kebijakan tumbuh paling cepat pada periode 1990-2000,

masing-masing mencatat pertumbuhan jumlah perhimpunan sebesar 78,5%, 50%, dan 42,5%, jauh melampaui laju pertumbuhan rata-rata sebesar 19,3%. Pesatnya pertumbuhan tersebut juga disebabkan oleh munculnya dermawan-dermawan baru berskala raksasa. Jaringan Yayasan George Soros misalnya menyumbang sekitar 500 juta dolar per tahun pada negeri-negeri Selatan dan negeri sosialis dalam transisi, dengan fokus pada kebudayaan, kebijakan ekonomi dan sosial, serta hak asasi manusia. Yayasan Bill dan Melinda Gates telah mengeluarkan lebih dari 4 milyar dolar dalam dua tahun sejak 2000, untuk mendorong inisiatif-inisiatif kesehatan dunia. Jumlah perhimpunan dengan kegiatan politik justru berkurang sebesar 2,7% dari jumlah pada 1990 (UNDP, *ibid.*).

Di Indonesia, watak oligopsonik dari pasar pengerahan sosial lewat perhimpunan non-pemerintah—di mana dari sedikit 'pembeli jasa' yaitu penyokong dana dominan masing-masing mempunyai pengaruh besar terhadap penyedia jasa—dapat kita baca cukup jelas sejak awal 1990-an, tetapi terutama setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998. Konteks politik utama bagi kasus Indonesia, dan yang sekaligus menjadi tema yang memayungi berbagai sektor pengaliran dana ke sini, adalah 'transisi menuju demokrasi'. Walaupun demikian, ada berbagai kepentingan dan agenda yang berpilin lewat jaringan perpipaan dana tersebut. Demikian pula, perbedaan dan gabungan kepentingan dari unsur-unsur pro-demokrasi, oportunis, penumpang gelap, penadah, dan perantara dalam rombongan besar perhimpunan non-pemerintah di Indonesia sendiri berperan penting dalam membentuk dan memelihara model pengerahan dana pembiayaan yang sekarang dominan.

Pada garis besarnya dapat diamati adanya beberapa gejala sebagai berikut. Pertama, secara umum pemekaran perhimpunan serta perkembangan kegiatan perhimpunan berjalan mengikuti konsentrasi dukungan dana resmi dari pemerintah negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) serta perhimpunan-perhimpunan di negeri maju. Program pendidikan pemilih menjelang pemilihan umum 1999, program pembaruan pengurusan negara, serta program-program penanggulangan dampak krisis ekonomi adalah beberapa contoh agenda pemberi dana yang melibatkan perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah secara meluas sebagai pelaksana kreatif dari agenda yang ditentukan.

Kedua, di berbagai wilayah, industri-industri keruk khususnya pertambangan dan perkayuan—yang di samping memberikan pemasukan bagi pengurus-negara di daerah juga ikut menciptakan masalah bagi rakyat setempat—seringkali membutuhkan jasa perantara

untuk mengurus berbagai tuntutan rakyat terhadap perusahaan. Semakin besar ukuran usahanya, semakin tinggi permintaan akan jasa tersebut. Di beberapa wilayah, perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah bertindak tak ubahnya kontraktor proyek pembangunan, termasuk bekerjasama satu sama lain dalam sindikat perhimpunan sejenis, serta bertransaksi dengan penduduk setempat atas nama dan untuk kepentingan perusahaan. Pada aras negeri, model derma karitatif juga mulai lebih terus terang menunjukkan kerjasama antara pihak korporasi dengan perhimpunan non-pemerintah, dan tengah mengubah citra diri filantrofi-korporasi sendiri. Pokok perkaranya di sini adalah bahwa tanggung jawab kemasyarakatan perusahaan trans-nasional di negara sumber bahan mentah yang ditunaikan baik lewat program-program pembangunan untuk kampung-kampung di sekitar wilayah operasi perusahaan, maupun lewat pendanaan kegiatan non-negara secara umum, tidak bisa diperlakukan sebagai santunan bagi kerusakan sosial dan kerusakan ekologis dari perluasan industri keruk di kepulauan.

Gejala ketiga adalah perluasan dan peningkatan porsi peran perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah internasional, bukan saja sebagai *broker* yang menjembatani badan dana di negeri asal dengan perhimpunan pelaksana kegiatan di Indonesia, tetapi juga secara langsung membuat dan melaksanakan program sendiri serta menjalin ikatan dengan para pelaku perubahan termasuk pengurus-negara di daerah. Dengan kata lain, tengah berlangsung perluasan operasi perhimpunan-perhimpunan dari negeri Utara di Selatan, mengikuti kecenderungan yang sudah ada sebelumnya. Sampai tahun lalu 79% dari perhimpunan yang punya ikatan dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah perhimpunan Utara.

Ketiga gejala tersebut di atas—sebagian saja dari kecenderungan perkembangan khususnya pada masa setelah 1998—berpengaruh besar pada bagaimana perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah di Indonesia melihat dirinya di hadapan rakyat, pengurus-negara, perusahaan, dan penyokong pembiayaan. Ketika proses dukung-mendukung pembiayaan tindakan kolektif berubah menjadi alat perumus agenda tindakan itu sendiri, maka proses demokratisasi ikatan-ikatan politik di antara berbagai pelaku utama perubahan termasuk perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah sendiri—sasaran utama yang dinyatakan hendak disasar oleh agenda-agenda negara industri maju di Indonesia—berubah menjadi sebuah proses persaingan antar pelaku pasar untuk meraih dana. Pengendali dana adalah penguasa.

Selama ini persaingan macam begini telah menciptakan situasi di mana blok-blok penggalang dana memperlakukan perhimpunan



Dari sebelas bidang kegiatan, perhimpunan yang bergerak di bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan advokasi kebijakan tumbuh paling cepat pada periode 1990-2000, masing-masing mencatat pertumbuhan jumlah perhimpunan sebesar 78,5%, 50%, dan 42,5%, jauh melampaui laju pertumbuhan rata-rata sebesar 19,3%. Jumlah perhimpunan dengan kegiatan politik justru berkurang sebesar 2,7% dari jumlah pada 1990. (Sumber: UNDP dalam Hendro Sangkoyo, 2003)

penerima hibah sebagai anak perusahaan wara-laba (*franchise*), dan begitu pula sikap dari banyak perhimpunan non-pemerintah memperlakukan rakyat dan kampung-kampung dampingannya. Persaingan antar perhimpunan maupun antar jaringan yang berujung pada sengketa, tak jarang merupakan sekedar wujud dari soal yang sama. Akan tetapi persoalannya lebih pelik daripada itu. Persaingan juga terjadi antar negeri. Di samping itu, pertambahan jumlah perhimpunan yang luar biasa mendorong munculnya peran baru bagi industri sertifikasi global untuk melayani kepentingan pengurus-negara yang ingin tetap mengendalikan gerakan-gerakan sosial di dalam negeri, serta kepentingan organisasi penggalang dana, yang harus bertanggung-gugat pada sponsornya masing-masing. Beberapa perusahaan sertifikasi trans-nasional kini tengah merumuskan model kelaikan organisatoris bagi perhimpunan non-pemerintah di negara Selatan, yang akan menyaring siapa-siapa yang patut menjadi rekanan dari organisasi pendana.

Pendek kata, logika perputaran uang sendiri telah dan tengah menjadikan perubahan sosial itu sendiri sebagai sebuah arena pasar global yang menjanjikan, dengan pelaku utama perhimpunan non-pemerintah. Di sinilah kumpulan artikel dalam **wacana** kali ini berbicara.

Lima artikel pertama mendudukkan cerita tentang Indonesia dalam perspektif perombakan bangunan politik dan ekonomi dunia yang tengah berlangsung sekarang. Tulisan pertama menyoroti sisi ekonomi-politik pendanaan pengerahan sosial di Indonesia. Kim D. Reimann mengajukan wacana tandingan mengenai kebangkitan perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah terutama di negeri-negeri Selatan. Menurutnya, dalam perkembangan tersebut peran dari agenda perombakan bangunan politik dunia jauh lebih penting daripada peran kesukarelaan dan kesadaran sendiri dari masyarakat sipil. Tulisannya menunjukkan secara kronologis bagaimana kiprah badan-badan PBB serta organisasi-organisasi kenegaraan negeri-negeri Utara di Asia, Afrika dan Eropa Timur dalam menciptakan ruang gerak dan sistem-sistem pendukung bagi tumbuhnya perhimpunan non-pemerintah. Thomas Carothers dalam edisi ini mengulas beberapa masalah genting yang ia temui selama bertahun-tahun menjalankan program bantuan luar negeri untuk demokratisasi lewat bawah, yaitu dengan melibatkan perhimpunan non-pemerintah di negara-negara Selatan dan negara transisi-menuju-demokrasi. James Petras menceritakan pengamatannya tentang proses perubahan struktural dalam gerakan perhimpunan non-pemerintah yang berlangsung di Amerika Latin. Tulisan ini merupakan kesimpulan lan-



Di beberapa wilayah, perhimpunan-perhimpunan non-pemerintah bertindak tak ubahnya kontraktor proyek pembangunan, termasuk bekerjasama satu sama lain dalam sindikat perhimpunan sejenis, serta bertransaksi dengan penduduk setempat atas nama dan untuk kepentingan perusahaan. (Sumber: Hendro Sangkoyo, 2003)

jut dari pengamatannya dengan Arellano Lopez tiga tahun sebelumnya, yang melihat kecenderungan pergeseran ujung pipa saluran dana, dari dukungan ke perhimpunan-perhimpunan akar-rumput di kampung dan penguatan institusi rakyat menjadi pelayanan pengantaran barang dan kontraktor (Lopez dan Petras, 1994). Pantoro Tri Kuswardono mengulas duduk perkara aliran dana pembiayaan tindakan kolektif di negeri-negeri Selatan dengan ketajaman penglihatan seorang yang terlibat langsung, baik dalam perpipaan aliran dana maupun dalam keruwetan ikhtiar rakyat untuk menguatkan diri.

Tulisan Kusnadi Wirasapoetra mencoba memetakan lebih jauh bagaimana perpipaan dana bekerja, dengan melihat Kalimantan Timur sebagai kasus telaahnya. Baik disampaikan di sini bahwa rencana redaksi untuk juga mengetengahkan berbagai kesulitan lapangan dari sisi pandang organisasi penggalang dana tidak tercapai, karena beberapa calon penulis yang telah menyatakan kesediaannya kemudian menarik diri.

Dua artikel berikutnya menunjukkan bahwa memang ada jalan lain untuk memelihara keawetan gerakan dan menjaga agar perhimpunan tetap hidup dan berkembang, akan tetapi menemukannya tidak semudah menadahkan tangan pada para penggalang dana hibah seperti yang bertahun-tahun menjadi praktek sosial dominan di kalangan perhimpunan non-pemerintah. IBK Yoga Atmaja menuturkan bagaimana pengalaman perhimpunannya merintis jalan setapak menuju kemandirian. Cerita Yayasan Wisnu merupakan satu dari cerita serupa di berbagai penjuru kepulauan yang daftarnya terus bertambah panjang, tentang bagaimana menggalang tenaga—bukan hanya dana—untuk mengubah bangunan kuasa dan merebut syarat-syarat keselamatan, produktivitas, dan kelangsungan pelayanan alam. Longgena Ginting menutup rangkaian tulisan kali ini dengan mengajukan penggalangan iuran publik sebagai cara tandingan dari model pembiayaan gerakan sosial yang ada sekarang.

Tidak seluruh sisi masalah pembiayaan perhimpunan non-pemerintah tercakup oleh pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam artikel-artikel tersebut di atas. Di lain pihak, tanggung-gugat perhimpunan non-pemerintah jauh lebih luas daripada bagaimana mereka memecahkan soal pembiayaan kegiatan. Meskipun demikian, perhatian kritis pada soal aliran dana merupakan salah satu kunci penting bagi proses demokratisasi gerakan kemasyarakatan di Indonesia.


WAH, KOLEGA ANDA ITU MENDERITA SAKAU... KETAGIHAN DONOR. DIA HARUS MASUK REHABILITASI
FUNDING..AAHHH
FUNDING..AAHHH
..AAHHH
sebikom@yahoo.com

Ekonomi-Politik Pendanaan Pengerahan Sosial di Indonesia

Hendro Sangkoyo[1]

In the map of social mobilization, the amount of money available inspires questions about the interests behind the money flowing to the global South. There are in general three types of social mobilization through funding: (1) funding allocations as part of the "infrastructure of trust"; (2) social mobilization as the infrastructure of goods production and capital circulation; and (3) social mobilization as a voluntary donation for prosperity (philanthropy) or "movement dues" among people working together for social change. Examining Indonesia's experience as the "recipient," it can be seen that from the beginning of the twentieth century to World War II the first and third categories were dominant. By the early 1980s, the second category was gradually taking over. Streams of funding that had previously been based on bureaucratic offices, state offices, or popular unions, switched to "non-governmental organizations". The writer asks, where are the people, the citizenry, in the new map of the social mobilization industry? The development of this social mobilization, because of the span of controls that reach social units as small as the village or neighborhood, is imagined as the "organized element of civil society." These plans and developments for social mobilization is more productive with a narrow meaning. However, the most important criticism of this innovation is that the agenda for the mechanization of social movements places the people together with various ways of connecting and moving independently.

---

[1] Hendro Sangkoyo, pelajar teori perencanaan dan politik komparatif Asia Tenggara.

Pengerahan sosial lewat aliran dana dari negara-negara kaya ke negara miskin adalah sebuah industri raksasa, yang pada tahun 2000 bernilai sekitar 54 milyar dolar.[2] Pengerahan sosial di sini dimaknai tanpa pandang-isi, sebagai suatu usaha sistematis untuk melibatkan orang banyak lewat pemasaran wacana, pembentukan perilaku, pelatihan kemampuan atau ketrampilan serta pengembangan pranata pendukungnya. Lebih khususnya, pengerahan sosial hendak ditaruh dengan negeri-negeri Selatan sebagai sebuah pasar tangkapan, dan negeri-negeri Utara sebagai pencipta persoalan—dan oleh karenanya, juga pencipta kebutuhan pemecahan persoalan. Cerita pengerahan sosial ini hendak ditaruh pada peta sejarah kolonisasi negeri-negeri Selatan.

Dekolonisasi sejak Perang Dunia II telah menciptakan perladangan baru bagi sebuah proses belajar untuk menjadi masyarakat dan negara sosialis atau sebaliknya kapitalis liberal yang sejati. Hal yang disebut terakhir, pada saat ini telah menjadi satu-satunya pilihan yang ditawarkan kepada seantero negeri-negeri bekas jajahan. Di dalam pelatihan kolosal tersebut, kurikulum inti adalah bagaimana membangun dan merawat ketertiban industrial dan politik di atas kerak-kerak kebudayaan pra-kolonial yang belum sepenuhnya terkikis dari ingatan dan praktek hidup orang banyak. Kolonisasi adalah tahap pertama pendidikan, dan pengerahan sosial seusai-penjajahan adalah ikhtiar tahap kedua untuk melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas.

Wujud paling mencolok dari proyek-macet kolonisasi adalah gagal atau macetnya bangunan-bangunan pengurusan kenegaraan Barat, termasuk mesin-mesin hukum, politik, dan keuangan, yang tercermin misalnya dalam gejala korupsi, pengabaian tujuan serta peralatan hukum dan aturan kenegaraan, tidak berjalannya politik elektoral, atau rendahnya jumlah pembayar pajak. Dalam penglihatan bahwa ketertiban hukum dan politik serta keberadaban masyarakat adalah dua sisi mata uang, maka kontradiksi beserta tegangan dan sengketa kemasyarakatan yang dihasilkannya bukanlah reaksi tertunda dari relasi-relasi kuasa yang dibangun di negara jajahan untuk merawat rezim industri keruk kolonial, melainkan, sekali lagi, adalah warisan budaya nenek moyang yang 'ketinggalan jaman'.

Dalam ungkapan lain, seluruh pengalaman rakyat kepulauan Indonesia dengan rezim Soeharto dapat kita lihat sebagai proses-belajar yang disponsori oleh negara-negara alumni Perang Dunia II pendu-

---

[2] Sekitar 13 persen dari jumlah tersebut disalurkan lewat jasa organisasi non-pemerintah.

kung rezim. Sebagai akibat langsung dari praktek pengelolaan politik dan ekonomi selama tiga dekade, proses pencarian ruh yang berlangsung sesudahnya sampai saat ini beserta gangguan sistematis terhadapnya lewat sektor keuangan tidak bisa dianggap sebagai 'transisi menuju demokrasi', karena Demokrasi Pancasila Orde Baru maupun rezim pengelolanya *adalah* anak-asuh demokrasi liberal. Kurikulum 'transisi menuju demokrasi' itu sendiri dalam kenyataannya didominasi oleh tema 'transisi menuju moneta-krasi' atau kekaisaran uang, serta transformasi lanjut dari aparatus kenegaraan untuk sepenuhnya menjadi pelancar proses kapital. Seperti kita tahu, sponsor dan kasir lapangan dari rezim Orde-Baru dan rezim-rezim 'transisional' sesudahnya, terutama adalah Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), serta kantor-kantor keuangan bilateral dan multi-nasional lainnya.

Dalam konteks tulisan ini, agenda dominan tadi merupakan lahan budidaya dan pasar bagi industri pengerahan sosial. Indonesia dalam hal ini adalah bagian dari negeri-negeri bekas jajahan yang merdeka sejak berakhirnya Perang Dunia II atau belakangan. Negeri-negeri 'Selatan' ini menyerupai sebuah *bazaar* raksasa, garis depan bagi perluasan sirkuit modal khususnya bagi negara-negara alumni Perang Dunia II. Lepas dari agenda, tujuan, dan cara pencapaiannya, dalam dua puluh tahun terakhir industri pengerahan sosial—khususnya yang menggunakan jasa dari sektor non-pemerintah, telah menjadi salah satu komponen sektor jasa yang tumbuh paling cepat.

Harus dikatakan di sini bahwa penanda 'Utara' atau 'Selatan' bukan mengacu pada wilayah geografis atau geo-politik. Sekarang proses perluasan pasar tidak lagi menempuh trayek tunggal abad keduapuluh dari wilayah-kekuasaan negara industri ke wilayah-wilayah kekuasaan negara sumber pengerukan bahan mentah. Mengikuti jejak sejarah dari '*indentured labour*' Cina ke kantung-kantung pertambangan di negeri bawah-angin dan 'Dunia Baru', sekarang migrasi antar-negeri telah menyediakan kanal perluasan pasar bagi profesi apapun, dari birokrat Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai pekerja seks komersial, dari ahli teknologi informasi sampai buruh tani. Sebagai pasar bagi proyek perluasan kapital, Dunia Ketiga dan Dunia Keempat (lokasi sosial para gelandangan dan pariah yang berada di sebelah bawah nomenklatur kelas) hidup dan berbiak bukan saja di Kalkuta, Jakarta, pedalaman Amazon atau Papua, tapi juga di jantung New York City dan London. Begitu pula sebaliknya, terminal-terminal keuangan di negeri-negeri Selatan, sebagai satelit atau miniatur dari metropolis-metropolis industrial Utara, dapat dipandang sebagai sumber-sumber domestik dari dana pengerahan sosial.



Meskipun banyak stafnya berniat baik, badan-badan bantuan internasional hanya berurusan dengan uang, tidak dengan proses sosial yang merupakan kunci untuk terjadinya perubahan institusional. Stafnya terlalu sibuk dengan prosedur-prosedur birokrasi sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersama mitranya menangani masalah-masalah pembangunan yang lebih penting. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Peta Sisi Penyediaan

Besarnya sisi penyediaan dana mengundang pertanyaan mengenai kepentingan-kepentingan utama di balik aliran dana untuk pengerahan sosial di negeri-negeri Selatan. Pada garis besarnya kita bisa menggolong-golongkannya ke dalam tiga spesies pengerahan sosial lewat alir dana. Rombongan pertama, juga merupakan model yang tertua, adalah aliran dana sebagai infrastruktur perawatan kepercayaan. Termasuk dalam rombongan ini adalah pemasaran sosial atau pembelaan agenda global dari pusat-pusat perawatan kepercayaan. Karena watak dasarnya itu, aliran dana dalam golongan ini pada umumnya terbatas pada komunitas-komunitas kepercayaan masing-masing.

Rombongan kedua adalah jenis-jenis pengerahan sosial sebagai infrastruktur produksi barang dan sirkulasi kapital. Termasuk di dalamnya antara lain pemasaran sosial barang atau jasa pelayanan baru, pengeluaran filantropis untuk mendapatkan pengurangan pajak, pencucian uang dari sumber-sumber tidak sah, pengerahan sosial sebagai bagian dari biaya transaksi bisnis multi-nasional—yaitu sebagai asuransi sosial-politik untuk melindungi sektor-sektor produksi dengan biaya sosial dan ekologis tinggi seperti di sektor industri keruk—serta aliran dana untuk pengerahan sosial di negeri Selatan sebagai komponen bantuan pembangunan politik luar negeri negara-negara Utara. Hal yang disebut terakhir, pada galibnya adalah setali tiga uang dengan asuransi sosial-politik bisnis multi-nasional, yaitu aliran dana untuk merawat kelangsungan relasi patron-klien di antara keduanya.

Secara tipikal NGO Selatan (Asia) tumbuh di masa perjuangan kemerdekaan. Misalnya gerakan Gandhi di India yang memiliki banyak pengikut dan sampai sekarang masih terus berkembang dengan kegiatan seperti pusat kerajinan tenun dan inisiatif teknologi tepat guna lainnya, sekolah yang memfokuskan pada pendidikan fungsional, mahkamah rakyat yang mempraktekkan penekanan masyarakat tanpa melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan, dan kampanye organisasi yang menuntut reformasi agraria dan aspek keadilan sosial lainnya. (Sumber: John Clark, 1995)

Jenis pengerahan sosial yang ketiga, berbeda dari dua yang disebut terdahulu, menempatkan aliran dana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan domestik si pengalir dana lewat sebuah kinerja dari penerima dana di seberang lautan. Bergantung pada kepribadian politiknya, aliran dana serta pengerahan sosial bagi spesies ketiga ini bisa merupakan sumbangan sukarela untuk kesejahteraan (filantropi), atau 'iuran-pergerakan' antar sesama pelaku perubahan untuk suatu perubahan yang berwatak politis. Termasuk dalam tradisi yang disebut belakangan adalah kepedulian dan pembelaan baru terhadap krisis biosferik sebagai masalah politik. Keduanya bisa menyatakan diri 'dari, untuk, dan oleh rakyat'. Ia berbeda dari jenis pertama dalam dua hal. *Pertama*, pembedaan peran pemberi dan penerima dana adalah berdasarkan 'kemampuan keuangan', bukan 'perbedaan kepentingan dalam proses kapital' seperti dalam corak kedua atau 'hubungan sub-ordinasi' dalam hirarki perawatan kepercayaan. *Kedua*, bergantung pada wataknya—filantropi atau politik—

penentuan agenda dapat dilakukan dari 'sisi permintaan' untuk dipenuhi oleh pembangkitan sisi penyediaan, atau sebaliknya.

Peta Sisi Permintaan

Pada ujung penerima dari alir dana pengerahan sosial tersebut, pengalaman Indonesia sejak awal abad ke-dua-puluh menyarankan bahwa corak alir dana untuk pengerahan sosial yang dominan sampai dengan Perang Dunia II adalah corak pertama dan ketiga. Sampai dengan tiga dekade berikutnya (awal 1980-an), tradisi kedua secara bertahap mengambil alih kedudukan dari kedua jenis aliran dana lainnya dalam volume dana, cakupan agenda, serta infrastruktur pengaliran dana maupun pengerahan sosial yang didanainya. Dalam dua dekade berikutnya sampai pergantian abad yang baru lalu, kepemimpinan tradisi filantrofi-korporasi tersebut dapat dikatakan mengalami transformasi dalam agendanya, yang menjadikan aliran dana untuk pengerahan sosial bukan saja sebagai alat pelancar proses kapital dan asuransi resiko, tetapi juga sebagai alat perombak bangunan pengelolaan ekonomi di negara-negara Selatan menjadi komponen terpadu dari 'aparatus produksi' negeri-negeri pengalir dana.

Pergeseran tersebut juga tercermin dalam cara alir dana serta pengerahan sosialnya. Rantai penyaluran dana tradisional yang tadinya bertumpu sepenuhnya pada cabang-cabang birokrasi kepercayaan (untuk tradisi pengerahan sosial pertama), kantor negara (untuk tradisi kedua), atau serikat-serikat kemasyarakatan yang rentang operasinya lokal (untuk tradisi ketiga), mengalami modularisasi yang mengatasi perbedaan-perbedaan di antara ketiga tradisi. Modularisasi tersebut dimungkinkan dengan inovasi sosial atau ideologis yaitu 'organisasi non-pemerintah', yang mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasan dari partai-politik tradisional, kantor-kantor negara, divisi hubungan masyarakat dari perusahaan, atau birokrasi resmi badan-badan kepercayaan.

Sebagai unsur baru dari industri pengaliran dana dan pengerahan sosial, organisasi non-pemerintah telah berkembang menjadi suatu mesin pengerahan sosial dengan nomenklaturnya sendiri, yang mencakup rentang pengerahan dari tingkat kampung sampai dengan perantara-grosir di ibukota-ibukota politik negara Selatan dan negara asal dana. Tak beda dengan infrastruktur pemasaran-berlapis, organisasi non-pemerintah mempunyai lokasi sosial yang jelas dalam seluruh mata rantai industri. Ujung terjauh dari sumber dana adalah 'organisasi rakyat', kemudian 'organisasi yang basisnya ada di kampung', 'organisasi pembelaan', atau 'organisasi selain pembelaan' (keduanya tidak punya basis di kampung), 'organisasi sumber bagi masyarakat

sipil', dan pada jenjang paling atas dari mata rantai ini, bersemayam perusahaan-perusahaan, badan pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, partai politik, badan perawat kepercayaan, atau donor-donor pribadi.

Di mana kedudukan rakyat biasa dalam peta pelaku industri pengerahan sosial itu? Bangunan pengerahan sosial tersebut, karena rentang kendalinya yang mampu mencapai kesatuan-kesatuan sosial terkecil setara kampung, bukan saja berfungsi sebagai perpipaan aliran dana, tetapi lebih penting dari itu, ia dibayangkan sebagai 'wujud terorganisir dari masyarakat sipil', alias mesin gerakan sosial itu sendiri. Sebagai sebuah model pengerahan sosial seusai partai politik dalam tradisi Kiri, harus dikatakan bahwa rancang-bangun pengerahan macam ini lebih produktif dalam arti sempit, terutama karena keleluasaan modularnya, kejelasan aliran dananya (yaitu dari pusat ke pinggir), serta kejelasan peran para pelaku dan transaksi antar-pelaku di sepanjang rantai pengerahan, yang diikat dengan relasi kontraktual yang berbasis dana. Di lain pihak, kritik terpenting terhadap seluruh inovasi ini adalah pada agenda mekanisasi gerakan sosial yang menaruh rakyat beserta kemajemukan cara berhimpun dan cara bergeraknya sendiri-sendiri, sebagai ladang-ladang peternakan dan sang ternak itu sendiri, dengan jaringan organisasi non-pemerintah sebagai komponen-komponen industri peternakan.



NGO Utara mulai berkembang setelah Perang Dunia I, utamanya mendapat dukungan dari gereja Katolik seperti CARITAS, Save The Children, OXFAM, Catholic Relief Services (CRS), CARE, dan lain-lain. Pada awalnya bergerak dalam bidang penyantunan, terutama di kawasan Eropa yang tercabik-cabik karena perang. Terlihat bahwa seolah-olah terdapat homogenitas di antara sesama NGO. Namun sejak tahun 1960-an terjadi perkembangan bentuk aktivitas. (Sumber: John Clark, 1995)

Kritik tersebut juga mempunyai alasan praktisnya. Tidak terlalu sulit untuk membaca bahwa bagi sang penerima akhir, ketergantungan energi pada ujung-sebelah-atas dari pengaliran dana dapat dieja sebagai kelemahan mendasarnya. Dari sisi yang sama, kinerja gerakan bergantung pada keadaan aliran dana. Jauh lebih penting lagi adalah bahwa sangat tipis perbedaan antara peran organisasi non-pemerintah sebagai kontraktor, sub-kontraktor atau perantara dengan perannya sebagai 'pendamping' atau 'pelayan' kampung. Peran organisasi non-pemerintah sebagai distributor barang-barang kebutuhan publik telah meluas menjadi sub-kontraktor dalam berbagai wilayah *policy*. Dari sisi pemberi dana, agenda gerakan bergantung pada sejauh mana pemberi dana bisa memperkenankannya tanpa menghadapi kesulitan dengan para patron dan pembayar pajak di negeri masing-masing.

Beberapa catatan penting hendak disampaikan di sini sehubungan dengan peta dasar aliran dana untuk pengerahan sosial tersebut. Pertama, dalam prakteknya sangat jamak kita temui *kortsluit* atau hubungan-pendek serta tumpang-menumpang di antara ketiganya. Program badan-badan pembangunan internasional misalnya, bukan

saja merupakan instrumen politik luar negeri pemerintah yang bersangkutan melainkan juga perpipaan dana untuk kedua spesies lainnya.

Kedua, peta sisi permintaan dan sisi penyediaan tersebut, sekali lagi, tidak mempertimbangkan penilaian sepihak atas buruk-baiknya masing-masing metoda atau pilihan. Justru rakyat harus menghadapi kemajemukan dari rezim kebenaran dalam proses perubahan.

Catatan ketiga berkaitan erat dengan korupsi dalam aliran dana pengerahan sosial. Gejala korupsi hampir selalu dijelaskan secara lepas konteks sebagai aliran dana yang menyimpang dari ketentuan atau rancangan alokasinya yang semula. Mempertimbangkan ekonomi aliran dana pengerahan sosial yang baru saja dibahas, abstraksi tentang korupsi dengan demikian harus dikoreksi dan ditempatkan sebagai sebuah gejala politik dalam konteks kuasa rakyat. Korelasi yang disarankan oleh *Transparency International*: antara derajat globalisasi satu negara dengan tingkat korupsinya—makin tinggi indeks globalisasi, makin rendah tingkat korupsi di situ—sebagai contoh, bukan saja meragukan, tapi juga sesungguhnya dibantah oleh kasus-kasus korupsi spektakuler justru di para alma-mater globalisasi itu sendiri.[3] Di Indonesia sendiri, salah satu negara paling korup menurut standar manapun, justru sektor yang paling terintegrasi dengan pasar global-lah korupsi mencapai angka tertinggi. Salah satu contoh klasik adalah kebocoran sistemik sebesar 30 persen dari dana hutang Bank Dunia ke pemerintah Indonesia.[4]

Oleh karenanya, dari ujung penerima dana, salah satu masalah tergenting adalah defisit demokrasi. Kalau korupsi, seperti halnya ia dalam pengertian ideologisnya yang mengabdi kepada pasar, diperhitungkan sebagai proses penyebab defisit dalam aliran dana, maka dalam pengertian politisnya, korupsi hendak diperiksa sebagai proses penyebab defisit dalam penguatan kuasa rakyat. Maka pertanyaan yang kemudian patut diajukan: "Bagaimana setiap mata rantai dalam sirkuit alir dana yang berujung di aktivisme non-pemerintah di Indonesia mempengaruhi proses-proses perubahan sosial yang bersifat struktural, serta perubahan kesadaran, aspirasi dan identitas politik dari pelaku dan obyek kegiatan yang dilancarkannya?" Begitu pula sebaliknya, dari ujung pengerahan dana, salah satu masalah kunci adalah transparansi dan tanggung-gugat badan-badan penghimpun dana pada rakyat di negerinya sendiri *dan* pada rakyat di negeri-negeri Selatan.

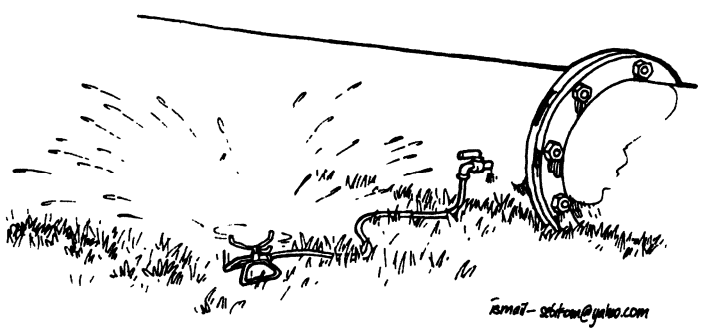
---

3 Transparency International; *Data and Research, Global Corruption Report 2001*, hlm. 227, 287-9.

4 Winters, J. (FEER, Februari 1997).

Gerakan-gerakan rakyat yang besar merupakan gejala sukarela yang paling murni. Barangkali cara yang paling pasti untuk mematikan gerakan-gerakan ini adalah dengan mendorong mereka ke arah birokratisasi dengan menimbuni mereka dengan uang. Masalah ini tampak pada Gerakan Pendidikan Massal Cina. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Y.C. James Yen, berupa gerakan melek huruf pada tahun 1920-an dan 1930-an. Akhirnya, gerakan ini memperoleh banyak dukungan keuangan dan mencapai puncaknya dengan berdirinya Komisi Gabungan Cina-Amerika untuk Rekonstruksi Pedesaan (KGRP). KGRP memiliki anggaran US$ 27,5 juta dari pemerintah Amerika dan Cina. Akibatnya, gerakan yang murni sukarela ini bergeser menjadi program yang dikelola dari pusat, dibiayai di depan umum dan memiliki anggaran besar, organisasi resmi, sistem akunting dan staf profesional. (Sumber: James B. Mayfield, 1985)

Model tanggung-gugat dalam pasar pengerahan-sosial, yang sekali lagi berpusat pada pencegahan defisit aliran dana, dan bertumpu pada mekanisme audit teknis keuangan saja tanpa audit sosial *yang mencakup seluruh rentang pelaku termasuk sumber-aliran dana*, bukan hanya 'terlalu sempit' tetapi tidak dapat diterima karena menggelapkan sisi politik dari seluruh proses transaksinya. Nyatanya, tanpa kejelasan jawaban dari pertanyaan tersebut di atas, besaran dana dan identitas pelaku transaksi tidak dapat dimaknai. Sama seperti gagalnya berbagai inisiatif publik untuk 'memberantas korupsi', berpulang pada miskinnya jawaban 'teknis' terhadap gejala korupsi yang diperlakukan sebagai pencurian uang semata. Seperti diingatkan oleh pengamatan lama itu, ketika ekonomi bertransformasi menjadi perpipaan dari proses kapital, maka "seluruh relasi kemasyarakatan akan diringkus dalam dompet". Apa yang kita butuhkan di sini adalah pemeriksaan relasi kemasyarakatan dari sang dompet, bukan penghitungan isi dompet.



Politik, Norma-Norma Internasional, dan Pertumbuhan NGO-NGO[1] Sedunia[2]

Kim D. Reimann[3]

The study of the growth of various NGO movements is usually based on a "bottom-up" approach. It depicts the formation of NGOs as a response by the society to socio-economic factors, the information revolutions, and the decline of the state. This analysis is consistently connected to how the discourse of globalization and domestic economic integration and global structural laws cause an increase in the number and development of NGOs. This approach is not without weaknesses, such as the narrow point of view used. Economic growth has occurred quickly along with industrialization, but the people have differing abilities to respond. Unlike the previous studies, this article chooses to use a "top-down" approach to emphasize political strength and organizational structure. In the context of the politics of globalization, this article presents the development of NGOs, emphasizing the effect from the state and the structure of international organizations. This allows the reader to see NGOs as part of social movements affected by and affecting global structures.

---

1 Artikel ini menggunakan istilah asal Ornop, yakni NGO (Non-Governmental Organization), dimaksudkan sebagai penekanan atas adanya istilah INGO (International Non-Governmental Organization).

2 Tulisan ini diambil dan diterjemahkan dengan seizin penulisnya dari paper 'International Politics, Norms and the Worldwide Growht of NGOs' (24 Maret 2002). Redaksi menyampaikan terima kasih kepada Kim D. Reimann atas izin yang diberikan. Tulisan diterjemahkan Kurniawan Adi S.

3 Kim D. Reimann memperoleh gelar doktoralnya dari Department of Government (2001) di Harvard University. Sekarang ia adalah assistant professor di Georgia State University.

Dalam kapasitasnya sebagai agen layanan dan advokat, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif di lapangan internasional tumbuh demikian banyak dan memainkan peran yang makin penting dalam politik dunia selama tiga dasawarsa terakhir. Bersamaan dengan pertambahan jumlah dan keaktifan para aktor non-negara dalam tahun-tahun belakangan, juga muncul banyak pustaka mengenai NGO-NGO di beberapa disiplin dan subbidang akademis, termasuk ilmu politik (Keck dan Sikkink, 1998; Risse, Ropp, dan Sikkink 1999; Finnemore 1996; Price 1998; Wapner 1995), sosiologi (Boli dan Thomas 1999; Smith, Chatfield, dan Pagnucco 1997; dan della Porta, Kriesi dan Rucht 1999), dan antropologi (Fisher 1997; Hann dan Dunn 1996; Kearny 1995). Kini kebanyakan kajian yang ada memusatkan perhatian pada peran NGO-NGO Internasional (INGO) dan NGO-NGO, baik pada hasil-hasil kebijakan ataupun fungsi-fungsi yang mereka lakukan. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, tulisan ini bertujuan memahami pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa kelompok-kelompok yang aktif secara mendunia ini tumbuh.

Perihal sumber-sumber pertumbuhan NGO dan INGO, kebanyakan kajian bertumpu pada penjelasan 'bawah-atas' (*bottom-up*) yang menggambarkan terbentuknya NGO sebagai tanggapan masyarakat terhadap faktor-faktor sosio-ekonomi, revolusi informasi, dan/atau kemunduran negara. Sebagai contoh dalam kajian-kajian awal perihal aktor-aktor non-negara, para ilmuwan politik berpendapat bahwa demokrasi, pembangunan ekonomi, dan integrasi ke dalam ekonomi dunia adalah faktor-faktor kunci di balik pertambahan jumlah INGO (Skjelsbaek 1972; Nye dan Keohane 1972). Belakangan para sosiolog juga menggunakan variabel-variabel sosio-ekonomi yang serupa—GNP (*Gross National Product*) per kapita, tingkat perdagangan, dan tingkat pendidikan menengah—untuk memperkirakan pertumbuhan dan perkembangan INGO (Boli, Loya, dan Loftin 1999). Penulis-penulis lain menunjuk kemunduran negara dan peningkatan alami aktivisme yang tak kenal batas akibat revolusi informasi dan teknologi telekomunikasi, sebagai alasan-alasan utama perkembangan INGO (Mathews 1997; Spiro 1995; Lipschutz 1992). Mereka berpendapat, bertemunya kesalingtergantungan (*interdependence*) dan kemunduran negara dengan alat-alat teknologi maju untuk melintasi batas-batas, mengilhami aktor-aktor masyarakat baru untuk berorganisasi dan bertindak secara internasional.

Meskipun demikian, ada alasan untuk meyakini bahwa pandangan atas pertumbuhan masyarakat 'bawah-atas' ini terlalu sempit untuk menjelaskan kemunculan dan perkembangan INGO dan NGO.



Ornop merupakan entitas yang sangat beragam. Sebuah daftar yang dikeluarkan oleh PBB, misalnya mencantumkan lembaga penelitian, organisasi profesi, serikat buruh, kamar dagang dan industri, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, perkumpulan orang lanjut usia, lembaga promosi pariwisata, yayasan swasta, partai politik dan lain-lain sebagai Ornop. (Sumber: IBK Yoga Atmaja, 2003)

Perbedaan level INGO dalam sistem demokrasi yang sama-sama terindustrialisasi benar-benar ada. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat-masyarakat tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memberikan tanggapan terhadap peningkatan level perkembangan sosio-ekonomi atau peningkatan teknologi. Sebagai contoh, meskipun Jepang dan Amerika Serikat memilik tingkat kekayaan, pendidikan, dan perkembangan ekonomi yang sama-sama tinggi, INGO Amerika lebih tampak 'nyata' dibandingkan INGO Jepang dalam urusan jumlah, ukuran lembaga, dan skala operasi (Reimann 2001). Sama halnya Inggris dan Italia—negara-negara dengan tingkat kekayaan, perdagangan, dan angka-angka perkembangan sosio-ekonomi yang sebanding—memiliki level aktivisme INGO yang berbeda. INGO Inggris lebih tampak di panggung internasional dibandingkan INGO Italia. Meskipun Jepang dan Italia mengalami pertumbuhan jumlah INGO baru secara luar biasa dalam lima belas tahun terakhir, orang seharusnya sudah dapat mengharapkan pertumbuhan ini sejak dulu jika faktor-faktor sosio-ekonomi dilihat sebagai pemacu utama terbentuk dan tumbuhnya INGO.

Berbeda dengan kajian-kajian yang lebih awal, tulisan ini berpendapat bahwa memahami secara mendalam kemunculan dan persebaran INGO dan NGO pada periode pasca-perang membutuhkan perspektif yang lebih bersifat atas-bawah (*top down*) dengan menekankan peranan kekuatan-kekuatan politik dan struktur-struktur kelembagaan. Sebagian karena tekanan NGO sebagai aktor sosial yang menantang atau menggantikan negara, pustaka-pustaka mutakhir perihal NGO secara tak sadar menganggap remeh cara-cara negara, organisasi-organisasi internasional, dan aktor-aktor internasional pemegang peran kunci untuk merangsang ledakan perkembangan INGO dan NGO sejak 1980-an. Dibangun berdasarkan teori gerakan sosial, pendapat-pendapat, dan karya-karya tulis bercorak institusional-sosiologis yang dihasilkan para teoris yang memandang kuatnya peranan negara (*strong state theory*) lebih tertarik pada masyarakat sipil di level nasional, tulisan ini menyajikan pandangan lain mengenai masyarakat sipil dunia yang tumbuh sebagai bagian dari proses 'politik' globalisasi.

Ada dua komponen utama dalam penjelasan pertumbuhan INGO dan NGO yang bercorak politik, keduanya menekankan peranan negara dan struktur-struktur lembaga internasional dalam proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi aktivisme kemasyarakatan transnasional—dan dalam kasus tertentu nasional. Pertama, dengan didasarkan pada teori gerakan sosial dan negara yang kuat, model saya memandang bahwa perubahan pada kebijakan dan struktur kelemba-

gaan organisasi-organisasi negara dan antar-pemerintah berbagai masa memungkinkan peningkatan 'kesempatan politik internasional' bagi NGO-NGO, sehingga kuat mendorong terciptanya INGO dan NGO. Ketika terjadi perluasan negara bangsa dan kesempatan politik di level dalam negeri mendorong pertumbuhan aktivisme nirlaba dan warga negara di banyak negara demokrasi liberal, pertumbuhan organisasi-organisasi internasional dan peningkatan partisipasi warga negara pada level internasional yang disponsori negara memberi sumber-sumber dan insentif baru bagi pertumbuhan INGO dan NGO sedunia. Kedua, kemunculan dan promosi oleh organisasi-organisasi internasional dan negara-negara aktivis tertentu terhadap 'norma internasional' yang pro-NGO sejak 1980-an telah menekan negara—yang dulu banyak melemahkan partisipasi masyarakat dan terciptanya NGO—untuk mendukung dan melibatkan NGO-NGO. Dengan kata lain, tekanan internasional dan proses sosialisasi yang mengembangkan dinamika negara-masyarakat di banyak bangsa, memungkinkan pertambahan jumlah kelompok-kelompok ini.

Selanjutnya tulisan ini dibagi menjadi dua bagian utama yang akan memeriksa kedua proses politik 'atas-bawah' ini. Mulai dari pembahasan teoretis, masing-masing bagian memberikan data-data dan contoh-contoh empiris untuk menggambarkan bagaimana proses globaliasi politik—yaitu perubahan struktur politik internasional dan perluasan politik internasional memasuki politik dalam negeri—secara langsung mempengaruhi terciptanya INGO dan NGO.

Kesempatan Politik Internasional dan Pertumbuhan NGO-NGO

> Proses mobilisasi politik tidak dapat kita pahami secara menyeluruh tanpa menyadari bahwa usaha-usaha memobilisasi sering berasal dari atas ke bawah, ketimbang bawah ke atas... Partisipasi politik tidak boleh dibayangkan hanya sebagai hasil spontan dari ciri-ciri psikologi dan sosial para individu, tetapi juga merupakan hasil insentif, pembatasan, dan kesempatan yang diciptakan sistem legal masyarakat dan intervensi yang terjadi dalam kehidupan politik lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan negara yang sangat besar, yang seringkali memainkan peran penting sebagai patron-patron aksi politik. – Walker 1991:49.

> Kamu masih belum punya EN-GI-OH (N-G-O—*Red.*) sendiri? Kamu belum punya yayasan nirlaba, lengkap dengan status hukumnya? Bahkan firma konsultan swasta sekalipun? Wah, kawan, berarti kamu ketinggalan zaman. Setiap kaum profesional yang belum memiliki aksesori yang paling mutakhir abad keduapuluh ini adalah orang yang sungguh tertinggal—jelas dia orang yang tak punya imajinasi, tak punya *sense* akan kesempatan, tanpa pandangan strategis, ketinggalan waktu

dan salah tempat. Lupakan saja karirmu dan ganti jualan lotere atau jadilah seniman jalanan. – Lofredo 2000:64.

Di level analisis dalam negeri, para ilmuwan politik dan teoris gerakan sosial pada tahun-tahun belakangan secara eksplisit memusatkan perhatian pada berbagai cara unsur-unsur struktural dalam lingkungan politik membentuk kemungkinan mobilisasi warga negara dan organisasi gerakan sosial baru. Ketika diperluas pada level internasional, teori-teori dan kerangka-kerangka tersebut menyediakan alat-alat yang bermanfaat untuk menganalisis beberapa faktor 'politik' yang mendukung, mendorong, dan mempengaruhi gelombang deras pendirian INGO dan NGO dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Dalam penjelasan mereka perihal kelompok-kelompok advokasi warga negara dan organisasi-organisasi sosial yang baru, para ilmuwan politik dari perspektif negara yang kuat dan teoris gerakan sosial memusatkan perhatian pada insentif-insentif yang disediakan struktur-struktur kesempatan politik—yaitu lembaga politik, kebijakan negara, dan jaringan elite baik yang terbuka maupun tertutup bagi aktivisme sosial—dalam proses pembentukan berbagai partisipasi politik (McAdam 1996; Tarrow 1996; Kriesi 1996). Karya Jack Walker, Theda Skocpol, dan lain-lain, sebagai contoh, memperlihatkan bagaimana struktur kesempatan politik yang meluas dalam bentuk patron-patron keuangan baru, subsidi negara dalam bentuk *bulk mail rate*, dan akses yang lebih luas untuk memasuki lembaga-lembaga politik baik di level legislatif dan federal, turut aktif mendorong kemunculan dan ledakan pertumbuhan kelompok kepentingan publik yang dipimpin warga negara (*citizen-led public interest groups*) di Amerika Serikat pada 1960-an sampai 1980-an (Walker 1991; Skocpol 1999a; Berry 1977 dan 1999). Jika kita bandingkan level organisasi gerakan sosial di berbagai negara industri, para ahli gerakan sosial sama-sama memperlihatkan bagaimana negara-negara yang memiliki struktur kesempatan politik yang lebih terbuka cenderung memiliki level kelompok gerakan warga negara yang lebih tinggi (Kriesi dkk. 1995; Kriesi 1996; Tarro 1996 dan 1998). Kedua penjelasan ini juga menekankan bahwa pembukaan struktur kesempatan politik cenderung terjadi pada masa-masa pembangunan negara dan inovasi kebijakan ketika lembaga-lembaga politik itu sendiri sedang berkembang (Skocpol 1996b; Tarrow 1996; Tilly 1984). Kemunculan dan perkembangan negara sendiri, dengan kata lain, sering kali memberi pintu baru bagi partisipasi rakyat dalam politik.



Tipologi LSM berdasar orientasi pekerjaannya: 1) *charitable orientation*, 2) *service orientation*, 3) *participatory orientation*, dan 4) *empowering orientation*. (Sumber: John Clark, 1995)

Jika diperluas ke level internasional, konsep struktur kesempatan politik memberikan kerangka teori yang bermanfaat untuk memahami bagaimana struktur politik dan konteks 'internasional' yang berubah secara langsung membentuk pertumbuhan INGO dan NGO. Sebagaimana dinyatakan para teoris gerakan sosial yang tertarik pada gerakan sosial transnasional, kemunculan dan perluasan *intergovernmental organizations* (IGO) pada periode pasca-perang—serupa dengan kemunculan dan perluasan negara-bangsa pada abad-abad sebelumnya—memberi insentif baru bagi aktor-aktor masyarakat untuk mengorganisir diri pada skala dunia dan menjadikan sasaran-sasaran internasional baru sebagai lokasi aksinya (Passy 1999; Smith 1999 dan 2000l; Tarrow 2001). Evolusi dan perkembangan IGO-IGO dan rezim-rezim internasional juga berperan dalam pembukaan signifikan beberapa dimensi kesempatan politik di level internasional dan pergeseran-pergeseran sangatlah relevan bagi para organisator INGO dan NGO.

Untuk tujuan tulisan ini, dua dimensi dari 'struktur kesempatan politik internasional' akan diperiksa: (1) ketersediaan sumber-sumber internasional dan (2) keterbukaan organisasi internasional terhadap partisipasi kelompok-kelompok masyarakat. Pertama, akan saya sajikan dalam bagian ini, IGO-IGO dan patron-patron internasional lain menyediakan 'sumber-sumber organisasi alternatif' potensial sehingga dapat melampaui sumber-sumber yang tersedia bagi para aktivis pada level dalam negeri (Tarrow 2001). Sumber-sumber tersebut dapat berupa sumber materi seperti hibah, subsidi, atau kontrak yang disediakan oleh IGO-IGO dan aktor-aktor politik internasional lain seperti pemerintah luar negeri, yayasan swasta, dan INGO berdana besar. Sumber-sumber tersebut juga dapat berupa sumber-sumber non-materi seperti legitimasi internasional, perhatian media, dan pengaruh politik. Kedua, IGO-IGO dan lembaga-lembaga internasional menyediakan 'struktur kelembagaan alternatif' untuk aksi politik dan suatu arena tempat para aktor kemasyarakatan secara potensial bisa mengakses sistem politik dalam negeri mereka (Risse-Kappen 1995; Passy 1999l; della Porta dan Kriesi 1999). Ketika IGO-IGO secara resmi memasukkan INGO dan NGO ke dalam struktur dan acara-acara mereka, mereka memberikan titik fokus (*focal point*) bagi pengorganisasian transnasional di seputar persoalan-persoalan baru, juga arena alternatif untuk mencapai tujuan politik dalam negeri mereka.



Menurut Olena P. Maslyukivska, ada enam peran LSM: 1) *development and operation of infrastructure*, 2) *supporting innovation, demonstration and pilot projects*, 3) *facilitating communication*, 4) *technical assistance and training*, 5) *research, monitoring and evaluation*, dan 6) *advocacy for and with the poor*. (Sumber: Olena P. Maslyukivska, 1999)

Ketika IGO-IGO muncul dan meluas, dan ketika aktor-aktor politik internasional tumbuh makin aktif, kedua jenis kesempatan internasional ini juga tumbuh secara dramatis. Bagian selanjutnya

akan memeriksa bagaimana perubahan-perubahan dalam kesempatan internasional didanai, diilhami, dan secara aktif didorong oleh pertumbuhan INGO dan NGO.

A. Program-Program Internasional dan Pertumbuhan Patron-Patron Masyarakat Sipil Dunia

Sejak kelahirannya di tahun-tahun awal pasca-perang, kebanyakan agen PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan IGO-IGO memasukkan INGO dan NGO sebagai 'rekan' dan kontraktor jasa dalam program-program mereka. Dalam dua dasawarsa terakhir, semesta sponsor internasional 'masyarakat sipil' dan jumlah program-program internasional yang melibatkan NGO tumbuh dramatis, dan sekarang tidak hanya melibatkan IGO-IGO tetapi juga sekumpulan rumit organisasi-organisasi pemerintah yang aktif secara internasional, organisasi semi-pemerintah, dan organisasi swasta. Pertumbuhan dana yang cepat pada organisasi-organisasi ini dimulai pada 1980-an, tetapi secara sangat mencolok pada 1990-an. Pada akhir 1990-an jumlah total tahunan dana eksternal yang tersedia bagi INGO dan NGO untuk kegiatan mereka berkisar antara $ 6 milyar hingga $ 7 milyar.[4]

Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa agen PBB memiliki ikatan panjang dengan NGO-NGO dan INGO-INGO Barat—terutama INGO-INGO Eropa—PBB dan agen-agen barunya merupakan pendorong penting bagi peningkatan aktivitas-aktivitas INGO pasca-perang pada pertengahan 1940-an hingga 1960-an (Smith 1990). Dalam bidang asistensi bantuan dan pengungsi, sebagai contoh ada hubungan dana dan kerja yang erat antara INGO dan UN Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA, Administrasi PBB untuk Bantuan dan Rehabilitasi) dan UN Relief and Works Agency (UNRWA, Agen Bantuan dan Kerja PBB) pada 1940-an; ketika UN High Commisioner for Refugees (UNHCR, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) didirikan 1951; statuta pendiriannya secara spesifik menyebut bahwa ia akan memberikan bantuan pada pengungsi melalui agen-agen swasta dan selama masa-masa awal ia banyak menumpukan penyediaan layanannya pada INGO (UNHCR 2000: 194; Smith 1990; Curti 1963; Lissner 1977). Agen-agen PBB lain yang melibatkan INGO dan NGO dalam program-programnya sebagai pelaksana proyek sejak tahun-tahun awal adalah UN Population Fund

---

4 Ini merupakan angka perkiraan konservatif yang penulis ajukan. Angka ini didasarkan pada belanja kira-kira di akhir 1990-an dan awal 2000-an dari seluruh donor internasional yang disebutkan dalam bagian ini: sistem PBB (2 milyar), UE (1 milyar), bantuan bilateral (3 milyar), dan ditambah dengan bantuan dari yayasan-yayasan semi-pemerintah, yayasan politik, dan yayasan pribadi (1 milyar).

(UNFPA, Dana Kependudukan PBB), UN Education, Science and Culture Organization (UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB), dan UN Children's Fund (UNICEF, Dana Anak-Anak PBB).[5]

Kampanye-kampanye yang diluncurkan agen-agen PBB pada tahun-tahun awal pasca-perang juga penting dalam proses mobilisasi titik-titik fokus (*focal points*) bagi INGO-INGO yang menyediakan hubungan masyarakat dan fungsi pencari dana yang saling menguntungkan dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan INGO. Dimulai dari UN Appeal for Children (Seruan untuk Anak-Anak PBB) pada 1948, serangkaian kerjasama antara PBB dan INGO untuk memobilisasi sumber-sumber dan kepentingan publik bermula. Dalam kasus kampanye UNICEF 1948, INGO-INGO yang berpartisipasi mampu mempertahankan andilnya dalam dana yang mereka kumpulkan untuk kampanye yang menyediakan sumber pendapatan (*revenue source*) untuk beberapa kelompok Eropa di tahun-tahun awal pasca-perang (Lissner 1977: 63; Smith 1990: 76; Curti 1963: 591-92). Serupa dengan itu, kampanye penggalangan dana untuk Tahun Pengungsi Dunia PBB pada 1958 dan Freedom from Hunger Campaign (Kampanye Bebas dari Kelaparan) Food and Agriculture Organization (FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian) pada 1960-an memobilisasi sejumlah besar INGO dan kelompok lokal untuk menggalang dana bagi program internasional dan merangsang pertumbuhan jaringan-jaringan INGO dan NGO[6] (Smith 1990: 76; Lissner 1977: 63-67; Curti 1963: 570-71; Bolling 1984: 209-10; Anand 1999: 73-90). Dalam beberapa kampanye PBB pada periode ini, INGO-INGO juga berperan sebagai perencana dan pelaksana proyek-proyek yang berkaitan dengan kampanye ini.[7]

---

5 Sebagai contoh UNFPA membelanjakan kira-kira $ 145 juta untuk 796 proyek yang dilaksanakan oleh NGO-NGO pada 1969-1986 (OECD 1988) dan pada akhir 1970-an UNESCO mengikat kontrak dengan lebih dari 500 NGO dalam proyek penelitian dan pelatihan (Bolling 1984: 121).

6 Kampanye Bebas dari Kelaparan FAO adalah kampanye PBB yang paling penting menggerakkan NGO-NGO di 1960-an karena ini merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa dan tidak hanya melibatkan proyek penggalangan dana tetapi juga rapat-rapat dan panitia persiapan. Dana disediakan oleh PBB untuk NGO-NGO dari negara-negara berkembang supaya bisa menghadiri acara-acara Kampanye Bebas dari Kelaparan. Lihat Anand 1999: 73-90.

7 Sebagai contoh Bolling mencatat bahwa INGO-INGO dan NGO-NGO yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang dilakukan selama kampanye yang berkaitan dengan PBB seperti Tahun Internasional Anak-Anak dan Dasawarsa Pembangunan (Bolling 1984: 211). Ia menulis, "Meskipun pada awalnya diandaikan bahwa NGO-NGO akan menyediakan dukungan moral dan dana untuk agen-agen PBB dan program-programnya—dan hal ini nyata terjadi dalam kasus UNICEF—NGO-NGO sendiri sekarang, dalam situasi-situasi tertentu, menerima dana PBB untuk membantu menjalankan program-program PBB" (Bolling 1984: 212).

Akan tetapi, dibandingkan dengan level kerjasama yang terjadi pada 1950-an dan 1960-an, dukungan PBB bagi INGO dan NGO sejak 1980-an telah meningkat mengikuti deret hitung dan sekarang tidak hanya melibatkan dana pelaksanaan proyek-proyek PBB saja melainkan juga dana untuk menghadiri konferensi-konferensi PBB, mendanai program-program pelatihan dan '*capacity building*', dan mendukung berbagai macam proyek pembangunan jaringan NGO. Pada akhir 1990-an agen-agen PBB menyediakan dana $ 2 milyar lebih setahun untuk proyek-proyek dan program-program PBB. Tabel 1 mendokumentasikan pertumbuhan program kerjasama NGO yang didanai agen-agen PBB pada 1980-an dan 1990-an.

Dalam hal jumlah, dukungan langsung PBB terbesar bagi INGO dan NGO adalah di wilayah bantuan kemanusiaan dan asistensi. Sejak pertengahan 1980-an, saat anggaran agen-agen PBB yang mengkhususkan diri di wilayah ini seperti UNHCR dan World Food Program (WFP, Program Pangan Dunia) bertambah banyak, jumlah dana dan barang yang disalurkan melalui INGO dan NGO juga membesar secara dramatis. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, bantuan UNHCR dan WFP senilai $ 1,5-2,3 milyar dijalankan oleh INGO dan NGO. Selain mempercepat pertumbuhan sebagian besar INGO Barat,[8] UNHCR juga secara sengaja melakukan usaha untuk memanfaatkan INGO-INGO Selatan, kadang-kadang hal ini terlalu jauh hingga menciptakan NGO-NGO lokal yang akan menjalankan program-program di bidang itu (Donini 1996: 94-95). WFP yang memiliki jaringan dengan 1.100 lebih NGO dan anggaran kerja $ 1,8 milyar pada akhir 1990-an adalah sponsor multilateral utama pertumbuhan INGO dan NGO dalam wilayah krisis kemanusiaan.

Dalam wilayah pembangunan internasional, berbagai agen PBB pada 1980-an dan 1990-an juga mulai aktif mengubah INGO dan NGO menjadi 'rekan' pembangunan. Dua contoh bagus dari kepentingan resmi yang baru terhadap NGO ini adalah United Nations Development Program (UNDP, Program Pembangunan PBB) dan World Bank (Bank Dunia). Setelah beberapa dasawarsa relatif mengabaikan INGO dan NGO, UNDP dan World Bank mulai melakukan perubahan kelembagaan di 1980-an yang memberikan partisipasi yang lebih besar kepada NGO dalam program-program mereka.[9] Pada akhir 1980-an



Pandangan pertama LSM terhadap negara menyebutkan bahwa negara itu otonom yang mempunyai peran sentral dalam politik. Oleh sebab itu negara harus mengatur masyarakat (*organic stateism/ corporate stateism*). LSM yang mempunyai pendapat ini, adalah LSM yang menganggap dirinya bagian integral dari pemerintah, dan menganggap dirinya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Walaupun memberi perhatian pada demokrasi, tetapi sebetulnya tetap *kesengsem* oleh ideologi pembangunanisme dan percaya pada politik birokrasi, serta tidak memiliki wawasan perubahan struktural dan pergeseran kontrol dari sistem yang ada. (Sumber: Eldrige, 1990)

[8] INGO terus mendominasi posisi kontraktor program-program dan proyek-proyek UNHCR. Pada 1999 kira-kira separuh program UNHCR dijalankan oleh INGO Amerika Utara dan Eropa (UNHCR 2000: 194).

[9] UNDP menunjuk penasihat NGO pertamanya pada 1984 dan pada 1986 menciptakan divisi khusus dalam UNDP yang menangani NGO-NGO. Sekarang divisi ini disebut Civil Society Organizations and Participation Program. Di World

dan 1990-an, IGO-IGO ini mulai membuat berbagai pendanaan dan inisiatif untuk mendukung pertumbuhan NGO. Program-program ini meliputi pendanaan proyek-proyek NGO, pendanaan dan pelatihan untuk peserta konferensi-konferensi PBB, dukungan materi dan teknik untuk pembangunan jaringan internet NGO nasional dan internasional, pelatihan berbagai lokakarya dan dukungan organisasi untuk berbagai program *'capacity building'* (lihat Tabel 1). Di World Bank juga dilakukan usaha-usaha untuk memperbesar keterlibatan NGO dalam proyek-proyek yang didanai World Bank. World Bank melaporkan bahwa partisipasi NGO dalam proyek-proyek yang didanainya meningkat dari 6 persen pada 1973-1988 menjadi 30 persen pada awal 1990-an dan 50 persen dari keseluruhan proyeknya pada akhir 1990-an (World Bank 1996 dan 1999; lihat Tabel 1).

Selain program-program di agen-agen lama PBB, pada 1990-an dibuatlah agen-agen baru PBB dan program-program baru PBB yang dikerjakan secara bersama dengan NGO dan INGO. Global Environment Facility (GEF, Fasilitas Lingkungan Global), sebagai contoh, diciptakan pada 1991 sebagai pendana proyek-proyek lingkungan internasional yang akan dikerjakan bersama dengan UN Environmental Program (UNEP, Program Lingkungan PBB), World Bank, dan UNDP. Sejak pendiriannya, GEF telah mendanai proyek-proyek yang melibatkan ribuan NGO. Pada 1990-an juga dibuat program-program baru PBB lain yang melibatkan partisipasi NGO yaitu UN International Drug Control Program (Program Kontrol Obat-Obatan Internasional PBB), Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty (Koalisi Rakyat untuk Menghapuskan Kelaparan dan Kemiskinan), UN Joint Program on HIV/AIDS (Program Bersama PBB untuk HIV/AIDS), dan Partnership for Poverty Reduction (Kerjasama untuk Pengurangan Kemiskinan) (Lihat Tabel 1).



Pandangan kedua LSM terhadap negara menyebutkan bahwa negara adalah *dependent variable*, sehingga negara harus berbagi peran dan kebebasan di dalam politik (*Liberalist-Pluralist*). Pada masyarakatlah kekuasaan dimiliki untuk mengatur negara. (Sumber: Eldrige, 1990)

Uni Eropa (UE). Organisasi antar-pemerintah lain yang secara dramatis meningkatkan dukungannya pada INGO dan NGO pada 1980-an dan 1990-an adalah Uni Eropa (UE). Karena bebas dari program-program bantuan bilateral dari masing-masing negara anggota UE, maka ia membuat program bantuan pembangunan luar negeri sendiri sejak 1960-an. Dana UE untuk INGO dan NGO mulai diberikan pada pertengahan 1970-an dengan program kecil yang didanai bersama sebesar 2,5 juta euro (kira-kira $ 3,2 juta).

Bank, hubungan dengan NGO-NGO diformalkan pada 1982 dengan cara menciptakan NGO-World Bank Committee. Selama 1990 World Bank menciptakan divisi baru dalam markas besarnya dan disebut NGO Unit. Unit ini mulai menyewa Spesialis NGO untuk Resident Missions (Misi Tinggal).

Sejak 1980-an jumlah absolut dan relatif bantuan luar negeri UE yang disalurkan melalui INGO meningkat tajam dan pada 1995 membumbung tinggi hingga mencapai kira-kira $ 1,0 milyar, terhitung kira-kira 15-20% dari keseluruhan bantuan luar negeri UE[10] (Randal dan German 1999; Aaronson 1999; Douxchamps 1996). Dua program yang menyediakan dukungan materi yang luar biasa besar dan langsung untuk INGO adalah program NGO yang didanai bersama dan program bantuan kemanusiaan. Seperti tergambar dalam grafik di Gambar 1, dana-dana untuk kedua program ini meningkat tajam pada akhir 1980-an dan 1990-an.[11] Apa yang paling tajam adalah peningkatan dana untuk bantuan kemanusiaan; sejak pertengahan 1990-an kira-kira separuh dana European Community Humanitarian Office (ECHO, Kantor Kemanusiaan Komunitas Eropa) dan sebagian besar kerja untuk pengungsi yang dilakukan oleh Direktorat-Jendral yang lain dijalankan oleh NGO (Randal dan German 1999: 267). Selain ini, sebagian dari bantuan pangan UE—bagian yang lumayan besar dari anggaran bantuan luar negeri UE—ditangani oleh INGO.

Meskipun berjumlah besar, bantuan kemanusiaan UE dan program-program dana-bersama NGO hanyalah beberapa dari 40 jalur anggaran UE yang sekarang telah mencakup pendanaan pada atau melalui INGO[12] (Randal dan German 1999: 274). Tabel 2 mendaftar

---

[10] Angka $ 1,0 milyar pada 1995 tidak termasuk dana untuk aktivitas NGO dalam European Development Fund (Dana Pembangunan Eropa) atau Directorate-General I (Direktorat Jendral I) dan angka pasti seluruh bantuan yang disalurkan melalui NGO lebih besar. Lihat Randal dan German 1999: 264.

[11] Program dana-bersama NGO, yang disediakan untuk INGO dan proyek kontrol, tumbuh dari 2,5 juta euro di 1976 menjadi 200 juta euro lebih pada tengah hingga akhir 1990-an. Antara 1979-1996 program ini telah turut mendanai lebih dari 7420 proyek yang dilakukan oleh 650 INGO di 133 negara (Randal dan German 1999: 264).

[12] Sekarang ada banyak program UE yang menyediakan dana bagi INGO yang ditangani oleh berbagai Direktorat-Jendral Komisi UE. Meski demikian, karena tidak ada data terpadu mengenai seberapa banyak angka pasti dari dana-dana yang disalurkan melalui INGO, maka sulit menghitung secara tepat jumlah pasti dana multilateral UE yang masuk ke dan melalui INGO. Lihat Cox dan Chapman 1999: 37. Angka-angka program dana-bersama NGO dan bantuan kemanusiaan merupakan contoh bagus dari jumlah dana UE yang tentu sangat besar.
Meskipun tidak ada angka pasti, intinya jelas, yaitu bahwa sekarang ada peluang pendanaan internasional yang lebih besar untuk INGO Eropa dibandingkan dahulu di masa pasca-perang. Bukti nyata untuk fakta ini adalah kemunculan panduan-panduan dan direktori-direktori baru untuk membantu NGO-NGO menemukan sumber pendanaan UE yang tepat. Pada 1998 Charities Aid Foundation (Yayasan Bantuan Karitas/Derma) menerbitkan The Way through the Labyrinth: A Guide to European Union Funding for the Non-Profit Sector (Kent: Charities Aid Foundation) dan NGO Liaison Committee (Panitia/Komite Penghubung PBB) menerbitkan NGO Handbook yang mengumpulkan informasi dana-dana UE yang tersedia bagi NGO. Perihal informasi tentang buku panduan ini lihat http://www.oneworld.org/liaison/en/pub/rap4.html, 5/7/01.

beberapa dana yang tersedia untuk INGO Eropa dalam masing-masing 31 jalur anggaran UE pada 1999, yaitu sebesar 1,7 milyar euro secara potensial. Seluruh jumlah ini mungkin tidak masuk ke INGO, tetapi meski hanya separuhnya pun, jumlah bantuan UE yang dibelanjakan melalui INGO melebihi $ 1 milyar. Meski hanya sebagian, Tabel 2 juga menguatkan jumlah potensial dana NGO sebesar ratusan juta euro.[13]

Agen Bantuan Bilateral. Pertumbuhan INGO di negara industri, terutama kelompok pemberi layanan yang mengkhususkan diri di wilayah pembangunan internasional, sejajar dengan kebijakan negara dan pembesaran anggaran di wilayah bantuan luar negeri (Smith 1990). Seperti telah dicatat para ahli pembangunan internasional, ledakan mendadak jumlah INGO terjadi persis ketika level keseluruhan dana negara untuk INGO meningkat pada 1970-an hingga 1990-an (van der Heijden 1987; Hellinger 1987; Hulme dan Edwards 1997; Clark 1999; Dichter 1999; Ottaway dan Carothers 2000). Sebagai contoh, data yang tersedia dari OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menunjukkan bahwa persentase keseluruhan bantuan resmi OECD yang disalurkan melalui NGO tumbuh dari 1% di 1975 menjadi 3,6% di 1985 dan menjadi 5% di 1994 (Edwards dan Hulme 1996: 961).

Meskipun dukungan negara untuk INGO mulai sejak awal 1950-an dan 1960-an, dana agen bantuan bilateral untuk INGO dan NGO meningkat paling nyata pada 1980-an dan 1990-an. Gelombang dana pertama untuk INGO dan NGO datang pada 1980-an dan merupakan bagian dari gerakan komunitas donor bilateral untuk menemukan bentuk bantuan baru, yang lebih 'partisipatif bagi rakyat' (Brown dan Koten 1991; Cernea 1988). Pada akhir Perang Dingin 1989 dan gelombang demokratisasi di banyak pada awal 1990-an, agenda dan retorika 'masyarakat sipil' baru muncul di kalangan agen-agen bilate-

---

[13] Tabel 2 tidak memasukkan beberapa program yang melibatkan NGO karena tidak ada angka anggarannya dan sebagian besar program untuk negara-negara Mediteranian yang mencari jalan masuk ke UE. Program-program yang menyediakan dana bagi INGO tetapi tidak bisa saya dapatkan angka anggarannya untuk tahun 1999 adalah (1) European Development Fund Microprojects (Mikroproyek Dana Pembangunan Eropa), dan (2) Aid for Economic Restructuring of the Countries of Central and Eastern Europe (Bantuan untuk Restrukturisasi Ekonomi Negara-Negara Eropa Tengah dan Timur) dan Program for Democracy (Program untuk Demokrasi). Program ketiga tidak masuk dalam Tabel 4 yang berpotensi mendanai INGO adalah MENA-Measures to Accompany Reforms to the Economic and Social Structures in the Mediterranean Non-Member Countries (Langkah-Langkah untuk Mendampingi Reformasi Struktur Ekonomi dan Sosial Negara-Negara Mediterania Non-Anggota). Program ini memiliki anggaran sebesar 849 juta euro (lebih dari $ 1 milyar). Lihat European Commission 1998.

ral sebagai alasan baru untuk menambah jumlah bantuan luar negeri melalui INGO dan NGO (Carothers 1999: 207-254; Van Rooy 1998). Selama fase ini, jumlah bantuan bilateral yang disalurkan melalui 'organisasi-organisasi masyarakat sipil' untuk mendorong pembangunan dan demokrasi telah jauh meninggalkan jumlah di 1980-an. Telah dikatakan bahwa di 1990-an agen-agen bilateral dari negara-negara OECD memberikan beberapa milyar dolar per tahun sebagai dana untuk INGO dan NGO. Beberapa negara—Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, Swiss, dan negara-negara Nordik—memelopori dan menyalurkan 10-25% dari keseluruhan bantuan luar negeri tahunan mereka melalui INGO dan NGO sejak akhir 1980-an atau awal 1990-an (Smillie dan Helmich 1999).

Yayasan-Yayasan Semi-pemerintah dan Yayasan-Yayasan Politik. Dana negara juga telah menemukan jalur memasuki INGO dan NGO melalui yayasan-yayasan semi-pemerintah dan politik. Sekali lagi, baru pada 1980-an dan 1990-an sebagian besar organisasi ini mulai berorientasi demikian.

Di antara yayasan semi-pemerintah yang paling terkenal adalah yayasan-yayasan berfokus regional yang didanai pemerintah AS: Asia Foundation (kira-kira 1954), Inter-American Foundation (kira-kira 1969), African Development Foundation (kira-kira 1980), dan Eurasia Foundation (1992).[14] Pada 1980-an dan 1990-an seluruh yayasan regional ini mulai mendukung kelompok-kelompok masyarakat sipil sebagai unsur utama program mereka dan pada pertengahan 1990-an anggaran hibah seluruh yayasan ini telah lebih dari $ 100 juta, yang sebagian besar lari ke NGO dan INGO. Sebagai contoh pada 1999 yayasan-yayasan ini membelanjakan lebih dari 1132 hibah untuk proyek-proyek yang melibatkan NGO-NGO mulai dari proyek pembangunan hingga proyek pengawasan (Reimann 2001: 165).

Contoh lain yayasan semi-pemerintah adalah Commonwealth Foundation (Yayasan Persemakmuran) yang berciri antar-pemerintah. Ia pertama kali didirikan pada 1965 dengan nama Charitable Trust dengan menganut hukum Inggris, dan kemudian pada 1981



Pandangan ketiga LSM terhadap negara menyebutkan bahwa negara dan masyarakat segi-segi dari supra struktur, sehingga saling berhadapan dalam kontradiksi. Negara awalnya muncul sebagai satu alat paksaan yang diperlukan ketika terjadi pembagian kerja, dan pada gilirannya menjadi alat penindasan sampai dengan terbentuknya masyarakat nir kelas. Setelah pemilikan pribadi dihapus, dan perbedaan kelas hilang, kebutuhan akan negara tidak ada lagi karena pada dasarnya secara internal masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri. Menurut kubu ini LSM haruslah menyatu dengan kelompok basis dan melakukan pendekatan penguatan masyarakat akar rumput. Demokratisasi bukanlah dilakukan dengan memperkuat masyarakat sipil, melainkan diletakkan dalam perjuangan kelas yang tertindas.(Sumber: Billah, 2000)

[14] Yayasan-yayasan ini berciri 'semi-pemerintah' dalam pengertian bahwa mereka secara teratur mendapat dana dari pemerintah, beranggotakan pejabat pemerintah dalam dewan organisasi, dan/atau didirikan dengan peraturan perundangan (*act of legislation*) yang memaksa mereka tunduk pada penilaian dan manajemen publik. Meski demikian, semua badan-badan tersebut sampai dengan derajat tertentu, bekerja sebagai lembaga otonom yang terpisah dari negara, dan kebanyakan pengamat tidak menganggap mereka sebagai agen langsung negara. Ikatan keuangan dan kelembagaan dengan negara—secara khusus ketergantungan mereka pada dukungan legislatif—sama sekali tidak berarti bahwa mereka selalu tunduk pada faktor-faktor politik.

menjadi organisasi internasional, Commonwealth Foundation didanai oleh dan terbuka untuk semua negara persemakmuran. Setelah memulai hubungan dengan NGO-NGO pada 1980-an, yayasan ini memulai program masyarakat sipil yang lebih aktif untuk mendukung NGO-NGO dan memperkuat hubungan NGO-pemerintah di negara-negara Persemakmuran pada 1990-an (www.commonwealthfoundation.com/programmes/index2.cfm?selectedtype=1, diakses pada 5/18/01).

Di 1990-an yayasan politik di Amerika Utara dan Eropa yang ditujukan untuk mendorong demokrasi dan keadilan di dunia juga makin mendukung kerja layanan dan advokasi NGO dan INGO dalam program-program mereka. Kebanyakan yayasan politik yang ada didirikan 20 tahun lalu dan mencontoh yayasan politik Jerman yang lebih dahulu, dan sekarang telah menjadi bagian integral dari banyak proyek kebijakan luar negeri pemerintah-pemerintah Barat untuk mendukung demokrasi di negara-negara berkembang (Carothers 1999). Pada mulanya yayasan politik Jerman didirikan untuk mendorong demokrasi di negeri Jerman pada masa awal pasca-perang, kemudian yayasan ini mulai memperluas program-program internasional dan luar negerinya di 1960-an.[15] Pada pertengahan 1990-an anggaran total kelima yayasan politik Jerman tersebut lebih dari $ 450 juta dan $ 236 juta darinya dianggarkan untuk program-program luar negeri (Phillips 1999; DAC 1998; Smillie dan Helmich 1993; www.aceproject.org/main/english/pcd0105.htm, diakses pada 5/13/01). Program masing-masing yayasan politik ini bervariasi, tetapi secara umum mereka mendukung berbagai kelompok masyarakat sipil di luar negeri dan secara aktif mendukung aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, *rule of law* (kekuasaan hukum), dan pemerintahan.



Sekitar 1.800 LSM mancanegara, beberapa dari Indonesia, telah memperoleh akreditasi PBB, sehingga selain mengikuti sidang umum, juga berhak memberikan *statement* selama tujuh menit dan membagi-bagikan selebaran kepada anggota dewan. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

Dengan mengikuti model Jerman, didirikanlah yayasan-yayasan politik di negara-negara lain pada 1980-an dan 1990-an dengan pengabdian tunggal pada program-program internasional untuk mendorong demokrasi. Di Amerika Serikat, yayasan tersebut adalah National Endowment for Democracy (NED) dan dua yayasan yang berafiliasi dengan partai—National Democratic Institute (NDI) dan International Republic Institute (IRI)—yang didirikan oleh Kongres pada 1983 de-

[15] Di Jerman sekarang ada lima yayasan politik, masing-masing berafiliasi dengan berbagai partai politik dan seluruhnya ditopang dana publik. Yayasan-yayasan dan partai politik yang menjadi afiliasinya adalah: Friedrich Ebert Foundation (Partai Sosial Demokratik), Konrad Adenauer (Serikat Demokrasi Kristen), Hanns Seidel Foundation (Serikat Sosial Kristen), Friedrich Naumann Stiftung (Demokrat Bebas), dan Heinrich Boll Foundation (Partai Hijau).

ngan mandat spesifik memperluas dan memperkuat demokrasi di seluruh dunia. Meskipun tidak sebesar yayasan di Jerman, organisasi-organisasi ini secara total memiliki anggaran $ 54,5 juta pada 1996 dan program-program luar negeri yang sangat luas (Phillips 1999: 81; www.ned.org; Carothers 1999). Pada 1999, hampir 200 hibah NED diberikan langsung ke NGO-NGO di negara-negara berkembang dan transisional (Reimann 2001: 165). Selain hibah tersebut, NED juga memberikan ratusan hibah untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh NDI, IRI, American Center for International Labor Solidarity (Pusat Amerika untuk Solidaritas Buruh Internasional), dan Center for International Private Enterprise (Pusat untuk Usaha Swasta Internasional). Kebanyakan proyek ini, terutama yang dilakukan oleh NDI, juga melibatkan NGO. Seiring langkah NED dan yayasan-yayasan politik Jerman, lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan politik lain mulai muncul di Kanada dan Eropa di akhir 1980-an dan selama 1990-an. Di antaranya adalah International Center for Human Rights and Democratic Development (Pusat Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Demokrasi) di Kanada, Westminster Foundation di Inggris, The Olaf Palme International Center dan Swedish International Liberal Center di Swedia, dan Karl Renner Institute di Austria. Dari semua lembaga dan yayasan tersebut, yayasan politik Kanada dan Inggrislah yang paling aktif mendukung NGO-NGO dan menyediakan dana bagi ratusan proyek NGO selama 1990-an hingga awal 2000-an.[16]

Yayasan-Yayasan Pribadi. Terakhir, yayasan-yayasan pribadi juga menjadi sekutu elite dan sumber dana yang makin penting bagi INGO dan NGO. Meski ada beberapa yayasan yang mendanai INGO dan NGO dalam wilayah pembangunan internasional sebelum 1970-an (Bolling 1984; Sommer 1977), baru pada 1980-an dan 1990-

[16] Sejak didirikan pada 1992, Westminster Foundation for Democracy telah mendanai lebih dari 6.000 proyek dan wilayah programnya sekarang (selain mendukung partai politik dan kelompok buruh) meliputi kelompok hak asasi manusia, organisasi perempuan, dan mendukung permbangunan masyarakat sipil. Lihat berbagai halaman perihal program Westminster Foundation di www.wfd.org, diakses pada 5/18/01. Kelima wilayah program Canadian International Center for Human Rights and Democratic Development (pembangunan demokrasi, globalisasi dan hak asasi manusia, hak masyarakat adat, hak perempuan, dan advokasi hak asasi manusia internasional) secara aktif melibatkan NGO. Termasuk di dalamnya 'usaha NGO untuk mendapatkan akses ke lembaga-lembaga multilateral' (www.ichrdd.ca/111/english/about/hist.html, diakses pada 5/18/01) dan telah memberi ratusan hibah sejak pertama didirikan pada 1988. Lihat www.ichrdd.ca/111/english/prog/programmes.html dan halaman-halaman lain di website Center tersebut (diakses Mei 2001).

anlah terjadi persebaran dana yang luas untuk layanan dan advokasi INGO dan NGO oleh yayasan-yayasan pribadi.[17]

Setelah naik secara ajeg pada 1980-an, hibah-hibah dari yayasan pribadi untuk proyek-proyek internasional melonjak naik pada 1990-an (Renz 1998; Foundation Center 1997 dan 2000). Di Amerika Serikat, hibah yayasan pribadi untuk proyek-proyek internasional naik mencapai kira-kira $ 996 juta di 1994 dan $ 1,6 milyar di 1998, menunjukkan peningkatan 51% dari level di 1990[18] (Foundation Center 1997 dan 2000; Renz 1998; Blum 2001). Sebagian besar yayasan Amerika yang pada masa lalu memberikan dana pada INGO dan NGO—misal Ford Foundation, Carnegie Corporation, MacArthur Foundation, dan Charles Stewart Mott Foundation—telah memperluas program-program internasionalnya secara besar-besaran. Pada periode ini, generasi baru yayasan Amerika juga didirikan oleh milyarder teknologi dan industri keuangan baru seperti George Soros, William Gates, dan David Packard. Para filantropis baru ini memberikan bagian besar dalam program yayasan mereka pada isu-isu dunia dan proyek-proyek NGO. Sebagai contoh di tahun 2000 hibah Gates Foundation untuk Global Health Program (Program Kesehatan Global) sendiri berjumlah total $ 68,5 juta (www.gatesfoundation.org, diakses pada 5/01). Di Eropa 1990-an juga merupakan periode ketika yayasan-yayasan Eropa mulai tumbuh besar dan memberi lebih banyak dana bagi proyek-proyek internasional dan INGO/NGO. Selama 1990-an, sebagai misal, beberapa yayasan Jerman yang besar seperti Bertelsmann Foundation dan Robert Bosch Foundation mulai memberi lebih banyak dana untuk program-program internasional, yayasan perbankan Italia yang baru mulai tumbuh baik dalam jumlah maupun kemampuan mendanai, dan yayasan-yayasan Inggris membelanjakan kira-kira £98 juta untuk program-program internasional (Europa Publications 2000: 9-12).

Meski tidak semua yayasan yang mendanai program internasional menyalurkannya melalui INGO dan NGO, jumlah dana yayasan pribadi yang tersedia untuk sektor NGO yang aktif di lapangan inter-

---

17 Lihat Keck dan Sikkink 1998: 98-99, sebagai contoh, untuk sejumlah kecil dana yayasan bagi kelompok-kelompok hak asasi manusia sebelum 1980-an dan lonjakan hibah yang mendadak pada 1980-an dan 1990-an.

18 Setelah disesuaikan dengan laju inflasi, angka di 1998 untuk pemberian hibah secara internasional dari yayasan-yayasan Amerika meningkat 51% dibandingkan level di 1990. Filantropi pengusaha internasional tidak hanya berlipat 2 kali pada 1990-an hingga mencapai $ 57 juta di 1998 (lihat Foundation Center 2000 dan Blum 2001). Pada akhir 1990-an direktori lain memperkirakan bahwa yayasan-yayasan AS membelanjakan $ 2 milyar untuk program-program internasional. Lihat Europa Publications 2000: 9-12.

nasional telah tumbuh luar biasa besar pada dua dekade terakhir. Tabel 3 memberikan contoh program-program terakhir dari yayasan-yayasan pribadi Amerika yang menyediakan dana untuk INGO dan NGO. Di tahun 2000 diberikan 2.048 hibah dari tiga belas yayasan seperti tertera pada tabel di wilayah persoalan pembangunan, hak asasi manusia, keamanan, lingkungan, dan perempuan dengan dukungan ribuan proyek NGO dan banyak jaringan NGO transnasional. Jika kita tambahkan proyek-proyek yang didukung oleh yayasan Open Society dan yayasan-yayasan yang tidak masuk dalam daftar ke dalam ribuan proyek ini, maka telah jelas bahwa yayasan-yayasan pribadi Amerika telah memainkan peran penting mendukung sektor NGO di dunia.

B. Akses Politik di Level Internasional

Selain sumber-sumber materi, lembaga-lembaga dan aktor-aktor internasional juga menyediakan kesempatan baru bagi aktor-aktor non-negara untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik di level internasional. Ketika lembaga-lembaga internasional membuka saluran-saluran akses baru dan lebih aktif melibatkan INGO dan NGO dalam proses pembuatan kebijakan mereka, mereka telah mendorong pembentukan dan pertumbuhan aktivis-aktivis sosial baru yang aktif secara internasional. Dengan menyediakan titik fokus untuk aksi dan arena politik alternatif bagi aktor-aktor yang menghadapi struktur kesempatan politik yang sulit di level nasional, gerakan IGO-IGO selama lima puluh tahun terakhir menuju keterbukaan partisipasi sosial yang lebih besar telah banyak membantu persebaran INGO/NGO ke banyak bagian dunia.

Seperti telah disebut di muka, evolusi IGO-IGO dan sistem politik internasional telah merangsang pengorganisasian kelompok dan gerakan sosial baru serupa dengan cara perkembangan negara-bangsa. Seiring waktu, peningkatan akses ke IGO sebagian telah menghasilkan perluasan dan perumitan sistem internasional ketika jumlah badan-badan internasional, perjanjian dan program meningkat. Di wilayah hak asasi manusia, isu lingkungan dan perempuan, kajian-kajian yang ada memperlihatkan bahwa jumlah INGO/NGO yang ditujukan pada perjuangan-perjuangan ini meningkat cepat begitu jumlah IGO dan perjanjian yang menyangkut soal-soal ini meningkat cepat pada periode pascaperang (Sikkink 1993; Berkovitch 1999; Meyer, Frank, Hironaka, Schofer, dan Tuma 1997). Bagian berikut ini akan memeriksa sistem PBB dan bagaimana peningkatan jumlah titik akses bagi INGO dan NGO memberikan rangsangan dan titik fokus bagi pengorganisasian di level internasional.



Organisasi rakyat adalah alat untuk menyebarkan kekuasaan di dalam masyarakat dengan memperkuat kekuasaan ekonomi dan politik dari mereka yang dulunya berada di pinggiran. Organisasi rakyat adalah tempat untuk orang berlatih menjadi warga negara yang demokratis dan merupakan batu penjuru institusional untuk demokratisasi. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Menyesuaikan NGO dengan Sistem PBB: Status Resmi dan Pelibatan Formal. Piagam PBB secara formal menyediakan kesempatan berpartisipasi bagi NGO dalam bentuk status konsultatif dengan Economic and Social Council (ECOSOC, Konsul Ekonomi dan Sosial) PBB. Pasal 71 dalam Piagam PBB memungkinkan ECOSOC "membuat pengaturan yang tepat untuk melakukan konsultasi dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang peduli dnegan hal-hal yang menjadi kompetensinya" dan pada akhir 1960-an sistem status tiga-baris (*three-tiered status system*) dibangun dengan mengategorikan NGO menurut derajat relevansinya dengan aktivitas ECOSOC. Pasal 71 memberi beberapa kesempatan penting bagi NGO seperti pengakuan internasional yang formal dan status resmi untuk berpartisipasi dalam konferensi-konferensi internasional PBB karena ECOSOC merupakan organisator utama bagi banyak acara tersebut. Ketika ditetapkan, Pasal 71 juga menjadi model dasar dan standar partisipasi NGO yang digunakan oleh agen-agen PBB lain (Charnovitz 1997: 253). Meski ketika pertama kali didirikan tidak semua organisasi PBB melibatkan INGO dan NGO, lama kelamaan hampir semua agen dan lembaga PBB telah menyediakan kesempatan formal dan informal bagi NGO untuk mengakses para pembuat keputusan dan terlibat dalam debat kebijakan. Perluasan akses ini kemudian menjadi perangsang penting pertumbuhan INGO dan NGO. Tabel 4 mendaftar tipe-tipe akses kelembagaan yang dimiliki NGO di berbagai departemen dan agen PBB.



Organisasi rakyat menggugah tuntutan untuk lebih tanggap terhadap masalah-masalah dasar, menyediakan daya tawar-menawar kolektif yang memungkinkan rakyat yang tidak mempunyai tanah, petani kecil, dan para gembel di kota untuk bisa bernegoisasi dengan wakil-wakil birokrasi pemerintah atau orang-orang kaya swasta, pada kedudukannya yang lebih setara. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Seiring perjalanan waktu kesempatan NGO untuk berpartisipasi dalam politik PBB makin meningkat dan memberikan insentif bagi para aktivis untuk berorganisasi dan bertindak di level internasional. Pada mulanya, di masa 1940-an dan 1950-an, partisipasi formal INGO dan NGO di PBB hanya terbatas di ECOSOC, Department of Public Information (Departemen Informasi Publik) PBB, dan agen-agen PBB yang sejak awal perkembangannya memiliki ikatan erat dengan NGO seperti UNHCR, UNICEF, UNESCO, dan WHO (World Health Organization). Kemudian seiring perkembangan badan-badan PBB dan rezim internasional, makin meningkat kesempatan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga PBB. Sebagai contoh, pada 1960-an Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) PBB dan posisinya dalam sistem PBB sebagai badan tambahan (*subsidiary body*) bagi badan-badan ECOSOC memberi kesempatan pada INGO-INGO hak asasi manusia yang memiliki status konsultatif dengan ECOSOC untuk melakukan kerja aktivis di level internasional. Ketika pada 1967 mandat Komisi diperluas hingga mencakup inves-

tigasi pelanggaran hak asasi manusia, struktur Komisi memungkinkan INGO seperti Amnesti Internasional (Amnesty International) untuk membuat pernyataan publik mengenai negara-negara pelanggar hak asasi manusia maupun menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi investigasi PBB terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia[19] (Gaer 1996; Cook 1996). Seperti kemudian terjadi di wilayah persoalan lain, pengadopsian konvensi dan trakta hak asasi manusia yang baru dan pembuatan sub-panitia dan sub-komisi seiring perkembangan waktu menambah titik akses dan cara bagi partisipasi INGO/NGO dalam wilayah hak asasi manusia.[20] Di tahun 1970, badan-badan baru PBB diciptakan untuk wilayah-wilayah persoalan lingkungan, pertanian, dan kependudukan—misalkan UN Environment Program (UNEP, Program Lingkungan PBB), International Fund for Agricultural Development (IFAD, Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian), dan UN Population Fund (UNFPA, Dana Kependudukan PBB)—dan seluruh organisasi baru tersebut menyediakan mekanisme formal dan informal untuk partisipasi INGO dan NGO (lihat tabel 4). Untuk memperkuat hubungan antara PBB-NGO dan memberikan layanan pendukung bagi NGO-NGO yang bekerja dengan PBB, pada tahun 1975 didirikan UN Non-Governmental Liaison Service (Layanan Penghubung Non-Pemerintah PBB) sebagai proyek antar-agen.

---

[19] Menanggapi resolusi ECOSOC tahun 1967 (1235), Komisi mengadopsi prosedur publik yang baru di mana pelanggaran negara tertentu terhadap hak asasi manusia akan diperdebatkan dan tindakan akan diambil. Pada 1970 hal ini ditambah dengan prosedur rahasia yang dikenal dengan 1503 (diberi nama sesuai dengan resolusi 1503 ECOSOC yang menetapkannya) yang memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup dan mengambil tindakan terhadap pelanggar hak asasi manusia. INGO-INGO seperti Amnesti Internasional dapat memakai rapat-rapat tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan informasi mengenai negara-negara yang memiliki catatan pelanggaran serius dan oleh karena itu menjadi cara yang berpotensi mengubah kebijakan. Lihat Cook 1996: 198-207 dan UN 1998.

[20] Pada tahun-tahun terakhir Komisi mulai membangun hubungan dekat (rapporteur) dan kelompok kerja untuk menangani tema-tema tertentu (misal penganiayaan, intoleransi agama, penghilangan, rasisme, kekerasan terhadap perempuan, dll.) dan 'mekanisme tema' ini memberi jalan yang telah lama dituju oleh para INGO yang peduli pada hak asasi manusia hingga mereka bisa menyalurkan informasi, melobi, dan meminta PBB secara resmi menyelidiki suatu negara. Amnesti Internasional sekarang mengirim faksimili harian kepada satu atau lebih mekanisme tematis. INGO dan NGO yang memiliki status konsultatif juga dapat membuat pernyataan lisan maupun tulisan di rapat-rapat Komisi dan berbagai Subkomisi dan panitia. Sebagai contoh, INGO berperan aktif di Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Kelompok Kerja Subkomisi untuk Penduduk Pribumi sekarang dihadiri hampir 1.000 INGO dan NGO per tahun dan telah menerima pernyataan dari NGO-NGO yang tidak memiliki status konsultatif. Lihat Cook 1996: 198-207 dan UN 1998.

Meski demikian, pada pertengahan 1980-an dan 1990-an akses NGO terhadap badan-badan PBB meningkat secara signifikan. Pertama, seperti digarisbawahi pada Tabel 4, pada 1990-an akses NGO terhadap dan partisipasi dalam organisasi-organisasi PBB yang telah memiliki ikatan lama dengan NGO—misal ECOSOC, UNHCR, UNICEF, UNESCO, WHO, IFAD, dan UNFPA—meningkat dan mendalam. Sebagai contoh, pada 1990-an di markas besar PBB INGO dan NGO lebih mudah menghadiri rapat-rapat dalam Sidang Umum PBB (SU PBB) dan lebih banyak bekerjasama dengan panitia-panitia dan badan-badan tambahan SU PBB (UN 1988). Hubungan NGO-PBB di berbagai departemen PBB di markas besar juga makin aktif setelah kebangunan kembali Inter-Departmental Working Group on NGOs (Kelompok Kerja Antar-Departemen mengenai NGO-NGO) di tahun 1995 dan arahan dari Sekretaris Jendral PBB pada 1997 kepada semua departemen untuk menugaskan petugas penghubung (*liaison officer*) jika belum ada (UN 1998). Jika dihitung, ada 92 kantor penghubung (*liaison office*) NGO di sistem PBB pada awal 1990-an (Alger 1994). Seperti telah disebut di bagian awal, dibandingkan dengan kontak-kontak terbatas sebelum 1980-an, akses secara kelembagaan bagi NGO untuk memasuki World Bank dan UNDP meningkat secara dramatis di 1990-an.

Terakhir, selain badan-badan PBB yang lebih lama, pada 1990-an ada banyak badan-badan baru dan inisiatif antar-agen PBB yang diciptakan secara khusus untuk menyediakan perwakilan bagi INGO dan NGO. Termasuk di antaranya: Office for Coordination of Humanitarian Affairs (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan) di Sekretariat PBB, Commission on Sustainable Development (Komisi untuk Pembangunan Berkelanjutan), Global Environment Facility, UN Program on HIV/AIDS (UNAIDS), Inter-Agency Learning Group on Participation (Kelompok Belajar Antar-Agen tentang Partisipasi), Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty, Global Urban Partnerships (Kerjasama Kota Global), dan Global Compact (lihat Tabel 4). Meskipun WTO (World Trade Organization)—sama dengan pendahulunya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan)—pertama-tama tertutup bagi partisipasi INGO ketika didirikan di tahun 1955 (Charnovitz 1996), selama lima tahun terakhir ia telah mengambil langkah-langkah untuk melibatkan NGO dalam aktivitas-aktivitasnya.[21] Oleh

[21] INGO dapat mendaftar sebagai pengamat di Konferensi Menteri WTO dan Sekretariat WTO memberikan pembekalan, terlibat dalam dialog-dialog informal dengan para INGO, dan memberikan pernyataan kebijakan kepada negara-ne-

karena itu, pada pergantian memasuki abad ke-21 secara kelembagaan 'arus utama' INGO dan NGO memasuki sistem internasional telah memiliki bobot dan kecepatan yang patut diperhitungkan. Dalam seting kelembagaan seperti demikian, insentif struktural untuk pengorganisasian di level internasional berjalan lebih baik dibandingkan pada periode 1960 dan 1970-an.

Konferensi-konferensi PBB dan persebaran NGO-NGO sedunia. Terkait erat dengan proses luas pelibatan INGO dan NGO di badan-badan PBB adalah pertambahan jumlah konferensi-konferensi dan traktat-traktat PBB yang terkait dengan mereka. Pertumbuhan jumlah konferensi, pertumbuhan jumlah 'Rencana Aksi' dan traktat internasional yang terkait dengan konferensi tersebut, dan aturan tentang keterlibatan INGO dan NGO dalam konferensi yang makin lentur merupakan penyumbang utama pertumbuhan dan persebaran INGO sedunia.

Sejak 1972 jumlah konferensi internasional yang diorganisir oleh PBB naik tajam. Misal kata, selama lima tahun antara 1976-1980 ada lebih banyak konferensi PBB mengenai isu global dibandingkan 20 tahun pertama sejarah PBB dan kecenderungan naik ini berlangsung hingga 1980-an dan 1990-an (Willetts 1989). Hal penting dalam penciptaan dan persebaran INGO adalah serangkaian konferensi 'mega' internasional PBB yang membahas beberapa tema khusus, mulai dari konferensi global tentang kelaparan sedunia dan hak asasi manusia di 1960-an, dan mendapat momentum yang lebih besar di 1970-an dengan berlangsungnya konferensi-konferensi tentang lingkungan, kelaparan sedunia, perempuan, dan pemukiman manusia (lihat Tabel 5). Dengan memberikan tujuan dan fokus bersama, konferensi tematik global ini merupakan titik fokus yang mempersatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk menggeluti satu tema dan merupakan perangsang penting bagi jaringan transnasional dan penciptaan kelompok-kelompok dan identitas-identitas baru. Konferensi tersebut juga membuka kesempatan politik baru bagi INGO untuk memasukkan persoalan-persoalan mereka ke dalam agenda para pembuat kebijakan, mempengaruhi wakil negara, menjangkau khalayak internasio-n-al baru, dan membangun legitimasi mereka sendiri (Smith 2000). Konferensi tersebut juga merupakan kesempatan unik bagi INGO dan NGO karena Sekretariat PBB memberikan dukungan kelembagaan untuk terlibat dalam konferensi dan mengorganisir 'forum paralel' PBB (Willetts, 1989; Feraru 1974). Meski hanya ada sedikit konfe-



Ada 3 macam peranan yang dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan sukarela yaitu: (1) menyaring dan menyiarkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan, pasti tidak akan terdengar oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umumnya; (2) menggairahkan dan menggerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat; (3) menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. (Sumber: John Clark, 1995)

gara anggota WTO (www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm, diakses pada 5/23/01).

rensi global yang besar di 1980-an, arah umumnya adalah peningkatan kesempatan konferensi internasional bagi NGO. Dengan delapan sidang puncak sedunia dan empat konferensi internasional besar lain antara 1990 dan 1996, periode 1990-an merupakan gelombang kedua pertemuan besar berskala global yang menawarkan kesempatan baru bagi para aktivis untuk berorganisasi di level internasional.

Selain peningkatan jumlah konferensi PBB, juga terjadi perubahan aturan dan prosedur keterlibatan NGO yang memudahkan sejumlah besar kelompok untuk berpartisipasi. Dibandingkan periode 1970-an, konferensi internasional PBB di 1990-an terbuka untuk lebih banyak aktor-aktor non-pemerintah. Dalam hal pemberian status pengamat di konferensi, pada 1970-an sekretariat konferensi PBB hanya menerima lamaran dari INGO dengan status ECOSOC atau dari kelompok-kelompok dengan 'karakter yang benar-benar internasional' (yaitu kelompok yang memiliki kantor atau cabang di lebih dari satu negara) yang memiliki kepentingan yang bisa dibuktikan dalam wilayah konferensi tersebut (Feraru 1974; Van Rooy 1997; Willetts 1996). Di 1980-an syarat karakter internasional ini dihapus sehingga NGO-NGO berlevel nasional dan lokal dapat menghadiri konferensi, dan pada 1980-an partisipasi dalam konferensi-konferensi PBB mulai melibatkan lebih banyak NGO-NGO tanpa status konsultatif di ECOSOC[22] (Willetts 1996:54). Mulai dengan UN Conference on Environment and Development (UNCED, Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan) pada 1992, digunakan prosedur akreditasi yang lebih lentur sehingga memungkinkan partisipasi INGO dan NGO dalam jumlah dan variasi yang lebih besar—semisal, termasuk NGO-NGO tanpa status konsultatif ECOSOC, NGO-NGO tanpa kantor internasional, dan kelompok-kelompok yang tidak secara khusus bergerak di tema konferensi[23] (Van Rooy 1997; Finger 1994).

---

[22] Sebagai contoh Willetts melaporkan bahwa hanya 40% dari 179 NGO yang hadir di International Conference on Drug Abuse and Illicit Trade (Konferensi Internasional tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Perdagangan Illegal) pada 1987 memiliki status konsultatif di ECOSOC. Lihat Willetts 1996: 54.

[23] Van Rooy mencatat bahwa UNCED pada 1992 menyediakan proses akreditasi yang luar biasa terbuka bagi NGO-NGO dan 'kali ini dnegan lebih sedikit pernyataan kepentingan dan lampiran laporan tahunan, setiap NGO berhak datang di pertemuan-pertemuan Rio dan rapat-rapat panitia persiapan (atau PrepCom) sebelumnya' (Van Rooy 1997: 100). Hanya empat kelompok dari total 1.418 NGO yang mendapat penolakan lamaran akreditasi. Akses yang lebih terbuka pada 1992 ini menimbulkan ketertarikan kelompok-kelompok swasta yang lebih besar untuk menghadiri konferensi-konferensi PBB yang lain di 1990-an yang juga melakukan proses partisipasi yang lebih terbuka dibandingkan konferensi-konferensi pada 1970-an.

Dalam hal tipe partisipasi, INGO dan NGO yang terakreditasi pada 1990-an jauh lebih aktif di tahap persiapan konferensi dan sekali lagi UNCED adalah model untuk konferensi periode 1990-an (Clark, Friedman, dan Hochstetler 1998). Ketika diputuskan menyelenggarakan UNCED, UNGA (United Nations General Assembly) menerbitkan arahan bahwa pemerintah-pemerintah nasional haruslah melibatkan NGO-NGO dalam proses persiapan UNCED. Ketika persiapan konferensi dimulai pada 1989, INGO dimaksudkan untuk tidak hanya terlibat dalam rapat-rapat Panitia Persiapan konferensi, melainkan juga di berbagai proses nasional dan regional resmi yang terkait dengan UNCED. Level persiapan yang berlapis-lapis ini merangsang INGO/NGO untuk mengorganisir diri mereka di level nasional, regional, dan internasional dan memiliki efek besar memunculkan aktor-aktor baru dalam proses ini[24] (Clark, Friedman, dan Hochstetler 1998; Finger 1994). Terakhir, dibandingkan dengan tahun 1970-an, ada lebih banyak INGO di dalam delegasi-delegasi resmi negara yang datang ke konferensi, bentuk akses lain yang meningkatkan kualitas tipe partisipasi NGO dapatlah diharapkan.[25]

Pertumbuhan jumlah konferensi juga merupakan bagian dari pertumbuhan sistem politik internasional lebih besar yang berpusat pada PBB dan peningkatan jumlah badan-badan internasional, traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional, dan 'Rencana Aksi' yang dilahirkan konferensi yang memberikan kesempatan politik baru bagi INGO dan NGO (Passy 1999; Smith 2000). Sebagai misal, konferensi-konferensi internasional telah turut menciptakan badan-badan baru PBB yang kemudian juga bekerja cukup dekat dengan INGO dan NGO, seperti UNFPA (Willetts 1989: 43), UNEP (Conca 1996: 105), International Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW, Institut Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan), the UN Development Fund for Women (UNIFEM, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan) (Stienstra 1994), IFAD,



Kontraktor pelayanan umum lebih didorong oleh pertimbangan pasar daripada didorong oleh nilai-nilai dan karena itu sifatnya lebih menyerupai bisnis daripada organisasi sukarela. Kontraktor pelayanan umum seringkali kelihatan seperti organisasi sukarela. Mereka mungkin mempunyai jenis registrasi resmi yang sama. Dalam pernyataan mengenai misinya organisasi tersebut menyebutkan agenda sosial. (Sumber: David C. Korten, 2001)

[24] Supaya berpartisipasi dalam acara-acara regional dan nasional sebelum UNCED, digelar konferensi-konferensi alternatif para NGO dan dianggap sebagai konferensi 'paralel'. Proses ini membutuhkan jaringan baru baik setingkat nasional maupun regional dan memberikan bahan bakar bagi penciptaan INGO-INGO baru juga internasionalisasi kelompok-kelompok yang sebelumnya hanya bekerja di level dalam negeri. Proses ini dimulai pada skala besar di UNCED, tetapi dilakukan kembali dalam proses-proses persiapan konferensi-konferensi PBB pada 1990-an dan 2000-an yang dilaksanakan setelah UNCED.

[25] Ketika UNCED diselenggarakan di Rio pada 1992, ada 14 negara yang melibatkan NGO-NGO di dalam delegasinya. Mereka adalah: Australia, Kanada, Commonwealth of Independent States, Finlandia, Prancis, India, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat. Lihat Finger 1994. Sebaliknya, NGO jarang terlibat dalam delegasi pada 1970-an. Lihat Van Rooy 1997.

Commision on Sustainable Development (Conca 1996: 113-114), dan Kantor UN Commissioner on Human Rights (Gaer 1996: 60-61). Ada banyak konferensi internasional yang juga menjadi proses berkelanjutan mengikuti cetak biru 'Rencana Aksi', inisiatif lain dan penyelenggaraan konferensi internasional lain. Proses konferensi yang berkelanjutan ini, dimulai pada 1960-an tetapi menjadi makin nyata pada 1990-an, memberikan serangkaian titik fokus kelembagaan dan kesempatan politik yang membuat NGO dapat menempati ruang aksi politik mereka dalam medan politik internasional.

Terakhir, traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di konferensi-konferensi internasional juga memberikan titik fokus bagi organisasi INGO dan alat aksi yang potensial. INGO dengan status konsultatif di ECOSOC sering boleh meminta dokumen yang terkait traktat dan menghadiri rapat-rapat (Smith 1999). Meski mereka sering dipinggirkan dari konvensi-konvensi dan traktat-traktat sebelumnya, pada tengah hingga akhir 1980-an INGO/NGO dilibatkan dalam teks traktat multilateral sebagai *stakeholder* dan peserta juga diberi akses yang lebih luas untuk dokumen-dokumen dan proses pelaksanaan yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam kasus traktat lingkungan, ledakan traktat pada akhir 1980 dan awal 1990-an—misal Protokol Montreal tentang Substansi-Substansi yang Menipiskan Lapisan Ozone (1987), Konvensi Basel mengenai Perdagangan Limbah Berbahaya Lintas Batas (1989), Konvensi Kerangka mengenai Perubahan Cuaca (1992), Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992) – memberikan sebentang kesempatan, peran, dan titik fokus baru bagi INGO (Raustiala 1997: 722-23; Smith 1999). Beberapa traktat dan konvensi juga memperkuat atau menciptakan hubungan kerja baru antara badan-badan PBB dengan INGO/NGO, dan karenanya memberikan legitimasi lebih untuk kerja-kerja INGO. Konvensi mengenai Hak Anak, sebagai contoh, telah menghasilkan aliansi antara INGO/NGO yang mengadvokasi anak dan UNICEF karena perannya sebagai pengawas dan pelaksana konvensi (Ritchie 1996: 183; Stiles 1998: 203).



Apabila para donatur berbicara tentang melibatkan LSM sebagai pelaksana proyek-proyeknya, mereka biasanya mencari kontraktor pelayanan umum bukan organisasi sukarela. Di negara-negara bagian Utara, kontraktor pelayanan umum merupakan sarana yang penting dan populer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam rentangan luas mulai dari pengumpulan sampah sampai pelayanan kesehatan, dan sekarang juga mulai menjadi pelaku penting di negara-negara bagian Selatan. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Norma-Norma yang Berubah dan Promosi Internasional NGO-NGO

Selain memberikan kesempatan keluar yang baru bagi para aktivis sehingga mendorong pembentukan dan pertumbuhan INGO/NGO, arena dan aktor internasional memainkan peran penting dalam membentuk-ulang politik *domestik/dalam negeri* dengan cara mempengaruhi cara aktor negara dan aktor masyarakat mendefinisikan kepentingan mereka. Interaksi-interaksi baru di level internasional—pertumbuhan konferensi-konferensi internasional dan meningkat-

nya promosi NGO oleh aktor-aktor internasional dari 1980-an dan seterusnya—dengan kata lain juga telah melahiran proses sosialisasi internasional yang mengubah cuaca dalam negeri bagi pembentukan NGO.

Karya terbaru oleh para institusionalis konstruktivis dan sosiologis dalam literatur hubungan internasional melihat bagaimana struktur-struktur dan lembaga-lembaga internasional mempengaruhi kebijakan dan perilaku negara (Katzenstein 1996; Finnemore 1996; Meyer, Boli, Thomas, dan Ramirez 1997; Risse dan Sikkink 1999). Para sarjana tersebut menekankan kausalitas penting dari struktur-struktur internasional dan menggambarkan proses sosialisasi yang menjadi saluran persebaran norma dan gagasan internasional mencapai pojok-pojok dunia. Menurut aliran pemikiran ini, ketika negara menjadi anggota organisasi internasional, mereka memasuki proses sosialisasi yang menuntut negara mengakui seperangkat aturan, harapan, dan konsep internasional. Proses ini menuju terciptanya transformasi dalam negeri ketika negara mengadopsi kebijakan baru yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga dan aktor-aktor internasional (Finnemore 1996; Meyer, Boli, Thomas, dan Ramirez 1997).

Penjelasan ini penting untuk memahami pertumbuhan INGO dan NGO pada 1980-an dan 1990-an karena pada periode inilah suatu proses persebaran norma yang bersangkutan dengan kebijakan negara domestik terhadap NGO mendapatkan momentumnya yang cepat dalam politik internasional. Penciptaan dan promosi oleh para negara aktivis dan organisasi internasional untuk menyebarluaskan pemahaman tentang norma INGO/NGO yang baru pada dasawarsa ini menekan banyak negara untuk memeriksa ulang hubungan mereka dengan aktor-aktor masyarakat. Setelah menjelaskan norma internasional yang baru, bagian berikut makalah ini akan menggambarkan beberapa program dan proses internasional yang menjadi jalan norma-norma internasional memasuki politik dalam negeri dan mengubah struktur kesempatan politik *domestik* NGO-NGO.

A. Norma Baru Pro-NGO

Peningkatan dukungan dari organisasi-organisasi dan aktor-aktor internasional terhadap INGO/NGO didukung oleh argumen normatif yang mempromosikan mereka dengan dasar berbagai prinsip ekonomi fungsional, demokratis, dan neo-liberal. Dalam banyak dokumen sekarang telah tercatat bahwa argumen-argumen mengenai nilai penting INGO/NGO memberikan derajat legitimasi yang tak pernah ada sebelumnya bagi kelompok-kelompok di level internasional sehingga mereka bisa memanfaatkannya (atau dimanfaatkan

untuk mereka) di rumah untuk berhadapan dengan negara. Ada dua saluran yang saling berpengaruh yang menjadi sebab perkembangan norma yang dipromosikan secara internasional mengenai partisipasi INGO/NGO pada akhir 1980-an dan 1990-an: (1) lingkaran pembangunan internasional dan aktor-aktor internasional di komunitas donor (agen-agen bantuan bilateral dan multilateral, yayasan-yayasan pribadi) dan (2) kehidupan organisasi PBB dan evolusi konferensi-konferensi internasional di tahun 1990-an.

Di 1980-an, agen-agen bantuan bilateral dan multilateral mulai mengalihkan perhatian mereka pada INGO dan NGO sebagai jalan alternatif untuk mempromosikan pembangunan internasional. Pada masa itu ada banyak kajian resmi yang ditugaskan untuk memeriksa peran NGO-NGO dalam pembangunan dan disimpulkan bahwa INGO dan NGO merupakan alternatif yang baik karena mampu menjangkau komunitas-komunitas miskin secara langsung, efektif biaya, memiliki pendekatan terhadap persoalan yang lebih lentur dan inovatif, kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proyek-proyek dan tekanan mereka pada usaha swa-bantu (OECD 1988; Clark 1981; Brown dan Korten 1991; World Development 1987; Cernea 1988: 17-18; World Bank 1991). Pandangan dan promosi baru untuk NGO ini menunjukkan pergeseran paradigma komunitas pembangunan internasional dari model pembangunan tradisional yang dipimpin negara—yang makin banyak dilihat sebagai kegagalan—menuju model hibrida neo-liberal yang melibatkan pembangunan 'partisipasi rakyat' dan aktor sektor swasta (Chabbott 1999; DAC 1995; Stiles 1998).



Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hari Rabu (2/2) Jakarta, mendeklarasikan berdirinya Komisi Pengawasan Bantuan Luar Negeri (Aid Watch Commission/ AWAC). Komisi ini antara lain akan menginvestigasi setiap penggunaan bantuan luar negeri dan menyampaikan rekomendasi kepada donor dan Kejaksaan Agung. Struktur organisasi AWAC tersusun atas Dewan Pengarah dan Badan Pekerja. (Sumber: KCM, 03/02/2000)

Kecenderungan umum di kalangan agen-agen donor ini kemudian menjadi gerakan yang menjangkau semuanya pada 1990-an ketika Perang Dingin berakhir dan tercipta bantuan luar negeri dan program pembangunan inisiatif demokrasi yang menekankan peranan 'masyarakat sipil' (Ottaway dan Carothers 2000). Dijuluki oleh para skeptis sebagai 'Agenda Kebijakan Baru' (Hulme dan Edwards 1997; Edwards 1994) INGO/NGO sekarang dilihat sebagai lembaga ideal baik oleh teori ekonomi dan politik neo-liberal yang dipromosikan oleh negara-negara industri pada dunia pasca-Perang Dingin (Fisher 1977). Di satu sisi, sebagai penyedia layanan yang menjangkau kelompok miskin INGO/NGO menjadi jawaban bagi kegagalan pasar; di sisi lain, sebagai organisasi dengan jalinan dan akar di rakyat INGO/NGO juga dilihat sebagai kendaraan demokratisasi dan komponen untuk mengembangkan 'masyarakat sipil' yang perlu dipupuk (Hulme dan Edwards 1997; Smillie 1995; Ottaway dan Carothers 2000). Di belakang peningkatan raksasa dalam segi dana yang

disalurkan melalui INGO/NGO pada 1990-an seperti digambarkan di bagian awal tulisan ini, di kalangan donor terdapat pandangan normatif yang melihat bahwa INGO/NGO adalah agen 'masyarakat sipil' yang tepat dan akan menghasilkan level demokrasi, keadilan, dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi pada negara-negara berkembang dan transisional (Fowler 1999; Zaidi 1999).

Norma baru yang pro-NGO ini pelan-pelan muncul di badan-badan PBB dan dikodifikasi dalam serangkaian konferensi dunia PBB yang diselenggarakan pada periode 1990-an. Sejak saat itu NGO-NGO lebih sering disebut dalam dokumen-dokumen dan rencana aksi-rencana aksi PBB yang menyebut mereka sebagai wakil 'masyarakat sipil'. Hampir dalam semua konferensi besar yang diselenggarakan oleh PBB di 1990-an NGO secara formal dianggap sebagai rekan penting PBB dan sebagai suara rakyat. Tabel 6 mendaftar kutipan-kutipan dari rencana aksi berbagai konferensi besar PBB di 1990-an dan menggambarkan bagaimana NGO-NGO kemudian dilihat sebagai agen demokrasi yang pantas mendapat tempat di meja sidang dan pantas mendapat dukungan aktif.

B. Norma-Norma Internasional Baru, Sosialisasi, dan Hubungan Negara-Masyarakat Domestik yang Berubah

Serentak dengan kemunculan dan kodifikasi norma baru pro-NGO di lingkaran internasional juga terjadi proses sosialisasi di mana agen-agen bantuan bilateral, organisasi-organisasi internasional, dan yayasan-yayasan pribadi secara aktif memberi saran (dan kadang-kadang meminta) kepada negara untuk mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka terhadap INGO dan NGO. Melalui partisipasi mereka dalam banyak kerjasama dan bantuan internasional, pada 1990-an negara yang mengabaikan atau menindas NGO mendapat tekanan yang makin kuat untuk melibatkan NGO dalam proses kebijakan juga memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi kemunculan dan pertumbuhan mereka. Di bawah ini adalah contoh-contoh program dan gerakan internasional yang secara aktif mendorong negara terlibat dengan NGO di level nasional.

Gerakan Donor untuk Legislasi NGO yang lebih Liberal. Sejajar dengan peningkatan level dana bagi NGO dan INGO di 1980-an dan 1990-an, organisasi-organisasi bilateral dan multilateral mulai mendorong negara untuk mengembangkan NGO di level nasional dengan cara mengadopsi regulasi legal dan fiskal yang lebih liberal. Sebagai contoh, di 1980-an pejabat-pejabat World Bank dalam konsultasi program dengan pemerintah Nepal, Banglades, dan Indonesia mendesak negara untuk mengurangi regulasi yang mengham-

bat pertumbuhan NGO-NGO (Beckman 1991). Pejabat-pejabat World Bank juga membuat struktur legal bagi organisasi-organisasi akar rumput menjadi prasyarat untuk mendapatkan dana proyek manajemen air di Pakistan pada akhir 1980-an, sehingga diluncurkanlah legislasi dan keputusan legal untuk 8.000 asosiasi-asosiasi pengguna air (Cernea 1988: 39-40). Kasus penting lain terjadi di Kenya pada 1990, ketika donor-donor internasional mendorong dan melobi NGO-NGO Kenya untuk melawan legislasi pemerintah yang secara ketat mengawasi dan mengendalikan NGO-NGO (Ndegwa 1994).

Gerakan internasional menuntut legislasi NGO yang lebih liberal mendapat momentum yang lebih besar dan menyebar ke bagian-bagian dunia yang lain di 1990-an dengan berakhirnya Perang Dingin. Hal ini melibatkan berbagai aktor internasional. Sebagai contoh, selama 1990-an World Bank mengambil sikap yang lebih pro-aktif dan mulai menampilkan dirinya sebagai konsultan untuk proses legislasi NGO.[26] Pada 1992, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL, Pusat Internasional untuk Hukum yang Tidak-Untuk-Keuntungan) didirikan di Washington D.C. sebagai organisasi nirlaba yang ditujukan untuk 'memfasilitasi dan mendukung pembangunan masyarakat sipil dan kemerdekaan berserikat berbasis global' (www.icnl.org/info/short.html, diakses 5/15/01). Bekerjasama dengan agen-agen bilateral dan multilateral, ICNL memberi saran kepada demikian banyak negara berkaitan dengan legislasi NGO dan telah memberikan bantuan ahli hukum untuk usaha-usaha donor Barat mempromosikan reformasi hukum. Pada 1977, bekerjasama dengan World Bank, ICNL menerbitkan *Handbook on Good Practices for Laws Relating to Non-Governmental Organizations* yang dibagikan meluas dan dipromosikan melalui serangkaian konferensi World Bank yang berfokus pada perubahan hukum di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Sepanjang satu dasawarsa, Ford Foundation dan beberapa yayasan pribadi besar lain telah memberikan sebagian dari

---

[26] World Bank menganggap penjaminan terhadap lingkungan 'memampukan' NGO dan masyarakat sipil sebagai bagian dari mandatnya untuk bekerja dengan INGO dan NGO. Baru-baru ini ia menjelaskan fungsi ini dalam pengertian berikut: 'lingkungan kebijakan bagi NGO dan masyarakat sipil sangatlah bervariasi di berbagai negara, dan merupakan penentu yang kuat untuk mempengaruhi pertumbuhan sektor NGO. Secara khusus, ada variasi yang besar di masing-masing negara dalam hal kerangka hukum yang mengatur NGO. Jika hukum hanya memberikan sedikit hak atau perlindungan terhadap NGO-NGO, pertumbuhan dan sumbangan sektor ini akan sangat terhambat. Untuk mengatasi persoalan ini, NGO Unit (dalam World Bank) telah mengembangkan suatu program yang dapat memberikan saran praktis terbaik mengenai hukum NGO' (http://wbln0018.worldbank.org/essd/...88/265698fa4c68ea25852567ed004c4c1, diakses pada 4/29/01).

dananya untuk pembangunan nirlaba dan reformasi hukum dan aktif secara global menyebarkan perdebatan mengenai legislasi NGO melalui konferensi-konferensi, kajian-kajian, dan terbitan-terbitan. Sejak pertengahan 1990-an, UNHCR dan Council of Europe bekerjasama mempromosikan reformasi hukum bagi NGO-NGO di negara-negara Commonwealth of Independent States (CIS) (UNHCR 2000: 201-202). Pada akhir 1990-an, gerakan global yang didanai donor untuk mengadopsi legislasi NGO yang lebih liberal benar-benar berkembang sepenuhnya.[27]

Melibatkan INGO dan NGO di dalam Konsultasi Bantuan dan Proses Kebijakan. Selain mempromosikan pengadopsian struktur hukum dan keuangan yang lebih menguntungkan NGO, aktor-aktor internasional juga mulai menggunakan pengaruhnya sebagai donor untuk membujuk negara agar memperbanyak saluran akses bagi NGO dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Di 1980-an, hal ini dilakukan di belakang layar, secara informal oleh World Bank dan agen-agen lain seperti IFAD pada mereka berdialog dengan pemerintah mereka mengusulkan pelibatan NGO dalam proyek-proyek yang didanai IGO dan dalam proses perencanaan pembangunan secara umum (Uvin 1996: 165).

Pada 1990-an usaha-usaha informal ini menjadi makin terstruktur dan formal di World Bank dan UNDP ketika kedua IGO ini berusaha membawa 'masyarakat sipil' memasuki proses perencanaan negara mereka. INGO/NGO sekarang masuk dalam penyusunan Kerangka Pembangunan Menyeluruh World Bank, cetak biru menyeluruh yang baru untuk sasaran-sasaran dan program-program pembangunan nasional yang menjadi dasar pinjaman World Bank pada masing-masing negara. Dialog negara-NGO dan *input-input* NGO yang lain dalam perencanaan pembangunan dianggap sebagai bagian penting dalam proses Kerangka Pembangunan yang baru ini (World Bank 1999: 15-16). Prosedur perencanaan World Bank yang diterapkannya kepada negara-negara peminjam—misalkan Country



Dalam pernyataannya, AWAC (Aid Watch Commission) mendesak pemerintah agar membuka akses informasi dan pengawasan terhadap setiap program utang luar negeri kepada masyarakat dan LSM-LSM yang independen. AWAC juga mendesak negara/lembaga donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) menekan pemerintah, untuk tidak memasukkan orang-orang partai politik pada posisi strategis di pemerintahan atau departemen, terlebih lagi pada jabatan kunci di badan usaha milik negara (BUMN). (Sumber: KCM, 03/02/2000)

[27] Sejumlah besar pendana bilateral, organisasi-organisasi internasional, yayasan-yayasan pribadi, dan INGO mendukung dan berpartisipasi dalam gerakan ini. Mereka meliputi: USAID, NED, Canadian International Development Agency (CIDA, Agen Pembangunan Internasional Kanada), World Bank, Asian Development Bank, InterAmerican Development Bank, UNHCR, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa), Council of Europe, Commonwealth Foundation, Hitachi Foundation, Aga Khan Foundation, Soros Foundation dan Open Society Institute, Mott Foundation, Ford Foundation, Aspen Institute, Charities Aid Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Save the Children, dan Center for Democracy. Lihat www.icnl.org, World Bank 1999, dan www.worldbank.org untuk informasi lebih jauh.

Economic Memorandum (Memorandum Ekonomi Negara), Country Assistance Strategies (Strategi Asistensi Negara), dll.—memberikan prosedur formal yang membuka proses pembuatan kebijakan negara bagi INGO/NGO dan mengubah cara negara memperlakukan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan cara yang sama UNDP memasukkan NGO ke dalam perencanaan programnya di level nasional melalui penyusunan kerangka kerjasama negara UNDP, nota saran, dan inisiatif-inisiatif lain (www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/policiesinfo.html, diakses pada 4/22/01). Proses-proses tersebut turut melahirkan interaksi negara-NGO dan negara lebih terbuka melibatkan NGO dalam proses pembuatan kebijakannya.

Resolusi Konflik, Transisi, dan Pelibatan NGO oleh IGO. Sejak 1990-an INGO, NGO, dan aktor masyarakat sipil lain telah dilibatkan sebagai rekan atau *shareholder* di PBB dan program-program internasional lain yang terkait dengan transisi pasca-konflik menuju demokrasi di wilayah-wilayah yang semula penuh dengan konflik sipil. Program-program ini merupakan proses sosialisasi karena memaksa negara-negara yang terlibat untuk mengakui dan mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang semula ditekan atau tidak diakui dan, dalam kasus-kasus tertentu, membuat hubungan negara-masyarakat lebih harmonis.

Salah satu contohnya adalah pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) PBB dan program rekonstruksi pasca-perang di Amerika Tengah. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, misi pengamat PBB dibuat di Nikaragua, El Salvador, dan Guatemala untuk mengawasi pemilihan umum, penghentian perang, dan pelanggaran hak asasi manusia.[28] Proyek-proyek awal ini diperluas hingga Special Economic Cooperation Plan untuk wilayah-wilayah yang menyediakan kerangka bagi kedua program PBB yang secara aktif melibatkan aktor-aktor masyarakat sipil dalam proses rekonstruksi pasca-konflik: International Conference on Central American Refugees (CIREFCA, Konferensi Internasional mengenai Pengungsi Amerika Tengah) dan Development Program for Refugees, Displaced and Repatriated Persons in Central America (PRODERE, Program Pembangunan untuk Peng-



Pada 1988 terjadi terobosan, isu-isu lingkungan hidup tiba-tiba maju ke tengah pentas dalam agenda global, sebagian didorong oleh penerbitan *Our Common Future* pada 1987, sebuah laporan Komisi Dunia mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan dan oleh bukti yang semakin banyak tentang kegagalan lingkungan hidup. (Sumber: David C. Korten, 2001)

[28] Misi pengamat PBB di El Salvador dan Guatemala berakhir meninggalkan fungsi pelayanan yang melampaui jangkauan normal misi semacamnya di waktu itu. Ia membuat program memperkuat lembaga-lembaga lokal dan nasional, program untuk menyelesaikan persoalan pembagian tanah, dan mengembangkan keadilan dan hak asasi manusia, kebanyakan dikerjakan bersama NGO-NGO. Misi-misi ini juga merupakan salah satu mekanisme internasional untuk menciptakan hubungan negara-masyarakat sipil dan mempromosikan transisi yang lebih melibatkan NGO. Lihat UNHCR 2000: bab 6.

ungsi, Pengungsi Dalam Negeri, dan Orang-Orang yang Ditempatkan Kembali di Amerika Tengah). Dijalankan bersama-sama beberapa agen PBB, program-program ini berfokus pada proses pemukiman kembali dan rekonstruksi untuk pengungsi di wilayah dan melibatkan partisipasi pemerintah pusat dan daerah, INGO/NGO, donor resmi, dan kelompok yang diuntungkan (*beneficiary groups*)[29] (Sollis 1996: 27). CIREFCA merupakan 'proses' forum yang dipimpin PBB di mana pemerintah tujuh negara Amerika Tengah, berkonsultasi dengan NGO, lebih dahulu membahas program-program rekonstruksi dan pembangunan yang akan mereka presentasikan dan mintakan dana dari donor internasional. CIREFCA mengarahkan dukungan resmi ke proyek yang lebih berlevel komunitas, ikatan regional yang lebih kuat, level komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dengan NGO, dan membangun jaringan regional NGO[30] (UNHCR 2000).

PRODERE merupakan program pembangunan yang berfokus pada rekonsiliasi dan rekonstruksi wilayah-wilayah yang banyak mengalami konflik dan berjalan dari 1990-95 dengan proyek nasional di enam negara Amerika Tengah. Untuk masing-masing program PRODERE mendorong pendirian agen pembangunan ekonomi lokal (*local economic development agencies*, LEDA) yang terdiri dari pemerintah dan wakil NGO dan bertugas merancang strategi pembangunan ekonomi untuk program tersebut. Sebagai hubungan legal-formal yang baru antara negara dan NGO, LEDA merupakan alat kunci pembangunan konsensus, rekonsiliasi, dan bentuk-bentuk partisipasi rakyat yang baru yang membantu melahirkan hubungan negara-masyarakat yang lebih kooperatif[31] (Lazarte, Hofmeijer, dan

---

[29] UNHCR merupakan agen pemimpin PBB untuk CIREFCA dan UNDP merupakan organisator utama PRODERE. Program-program tersebut dijalankan bersama dengan International Labor Organization (ILO) dan World Health Organization (WHO), dan melibatkan partisipasi IFAD, UNICEF, World Food Program, UNFPA, dan Pan American Health Organization (PAHO, Organisasi Kesehatan Seluruh Amerika). Lihat Sollis 1996: 197, dan UNHCR 2000: 23.

[30] CIREFCA juga memberikan titik fokus bagi pembentukan asosiasi-asosiasi NGO nasional baru di negara-negara peserta dan menciptakan asosisasi regional. NGO-NGO bisa memeroleh akses ke dana luar negeri dan sering menjadi pelaksana utama berbagai proyek yang dihasilkan dari proses ini. Lihat Sollis 1996: 198.

[31] Jaringan 18 Local Economic Development Agencies (LEDA) dibangun selama program PRODERE dan jaringan ini melanjutkan kerja mereka ketika kerja PRODERE telah selesai di tahun 1995. Mereka sekarang mendapat dana IGO dari Inter-American Development Bank dan komite-komite resmi nasional dan internasional yang lain. Lihat www.unops.org/projects/prodere.html. Selain panitia perencana berlevel pemerintah lokal ini, PRODERE juga membantu pendirian Local Health System (Sistem Kesehatan Lokal) dan Human Rights System (Sistem Hak Asasi Manusia) yang juga melibatkan wakil-wakil NGO dan kelompok lokal, hingga negara mau melibatkan anggota-anggota masyarakat yang sepanjang sejarah telah dipinggirkan. Badan-badan baru ini juga membantu melegitimasi NGO-NGO dan kelompok-kelompok lokal lain hingga tercapai

Zanenburg tanpa tanggal). PRODERE juga merupakan kunci yang membantu kelompok-kelompok mendapatkan surat legal dan akhirnya secara legal dimasukkan dalam 815 organisasi masyarakat sipil (UNDP 2000: 23; Sollis 1996: 199). Baik CIREFCA maupun PRODERE menjadi model yang digunakan oleh PBB untuk proses resolusi konflik yang lebih 'partisipatif bagi rakyat' di bagian dunia lain[32] (www.undp.org/csopp/csobroch.htm, diakses pada 11/27/99). World Bank baru-baru ini juga membangun Post-Conflict Trust Fund yang mempersatukan NGO-NGO dengan badan-badan resmi lain di negara-negara yang sedang memulihkan diri dari pertikaian sipil dan konflik etnis.[33]

Pengamatan dan Kesimpulan: Watak Simbiotik Pertumbuhan NGO dan IO (International Organization)

Berlawanan dengan kebanyakan pustaka yang cenderung menekankan faktor-faktor sosio-ekonomi dan faktor bawah-atas lain untuk menjelaskan kemunculan NGO-NGO, makalah ini berfokus pada struktur politik atas-bawah dan pada bagaimana lembaga-lembaga dan aktor-aktor internasional mempengaruhi insentif dan tekanan yang dihadapi para aktivis dan negara. Tidak sekedar reaksi sederhana masyarakat terhadap peningkatan kekayaan, globalisasi ekonomi, kemunduran negara, dan revolusi teknologi informasi, pertumbuhan INGO dan NGO pada beberapa dasawarsa terakhir terjadi dalam konteks politik yang mendorong kemunculan dan perkembangannya. Ketika struktur politik internasional mulai menyediakan kesempatan eksternal dan mempromosikan norma-norma dan kebijakan-kebijakan pro-NGO di level dalam negeri, maka IGO-IGO dan donor-donor internasional lain berfungsi sebagai sponsor resmi masyarakat sipil.

---

pemahaman baru mengenai proses pembangunan di kalangan aktor-aktor negara. Lihat Sollis: 198-99.

32 UNDP telah merancang program serupa di Afrika dan Asia. Brosure mutakhir UNDP mengutip Cambodia Reintegration and Rehabilitation Program (CARERE) sebagai contoh program yang didasarkan pada pendekatan partisipasi rakyat. Lihat www.undp.org/csopp/csobroch.htm.

33 Fund ini menyediakan hibah bagi NGO-NGO yang memberikan layanan bagi pengungsi dan komunitas-komunitas yang sedang melakukan pemulihan pasca-konflik. World Bank juga bekerja dengan NGO-NGO, lembaga penelitian-lembaga penelitian, organisasi-organisasi bilateral dan multilateral, dan pemerintah-pemerintah nasional untuk mengorganisir lingkaran pertemuan (roundtable), konferensi, perjanjian kerjasama untuk upaya-upaya pasca-konflik. Lihat http://www.worldbank.org/htm/extdr/pb/pbngos.htm, diakses pada 4/24/01.

Peningkatan level dana internasional dari terkhusus patron-patron elite, harus dicatat, merupakan bagian sangat penting dalam gelombang mutakhir aktivitas INGO dan NGO. Meskipun ada banyak kelompok yang terutama bertumpu pada dana anggota dan sumbangan dari publik, juga ada tak kalah banyak INGO dan NGO yang sekarang sangat bergantung pada dana resmi maupun yayasan pribadi. Hal ini berlaku baik pada INGO yang berbasis di negara-negara industri maupun NGO-NGO di negara-negara berkembang dan transisional. Banyak INGO dari Amerika Utara dan Eropa sangat terlibat dan terpengaruh oleh pertumbuhan pertumbuhan luar biasa bantuan luar negeri bilateral, dana yayasan, dan dana IGO baru dalam dua atau tiga dasawarsa terakhir. INGO yang aktif dalam wilayah pembangunan internasional mungkin merupakan INGO yang paling tergantung, dengan level ketergantungan seluruh INGO pada dana resmi sekitar 40-80% di Skandinavia, Belanda, Swiss, Jerman, dan Kanada (Smillie dan Helmich 1993 dan 1999). Ini terutama berlaku pada perkembangan INGO yang terlibat dalam krisis-krisis kemanusiaan, dan wilayah tempat negara dan IGO sangat tergantung pada penyediaan layanan INGO (Smillie dan Helmich 1999).

Dampak kesempatan dana internasional pada pertumbuhan NGO sangatlah dramatis di negara-negara berkembang dan transisional hingga mereka menjadi sasaran bantuan 'partisipasi rakyat' dan masyarakat sipil. Dengan memperhitungkan demikian banyak jumlah uang yang diguyurkan ke NGO-NGO pembantu pada periode 1980-an dan 1990-an, penjelasan atas-bawah dalam banyak hal merupakan penjelasan yang paling gamblang untuk menerangkan kemunculan mendadak kelompok-kelompok yang mengaku sebagai NGO. Kajian berlevel negara yang dilakukan oleh para sarjana dalam beberapa dasawarsa terakhir memang menunjukkan bahwa kemunculan dana internasional mendahului peningkatan mendadak jumlah NGO di banyak negara, termasuk Banglades (Stiles 2001, Tvedt 1998), Amerika Tengah dan Selatan (Shifter 2000; Sollis 1996: Macdonald 1994; Keck dan Sikkink 1998; Brysk 1994), Bolivia (Petras 1997), Nepal (Golub 2000; Edwards dan Hulme 1996), Tunisia (Edwards dan Hulme 1996), Kenya (Ndegwa 1994; Sandberg 1993; Maina 1998), Mozambique (Lubkemann 2001; Hanlon 2000), Mali (Fisher 1993: 76), Sierra Leone (Turay 2001); Mesir (Brouwer 2000; Mustapha 2000), Afrika Selatan (Ottaway 2000; Landsberg 2000), Tanzania (Kelsall 2001), Palestina (Brouwer 2000), Afganistan (Goodhand dengan Chamberlain 2000), Filipina (Racelis 2000), Eropa Timur dan Tengah, Rusia, dan Negara-Negara Merdeka Baru (Quigley 1997; Wedel 1998l; Ekiert dan Kubik 2000; Sperling 1999; Samp-



Negara-negara donor atau penyumbang dana untuk ADB, mendesak transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan program-program ADB atau Bank Pembangunan Asia. ADB terutama didesak agar bersikap transparan dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan. (Sumber: KCM, 14/06/2003)

son 1996; Soros 1991; Phillips 1999; Flaherty 1992; Quigley dan Popson 1999). Meskipun dana eksternal tidak selalu berhasil menciptakan komunitas NGO yang kuat dan sehat di negara-negara tersebut, tetapi tentulah meningkatkan jumlah keseluruhan NGO dan dalam beberapa kasus turut menciptakan mega-NGO-mega-NGO yang memiliki kemampuan layanan yang sangat besar.[34]

Meski demikian, untuk dapat memahami sepenuhnya bagaimana dinamika dari cerita yang disajikan dalam tulisan ini, pentinglah kiranya menjelajahi konteks luas globalisasi politik dan hubungannya dengan aktivisme masyarakat. Meskipun tulisan ini hanya berpusat pada aspek atas-bawah globalisasi politik, kemunculan INGO dan NGO di hampir setiap pojok dunia pada setengah abad terakhir dan kaitannya dengan pertumbuhan dan evolusi IGO melibatkan proses-proses rumit yang sulit dicirikan dengan sederhana. Tidak sekedar dikotomi atas-bawah versus bawah-atas, mungkin lebih tepat menggambarkan proses kemunculan INGO/NGO sebagai suatu proses interaktif, *simbiotik* yang berakar pada evolusi proses-proses globalisasi politik yang terjadi ketika lembaga-lembaga internasional bertambah banyak, bertambah besar, dan meningkat fungsinya.

Di satu sisi, seperti argumen dalam tulisan ini dan juga para sarjana gerakan sosial, kemunculan dan perluasan politik dan negara ke level internasional dalam bentuk IGO dan rezim internasional mengembangbiakkan kelompok-kelompok kepentingan sosial yang baru dan gerakan protes yang bekerja melintasi batas-batas negara. Meski demikian, di sisi lain INGO dan NGO kadang-kadang juga mempengaruhi dan menyumbang pertumbuhan rezim internasional baru dengan cara menyediakan diri sebagai pelaksana, pengawas, pemberi saran, pembela, dan konsumen. Dengan sumber materi dan



Negara-negara donor menginginkan agar departemen kunci di ADB—yang mengawasi implementasi ADF—bekerja independen. Para donor menekankan agar ADB juga memperbaiki strategi dalam pemberantasan kemiskinan, yang mendera 900 juta penduduk Asia. (Sumber: KCM, 14/06/2003)

[34] Banglades, Kenya, dan Mozambik merupakan contoh esktrim tentang efek dana eksternal untuk NGO di negara berkembang. Di Banglades, sumber dana luar negeri (agen bilateral, PBB, yayasan, INGO, dll.) untuk NGO meningkat dari $ 10 juta di 1987 menjadi $ 50 juta di 1992 dan $ 250 juta di 1997. Dengan perkiraan 15-30% dana bantuan luar negeri ke Banglades yang disalurkan melalui INGO dan NGO, sekarang ada seksi-seksi kebijakan pembangunan yang sepenuhnya disubkontrakkan ke NGO (Stiles 2001). Di Kenya, pada akhir 1980-an NGO menerima $ 35 juta dari pemerintah donor atau kira-kira 18% dari total dana luar negeri resmi untuk negara dan menjadi pemasukan hampir setengah dana layanan kesehatan dan keluarga berencana Kenya (Ndegwa 1994). Mozambik merupakan penerima dana UE untuk NGO yang disukai pada 1990-an dan 1994 ada lebih dari INGO dan $ 85 juta dukungan dana UE untuk INGO dan NGO di Mozambik. Kebanyakan dana ini disalurkan untuk proyek-proyek yang terkait dengan kesehatan dan beberapa NGO menjadi penyalur jasa yang sangat besar dengan kontrak UE senilai lebih dari $ 3 juta (kontras dengan ini, rata-rata anggaran negara Mozambik untuk belanja kesehatan hanyalah kurang dari $ 9 juta) (Hanlon 2000).

politik terbatas, IGO dan lembaga internasional harus sering bergantung pada aktor-aktor swasta agar pekerjaan mereka selesai dan sudah menjadi kepentingan diri organisasi IGO untuk mendukung NGO. Hal ini terutama berlaku ketika lembaga-lembaga dan rezim-rezim internasional bertambah banyak dan meluas jangkauannya. Baik kelompok-kelompok pemberi layanan maupun advokasi dalam banyak hal telah membantu IGO dengan cara memobilisasi kemauan politik internasional dan nasional untuk bekerjasama secara internasional, dengan cara membantu IGO menjalankan misinya, dan dengan menyediakan derajat legitimasi tertentu pada lembaga-lembaga internasional dengan membiarkan mereka melibatkan beberapa jenis wakil warga negara. Penelitian di masa depan tentang INGO dan NGO akan memberikan manfaat jika memeriksa dan lebih jauh menjelajah hubungan simbiotik antara lembaga-lembaga internasional dan aktor-aktor swasta.

Tabel 1. Dana PBB dan Program Pendukung untuk INGO dan NGO
(Keterangan: ki. = kira-kira)

Agen atau Program PBB (tanggal pendirian)	Program Pendukung NGO atau Masyarakat Sipil
World Bank (ki. 1944)	- 1970-an: INGO/NGO dilibatkan dalam proyek-proyek yang didanai World Bank sebagai konsultan, pelaksana, pengawas, dan penilai. Partisipasi ini meningkat secara dramatis di tahun 1990-an. - 1983: Dimulai program hibah dana kecil pertama untuk NGO-NGO di negara berkembang. - 1988-1990-an: Hibah dan program pendukung lain untuk INGO/NGO dirancang oleh World Bank. Termasuk di antaranya adalah Special Grant Program, Grants for Capacity Building, Population and Reproductive Healthy Capacity Building Program, Institutional Development Fund, Post-Conflict Trust Fund, dan dana-dana yang disalurkan melalui Global Environment Fund. Jumlah lokakarya dan konferensi yang didanai oleh World Bank juga meningkat dramatis dan Economic Development Institute World Bank dimulai dengan melibatkan NGO-NGO dalam program pelatihannya.
Food and Agriculture Organization (FAO) (ki. 1945)	- 1980-an: People's Participation Program

UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) (ki. 1994) dan UN Commission on Human Rights (ki. 1947)	- UN Commission on Human Rights (dan lebih baru lagi UNHCHR) bekerjasama dengan NGO-NGO selama bertahun-tahun. Selain mengandalkan NGO untuk informasi dan keahlian teknis, UNCHR juga menjalankan beberapa program pendanaan sukarela (*small voluntary funding program*) untuk NGO yang berpartisipasi dalam isu hak asasi manusia dalam rapat-rapat PBB dan proyek-proyek pelayanan INGO yang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia. Jumlah total dana ini tidaklah besar (kira-kira $ 8 juta pada 2000/2001), tetapi membuat banyak NGO dapat berpartisipasi dalam rapat-rapat hak asasi manusia di PBB dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban-korban hak asasi manusia. Dana tersebut adalah: - UN Voluntary Fund for Victims of Torture (ki. 1981) - UN Voluntary Fund for Indigenous Populations (ki. 1985) - Voluntary Trust on Contemporary Forms of Slavery (ki. 1991) - Voluntary Fund for the International Decade of the World's Indigenous People (ki. 1995) - Assisting Community Together (ki. 1998)
UN Children's Fund (UNICEF) (ki. 1948)	- Sejak didirikan UNICEF menjalin kerjasama dengan INGO dan NGO. INGO-INGO dan organisasi-organisasi berbasis komunitas merupakan pelaksana program-program UNICEF berlevel di negara di bidang kesehatan anak, gizi, pendidikan dasar, dan kebersihan air dan lingkungan. - Sejak 1989 mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak yang diusulkan oleh UNGA, UNICEF bekerjasama dengan NGO-NGO pelayanan dan advokasi di bidang perlindungan anak, pekerja anak, anak dalam konflik bersenjata, dan anak cacat.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)	- UNHCR bekerjasama dengan INGO dan NGO sejak didirikan. Jumlah bantuan UNHCR yang disalurkan melalui INGO.NGO meningkat banyak di 1980-an dan 1990-an. Pada 1999, $ 25 juta per tahun disalurkan melalui 544 INGO/NGO. Program-program UNHCR lain yang aktif mendukung INGO/NGO adalah: - 1989-1994: International Conference on Central American Refugees (CIREFCA). - 1993: Partnership in Action (PARinAC). Suatu program yang meliputi konsultasi, dukungan teknis, dan peningkatan kemampuan untuk NGO-NGO. - 1997: NGO Fund (Easter Europe dan CIS). Didirikan untuk mendukung NGO-NGO lokal dan mengembangkan pertukaran informasi dan ketrampilan di kalangan INGO dan NGO lokal.
World Food Program (WFP) (ki. 1963)	- Sejak dilahirkan WFP telah bekerjasama dengan NGO. Sejak 1992, kebanyakan program pangan untuk pengungsi di seluruh dunia berasal dari WFP yang memiliki belanja operasi sebesar $ 1-2 milyar per tahun di tengah hingga akhir 1990-an. INGO dan NGO merupakan rekan pelaksana WFP yang utama, dengan tiga perempat proyek pembangunan dan empat perlima kerja bantuannya melibatkan kerjasama dengan INGO dan NGO. Kerjasama ini sangat meluas di 1990-an dengan jumlah NGO rekan meningkat empat kali lipat antara 1989-1998 hingga mencapai 1.100 NGO lebih (250 di antaranya adalah INGO).



Alokasi anggaran hibah (*grant*) ADB untuk membantu pengembangan statistik negara-negara anggotanya pada tahun 2003 sebesar 120 juta dolar AS (sekitar Rp 1,104 triliyun). Jumlah itu menurun dibanding tahun 2002 yang 145 juta dolar AS, bahkan jauh lebih rendah dibanding tahun 2001 yang 160 juta dolar AS. (Sumber: KCM, 11/11/2002)

UN Development Program (UNDP) (ki. 1969)	- Hubungan kerja UNDP dengan NGO bermula dari tengah hingga akhir 1980-an dan bertambah cepat di tahun 1990-an dengan diciptakannya berbagai program pendukung NGO. Program yang mendanai dan/atau melibatkan INGO dan NGO termasuk: - 1988: Partners in Development Program I - Awal 1990-an: Development Program for Discplaced Persons, Refugees and Returnees in Central America (PRODERE). Keberhasilan program ini memunculkan program serupa untuk bagian dunia yang lain seperti Kamboja. - 1990-an: Partners in Development II; World Summit on Social Development Program; Environment and Development Program; Learning Group on Empowerment and Participation; Global Program; Environment and Social Sustainability Program; Indigenous Knowledge Program - 1992 (terus berjalan): Sustainable Development Networking Program. Menebar uang untuk mendirikan situs-situs internet lokal dan pelatihan teknologi informasi.
United Nations Population Fund (UNFPA) (ki. 1969)	- Kerjasama dengan NGO-NGO yang bekerja di bidang kependudukan telah dilakukan sejak pendirian UNFPA di 1969. Kebanyakan dana disalurkan ke NGO-NGO yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi. Pada 1997, pos pengeluaran yang dieksekusi oleh NGO meningkat hingga 15% dari belanja program UNFPA, hingga 10% di 1970-an dan 1980-an.
International Fund for Agricultural Development (IFAD) (ki. 1977)	- Pelaksanaan proyek: Sejak memulai kerja lapangannya di 1979, NGO merupakan pelaksana proyek-proyek yang didanai IFAD. Partisipasi NGO dalam proyek-proyek IFAD meningkat tajam di 1990-an, dengan jumlah total NGO yang terlibat sebanyak 173 NGO di 1993 menjadi 700 NGO di 2001, bersamaan dengan itu juga terjadi peningkatan luar biasa dalam jumlah program IFAD. IFAD merupakan pendukung aktif proyek-proyek mikrokredit NGO sejak awal 1980-an. - Pertengahan 1980-an: Special Program for Sub-Saharan African Countries Affected by Drought and Desertification menyediakan dana untuk proyek-proyek NGO di bidang ini. - Sejak 1987: Extended Cooperation Program (ECP) dan IFAD/NGO Fund didirikan dan menyediakan hibah langsung untuk NGO-NGO. Antara 1989-1999 ada total 170 proyek ECP yang didanai senilai $ 8,1 juta.
Global Environment Facility (GEF) (ki. 1991)	- Dijalankan bersama UN Environmental Program (UNEP), World Bank, dan UN Development Program (UNDP), GEF mendanai proyek-proyek lingkungan internasional di empat bidang (keanekaragaman hayati, perubahan cuaca, air internasional, penurunan mutu tanah). Lebih dari 150 proyek yang didanai GEF dilakukan atau dilakukan bersama dengan NGO dan lebih dari 60 jaringan NGO regional dan global terlibat dalam proyek air lintas-batas negara milik GEF. GEF Small Grants Program yang dijalankan oleh UNDP telah mendanai lebih dari 1.200 proyek yang dilaksanakan oleh NGO. Total dana GEF yang disalurkan melalui INGO dan NGO meningkat mulai dengan kurang dari $ 80 juta di 1996 hingga mencapai lebih dari $ 200 juta di 1999.

UN International Drug Control Program (UNDCP) (ki. 1991)	- Sejak dilahirkan UNDCP telah bekerja dengan INGO dan NGO. Sejak pertengahan 1990-an, INGO/NGO berpartisipasi dalam program-program UNDCP sebagai pelaksana proyek, penggalang dana, perumus proyek, penyedia layanan, dan pendukung kebijakan. UNDCP memiliki program-program pelatihan untuk NGO dan berusaha mengembangkan jaringan NGO. Antara 1990-1995, UNDCP menyalurkan dana $ 21,4 juta melalui NGO, terutama untuk pelaksanaan proyek. UNDCP menerbitkan direktori NGO-NGO yang bekerja untuk soal-soal yang berkaitan dengan obat-obatan, dan memiliki pangkal data dengan lebih dari 1.300 NGO di bidang ini.
Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty (ki. 1995)	- Merupakan program lanjutan yang terus berjalan dari Conference on Hunger and Poverty tahun 1995 di Brussels, Popular Coalition melibatkan IFAD, FAO, WFP, World Bank, European Commission, dan NGO-NGO. IFAD merupakan koordinatior koalisi yang memiliki beberapa proyek jaringan organisasi dan Community Empowerment Facility yang menyediakan hibah untuk proyek-proyek komunitas yang berhubungan dengan sumber-sumber.
UN Joint Program on HIV/AIDS (UNAIDS) (ki. 1996)	- UNAIDS merupakan usaha bersama UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO, dan World Bank. Meskipun UNAIDS bukanlah agen pemberi dana, ia bekerjasama dengan NGO-NGO dan membantu NGO mendapat dana. Ia juga menyediakan bantuan teknis dan mengembangkan upaya hubungan masyarakat NGO-NGO.
Partnership for Poverty Reduction (ki. 1996)	- Ini merupakan proyek antar-agen yang dimulai 1996 oleh World Bank Institute, Inter-American Foundation, dan UNDP. Ia mempromosikan kajian dan kerjasama swasta - publik di Amerika Latin dan wilayah kepulauan Karibia dan mempertemukan pemerintah, kalangan bisnis, dan NGO untuk membahas dan mendorong hubungan kerjasama ini. Meskipun in bukan merupakan program pemberian dana yang langsung, tetapi ia membuka arus utama NGO dan kelompok lokal untuk memasuki kebijakan negara di level dalam negeri.

Sumber:

Untuk FAO: www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/ppdirect/Ppre0044.htm, diakses 11/28/99.

Untuk GEF:www/gefweb.org/Partners/partners-Nongovernmental_Organ/partners-nongovernmental_organ.html diakses 3/21/01; GEF Digest, Fall 1999.

Untuk IFAD: www/ifaf.org/ngo/ecp/index.htm; www.ifad.org/ngo/events/10/overview_e.pdf, diakses 4/2/01.

Untuk the Partnership for Poverty Reduction: www.worldbank.org/ppr/english/about.html, diakses 4/24/01 dan World Bank. 1999. *World Bank Civil Society Relations, Fiscal 1999 Progress Report.* Washington, D.C.: World Bank.

Untuk the Popular Coalition: www.ifad.org/popularcoalition/main_cef.htm dan www.ifad.org/popularcoalition /main_ab.htm, diakses 4/25/01.

Untuk UNAIDS: www.un.org/esa/coordination/ngo/other.htm, diakses 11/28/99.

Untuk UNDP: www,undp.org/csopp/CSO/NewsFiles/partners.htm,-www,undp.org/csopp/CSO/NewsFiles/programmesglobal.htm,-www.undp.org/csopp/csobroch.htm, dan www, sdnp.undp.org/about/back.html. diakses 4/24/10.

Untuk UNHCR:www.unhcr,ch/html/meny2/9/vfindige.htm,www.unhcr.ch/html/menu2/9/vftorur.htm, www.unhcr.ch/html/menu2/9/vfinddec.htm, dan www.unhcr.ch/html/menu2/9/civilsup/actproj.htm, diakses 4/19/01.

Untuk UNHCR: UNHCR.2000, www.unhcr.ch/pubs/rm097/rm09702.htm, dan www.unhcr.ch/fdrs/ga99/ngofund.htm.accessed4/24/01.

Untuk UNDCP:www.un.org/esa/coordinations/ngo/other.htm, dan www.undcp.org/ngos_and_civil society.html, diakses 11/28/99.

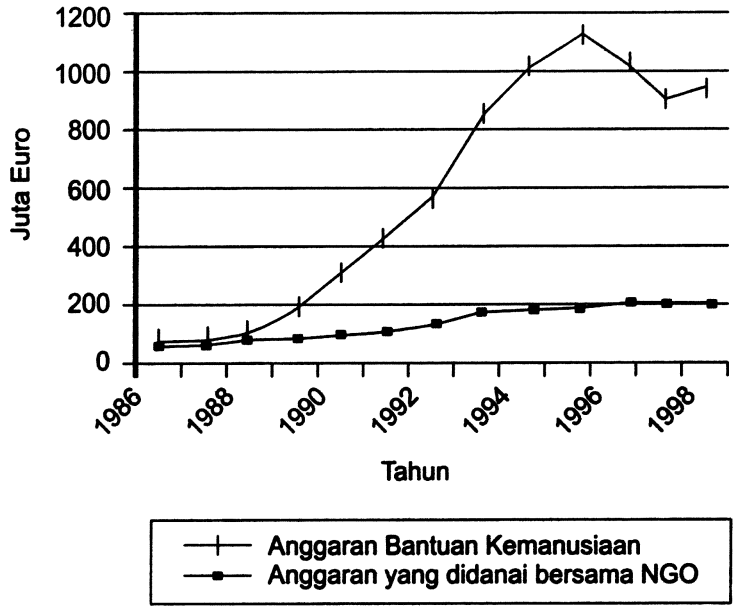
Untuk the World Bank: www.worldbank.org/html/extdr/pb/pbngos.htm dan www.worldbank.org/html/extdr/pb/pbngos.htm, diakses 4/24/01; World Bank 1995, 1996 dan 1999; dan World Bank and WWF 1999.

Untuk WFP: www.wfp.org/reports/wfpstats/99/tab_1_99.pdf, dan www.wfp.org/eb_public/EBA.A_99_English/annrep98/annrep98.htm, diakses 4/23/01.



Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah '*governance*' adalah Bank Dunia, melalui publikasinya *Governance and Development* (1992). Definisi '*governance*' menurut Bank Dunia adalah "*the manner in which power is exercised in the management of a country's social and economic resources for development*". (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Gambar 1. Peningkatan Bantuan Kemanusiaan UE dan NGO, 1986-1998



Sumber: European Commission dalam Cox dan Chapman 1999: 31.

Setelah Bank Dunia, ADB juga mempopulerkan istilah '*governance*' dalam *policy paper* bertajuk *Governance: Sound Development Management*. ADB mengartikulasikan empat elemen esensial *good governance*, yaitu *accountability, participation, predictability*, dan *transparency*. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Tabel 2. Dana UE yang terbuka untuk NGO-NGO, 1998

Program/Jalur Anggaran	Anggaran Program
Dukungan untuk Organisasi-Organisasi Pemuda Internasional Non-Pemerintah	1 juta euro
Proyek Pembangunan di Negara-Negara Berkembang dan Proyek-Proyek Peningkatan Kesadaran di Eropa yang Dijalankan oleh NGO-NGO	200 juta
Bantuan untuk Pengungsi (*Refugee*), Pengungsi yang Kembali (*Returnee*), dan Pengungsi Dalam Negeri (*Displaced*)	120 juta
Langkah-Langkah untuk Mendukung Migran, termasuk Imigran dari Luar Uni Eropa	8 juta
Langkah-Langkah untuk Menerima Kembali Pengungsi	10 juta
Langkah-Langkah untuk Memerangi Rasisme, Xenofobia, dan Anti-Semitisme	5 juta
Bantuan Pangan dan Operasi-Operasi Pendukung Keamanan Pangan	530 juta
Bantuan untuk Membantu Rakyat di Negara-Negara Berkembang dan Lainnya yang Terkena Bencana	158 juta
Bantuan Kemanusiaan Darurat untuk Rakyat Negara-Negara Eropa Tengah dan Timur	98 juta
Bantuan Kemanusiaan Darurat untuk Rakyat Negara-Negara Merdeka dari Uni Soviet	45 juta
Operasi Kemanusiaan untuk Membantu Pengungsi dan Orang yang Terpaksa Pindah di Negara-Negara Berkembang	17 juta
Dukungan Operasi, Kesiapan Menghadapi Bencana, dan Operasi-Operasi Kemanusiaan	7 juta
Bantuan untuk Pengungsi, Pengungsi Dalam Negeri, dan Pengungsi yang Kembali di Negara-Negara Berkembang Asia *non-Lome* dan Amerika Latin	59 juta
Kerjasama dengan Afrika Selatan	128 juta
Program Rehabilitasi di Afrika Selatan	10 juta
Operasi Komunitas yang Terkait dengan Perjanjian damai Israel/PLO	50 juta
Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran terhadap Soal-Soal Pembangunan dan Pendidikan Pembangunan	5 juta
Pengintegrasian Soal Gender dalam Kerjasama Pembangunan	5 juta
Lingkungan di Negara-Negara Berkembang	15 juta
Hutan Tropis	50 juta
Skema Kerjasama Utara-Selatan dalam Konteks Kampanye Menentang Penyalahgunaan Obat-Obatan	9 juta
Memerangi HIV/AIDS di Negara-Negara Berkembang	15 juta
Bantuan untuk Kebijakan Kependudukan dan Program-Program di Negara-Negara Berkembang	8 juta
Langkah-Langkah Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Negara-Negara Berkembang	50 juta
Kerjasama Tersebar (*Decentralized*) di Negara-Negara Berkembang	4 juta
Partisipasi Komunitas dalam Aksi Menghadapi Ranjau Darat Anti-Personil	7 juta
Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Negara-Negara Berkembang	17 juta
Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Negara-Negara Afrika Selatan	5 juta
Aktivitas Pengorganisasian Mencapai Tujuan-Tujuan Hak Asasi Manusia	15 juta
Hibah untuk Aktivitas-Aktivitas Mahkamah Pidana Internasional dan untuk Pendirian Mahkamah Pidana International (*Standing International Criminal Tribunal*)	3 juta
Program Khusus untuk Demokrasi dan *Good Governance* di Nigeria	3 juta
Dana Keseluruhan untuk NGO-NGO	1,7 milyar euro

Sumber: European Commission 1998.

Tabel 3. Dana untuk INGO/NGO oleh Yayasan Amerika Terpilih, 1999-2000

Yayasan	Jumlah Hibah (tahun)	Wilayah Program (jumlah hibah)
Ford Foundation	600 hibah (2000)	Pembangunan Komunitas dan Sumber Daya (94), Pembangunan Ekonomi (50), Pembangunan Manusia dan Kesehatan Reproduksi (115), Pemerintahan dan Masyarakat Sipil (157), Hak Asasi Manusia dan Kerjasama Internasional (175), Lain-Lain (9).
MacArthur Foundation	112 hibah (2000)	Perdamaian dan Keamanan Internasional (13), Pelestarian dan Pembangunan Berkelanjutan (37), Kependudukan (30), Tantangan Global (25), Inisiatif di mantan Uni Soviet (7).
Rockefeller Foundation	195 hibah (2000)	Keamanan Pangan (18), Inklusi Global (69), Pemerataan Kesehatan (43), Aktivitas-Aktivitas Regional (25), Program-Program Khusus (40)
Kellogg Foundation	73 hibah (2000)	Pembangunan Kelembagaan dan Kemampuan Memimpin (42), Kesehatan (1), Sistem Pangan (8), Pembangunan Pedesaan (2), Pendidikan Dasar dan Pemuda (3), Filantropi dan Kerja Sukarela (5), Pengembangan Program (1), Kemiskinan (1), Tujuan Umum (9), Lain-Lain (1)
Carnegie Corporation New York	21 hibah (2000)	Sumber Daya Manusia di Negara-Negara Berkembang (5), Perdamaian dan Keamanan Internasional (13), Filantropi dan Lembaga-Lembaga Nirlaba (3)
Open Society	4 kantor program, 32 yayayan luar negeri, dan 6 inisiatif	Yayasan dan Lembaga Open Society di: Albania, Armenia, Azerabaijan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Estonia, Georgia, Guatemala, Haiti, Hungaria, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyztan, Latvia, Lituania, Makedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Polandia, Romania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Afrika bagian Selatan (Southern Africa), Tajkistan, Ukraina, Uzbekistan, Yugoslavia. Proyek-proyek lain: Inisiatif Belarus, Proyek Birma, Proyek Eurasia Tengah, Proyek Ranjau Darat, Sindikat Proyek, Program Roma
Alton Jones Foundation	69 hibah (1999)	Keanekaragaman Hayati (39), Ekonomi untuk Planet yang Berkelanjutan (5), Program Dunia yang Aman (25)
Charles Stuart Mott Foundation	215 hibah (1999)	Masyarakat Sipil di Eropa Tengah/Timur (120), Masyarakat Sipil di Afrika Selatan (22), Program Lingkungan (52)
Rockefeller Brothers Fund	87 hibah (2000)	Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan (55), Sektor Nirlaba (12), Keamanan Global (14), Afrika Selatan (6)
Bill and Melinda Gates Foundation	51 hibah (2000)	Kesehatan Reproduksi dan Anak-Anak (17), Kondisi Kesehatan berhubungan dengan Kemiskinan (14), Proyek Khusus (20)
Wallace Global Fund	59 hibah (2000)	Lingkungan (35), Kependudukan (15), *Outreach* (pusat layanan atau informasi untuk kelompok masyarakat yang terabaikan—penj.) dan Pendidikan (5), Pengurangan Kemiskinan (1), Pengutungan Kelamin Perempuan (3)
Turner Foundation	56 hibah (1999)	Energi (10), Hutan dan Habitat (17), Kependudukan (24), dan Lain-lain (5)
David and Lucile Packard Foundation	156 hibah (2000)	Konservasi (56), Kependudukan (73), Anak-anak, Keluarga, dan Komunitas (1), Keefektifan Organisasi dan Filantropi (26)
Global Fund for Women	354 hibah (2000)	Dukungan untuk proyek-proyek di 92 negara yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok perempuan

Sumber:

www.fordfound.org, www.macfound.org, www.wkkf.org, www.carnegie.org, www.soros.org, www.rockfound.org, www.wajones.org, www.mott.org, www.rbf.org, www.gatesfoundation.org, www.turnerfoundation.org, www.wgf.org, www.packfound.org, http://www.globalfundforwomen.org diakses 5/01.

Tabel 4. Akses Kelembagaan untuk NGO-NGO di PBB
(Keterangan: ki. = kira-kira)

Kantor, Agen, atau Program PBB	Tipe Akses atau Partisipasi NGO
Level Sekretariat dan Badan-Badan Lain di Markas Besar PBB	- Hubungan antara DPI dan NGO telah ada sejak 1946 dan hubungan ini diresmikan dalam resolusi ECOSOC 1297 di tahun 1968. NGO-NGO bisa mendaftar untuk mendapatkan hubungan formal dengan Department of Public Information (DPI) dan dimasukkan dalam Direktori NGO. Selama Sidang Umum PBB, DPI mengorganisir konferensi tahunan selama 3 hari untuk NGO-NGO di Markas Besar PBB, juga pertemuan-pertemuan mingguan.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Sekretariat PBB) (ki. 1991)	- Kantor ini mengoordinir kerja-kerjanya melalui Inter-Agency Standing Committee, badan pembuat kebijakan kemanusiaan pusat di sistem PBB yang terdiri dari kepala-kepala agen PBB yang terlibat dalam aksi kemanusiaan (World Food Program, UNHCR, dll.), International Committee of Red Cross, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, dan tiga konsorsium NGO (InterAction, ICVA, and Steering Committee for Humanitarian Response). Kanto ini sendiri juga mengadakan rapat bulanan dengan INGO-INGO yang diketuai bersama dengan InterAction. - Kantor ini juga memiliki petugas penghubung NGO yang ditugaskan dalam struktur koordinasi di lapangan. - Bekerja dengan Kantor, INGO berpartisipasi dalam perencanaan dan isi PBB.
Departemen-Departemen Sekretariat Lain	- Beberapa Departemen PBB, seperti Departemen Urusan Pelucutan Senjata, bekerja dekat dengan NGO. Pada 1997 Sekretaris Jenderal PBB memanggil semua departemen yang belum memiliki petugas penghubung untuk mengangkatnya. Inter-Departmental Working Group untuk NGO dihidupkan kembali tahun 1995 dan bertujuan menyusun panduan untuk pelibatan dan partisipasi NGO dalam departemen-departemen.
UN General Assembly (UNGA) (Sidang Umum PBB) (ki. 1945)	- Meskipun NGO-NGO tidak memiliki status formal di UNGA, secara informal mereka telah berpartisipasi dalam kerja panitia-panitia dan beberapa badan tambahan UNGA. NGO-NGO mengajukan petisi terhadap beberapa panitia UNGA dan berpartisipasi dalam *proceeding* subkelompok-subkelompok UNGA tersebut. - Sejak tahun 1990-an, NGO juga telah berpartisipasi lebih aktif dalam sidang-sidang khusus UNGA yang menindaklanjuti konferensi-konferensi internasional dan inisiatif PBB. Untuk sidang-sidang ini, NGO bisa meminta akreditasi khusus. Tergantung pada sidangnya, mereka bisa berpartisipasi sebagai pengamat dan menyediakan masukan untuk menyusun draf prinsip-prinsip dan resolusi-resolusi yang dipakai oleh UNGA.
Economic and Social Council (ECOSOC) (ki. 1945)	- Status konsultatif dengan ECOSOC adalah inti hubungan formal antara PBB dan NGO dan diberikan pada NGO sejak pertengahan 1940-an. NGO dapat berpartisipasi dalam berbagai level rapat ECOSOC dan badan-badan tambahannya.
Commission on Human Rights (badan tambahan of ECOSOC) (ki. 1947)	- NGO yang memiliki status konsultatif dari ECOSOC dpat memberikan pernyataan lisan dan tulisan kepada Komisi dan berbagai subkelompoknya. NGO juga diperbolehkan berpartisipasi dalam sidang-sidang berbagai subkomisi dan kelompok kerja. Beberapa subkomisi memperbolehkan NGO tanpa status konsultatif membuat pernyataan dan memberikan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Commission on Sustainable Development (badan tambahan ECOSOC) (ki. 1992)	- The Commission on Sustainable Development (CSD) adalah badan PBB utama untuk menindaklanjuti inisiatif dan komitmen yang dibuat di UNCED dan Agenda 21 di pada tahun 1992. Agenda 21 meminta CSD untuk melibatkan wakil-wakil dari "kelompok-kelompok besar", termasuk NGO, dalam pembahasan. Dalam CSD, NGO berpartisipasi dalam diskusi panel PBB dan dalam format-format baru yang lain. Partisipasi dibuka untuk NGO yang memiliki status konsultatif ECOSOC dan NGO yang berpartisipasi di UNCED.
Komisi-Komisi lain di bawah ECOSOC	- Komisi-komisi lain yang melibatkan NGO dalam kerja mereka adalah Commission on Population and Development (Komisi Kependudukan dan Pembangunan), Commission for Social Development (Komisi Pembangunan Sosial), Commission on the Status of Women (Komisi untuk Status Perempuan), dan Komisi on Human Settlements (Komisi untuk Pemukiman Manusia).
UNICEF (badan tambahan ECOSOC) (ki. 1948)	- Di tahun 1950, Resolusi UNGA 417 (V) memerintahkan UNICEF untuk meminta saran dan bantuan teknis dari NGO-NGO yang terlibat dengan aktivitas anak dan kesejahteraan keluarga. Sejak itu, UNICEF memberikan status konsultatif pada NGO-NGO berstatus konsultatif ECOSOC yang terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan anak-anak. NGO-NGO tersebut diberi status pengamat di sidang-sidang Dewan Eksekutif UNICEF dan, dengan ijin Ketua, dapat berbicara dan mengedarkan pernyataan. Pada 1998, 191 NGO mendapatkan status tersebut. UNICEF juga bekerjasama dengan NGO Committee on UNICEF, kelompok payung NGO yang didirikan pada tahun 1952 yang berfokus pada persoalan anak-anak. UNICEF menetapkan Memorandum of Understanding dan Project Cooperation Agreements dengan INGO dan NGO yang bekerjasama dengan UNICEF dalam program-programnya.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) (badan tambahan ECOSOC) (ki. 1951)	- *Statue* (akta pendirian) UNHCR menyatakan bahwa ia harus memberikan bantuan pada pengungsi melalui agen-agen swasta maupun publik. NGO juga diperbolehkan berpartisipasi sebagai pengamat baik dalam Executive maupun Standing Committee UNHCR. Konsultasi UNHCR/NGO mendahului rapat Executive Committee UNHCR. - Ikatan yang lebih erat dan konsultasi dengan INGO dan NGO telah diusahakan di tahun 1990 melalui program Partnership in Action (PARinAC).
World Food Program (WFP) (badan tambahan ECOSOC) (ki. 1962)	- WFP telah mengundang NGO-NGO sebagai pengamat untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Eksekutifnya dan mereka boleh berbicara. WFP juga melakukan dialog kebijakan secara berkala dengan rekan pelaksananya yang utama melalui Konsultasi WFP-NGO tahunan, dengan agenda dan keanggotaan diputuskan bersama. Di pertengahan 1990-an, WFP mulai menegosiasi 'Memorandum of Understanding perihal kesepakatan kerjasama' dan *stand-by arrangement* dengan rekan-rekan INGO yang besar.
UN Development Program (UNDP) (badan tambahan ECOSOC) (ki. 1966)	- Perubahan-perubahan dalam hubungan formal UNDP-NGO mulai terjadi pada awal hingga pertengahan 1990-an. Di 1997, diberlakukan aturan prosedur yang memperbolehkan Dewan Eksekutif UNDP mengundang NGO berstatus konsultatif ECOSOC untuk berpartisipasi dalam pembahasan yang terkait dengan aktivitas-aktivitasnya. Dengan berlakunya panduan formal untuk melibatkan NGO dalam proyek-proyek UNDP di 1997, ada usaha yang lebih berskala sistem untuk menjangkau NGO-NGO lokal. Pada tahun itu Administrator UNDP meminta semua perwakilan warga (*resident representatives*) untuk mengadakan konsultasi dan dialog kebijakan dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan melibatkan mereka dalam proyek-proyek UNDP.

UN Population Fund (UNFPA) (badan tambahan ECOSOC) (ki. 1969)	- UNFPA menetapkan Panitia Pemrasaran (Advisory Committee) NGO untuk memberinya saran perihal kebijakan dan soal-soal program dan mengembangkan keterlibatan NGO yang lebih besar dan kerja-kerjanya (terutama dalam hal advokasi). Panitia ini terdiri dari 25-35 NGO lokal, nasional, regional, dan internasional. Kelompok Kerja NGO akan membahas lamaran akreditasi dengan UNFPA. UNFPA baru-baru ini juga mendirikan NGO/Civil Society Theme Group (Kelompok Tema Masyarakat Sipil/NGO) untuk merumuskan dan melaksanakan prosedur-prosedur dan program-program untuk mempromosikan dan memperkuat kerjasama.
Agen, Program, Lembaga PBB	
World Bank (ki. 1944)	- Pada 1982, World Bank mendirikan NGO Consultative Committee (Panitia Konsultasi NGO), dialog formal pertama dan teratur antara World Bank dan INGO/NGO. Pada 1995, World Bank mulai menunjuk spesialis-spesialis NGO untuk misi tinggal dan pada 1999 telah ada spesialis untuk 63 misi. Pada 1996, World Bank meluncurkan inisiatif pembahasan kebijakan yang baru yang disebut Structural Adjustment Participatory Review (Pembahasan Partisipasi Penyesuaian Struktural) yang melibatkan NGO, World Bank, dan pemerintah nasional untuk membahas efek-efek sosial dari langkah-langkah penyesuaian strukutural. INGO/NGO juga terlibat dalam banyak panitia sektoral yang menyediakan saran untuk World Bank dan input untuk penelitian dan kertas kebijakan World Bank.
Food and Agricultural Organization (FAO) (ki. 1945)	- Basic Texts (Naskah Dasar) FAO menyediakan aturan formal untuk konsultasi, kerjasama, dan hubungan (*liaison*) dengan NGO. Tiga jenis status (konsultatif, konsultatif khusus, *liaison*) diberikan. Pada 1998, ada 190 INGO yang memiliki status formal itu di FAO. INGO-INGO tersebut bisa diundang untuk mengirimkan pengamat mengikuti sidang-sidang FAO Council and Conference dan berpartisipasi dalam rapat-rapat ahli, konferensi-konferensi teknis, dan seminar-seminar. FAO juga mendirikan Unit for Cooperation (Unit Kerjasama) dengan Sektor Privat dan NGO.
UNESCO (ki. 1945)	- Anggaran dasar UNESCO memberi jaminan awal untuk hubungan dengan NGO dan pada 1960 sekumpulan Arahan (Directive) diadopsi sehingga menjadi panduan partisipasi NGO. Berdasarkan Arahan ini, dibuat tiga kategori status formal NGO dan pada 1990-an telah 580 NGO mendapat akreditasi. Pada 1995, tiga kategori tersebut dihilangkan dan fokus bergeser ke hubungan operasional di lapangan. Juga ada klausul untuk konsultasi teratur dengan NGO-NGO.
World Health Organization (WHO) (ki. 1946)	- Pasal 71 anggaran dasar WHO menyatakan bahwa WHO bisa berkonsultasi dan bekerjasama dengan NGO-NGO sepersetujuan pemerintah yang bersangkutan. Hanya ada satu kategori dan hanya INGO-INGO yang berhak. Dewan WHO menentukan INGO mana yang diberikan hubungan resmi dengan WHO dan untuk INGO yang telah disetujui ditugaskan seorang petugas teknis yang bertanggung jawab pada kolaborasi WHO-NGO. INGO dapat mengirimkan pengamat pada rapat-rapat dan konferensi-konferensi WHO. Pada 1998, ada 180 lebih NGO yang memiliki hubungan formal dengan WHO. Meski demikian, ada juga kontak dan kerjasam informal antara WHO dan NGO tanpa status formal dari WHO.
UNEP (ki. 1970)	- Ada ikatan erat antara UNEP, Environmental Liaison (jaringan NGO yang bermarkas di Nairobi) dan INGO/NGO lain. Ikatan ini kadang-kadang memberi akses NGO ke negosisasi-negosiasi internasional yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

International Fund for Agricultural Development (IFAD) (ki. 1977)	- Meski tidak ada status konsultatif formal untuk NGO-NGO, mereka diperbolehkan berpartisipasi sebagai pengamat IFAD Governing Council. Sejak 1990, IFAD menyelenggarakan konsultasi tahunan dengan rekan NGO terpilih dan hal ini menjadi forum dialog. Kelompok Pemasaran untuk NGO memilih peserta untuk konsultasi dan memberikan saran secara berkelanjutan perihal cara memperkuat kerjasama IFAD-NGO. Secara lembaga masing-masing divisi regional Program Management Department dan Divisi Pemrasaran Teknis IFAD menunjuk Titik Fokus (*Focal Point*) NGO. Ada juga Unit Kerjasama NGO dan Masyarakat Sipil dalam Departemen Strategi Sumber Daya dan Kebijakan Ekonomi IFAD.
World Trade Organization (ki. 1995)	- Dibandingkan pendahulunya, General Agreement on Tariffs and Trade (Kesepakatan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan), WTO memakai mekanisme-mekanisme partisipasi NGO baik formal maupun informal. Secara khusus dalam Kesepakatan Pasal 5 tersebut ditetapkan bahwa Konsul Jendral WTO 'boleh mengadakan membuat kesepakatan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang peduli dengan soal-soal yang menjadi kepedulian WTO'. Pada 1996, General Council mengadopsi panduan untuk hubungan WTO-NGO. Di dalamnya termasuk: status pengamat dalam sidang pleno Konferensi Menteri-Menteri WTO dan kerjasama dengan acara-acara NGO yang paralel, pertemuan rutin dengan WTO untuk NGO-NGO dalam panitia-panitia dan kelompok kerja WTO, penyebaran dokumen yang diserahkan NGO ke WTO kepada negara-negara anggota WTO, dialog-dialog informal berkala antara Sekretariat-NGO, mensponsori simposium-simposium mengenai soal-soal perdagangan dengan para NGO dan melibatkan NGO di lokakarya-lokakarya WTO.
UN Program on HIV/AIDS (UNAIDS) (ki. 1996)	- Ini merupakan program PBB pertama yang melibatkan wakil-wakil NGO dalam badan pengatur UNAIDS sebagai peserta penuh dan tidak hanya pengamat. Dewan Koordinasi Program terdiri dari: wakil-wakil ke-22 negara anggota, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO, World Bank, NGO-NGO, dan orang dengan HIV/AIDS.
Badan-Badan PBB lain	- International Maritime Organization (Organisasi Kelautan Internasional) (IMO) memberikan status konsultatif pada NGO-NGO yang bertujuan dan beraktivitas sesuai dengan mandat IMO. Pada 1998, ada 54 NGO yang memiliki status ini. - UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengatur partisipasi NGO dengan tiga kategori status (umum, khusus, terdaftar). NGO-NGO tersebut memiliki status pengamat di sidang-sidang UNCTAD. Ikatan antara UNCTAD dan NGO-NGO dikokohkan kembali tahun 1988 dan menjadi lebih aktif di 1990-an dengan inisiasi konsultasi tahunan UNCTAD-NGO. Pada 1998 ada 177 NGO yang memiliki status konsultatif dengan UNCTAD. - UN Industrial Development Organization (UNIDO) memiliki klausul dalam anggaran dasar untuk melibatkan NGO. Status konsultatif diberikan pada Industrial Development Board (Dewan Pembangunan Industri) dan memungkinkan NGO untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat Dewan, Konferensi Umum, dan aktivitas-aktivitas lain. Pada 1998, ada 100 lebih NGO yang memliki status konsultatif.

Inisiatif Antar-Agen	
UN Non-Governmental Liaision Service (ki. 1975)	- Proyek bersama oleh beberapa agen PBB untuk menyebarkan informasi dan mengembangkan dialog antara PBB dan NGO. Proyek ini dikerjakan bersama semua agen dan program PBB untuk mengoordinir informasi yang terkait dengan NGO dan memberikan berbagai layanan informasi kepada NGO.
Global Environment Facility (ki. 1991)	- Setelah mengabaikan NGO pada fase awalnya dari 1991-93, pada 1994 GEF Council memutuskan untuk melibatkan partisipasi dan perwakilan NGO dalam strukturnya. Sekarang GEF melibatkan NGO-NGO dan jaringan-jaringan NGO ke dalam struktur pembuatan kebijakan melalui sistem perwakilan 'titik fokus' regional. NGO memiliki 10 kursi wakil di rapat-rapat GEF Council dan ada pula konsultasi-konsultasi GEF-NGO reguler.
Inter-Agency Learning Group on Participation (ki. 1995)	- Kelompok antar-agen ini didirikan 'untuk memajukan arus utama pembangunan partisipatif' di IGO dan membangun jaringan untuk mendukung partisipasi rakyat di level lokal. Di dalamnya termasuk UNDP, World Bank, UNIFEM, GEF, UNICEF, agen -agen donor bilateral, yayasan pribadi, dan NGO-NGO.
Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty (ki. 1995)	- Inisiatif PBB-NGO ini bertujuan menggerakkan sumberdaya dan jaringan untuk mengatasi kemiskinan pedesaan. IGO yang berpartisipasi adalah IFAD, FAO, WFP, World Bank, dan European Commission. Panitia Pengarah terdiri dari wakil-wakil IGO ini dan 7 wakil NGO dari berbagai bagian dunia.
Global Urban Partnerships (1997)	- Diluncurkan oleh World Bank, inisiatif antar-agen ini mempersatukan IGO-IGO, pemerintah nasional dan lokal, agen-agen donor, kalangan bisnis, dan NGO-NGO untuk mengerjakan soal-soal perkotaan.
The Global Compact (ki. 1999)	- Mempertemukan PBB, kalangan bisnis, buruh, dan NGO, ini merupakan inisiatif kerjasama dengan fokus pada soal hak asasi manusia. Lembaga-lembaga dan badan-badan PBB yang berpartisipasi meliputi: Executive Office of the Secretary-General, Office of High Commissioner for Human Rights, International Labor Organization, UNEP, dan UNDP.

Sumber:

United Nations 1998a untuk sejumlah agensi yang tercantum dalam tabel.
Untuk DPI: www.un.org/partners/civil_society/ngo/ngosdpi.htm#top.
Untuk lembaga-lembaga ECOSOC: www.un.org/esa/coordination/ecosoc/subsidiary.htm; www.globalpolicy.org/ngos/docs96/review.htm.
Untuk GEF: www.gefweb.org/participants/Focal_Points/NGO/ngo.html.
Untuk Inter-Agency Learning Group on Participation: www.undp.org/csopp/igp.htm.
Untuk IFAD: IFAD 2000.
Untuk ILO: www.ilo.org/public/english/comp/civil/ngo/relngios.htm.
Untuk Popular Coalition: www.ifad.org/popularcoalition/.
Untuk Global Compact: www.unglobalcompact.org/gc/unweb.nsf/.

Untuk Global Urban Partnerships: www.worldbank.org/html/fpd/urban/urb_part/urb_part.htm.
Untuk UNHCR: Cook 1996, UN 1998a.
Untuk UNCTAD: www.un.org/esa/coordination/ngo/other.htm.
Untuk UNDP: www.undp.org/csopp/scpolicy.htm.
Untuk UNEP: Conca dalam W&G. hlm. 113.
Untuk UNHCR: UNHCR 2000.
Untuk UNICEF: www.ngosatunicef.org/committee.html.
Untuk WTO: www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_e.htm.
Semua website diakses pada April dan Mei 2001.



UNDP menyebutkan ciri-ciri *good governance*, yaitu: 1) mengikutsertakan semua, 2) transparan dan bertanggung jawab, 3) efektif dan adil, 4) menjamin adanya supremasi hukum, 5) menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta 6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Tabel 5. Konferensi-konferensi Internasional PBB yang Besar, 1963-2002
(Keterangan: t.t. = tidak tersedia)

Waktu	Konferensi Internasional	Partisipasi NGO
1963	Konferensi Pangan Dunia FAO	t.t.
1967	Konferensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, Teheran	NGO pengamat: 57 NGO
1972	Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia, Stockholm	NGO pengamat yang terakreditasi: 255 NGO Forum NGO: beberapa ratus NGO
1974	Konferensi PBB mengenai Kependudukan, Bukaresh	t.t.
1974	Konferensi Pangan Dunia, Roma	400 NGO
1975	Konferensi Pertama tentang Perempuan, Mexico City	NGO pengamat yang terakreditasi: 114 NGO Forum NGO: 6.000 peserta
1975	Sidang Khusus UNGA mengenai Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi Internasional	t.t.
1976	Konferensi PBB mengenai Pemukiman Manusia (HABITAT= UN Conference on Human Settlement), Vancouver	NGO pengamat yang terakreditasi: t.t. Forum NGO: 3.500 wakil NGO
1980	Konferensi Kedua mengenai Perempuan, Kopenhagen	NGO pengamat yang terakreditasi: 135 NGO Forum NGO: 8.000 peserta
1981	Konferensi PBB Pertama mengenai Negara-Negara yang Paling Terbelakang, Paris	t.t.
1984	Konferensi tentang Kependudukan, Mexico City	NGO pengamat yang terakreditasi: 139 NGO
1985	Konferensi Ketiga mengenai Perempuan, Nairobi	NGO pengamat yang terakreditasi: 163 NGO Forum NGO: 14.000 peserta
1990	Sidang Puncak Dunia tentang Anak-Anak, New York	NGO pengamat yang terakreditasi: 45 NGO
1990	Konferensi PBB Kedua mengenai Negara-Negara yang Paling Terbelakang, Paris	t.t.
1992	Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (UNCED= UN Conference on Environment and Development), Rio de Janeiro	NGO pengamat yang terakreditasi: 1.400 NGO Forum NGO: 18.000 peserta
1993	Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia, Wina	NGO pengamat yang terakreditasi: 841 NGO Forum NGO: 2 700 peserta
1994	Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (ICPD= International Conference on Population and Development), Kairo	NGO pengamat yang terakreditasi: 1.200 perwakilan NGO
1994	Konferensi Global mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan Negara Berkembang Pulau Kecil, Barbados	NGO pengamat yang terakreditasi: 200 NGO Forum NGO: t.t.
1995	Sidang Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial, Kopenhagen	NGO pengamat yang terakreditasi: 811 NGO
1995	Konferensi Dunia Keempat mengenai Perempuan, Beijing	NGO pengamat yang terakreditasi: 5.000 wakil dari 2.100 NGO
1995	Konferensi Brusel mengenai Kelaparan dan Kemiskinan	Forum NGO: mendekati 1.000 peserta
1996	Konferensi PBB Kedua mengenai Pemukiman Manusia (HABITAT II), Istanbul	NGO pengamat yang terakreditasi: n.a. Forum NGO: 9.000 peserta
1996	Sidang Puncak Pangan Dunia, Roma	NGO pengamat yang terakreditasi: 457 NGO Forum NGO: 1.300 peserta
1998	Konferensi Diplomatik PBB mengenai Pendirian Pengadilan Penjahat Internasional, Roma	NGO pengamat yang terakreditasi: 124 NGO
1999	Konferensi NGO Internasional, Seoul	7.000 peserta dari 1.000 NGO
2000	Sidang Puncak Milenium, New York	NGO pengamat yang terakreditasi: t.t. Forum NGO Milenium: lebih 1.000 NGO
2001	Konferensi PBB Ketiga mengenai Negara-Negara yang Paling Terbelakang, Brusel	- Partisipasi NGO: t.t. - Forum NGO: 600 NGO
2001	Konferensi PBB mengenai Perdagangan Ilegal Pistol Tangan dan Senapan Ringan	t.t.
2001	Konferensi Dunia menentang Rasisme, Dikriminasi Ras, Xenofobia, dan Intoloreasi yang Terkait, Durban	NGO pengamat yang terakreditasi: 4.000 NGO Forum NGO: 7.000 peserta

Sumber:

Beberapa hal mengenai NGO diambil dari beragam sumber sekunder dan berita: Feraru 1974; Clark, Friedman dan Hochstetler 1998, Van Rooy 1997, M2 Presswire 1998 dan Aird 1996.

Informasi lainnya diperoleh dari website-website: www.unchs.org/unhcs/english/hagenda/civil-so.htm; communication.measureprogram.org/factsheets/un-icpd.htm; www.ifad.org/coalition.htm (11/27/99); www.millenniumforum.org/html/papers/mfd26May.htm; www.fao.org/docrep/X2051e/X2051e00.htm; www.oneworld.org/liaison/forum/en/about/what_it_is.htm; http://www.un.org/WCAR/dh/index.html; http://www.hri.ca/racism/. Semua website diakses pada April dan Mei 2001 dan Maret 2002.

Tabel 6. Kutipan-kutipan yang Menyebut 'Pembangunan yang Partisipatif' dan NGO-NGO dalam Rencana Aksi Konferensi Dunia PBB, 1990-an

Konferensi dan Rencana Aksi	Bagian yang Menyebut Pembangunan yang Partisipatif, Peran NGO dan Partisipasi NGO
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan (1992): Agenda 21	***Pembangunan yang Partisipatif***: "Salah satu prasyarat mendasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, dalam konteks yang lebih khusus yaitu lingkungan dan pembangunan, telah tumbuh kebutuhan bentuk-bentuk partisipasi yang baru. Ia meliputi kebutuhan individu, kelompok, dan organisasi untuk berpartisipasi dalam prosedur penilaian dampak lingkungan juga mengetahui dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan, terutama keputusan yang secara potensial akan mempengaruhi komunitas-komunitas tempat orang hidup dan bekerja." (Bab 23, Paragraf 2) (23.2) "Organisasi-organisasi non-pemerintah memainkan peran penting membentuk dan menerapkan demokrasi partisipatif. Kredibilitas mereka terletak pada peran tanggung jawab dan konstruktif yang mereka mainkan di masyarakat. Organisasi-organisasi formal dan informal, juga gerakan-gerakan akar rumput, haruslah diakui sebagai rekan dalam pelaksanaan Agenda 21." Bab 27, Paragraf 1. (27.1) ***Peran dan Partisipasi NGO-NGO***: "Organisasi-organisasi non-pemerintah... memiliki pengalaman, keahlian, dan kemampuan lapangan yang mapan dan beragam akan menjadi luar biasa penting bagi pelaksanaan dan pembahasan pembangunan berkelanjutan yang baik dan secara sosial bertanggung jawab, sebagaimana dibayangkan dalam Agenda 21. Dengan demikian, komunitas organisasi-organisasi non-pemerintah menawarkan jaringan global yang harus dimanfaatkan, dimampukan, dan diperkuat untuk mendukung usaha-usaha mencapai tujuan bersama tersebut." (27.3) "Untuk memastikan bahwa kontribusi potentsial organisasi-organisasi pemerintah sepenuhnya terwujud, komunikasi dan kerjasama sebaik mungkin antara organisasi-organisasi internasional, nasional, pemerintah-pemerintah lokal dan organisasi-organisasi non-pemerintah haruslah dipromosikan dalam mandat lembaga, dan program yang dirancang untuk menjalankan Agenda 21." (27.4).

Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia (1993): Deklarasi dan Program Aksi Wina	***Kaitan antara Hak Asasi Manusia, Partisipasi, dan Pembangunan***: "Demokrasi, pembangunan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*) bersifat saling tergantung dan saling memperkuat. Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat yang diungkapkan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri dan partisipasi penuh mereka dalam seluruh aspek hidup mereka..." Bab 1, Paragraf 8 (1.8) ***Peran dan Partisipasi NGO-NGO***: "Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia mengakui peran penting organisasi non-pemerintah dalam usaha mengembangkan seluruh aktivitas hak asasi manusia dan kemanusiaan di level nasional, regional, dan internasional. Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia menghargai sumbangan mereka untuk meningkatkan kesadaran publik perihal soal-soal hak asasi manusia, sumbangan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang ini, dan promosi serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Sembari mengakui bahwa tanggung jawab utama untuk menerapkan standar ada pada Negara, konferensi ini juga menghargai sumbangan organisasi-organisasi non-pemerintah dalam proses ini..." (1.38) "Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar organisasi-organisasi non-pemerintah dan akar rumput terlibat yang aktif dalam pembangunan dan/atau hak asasi manusia dimampukan memainkan peran besar di level nasional dan internasional dalam debat, aktivitas, dan penerapan yang terkait dengan hak untuk membangun, dan bekerjasama dengan Pemerintah, dalam semua aspek kerjasama pembangunan yang relevan." (1.73)
Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (1994): Program Aksi	***Peran NGO-NGO sebagai Suara Rakyat dan Penyedia Layanan dalam Pembangunan***: "Organisasi-organisasi non-pemerintah adalah suara rakyat yang penting, dan asosiasi serta jaringan merupakan alat yang efektif dan efisien untuk lebih memfokuskan inisiatif lokal dan nasional dan menghadapi soal kependudukan, lingkungan, migrasi, dan pembangunan sosial yang menekan." Bab 15, Paragraf 3 (15.3) "Organisasi-organisasi non-pemerintah terlibat aktif dalam penyediaan program dan layanan proyek di hampir semua pembangunan sosio-ekonomi, termasuk sektor kependudukan... Kekuatan dan kredibilitas mereka terletak dalam tanggung jawab dan peran konstruktif yang mereka mainkan dalam masyarakat dan dukungan untuk aktivitas mereka didapat dari komunitas secara keseluruhan. Organisasi serta jaringan formal dan informal, termasuk gerakan akar rumput, mendapat pengakuan yang layak mendapat pengakuan yang lebih besar di level lokal, nasional, dan internasional sebagai rekan yang terpercaya (*valid*) dan penting (*valuable*) untuk menerapkan Program Aksi ini." (15.4) "Semua negara harus melaksanakan mekanisme tindak lanjut, akuntabilitas, dan pengawasan nasional yang selayaknya, bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, kelompok-kelompok komunitas, dan wakil-wakil media, serta komunitas akademis, juga dukungan parlemen." (16.10)



Program PBB pengembangan *governance*, di bawah National Governance Programme: 1) Partnership for the Support of Governance Reform in Indonesia—Kemitraan adalah program diseminasi pengetahuan tentang pengalaman *good governance*, monitoring inisiatif *good governance*, dan membiayai inisiatif untuk perbaikan *governance* yang melibatkan pemerintah, donor, dan CSOs (Civil Society Organizations); 2) Technical assistance for Parliamentary and Public Participation. Wujudnya adalah mendukung dan memperlengkapi DPR dengan *media centre*. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Sidang Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial (1995): Program Aksi	***Pembangunan Sosial yang Partisipatif***: "Tujuan utama pembangunan sosial adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup semua orang. Untuk ini dibutuhkan lembaga demokrasi, penghargaan terhadap seluruh hak asasi manusia serta kebebasan dasar, kesempatan ekonomi yang meningkatkan dan setara, *rule of law*, pengembangan penghargaan terhadap semua keragaman budaya dan hak-hak pribadi kelompok minoritas, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Pemberdayaan dan partisipasi bersifat esensial bagi demokrasi, harmoni, dan pembangunan sosial. Semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan dan mampu menjalankan hak dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam urusan komunitas tempat mereka hidup." Bab 1, Paragraf 7 (1.7) ***Peran dan Partisipasi NGO dan Masyarakat Sipil***: "Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar esensial bagi pembangunan sosial, termasuk hak membangun mereupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendasar, sehingga harus dikembangkan dan dilindungi melalui aksi-aksi berikut: "... (j) Memperkuat kemampuan masyarakat sipil dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program pembangunan sosial, dengan pendidikan dan akses ke sumber-sumber..." (1.15) "Penerapan Deklarasi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial dan Program Aksi Sidang Puncak yang efektif membutuhkan penguatan organisasi-organisasi komunitas dan organisasi-organisasi nirlaba serta non-pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, integrasi sosial, hak asasi manusia, peningkatan kualitas hidup, dan bantuan serta rehabilitiasi, memampukan mereka berpartisipasi secara konstruktif dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Ini membutuhkan: "(a) Mendorong dan mendukung pendirian dan pembangunan organisasi-organisasi semacam, terutama di kalangan rakyat yang dirugikan dan rentan; "(b) Membangun kerangka legislatif dan peraturan, tatanan kelembagaan, dan mekanisme konsultasi untuk melibatkan organisasi-organisasi semacam dalam perancangan, pelaksanaan dan evaluasi strategi serta program pembangunan sosial; "(c) Mendukung program-program peningkatan kemampuan untuk organisasi-organisasi semacam itu dalam bidang-bidang kritis, seperti perencanaan yang partisipatif, rancang program, pelaksanaan dan evaluasi, analisis ekonomi dan keuangan, manajemen kredit, penelitian, informasi dan advokasi; "(d) Menyediakan sumber-sumber melalui langkah-langkah seperti program hibah dana kecil, dan dukungan teknis serta administratif lain untuk inisiatif yang diambil dan dikelola di level komunitas..." (5.85)



Program PBB pengembangan *governance*, di bawah Local Governance Programme: 1) Poverty Alleviation through Rural-Urban (PARUL); 2) Breakthrough Urban Initiatives for Local Development—BUILD (Januari 1998 s.d. 2001) adalah program untuk memperkuat kapasitas manajemen perkotaan dalam rangka menghadapi otonomi daerah; 3) Support for Local Parliament. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (1995): Platform Aksi Beijing	***Pemberdayaan Perempuan sebagai Bagian dari Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat:*** "Platform Aksi merupakan agenda untuk pemberdayaan perempuan... Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hak asasi manusia dan syarat keadilan sosial dan prasyarat penting serta dasar bagi kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. Kerjasama yang telah beralih rupa berdasar keseteraan antara perempuan dan laki-laki merupakan syarat pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat..." Bab 1, Paragraf 1 (1.1) ***Peran dan Partisipasi NGO-NGO:*** "Kekuatan sektor non-pemerintah yang makin besar, terutama organisasi-organisasi perempuan dan kelompok-kelompok feminis, menjadi kekuatan pendorong perubahan. Organisasi-organisasi non-pemerintah telah memainkan peran advokasi yang penting untuk mengajukan legislasi atau mekanisme yang menjamin promosi perempuan. Mereka juga telah menjadi katalis untuk pendekatan pembangunan yang baru... Perempuan, melalui organisasi-organisasi non-pemerintah, telah berpartisipasi dalam dan kuat mempengaruhi forum-forum serta debat-debat komunitas, forum nasional, regional, dan internasional." (2.26) "Organisasi-organisasi non-pemerintah harus didorong untuk menyumbang dalam proses perancangan dan pelaksanaan strategi atau rencana aksi nasional ini. Mereka juga harus didorong untuk mengembangkan program mereka sendiri untuk melengkapi usaha pemerintah. Organisasi perempuan dan kelompok feminis, bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang lain, harus didorong untuk mengorganisir jaringan, sebagai suatu kewajiban, dan mengadvokasi dan mendukung pelaksanaan Platform Aksi oleh Pemerintah atau badan-badan regional serta internasional." (5.298) "Organisasi-organisasi non-pemerintah internasional memainkan peran penting melaksanakan Platform Aksi ini. Harus dipertimbangkan cara membangun mekanisme kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan pelaksanaan Platform ini di berbagai level." (5.344)

	Partnerships, *Partisipasi, dan Pemukiman yang Memadai*: "Kerjasama antar-negara dan antar-aktor dalam negara dari organisasi-organisasi publik, pribadi, sukarela, serta berbasis komunitas, sektor koperasi, organisasi non-pemerintah, dan individu esensial untuk mencapai pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan dan penyediaan perumahan yang memadai untuk seluruh layanan dasar. Kerjasama dapat memadukan dan sama-sama mendukung tujuan partisipasi berbasis-luas ini melalui, di antara yang lain, pembentukan aliansi, pengumpulan sumber-sumber, berbagi pengetahuan, menyumbangkan ketrampilan, dan kapitalisasi berdasar keuntungan komparatif aksi-aksi bersama. Proses-proses ini dapat dibuat lebih efektif dengan cara memperkuat organisasi-organisasi sipil di semua level..." Bab 2, Paragraf 33 (2.33) "Pemberdayaan dan partisipasi mendorong demokrasi dan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan. Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya oleh Pemerintah haruslah dituntun prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik berbasis-luas." (4.179)
Habitat II (1996): Deklarasi Istanbul mengenai Pemukiman Manusia	***Peran dan Partisipasi NGO-NGO dan Masyarakat Sipil*:** "Pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif organisasi-organisasi masyarakat sipil, juga partisipasi seluruh rakyat berbasis-luas. Ini juga membutuhkan pemerintah yang tanggap, transparan, dan akuntabel di level lokal. Keterlibatan warga negara dan pemerintah yang bertanggung jawab mensyaratkan penyusunan dan penguatan mekanisme-mekanisme partisipatif..." (4.181) "Pelaksanaan Agenda Habitat yang efektif membutuhkan penguatan penguasa-penguasa lokal, organisasi-organisasi komunitas, dan organisasi-organisasi non-pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, penghapusan kemiskinan, hak asasi manusia, integrasi sosial, infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup, dan bantuan serta rehabilitasi, memampukan mereka berpartisipasi secara konstruktif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan. Ini membutuhkan: "(a) Pembuatan kerangka legislatif dan peraturan, tatanan kelembagaan, dan mekanisme konsultasi untuk organisasi-organisai yang terlibat dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi serta program pemukiman manusia; "(b) Mendukung program-program peningkatan kemampuan untuk organisasi-organisasi semacam dalam bidang-bidang kritis seperti perencanaan yang partisipatif, perancangan program, pelaksanaan dan evaluasi, analisis ekonomi dan keuangan, manajemen kredit, penelitian, informasi, dan advokasi; "(c) Menyediakan sumber-sumber melalui langkah-langkah seperti program hibah, dan dukungan teknis serta administratif lain untuk inisiatif yang diambil dan dikelola di level komunitas..." (4.237)

Sumber:

Kutipan-kutipan diambil dari teks aktual yang dibuat dalam setiap konferensi internasional. Teks-teks tersebut tersedia *on-line* di URL berikut.

Untuk Agenda 21: www.igc.apc.org/habitat/agenda21/indec.html.

Untuk International Conference on Population and Development: www.iisd.ca/lingkages/Cairo/program/p0000.html.

Untuk World Summit for Social Development:gopher//gopher.undp.org/:70/00/unconfs/wssd/summit/off/a—9.en.

Untuk the Fourth World Conference on Women: gopher://gopher.undp.org/70/00/undocs/gad/A/CONF.177/95_11/20.

Untuk Habitat II: www.undp.org/un/habitat/agenda/contents.html.

Semua website diakses pada Mei 2001.



Salah satu program Bank Dunia adalah Learning and Innovation Loan (LIL-Februari 1999 s.d. Desember 2001), yakni program untuk memajukan reformasi kelembagaan dan merangsang Pemda Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, partisipasi, pengelolaan lingkungan, dll. melalui kompetisi. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Pustaka

Aaronson, Mike. 1999. Speech to the European Conference on the Evolving Role of NGOs in Development and the 25th General Assembly of European NGOs, April 15-17.

Algers, Chadwick F. 1994. 'Citizens and the UN System in a Changing World.' Dalam *Global Transformation: Challenges to the State System*, ed., Yoshikazu Sakamoto. Tokyo, New York and Paris: UN University Press.

Anand, Anita. 1999. 'Global Meeting Place: United Nations' World Conferences and Civil Society.' Dalam *Whose World Is it Anayway? Civil Society, The United Nations and the Multilateral Future*, John W. Foster with Anita Anand, eds. Ottawa: The United Nations Association in Canada.

Beckman, David. 1991. 'Recent Experiences and Emerging Trends.' Dalam *Nongovernmental Organizations and the World Bank: Cooperation for Development*, eds., Samuel Paul and Arturo Israel. Washington, D.C.: World Bank.

Berkovitch, Nitza. 1999. 'The Emergence and Transformation of the International Women's Movement.' Dalam *Constructing World Culture, International Nongovernmental Organizations Since 1875*, eds., John Boli and George M. Thomas. Stanford: Stanford University Press.

Berry, Jeffrey M. 1999. 'The Rise of Citizen Groups.' Dalam *Civil Engagement in American Democracy*, eds. Theda Skocpol and Morris P. Fiorina. Washington, D.C. and New York: Brookings Institution Press and Russell Sage Foundation.

Berry, Jeffrey M. 1977. *Lobbying for the People. The Political Behavior of Public Interest Groups*. Princenton: Princenton University Press.

Blum, Debra. 2000. 'American Foundations Increase Giving to Support International Projects.' *Chronicle of Philanthropy* 13 (11):23.

Boli, John, Thomas Loya, and Teresa Loftin. 1999. 'National Participation in World-Polity Organization.' Dalam *Constructing World Culture, International Nongovernmental Organizations Since 1875*, ed. John Boli and George M. Thomas. Stanford:Stanford University Press.

Boli, John and George M. Thomas, eds., 1999. *Constructing World Culture, International Nongovernment Organization Since 1875*. Stanford:Stanford University Press.

Bolling, Landrum with Craigh Smith. 1984. *Private Foreign Aid: US Philanthropy for Relief and Development*. Boulder: Westview Press.

Brouwer, Imco. 2000. 'Weak Democracy and Civil Society Promotion: The Cases of Egypt and Palestine.' Dalam *Funding Virtue. Civil Society Aid and Democracy Promotion*, eds., Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

Brown, L. David and David C. Korten. 1991. 'Working More Effectively with Nongovernmental Organizations.' Dalam *Nongovernmental Organization and the World Bank: Cooperation for Development*, eds., Samuel Paul and Arturo Israel. Washington, D.C.: World Bank.

Brysk, Alison. 1994. 'Acting Globally: Indian Rights and International Politics in Latin America.' Dalam *Indigenous Peoples and Democracy in Latin America*, ed., Donna Lee Van Cott. New York: St. Martin's Press.

Carothers, Thomas. 1999. *Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

Cernea, Micheal. 1988. 'Nongovernmental Organizations and Local Development.' *World Bank Discussion Papers*. Washington, D.C.: World Bank.

Chabbott, Colette. 1999. 'Development INGOs.' Dalam *Constructiong World Culture, International Nongovernmental Organization Since 1875*, eds., John Boli and George M. Thomas. Stanford:Stanford University Press.

Charnovitz, Steve. 1997. 'Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance.' *Michigan Journal of International Law 18 (2)* : 183:286.

Charnovitz, Steve. 1996. 'Participation of Nongovernmental Organization in the World Trade Organization.' *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 17 (1):331-57.

Clark, Ann Marie, Elisabeth J. Friedman and Kathryn Hochstetler. 1998. 'The Sovereign Limits of Global Civil Society, A Comparison of NGO Participation in UN World Conferences on the Environment, Human Rights and Women,' *World Politics* 51, 1 (Oktober):1-35.

Clark, John. 1991. *Democratizing Development*. London: Earthscan Publications.

Clarke, Tim. 2000. 'EC Support for Development NGOs.' *ACP-EU Courier* Juni-Juli:51-53.

Conca, Ken. 1996. 'Greening the UN:Environmental Organizations and the UN System.' Dalam *NGOs, The UN and Global Governance*, ed. Thomas G. Weiss and Leon Gordenker. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.

Cook, Helena. 1996. 'Amnesty International at the United Nations.' Dalam *Pressure Groups in the Global System, The Transnational Relations of Issue-Oriented Non-Governmental Organization*. Ed. Peter Willetts. London: Frances Pinter.

Cox, Aidan and Jenny Chapman. 1999. *The European Community External Cooperation Programs, Policies. Management and Distribution*. Brussels: European Commission. (Available on line at http://europa.eu.int/comm/europeaid/evoluation/odi_report_end/index_en.htm, 4/14/01).

Curti, Merle. 1963. *American Philanthropy Abroad: A History*. New Brunswick: Rutgers University Press.

DAC. 1998. *Germany*. Development Cooperation Review Series No. 29. Paris: OECD.

DAC. 1995. *Participatory Development and Good Governance*. Paris: OECD.

della Porta, Donatella and Hanspeter Kriesi. 1999. 'Social Movements in a Globalizing World: an Introduction.' Dalam *Social Movements in a Globalizing World*, ed. Donatella della Porta, Hanspeter Kriese, and Dieter Rucht, London: Macmillan Press.

della Porta, Donatella and Hanspeter Kriesi, and Dieter Rucht, eds. 1999. *Social Movements in a Globalizing World*. London: Macmillan Press.

Dichter. Thomas W. 1999. 'Globalization and Its Effects on NGOs: Efflorescence or Blurring of Roles and Relevance?' *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 28 (4), Supplement: 38-58.

Donini, Antonio. 1996. 'The Bureaucracy and the Free Spirits: Stagnation and Innovation in the Relationship Between the UN and NGOs.' Dalam *NGOs, the UN, and Global Governance*, eds., Thomas C. Weiss and Leon Gordenker. Boulder and London: Lynne Rienner.

Douxchamps, Frances. 1996. 'Partners or Contractors? The European Union.' Dalam *Partner or Contractors? Official Donor Agencies and Direct Funding Mechanisms:Three Northern Case Studies – CIDA, EU and USAID*, Ian Smillie, Francis Douxchamps and Rebecca Sholes/Jane Covery, eds., Occasional Paper Series, Number 11, Februari, Oxford: INTRAC.

Edwards, Michael and David Hulme. 1996. 'Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations,' *World Development* 24 (6):961-73.

Edwards, Michael. 1999. 'International Development NGOs:Agents of Foreign Aid or Vehicles for International Cooperation?' *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 28 (4), Supplement: 25-37.

Ekiert, Grzegorz and Jan Kubik. 2000. 'Civil Society from Abroad: the Role of Foreign Assistance in the Democratization of Poland.' *Weatherhead Center for International Affairs Working Paper Series* Paper No. 00-01, Februari.

Europa Publications. 2000. *The International Foundation Directory 2000*. London: Europa Publications.

European Commission. 1998. 'Digest of Community Resources Available for Financing the Activities of NGOs and Other Governmental and/or Decentralized Bodies Representing Civil Society in the Fields of Development Cooperation and Humanitarian Aid.' VII/424/98/EN. Directorate-General VIII, Development. April. Brussels: EC.

Feraru, Anne Thompson. 1974. 'Transnational Political Interests and the Global Environment.' *International Organization* 28 (1):31-60.

Finger, Matthias, 1994. 'Environmental NGOs in the UNCED Process.' Dalam *Environmental NGOs in World Politics*, ed. Tho-

mas Princen and Mtthias Finger. London and New York: Routledge. 1994.

Finnemore, Martha. 1996. *National Interests in International Society*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Fisher, Julie. 1993. *The Road from Rio. Sustainable Development and the Nongovernmental Movement in the Third World.* Westoport: Praeger.

Fisher, William F. 1997. 'Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices.' *Annual Review of Anthropology* 26:439-64.

Flaherty, Susan L.Q. 1992. 'Philanthropy without Borders: US Private Foundation Activity in Eastern Europe.' *Voluntus* 3 (3):335-50.

The Foundation Center. 2000. *Foundation Yearbook*. New York: The Foundation Center.

The Foundation Center. 1997. *International Grantmaking. A Report on US Foundation Trends*. New York: The Foundation Center.

Fowler, Alan. 2000. 'Civil Society, NGOs and Social Development: Changing the Rules of the Game.' *United Nations Research Institute for Social Development Occasional Paper* No. 1, Januari. Available on-line at: www.un.org./partner/civil_society/document/unrisd_1.htm,11/10/00.

Gaer, Felice D. 1996. 'Reality Check: Human Rights NGOs Confront Governments at the UN.' Dalam *NGOs, the UN, and Global Government*, eds. Thomas G. Weiss and Leon Gordenker. Boulder and London : Lynne Rienner.

Golub, Stephen J. 2000. 'Democracy as Development: A Case for Civil Society Assistance in Asia.' Dalam *Funding Virtue, Civil Society Aid and Democracy Promotion,* ed. Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Goodhand, Jonathan with Peter Chamberlain. 2000. 'Help Yourself by Helping the Poor.' Dalam *Development, NGOs and Civil Society*, ed., Deborah Eade. Oxford: Oxfam GB.

Hanlon, Joseph. 2000. 'An Ambitious and Extensive Political Agenda: The Role of NGOs and the Aid Industry.' Dalam *Global Institutions and Local Empowerment, Competing Theoretical Perspective*, ed., Peter Uvin. London and New York: MacMillan and St. Martin's Press.

Hann, Chris and Elizabeth Dunn, eds. 1996. *Civil Society, Challenging Western Models.* London and New York: Routledge.

Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton. 1999. *Global Transformations, Politics, Economics and Culture.* Stanford:Stanford University Press.

Hellinger, Doug. 1987. :NGOs and the Large Aid Donors: Changing the Terms of Engagement.' *World Development* 15, Supplement, Fall: 135-43.

Hulme, David and Michael Edwards. 1997. *NGOs, State and Donors: Too Close for Comfort?* New York: St. Martin's Press.

Katzenstein, Peter J. Ed. 1996a. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics.* New York: Columbia University Press.

Kearney, M. (1995). 'The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism.' Annual Review of Anthropology. 24-547-565.

Kelsall, Tim.2001. 'Donors, NGOs and the State, Governance and 'Civil Society' in Tanzania.' Dalam *The Charitable Impulse*: NGOs and Development in East and North-east Africa, eds., Ondine Borrow ang Michael Jennings. Bloomfield: Kumarian Press.

Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink. 1998. *Activists Beyond Border.* Ithaca and London: Cornell University Press.

Kriesi, Hanspeter. 1996. 'The Organizational of Structure of New Social Movements in a Political Context.' Dalam *Comparative Perspectives on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing, Structures and Cultural Framings*, eds., Doug McAdam, John.D.McCarthy, and Mayer N. Zald. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Kriesi, Haspeter, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak, and Marco G. Giugni. 1995. *New Social Movements in Wertern Europe, A Comparative Analysis.* Minneapolis:University of Minnesota Press.

Landsberg, Christoper. 2000. 'Voicing the Voiceless: Foreign Political Aid to Civil Society in South Africa.' Dalam *Funding Virtue.Civil Society Aid and Democracy Promotion,*ed. Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washinton, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Lazarte, Alfredo, Hans Hofmeijer and Maria Zwanenberg. No date. 'Local Economic Development in Central America: The PRODERE Experience.' Geneva: International Labor Organization. Available On-Line at: www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/prodere.htm

Lipschutz, Ronnie D. 1992.'Reconstructing World Politics: The Emergence of Global Civil Society.' *Millennium: Journal of International Studies* 21,2:239-420.

Lissner, Jorgen. 1997. *The Politics of Altruism, A Study of Political Behaviour of Voluntary Development Agencies.* Geneva: Lutheran World Federation.

Lofredo, Gino. 2000. 'Help Yourself by Helping the Poor.' Dalam *Development, NGOs and Civil Society,* ed., Deborah Eade. Oxford: Oxfam GB.

Lubkemann, Stephen C. 2001. 'Rebuilding Local Capacities of Mozambique: The National Health System and Civil Society.' Dalam *Patronage or Partnership: Local Capacity Building ini Humanitarian Crises,* ed., Ian Smillie. Bloomfield: Kumarian Press.

Macdonald, Laura. 1994. 'Globalizing Civil Society: Interpreting International NGOs in Central America.' *Millennium* 23 (2):267-85.

Maina, Wachira. 1998. 'Kenya: The Sate, Donors and the Politics of Democratization.' Dalam *Civil Society and the Aid Industry. The Politics of Promise,* ed. Alison Van Rooy. London:Earthscan Publications.

Mathews, Jessica. 1997. 'Power Shift.' *Foreign Affairs,* 76, 1 (Januari/Februari): 50-56.

McAdam, Doug. 1996. 'Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions.' Dalam *Comparative Prespectives on Social Movement: Political Opportunities, Mobillizing Structures,and Cultural Framing,* eds., Doug McAdam, John. D. McCarthy, and Mayer N Zald. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Meyer, John W., John Boli, George M. Thomas, and Francisco O. Ramirez.1997.'World Society and the Nation-State.' *American Journal of Sociology* 103, 1, Juli:144-81.

Meyer, John W., David John Frank, Ann Hironaka, Evan Schofer, and Nancy Brandon Tuma. 1997. 'The Structuring of a World

Environmental Regime, 1870-1990.' *International Organization* 51 (5):623-51.

Mustapha, Kamel Al-Sayyid.2000. 'A Class of Values: US Civil Society Aid and Islam in Egypt.' Dalam *Funding Virtue. Civil Society and Democracy Promotion,* ed Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washinton, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Ndegwa, Stephen N.1994. 'Civil Society and Political Change in Africa, the Case of Non-Governmental Organizations in Kenya.' *International Journal of Comparative Sociology* 35(1-2): 19-36.

Nye, Joseph S. And Robert Keohane. 1972. 'Transnational Relations and World Politics: An Introduction.' Dalam Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, eds., *Transnational Relations and World Politics.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

OECD. 1998. *Voluntary Aid for Development. The Rule of Non-Governmental Organizations.* Paris OECD.

Ottaway, Marina and Thomas Carothers, ed. 2000. *Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy Promotion.* Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Ottaway, Marina. 2000. 'Society Movements, Professionalization of Reform, and Democracy in Africa.' Dalam *Funding Virtue. Civil Society Aid and Democracy Promotion,* ed. Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Passy, Florence. 1999. 'Supranational Political Opportunities as a Channel of Globalization of Political Conflicts. The Case of the Rights of Indegenous Peoples.' Dalam *Social Movements in a Globalizing World,* Donatella della Porta, Hanspeter Kriesi, and Dieter Rucht, eds. London: Macmillan Press.

Petras, James. 1997. 'Imperialism and NGOs.' *Monthly Review* 49 (7): 10-27.

Phillip, Ann.1999. 'Exporting Democracy: German Political Foundations in Central-East Europe.' *Democratization* 6 (2): 70-98.

Price, Richard.1998. 'Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society Targets Land Mines.' *International Organization* 52, 3 (Summer): 613-644.

Quigley, Kevin F.F. and Nancy E. Popson.1999. 'Rebuilding Civil So-

ciety in Eastern and Central Europe: The Role Played by Foundations.' Dalam *Private Funds, Public Purpose. Philanthropic Foundations in International Perspective,* eds. Helmut K. Anheier and Stefan.

Toepler. New York, Boston, Dordrecht, London and Moscow: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Quigley, Kevin F.F. 1997. *For Democracy's Sake. Foundations and Democracy Assistance in Central Europe.* Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

Racelis, Mary. 2000. 'New Visions and Strong Actions: Civil Society in the Phillippines.' Dalam *Funding Virtue, Civil Society Aid and Democracy Promotion*, ed. Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Randel, Judith and Tony German. 1999. 'European Union.' Dalam *Stakeholders: Government-NGO Partnership for International Development*, eds., Ian Smillie and Henny Helmich. London: Earthscan.

Raustiala, Kal. 1997. 'States, NGOs and International Environmental Institutions.' *International Studies Quarterly* 41, 4, (Desember): 719-40.

Reimann, Kim D. 2001. 'Late Developers in Global Civil Society: Domestics Barriers, International Socialization and the Emergence of International NGOs in Japan.' Desertasi Ph.D., Harvard University.

Renz, Loren. 1998. 'International Grant Making by US Foundations: Issues and Diretions in the 1990s.' *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 27 (4) Desember: 507-521.

Risse, Thomas and Kathryne Sikkink, 1999. 'The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practice: An Introduction.' Dalam *The Power of Human Rights, International Norms and Domestic Change*, Thomas Risse, Stephen C. Ropp and Kathryn Sikkink, eds. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Risse, Thomas, Stephen C. Ropp and Kathryn Sikkink, eds. 1999. *The Power of Human Rights, International Norms and Domestic Change.* Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Risse-Kappen, Thomas, 1995, 'Bringing Transnational Relations Back in: Introduction.' Dalam *Bringing Transnational Relations Back in: Non-State Actors, Domestic Structures and International Relations*, ed. Thomas Risse-Kappen. Cambridge: Cambridge University Press.

Ritchie, Cyril. 1996. 'Coordinate? Cooperate? Harmonize? NGO Policy and Operational Coalitions.' Dalam *NGOs, the UN and Global Governance*, ed. Thomas G. Weiss and Leon Gordenker. Boulder and London: Lynne Riener Publishers.

Sampson, Steven. 1996. 'The Social Life of Projects: Importing Civil Society to Albania.' Dalam *Covil Society, Challenging Western Models*, ed. Chris Hann and Elizabeth Dunn. London and New York: Routledge.

Sandberg, Eve. 1993. 'The Changing Politics of Non-Governmental Organizations and African States.' *CPS Comparative Perspective, Policy: Issues and Actors*, 6 (4).

Sikkink, Kathryn. 1993. 'Human Rights, Principled Issue-Networks, and Sovereignty in Latin America.' *International Organization*, 47,3 Summer, 411-41.

Shifter, Michael. 2000. 'Latin American Democratization: The Civil Society Puzzle.' Dalam *Funding Virtue, Civil Society and Democracy Promotion*, ed. Marina Ottaway and Thomas Carothers. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Skjelsbaek, Kjell. 1972. 'The Growth of International Nongovernmental Organization in the Twentieth Century.' Dalam Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, eds., *Transnational Relations and World Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Skocpol, Theda. 1999a. 'Advocates without Members: The Recent Transformation of American Civic Life.' Dalam *Civil Engagement in American Democracy*, eds. Theda Skocpol and Morris P. Fiorina. Washington, D.C. and New York: Brookings Institutions Press and Russell Sage Foundation.

Skocpol, Theda. 1999b. 'How Americans Became Civil.' Dalam *Civic Engagement in American Democrary*, eds. Theda Skocpol and Morris P. Fiorina, Washington, D.C. and New York: Brookings Institutions Press and Russell Sage Foundation.

Smillie, Ian and Henny Helmich, ed. 1999. *Stakeholders: Govern-*

ment-NGO Partnerships for International Development. London: Earthscan.

Smillie, Ian and Henny Helmich, ed. 1993. *Non-Governmental Organizations and Governments: Stakeholders for Development.* Paris: OECD.

Smillie, Ian. 1995. *The Alms Bazaar. Altruism Under Fire-Non-Profit Organizations and International Development.* London: IT Publications.

Smith, Brian H. 1990. *More Than Altruism: The Politics of Private Foreign Aid.* Princenton: Princenton University Press.

Smith, Jackie, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco, eds. 1997. *Transnational Social Movements and Global Politics.* Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Smith, Jackie. 1999. 'Global Politics and Transnational Social Movements Strategies. The Transnational Campaign against International Trade in Toxic Waster.' Dalam *Social Movements in a Globalizing World,* Donatella della Porta, hanspeter Kriesi, and Dieter Rucht, eds. London: Macmillan Press.

Sollis, Peter. 1996. 'Partners in Development? The State, NGOs and the UN in Central America.' Dalam *NGOs and Global Governance,* ed. Thomas G. Weiss and Leon Gordenker. Boulder and London: Lynne Riemer Publishers.

Sommer, John G. 1977. *Beyong Charity: US Voluntary Aid for a Changing World.* Washington, DC: Overseas Development Council, 1977.

Soros, George. 1991. *Underwriting Democracy.* New York: Free Press.

Sperling, Valerie. 1999. *Organizing Women in Contemporary Russia.* Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Spiro, Peter J. 1995. 'New Global Communities: Nongovernmental Organizations in International Decision-Making Institutions.' *The Washington Quarterley* 18, 1 (Winter): 45-56.

Stienstra, Deborah. 1994. *Women's Movement and International Organizations.* St. Martin's Press.

Stiles, Kendall W. 2001. 'Intermestic Policy Circles. Emerging Donor-MGO Networks in the Developing World.' *Paper* dipresentasikan pada the Annual Convention of the International Studies Association, Chicago, Februari 20-24.

Stiles, Kendall W. 1998. 'Civil Society Empowerment and Multilateral Donors: International Institutions and New International Norms.' *Global Governance* 4:199-216.

Tarrow, Sidney. 2001. 'Transnational Politics: Contention and Institutions in International Politics.' *Annual Review of Political Science* 4:1-20.

Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics, Second Edition*. New York and Cambridge: Cambridge University Press.

Tarrow, Sidney. 1996. 'States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements.' Dalam *Comparative Perspective and Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, eds., Doug McAdam, John. D. McCarthy, and Mayer N. Zald. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Tilly, Charles. 1984. 'Social Movements and National Politics.' Dalam *Statemaking and Social Movements*. Charles Bright and Susan Harding, eds. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Turay, Thomas Mark. 2001. 'Sierra Leone. Peacebuilding in Purgatory.' Dalam *Patronage or Partnership: Local Capacity Building in Humanitarian Crises*, ed., Ian Smillie. Bloomfield: Kumarian Press.

Tvedt, Terge. 1998. *Agents of Mercy of Development Diplomats? NGOs and Foreign Aid*. Trenton and Oxford : Africa World Press and james Curry, Ltd.

United Nations. 1998. Report of the Secretary – General. A/53/170.

UNHCR. 2000. *The State of the World's Refugees 2000. Fifty Years of Humanitarian Action*. London and Geneva: Oxford University Press and UNHCR.

Uvin, Peter. 1996. 'Scaling Up the Grassroots and Scaling Down the Summit: The Relations Between Third World NGOs and the UN.' Dalam *NGOs, the UN and Global Governance*, ed. Thomas G. Weiss and Leon Gordenker. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.

van der Heijden, Hendrik. 1987. 'The Reconciliation of NGO Autonomy, Program Integrity and Operational Effectiveness with Accountability to Donors.' *World Developments* 15 Fall Supplements: 103-12.

Van Rooy, Alison, ed. 1998. *Civil Society and the Aid Industry. The Politics of Promise.* London: Earthscan Publications.

Van Rooy, Alison. 1997. 'The Frontiers of Influence: NGO Lobbying at the 1974 World Food Conference, the 1992 Earth Summit and Beyond.' *World Development* 25 (1):93-114.

Walker, Jack L. 1991. *Mobilizing Interest Groups in America. Patrons, Professions, and Social Movements.* Ann Arbor: University of Michigan Press.

Wapner, Paul. 1995. 'Politics Beyond the State, Environmental Activism and World Civic Politics.' *World Politics* 47 (April):311-40.

Wedel, Janine R. 1998. *Collision and Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989-98.* New York: St. Martin's Press.

Willets, Pter. 1996. 'Consultative Status for NGOs at the United Nations.' Dalam Peter Willets, ed. *The Conscience of the World. The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System.* Washington DC: The Brooking Institutions.

Willets, Pter. 1989. 'The Pattern of Conferences.' Dalam *Global Issues in the UN';s Framework*, ed. Paul Taylor and A.J.R. Groom. London: MacMillan.

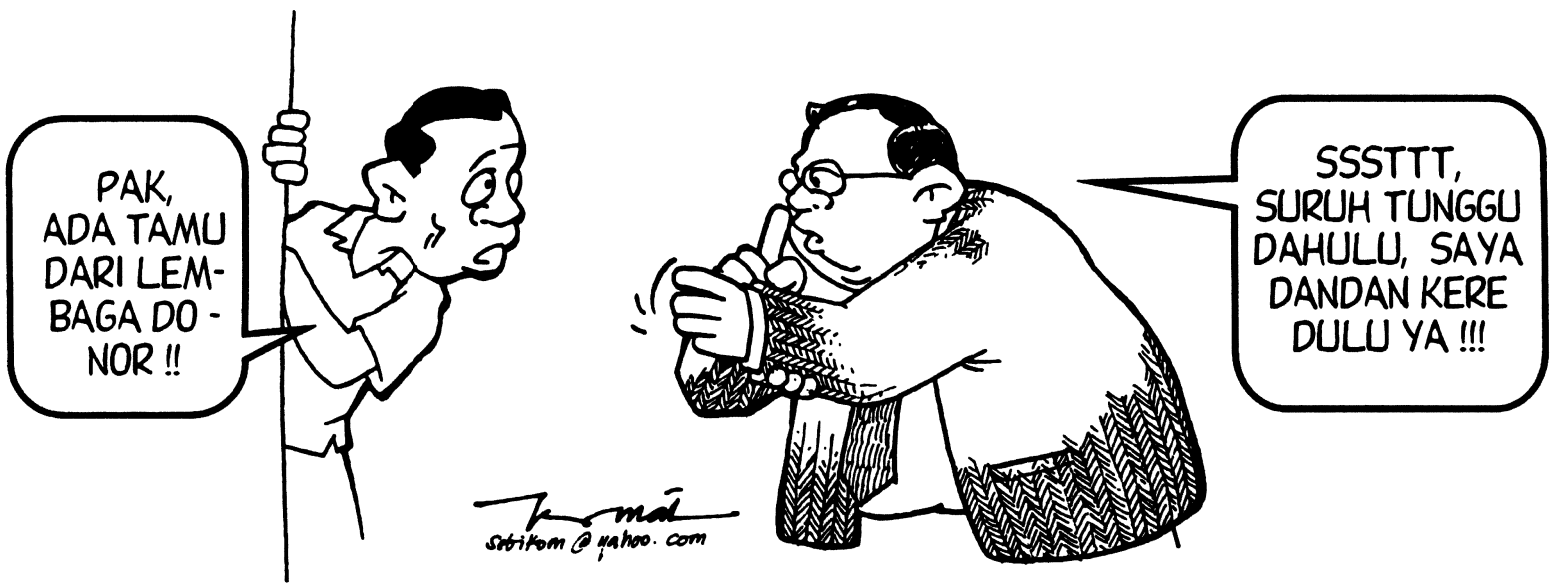
World Bank. 1999. *World Bank-Civil Society Relations. Fiscal 1999 Progress Report.* Washington, D.C.: World Bank.

World Bank. 1996. The *World Bank's Partnership with Nongovernmental of Development.* Washington, DC: World Bank.

World Bank. 1991. *World Development Report 1991: The Challenge of Development.* Oxford: Oxford University Press.

World Development. 1987. *Development Alternatives: The Challenge for NGOs. Special Issue of World Department* 15 (Supplement).

Zaidi, S. Akbar. 1999. 'NGO Failure and the Need to Bring Back the State.' *Journal of International Development* 11:259-71.


PAK, ADA TAMU DARI LEM-BAGA DO - NOR !!
SSSTTT, SURUH TUNGGU DAHULU, SAYA DANDAN KERE DULU YA !!!
sabikom@yahoo.com

Dari Bawah ke Atas: Masyarakat Sipil[1]

Thomas Carothers[2]

Enthusiasm for the concept of civil society grew most markedly after the fall of Communist regimes. Democracy-related aid projects now generally begin with efforts to strengthen civil society. Particularly America, in the Clinton and Bush periods, has been very concerned with developing democracy in developing countries. Concern over the threat of "people power" has inspired America to disburse large amounts of aid, which have flowed primarily directly to NGOs. USAID, for example, gives democracy funding, particularly to advocacy organizations. Recipient NGOs are chosen based on their potential to become a "transmission belt" between the people and the state. Aid is given either (1) in the form of trainings, development aid, and media for advocacy organizations or (2) in the form of providing necessary tools/equipment. Classic problems materialize, including funding-related dependence and illusions of not taking sides, which cannot truly be implemented by many advocacy NGOs. Considering the experience of several countries, it is clear that the concept of civil society has not yet had a serious impact on developing countries. Trainings and civic education can be seen as romanticism, when considered in light of social, economic, and cultural realities that cannot give rise to major change. Democracy-related aid programs will fail for this reason as long as the perspective on civil society remains a stereotype that ignores the real complicated system of power connections in many developing countries.

---

1 Tulisan ini diambil dan diterjemahkan dengan seizin penulisnya dari Bab 8 'From the Bottom Up: Civil Society', *Aiding Democracy Abroad; The Learning Curve* (Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), 1999). Informasi lebih lanjut lihat www.ceip.org. Redaksi menyampaikan terima kasih kepada Thomas Carothers atas izin yang diberikan. Tulisan diterjemahkan Kurniawan Adi S.

2 Thomas Carothers adalah Direktur CEIP, Washington D.C.

Sebelum 1990-an istilah 'masyarakat sipil' jarang digunakan oleh para pemberi bantuan dan pengambil kebijakan di Amerika Serikat (AS). Tetapi sejak era itu, istilah ini menjadi konsep yang tren hingga ia nyaris menjadi lagu wajib setiap dokumen atau diskusi mengenai demokratisasi. Program-program bantuan yang secara tegas ditujukan untuk 'memperkuat masyarakat sipil' tumbuh makin banyak, dan sekarang telah menjadi bagian dari portofolio bantuan demokrasi AS di kebanyakan negara. Dalam hal ini Amerika Serikat tidak sendirian. Banyak negara donor lain, juga organisasi pribadi pemberi bantuan, turut menganut konsep ini dan menyediakan program-program yang terkait dengannya. Di sisi lain, dalam masyarakat-masyarakat transisional, para pencari dana bantuan yang aktif mulai belajar memerankan diri dan ambisi mereka dalam kerangka pengertian masyarakat sipil.

A. 'Penemuan' Masyarakat Sipil

Pertumbuhan bantuan untuk masyarakat sipil sebagai salah satu unsur bantuan demokrasi AS memiliki beberapa penyebab. Pertama, dan mungkin terpenting, adalah bahwa gagasan masyarakat sipil itu sendiri yang makin diminati. Minat besar terhadap konsep yang mulia tetapi telah dilupakan banyak generasi ini dirangsang oleh gerakan pembangkangan di Eropa Timur pada 1980-an, terutama di Polandia dan Cekoslovakia. Kebangkitan gerakan ini, dan kemenangannya pada 1989, menambah daya tarik gagasan masyarakat sipil sebagai wilayah yang tidak memakai kekerasan tetapi kuat, tidak partisan tetapi pro-demokrasi, dan wilayah yang tumbuh dari esensi masyarakat tertentu tetapi juga universal. Pada dasawarsa yang sama, gagasan masyarakat sipil juga berkembang di Amerika Selatan. Di Chile, Brasilia, Argentina, dan di banyak tempat di kawasan tersebut masyarakat sipil—terutama sebagaimana tampak nyata dalam gerakan hak asasi manusia—dibayangkan sebagai suaka nilai-nilai demokrasi di hadapan otoritarianisme dan sebagai jalan keluar dari jalan buntu revolusi Marxis dan kediktatoran sayap kanan. Keruntuhan Tembok Berlin, kebangkitan demokrasi di Amerika Latin, dan ledakan transisi demokrasi di seluruh dunia membuat masyarakat sipil kembali penting. Akademisi dan komentator Barat merengkuh konsep ini, menghasilkan banjir konferensi, seminar, buku, dan artikel yang menjelajahi setiap aspeknya. Para praktisi pemberi bantuan mulai mengakrabkan diri dengannya, mencari cara untuk mempromosikan masyarakat sipil, dan memasukkannya dalam daftar isian aspek-aspek kunci demokrasi yang menjadi model program demokrasi mereka.

Pengalaman pemberian bantuan demokrasi di akhir 1980-an dan awal 1990-an membangkitkan kembali minat dalam pengembangan masyarakat sipil. Ketika mereka berusaha memperkuat transisi demokrasi, para penganjur (*promoter*) demokrasi AS memusatkan perhatian pada pemilihan umum. Setelah terjadi terobosan pemilihan umum di banyak negara, insting kedua mereka adalah mengarahkan reformasi ke lembaga-lembaga negara. Banyak usaha bantuan demokrasi yang diarahkan lembaga-lembaga negara terhalang oleh begitu besar persoalan yang dihadapi dan begitu sedikit minat melakukan reformasi di lembaga-lembaga negara yang disasar. Pengalaman ini membuat para penganjur demokrasi untuk berpaling pada bantuan masyarakat sipil baik sebagai cara untuk merangsang tekanan eksternal melakukan reformasi pada lembaga-lembaga negara yang stagnan juga sebagai target bantuan alternatif, yang lebih terjangkau, dan ramah dibanding lembaga-lembaga negara.

Ketika pemerintah Clinton berkuasa kecenderungan terhadap kerja masyarakat sipil ini menguat. Kelompok konservatif dalam pemerintahan Reagan dan Bush bersikap ramah terhadap konsep masyarakat sipil dalam konteks perjuangan anti-komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet. Mereka mereasa cemas dengan perkembangan masyarakat sipil di negara-negara berkembang, tempat gagasan 'kekuatan rakyat' sering dikaitkan dengan gerakan politik kiri. Sebaliknya, kelompok liberal Amerika merasa lebih nyaman dengan gagasan pembangunan politik secara bawah-atas (*bottom-up*) di semua bagian dunia. Kebanyakan orang yang masuk ke birokrasi kebijakan luar negeri di masa Clinton, terutama di USAID (United States Agency for International Development), itu sendiri datang dari komunitas NGO (organisasi non-pemerintah), dan mereka secara instingtif cenderung mendekat ke bantuan demokrasi terhadap NGO.

Faktor terakhir, remeh tetapi penting, juga turut menyumbang peningkatan bantuan masyarakat sipil. Pengurangan yang besar dalam keseluruhan nilai anggaran bantuan luar negeri di paruh pertama 1990-an menciptakan tekanan kuat terhadap para pejabat pemberi bantuan untuk melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit uang. Bantuan masyarakat sipil secara umum bernilai lebih kecil dibanding proyek-proyek yang melibatkan reformasi terhadap lembaga-lembaga negara yang besar. Dan pemberian dana terhadap aktivisme warga negara tampaknya memberi harapan yang lebih besar perihal cara murah mencapai hasil besar. Oleh karena itu program-program masyarakat sipil berkembang justru ketika anggaran menciut.



Menurut Hetifah Sj. Sumarto, *civil society* adalah ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi Ornop, institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dll. yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

Sebagai suatu konsep, masyarakat sipil melambangkan wilayah luas—ruang di dalam masyarakat antara individu dan keluarga di satu sisi dan negara atau pemerintah di sisi lain. Meskipun para sarjana berdebat perihal definisi pasti konsep ini, ada sejumlah besar konsensus perihal pandangan masyarakat sipil yang tidak mencakup bisnis swasta dan sektor politik formal (yang oleh beberapa kalangan disebut 'masyarakat politik') tetapi sebaliknya cukup inklusif. Gordon White mendefinisikannya sebagai dunia penghubung (*associational realm*) antara negara dan keluarga yang dihuni oleh organisasi-organisasi yang terpisah dari negara, memiliki otonomi berkaitan dengan negara, dan dibentuk secara sukarela oleh anggota-anggota masyarakat untuk melindungi atau memperluas kepentingan atau nilai-nilai mereka.[3]

Definisi ini mencakup berbagai kelompok, asosiasi, jaringan yang melintasi banyak dualitas, termasuk antara kelompok-kelompok kepentingan 'modern' seperti serikat dagang atau asosiasi profesional dan organisasi-organisasi 'tradisional' yang berdasar kekerabatan, etnisitas, budaya, atau agama; antara organisasi-organisasi formal dan jaringan-jaringan sosial informal berdasar ikatan patrimonial atau klientalistik; antara lembaga-lembaga yang memiliki peran politik khusus sebagai kelompok penekan atau advokasi dan lembaga dengan sebagian besar aktivitas di luar sistem politik, antara asosiasi-asosiasi legal-terbuka dan organisasi-organisasi rahasia atau ilegal seperti Freemason, Mafia, atau Triad; antara asosiasi-asosiasi yang menerima status quo politik atau asosiasi yang berusaha mentransformasikannya.[4]

Karena keluasan konsep ini, secara teoritis usaha-usaha untuk mendukung perkembangan masyarakat sipil di negara-negara transisional bisa mencapai banyak organisasi, asosiasi, dan kolektivitas.



Menurut Olena P. Maslyukivska, LSM adalah '*a non-profit making, voluntary, service-oriented/development oriented organization, either for the benefit members (a grassroots organization) or other members of the population (an agency)*'. (Sumber: Olena P. Maslyukivska, 1999)

---

3 Gordon White, 'Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground," *Democratization*, vol. 1, no. 3 (Musim Gugur 1994), hlm. 379. Banyak literatur mengenai masyarakat sipil. Termasuk dalam buku-buku terbitan terakhir adalah Ernest Gellner, *Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals* (New York: Allen Lane, 1994); John Hall, ed., *Civil Society: Theory, History, Comparison* (Cambridge, UK: Polity Press, 1995); Adam B. Seligman, *The Idea of Civil Society* (New York: Maxwell Macmillian International, 1992); John Keane, *Civil Society: Old Images, New Visions* (Stanford: Stanford University Press, 1998); John W. Harbeson, Donald Rothchild, dan Naomi Chazan, eds., *Civil Society and the State in Africa* (Boulder, Colo.: Lynne ienner, 1994). David Rieff melontarkan beberapa pertanyaan yang sangat bermanfaat mengenai konsep masyarakat sipil dalam 'Civil Society and the Future of the Nation-State,' *The Nation*, 22 Februari 1999, hlm. 11-16.

4 Gordon White, 'Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground,' hlm. 379.

Akan tetapi, dalam praktek tidak. Program-program masyarakat sipil AS yang dijalankan atas nama demokrasi hanya berfokus pada sebagian sempit dari sekian luas tenunan masyarakat sipil di negara-negara penerima bantuan, yaitu: organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerja mengadvokasi hal-hal yang oleh pemberi bantuan anggap sebagai persoalan-persoalan sosio-politik yang menyentuh kepentingan publik—termasuk pemantauan pemilu, pendidikan sipil, transparansi parlemen, hak-hak asasi manusia, anti-korupsi, lingkungan, hak-hak perempuan, dan hak-hak masyarakat adat.[5] Tiga wilayah lain yang diberi bantuan demokrasi AS—pendidikan sipil, asistensi media, dan bantuan untuk serikat buruh—juga melambangkan usaha untuk membangun masyarakat sipil, meskipun ketika para pemberi bantuan AS memakai istilah 'bantuan masyarakat sipil' mereka biasa merujuk hanya pada kerja mereka dengan NGO-NGO advokasi.

Bantuan masyarakat sipil AS yang merupakan portofolio pengembangan demokrasi AS secara umum tidak mencapai banyak bagian masyarakat sipil, yaitu: (1) organisasi-organisasi sosial atau sosio-ekonomi mapan yang besar seperti gereja atau serikat buruh (bantuan masyarakat sipil AS diberikan pada beberapa organisasi keagamaan, tetapi dengan program selain bantuan masyarakat sipil); (2) kelompok-kelompok sosial dan kultural seperti kelompok-kelompok olahraga, kelompok-kelompok alam, masyarakat musik, kelompok menjahit, dan kelompok semacamnya; (3) kelompok-kelompok informal berdasar identitas sosial seperti klan, asosiasi etnis, kelompok kesukuan, asosiasi petani penyewa lahan, dan lain-lain; dan (4) sebagian besar NGO di kebanyakan masyarakat transisional yang menyediakan layanan sosio-ekonomi atau berusaha memajukan pembangunan sosio-ekonomi, seperti relawan klinik kesehatan, koperasi pertanian, asosiasi petani penyewa lahan, organisasi pengembangan komunitas, masyarakat kesejahteraan anak, dan banyak yang lain.

---

5 Dalam sebuah pernyataan tipikal tentang bagaimana penganjur demokrasi di USAID memandang masyarakat sipil, Harry Blair mengenalkan sebuah studi tentang masyarakat sipil yang disponsori USAID dengan: "Di sini masyarakat sipil berarti organisasi-organisasi yang berada di ruang antara negara dan keluarga dimana keduanya menikmati otonomi dari negara dan berusaha memiliki pengaruh yang signifikan atas kebijakan publik" (peng-italic-an merupakan tambahan). Harry Blair, 'Civil Society and Building Democracy: Lessons from International Donor Experience,' dalam Amanda Bernard, Henry Helmrich, dan Percy B. Lehning, eds., *Civil Society and International Development* (Paris: North-South Centre of the Council of Europe and Development Centre of the OECD, 1998), hlm. 66. Lihat juga Gary Hansen, *Constituencies for Reform: Strategic Approaches for Donor-Supported Civic Advocacy Programs, USAID Program and Operations Assessment Report no. 12* (Washington, D.C.: USAID, Februari

Para pejabat pemberi bantuan memang mulai menyebut NGO-NGO advokasi yang mereka dukung melalui program masyarakat sipil sebagai 'organisasi masyarakat sipil' sehingga secara menyesatkan menyiratkan bahwa sedikit organisasi yang secara umum baru dan terspesialisasi ini merepresentasikan inti atau malah seluruh masyarakat sipil di negara-negara yang dimaksud. Para pejabat pemberi bantuan AS di negara-negara transisional biasa menggambarkan aktivitas beberapa NGO yang mereka danai dengan mengatakan secara gagah, "Masyarakat sipil telah memutuskan melakukan ini" atau "Masyarakat sipil tidak setuju dengan pemerintah dalam hal itu". Jadi, satu atau dua lusin orang yang kebetulan memiliki hubungan dekat dengan donor disebut sebagai penentu atau bertindak untuk seluruh masyarakat sipil di negara.

Tulisan ini terutama memeriksa bantuan untuk NGO-NGO advokasi, bentuk utama bantuan AS untuk masyarakat sipil, meskipun bahasan ini juga menganalisis ketiga tipe utama bantuan demokrasi yang dialirkan ke masyarakat sipil—bantuan pendidikan sipil, asistensi media, dan bantuan untuk serikat buruh. Fokus bab ini ada pada kesenjangan yang sering terjadi antara harapan pemberi bantuan dan realitas perkembangan masyarakat sipil di negara-negara transisional. Ini merupakan persoalan yang sangat penting dalam wilayah ini karena pemberi bantuan dan yang lain menggosok masyarakat sipil menjadi model yang bersinar-sinar, menyelimutinya dengan harapan yang luar biasa tinggi dalam peran yang telah ditetapkan, kunci menuju demokratisasi. Tulisan ini juga menekankan persoalan-persoalan yang sebelumnya telah digarisbawahi dalam pembahasan mengenai wilayah bantuan demokrasi yang lain, termasuk ekspor model kelembagaan tertentu, kesulitan mengubah struktur kepentingan dan hubungan kuasa yang mendasari, dan inkorporasi pelan-pelan pelajaran yang didapat dari pengalaman.

B. NGO-NGO Advokasi

Kecenderungan bantuan masyarakat sipil AS untuk berkonsentrasi pada NGO advokasi ketimbang sekian banyak unsur lain masyarakat sipil di negara-negara transisional didasarkan pada keyakinan bahwa NGO advokasi bisa menjalankan fungsi pro-demokrasi yang kritis. Mereka diandaikan bisa mengartikulasikan kepentingan warga negara, berfungsi sebagai 'sabuk transmisi' antara penduduk dan pemerintah. Pemberi bantuan berharap kelompok-kelompok ini akan meningkatkan partisipasi warga negara dalam urusan-urusan publik dan menjadikan diri mereka sebagai model metode-metode dan

nilai-nilai demokrasi. Mereka juga diandaikan dapat mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik—dengan memaksa negara menjadi akuntabel terhadap norma-norma dan standar-standar, mendesakkan gagasan-gagasan reformasi tertentu, dan memberikan saran dan bantuan teknis pada pemerintah mengenai perancangan dan pelaksanaan kebijakan tertentu. Pemberi bantuan AS secara umum melihat berbagai fungsi ini sebagai campuran hal-hal baik yang saling melengkapi dan seharusnya dikerjakan sejauh mungkin di kebanyakan situasi.

NGO-NGO advokasi juga memikat hati para donor karena karakter kerja dan budaya mereka. Mereka merangsang partisipasi publik dan menyalurkannya pada isu-isu yang hati-hati, seperti anti-korupsi atau hak asasi manusia, yang tak terkait langsung dengan ideologi tertentu. Anggapan mengenai karakter tidak memihak ini sangat penting—ini membuat para donor merasa bahwa mereka terlibat mendalam dalam kehidupan politik penerima dana tanpa terlibat dengan politik partai. Di antara ciri-ciri lain yang membuat NGO-NGO advokasi menarik bagi para donor AS dan Barat lain adalah mereka menekankan pengetahuan teknokratis ketimbang propaganda bombastis, mengusahakan dialog ketimbang konfrontasi, dan secara umum mempekerjakan para profesional muda, cemerlang, dan berorientasi Barat ketimbang kelompok partai dan serikat politik yang lebih tua dan mapan. Para pemberi dana sering membayangkan sektor NGO advokasi seperti wilayah tak terjamah, bebas dari ikatan kotor, dan ketegangan etnis, kelas, klan, dan politik yang membuat kehidupan politik demikian kacau dan sulit ditangani.

Terlebih lagi, kebanyakan tipe lain organisasi masyarakat sipil di banyak negara transisional sulit dibantu oleh para pemberi bantuan dari AS. Gereja atau organisasi keagamaan lain merupakan aktor masyarakat sipil yang sangat penting di banyak negara, tetapi dalam banyak kasus tidak satu pun dari mereka yang mudah pemerintah AS bantu karena kepekaan yang berkembang jika pemerintah AS mendanai organisasi keagamaan dan keengganan organisasi-organisasi tersebut menerima dana pemerintah AS. Asosiasi-asosiasi kesukuan dan kelompok klan pas dengan gambaran Washington sebagai organisasi yang penuh misteri, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan seringkali tidak mau menerima dukungan dari AS. Pendek kata, tidak hanya karena kelompok advokasilah yang memiliki kaitan jelas dengan proses perubahan politik saja, juga karena merekalah yang paling mudah donor bantu. Mereka cenderung lebih mau menerima dukungan luar negeri, memiliki struktur organisasi profesional yang



Menurut ADB, LSM-LSM adalah *'private organizations entirely or largely independent of government, not created for financial or material gain, that address concerns such as social and humanitarian issues of development, individual and community welfare and well being, disadvantage, poverty and environmental and natural resource protection, management and improvement'*. (Sumber: F. Kazi Jalal, 1999)

cocok dengan kebutuhan birokratis pendana, mengartikulasikan tujuan-tujuan mereka dalam pengertian yang bisa dipahami dan diterima pendana.

Meskipun gagasan tidak memihak merupakan gagasan acuan yang umum di belakang program masyarakat sipil AS, asistensi tersebut seringkali nyata memperlihatkan agenda liberal dalam negeri AS yang mendasar—dukungan terhadap hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, rakyat pribumi, dan seterusnya. Jarang sekali kita dapati bantuan untuk kelompok perempuan yang menentang aborsi, kelompok warga negara yang mendorong pelembagaan hukuman mati, atau asosiasi bisnis yang minta pengenduran hukum lingkungan. Pemberi dana berkata bahwa NGO-NGO advokasi yang mereka bantu mengejar kepentingan publik, tetapi kepentingan publik tersebut ditafsirkan sesuai dengan pandangan komunitas NGO AS, sumber promosi antusias masyarakat sipil di luar negeri.

Tekanan pada advokasi dalam bantuan masyarakat sipil AS berbeda dengan konsep 'modal sosial' yang dikembangkan oleh Robert Putnam dalam karyanya yang berpengaruh mengenai masyarakat sipil di Italia, meskipun para penganjur bantuan masyarakat sipil seringkali mengutip Putnam untuk mendukung pendekatan mereka. Menurut Putnam, modal sosial menunjuk pada 'aspek-aspek organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan cara memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi'.[6] Putnam tidak menekankan kelompok advokasi dalam penelitiannya mengenai berbagai jenis asosiasi dalam masyarakat sipil yang melahirkan modal sosial, tetapi asosiasi-asosiasi sipil yang melahirkan 'interaksi horisontal yang mendalam', seperti 'asosiasi ketetanggaan, kelompok koor, koperasi, klub olahraga, partai berbasis massa, dan yang semacamnya'.[7] Meskipun para donor AS tidak punya alasan untuk menolak kelompok koor, klub olahraga, atau bentuk asosiasi sipil lain yang tidak berarti banyak untuk kerja advokasi, tetapi mereka cenderung tidak memberikan dana bantuan pada kelompok-kelompok tersebut karena percaya bahwa kelompok itu merupakan jalur tidak langsung menuju penguatan demokrasi ketimbang organisasi-organisasi advokasi.

Ada dua bentuk bantuan dominan bagi NGO-NGO advokasi. Pertama adalah bantuan teknik—pelatihan, saran, dan informasi mengenai pengembangan organisasi dan manajemen, metode ad-

1996).

[6] Robert Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 167.

vokasi, pengumpulan dana, analisis isu, dan hubungan dengan media. Pelatihan advokasi telah menjadi subkultur kecil dalam dunia bantuan, didukung barisan pemuda Amerika, biasanya berpengalaman melakukan aktivisme sipil di Amerika Serikat, pergi ke empat penjuru dunia mengajari orang-orang asing membingkai isu politik, merencanakan kampanye advokasi, menulis proposal hibah, menciptakan kampanye publisitas, mengatur analisis kebijakan yang penting, menyusun draf peraturan, dan menyodorkan kasus yang persuasif ke pejabat pemerintah. Mereka tidak hanya memberikan seperangkat alat, tetapi juga *sense of mission* yang lebih luas perihal advokasi kepentingan publik.

Bentuk kedua dukungan bagi NGO advokasi adalah pendanaan langsung meliputi penyediaan peralatan, terutama komputer, mesin faksimili, dan fotokopi. USAID menyediakan kedua bentuk bantuan meskipun ia menekankan bantuan pelatihan dan teknik ketimbang hibah langsung. Kelompok-kelompok swasta yang bekerja didanai oleh pemerintah AS, NED (National Endowment for Democracy), Asia Foundation, Eurasia Foundation, lebih menekankan pemberian hibah dana.

Donor AS juga berusaha mencari metode bantuan yang lain. Kadang-kadang mereka berusaha menggalang koalisi NGO di negara-negara penerima bantuan untuk menghadapi soal tertentu dengan barisan yang lebih luas. Sebagai contoh, di Rumania pada pertengahan 1990-an para penasihat AS untuk beberapa kelompok hak asasi manusia dan sipil mendorong pembentukan koalisi untuk mengadvokasi peningkatan transparansi parlemen. Di Nepal pada akhir 1990-an perwakilan NDI (National Democratic Institute) berusaha membangun koalisi NGO untuk melakukan lobi anti-korupsi. Mereka juga berusaha memperkuat kerangka hukum yang menjadi landasan kerja NGO. Banyak negara memulai transisi mereka dengan kerangka hukum yang membatasi asosiasi independen, warisan masa lalu yang tidak demokratis dan dirancang untuk mencegah pendirian NGO independen. Seluruh bantuan masyarakat sipil yang masih baru ini tumbuh di sekitar persoalan tersebut, menyusun model undang-undang NGO dan sejumlah besar pembagian informasi perihal subyek tersebut di banyak negara dan kawasan.



Tipologi LSM berdasar sifat kegiatannya: 1) *relief and welfare agencies*, 2) *technical innovation organizations*, 3) *public service contractors*, 4) *popular development organizations*, 5) *grassroot development organizations*, dan 6) *advocacy groups and networks*. (Sumber: John Clark, 1995)

Pembangunan versus Kelompok Demokrasi

'Penemuan' NGO oleh para penganjur demokrasi yang terjadi baru-baru ini sama sekali bukan perjumpaan pertama donor dengan NGO. Ketika terjadi kebangkitan pendekatan kebutuhan dasar manusia untuk masalah bantuan pembangunan pada 1970-an, para donor

menekankan konsep seperti pembangunan yang partisipatif, pembangunan komunitas, dan pembangunan lokal, dan menyalurkan dana yang semakin banyak melalui NGO-NGO internasional dan lokal. Tekanan donor yang makin kuat terhadap isu-isu tersebut berlanjut pada 1980-an dan 1990-an, mendorong pertumbuhan NGO layanan dan advokasi yang lebih luas di negara-negara berkembang. Hal ini juga merangsang sejumlah analisis dan tulisan perihal NGO dan perannya dalam pembangunan dan dalam bantuan pembangunan.[8] Donor dan NGO internasional yang bekerja dengan NGO lokal untuk proyek-proyek pembangunan pada mulanya tidak mendorong NGO lokal untuk mengambil peran advokasi atau demokrasi. Pandangan yang lebih banyak berlaku adalah bahwa masyarakat yang disfungsional, biasanya berpemerintahan otoritarian, sering lebih baik mengambil jalan memutari pemerintah dan mengusahakan metode swa-bantu (*self-help*). Dalam sisi sosial dan ekonomi pembangunan, bekerja dengan NGO seringkali berarti menghindari pemerintah ketimbang melibatkannya.

Ketika para penganjur demokrasi dari AS pada awal 1990-an mulai memusatkan perhatian pada pengembangan masyarakat sipil melalui NGO-NGO yang berorientasi ke politik, mereka maju sendiri tanpa dukungan sekian banyak dunia bantuan dan pengembangan NGO yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Jika seseorang menilik misi USAID di pertengahan 1990-an dan menerima pembekalan pendek dari *democracy officer* perihal kerja masyarakat sipil USAID di negara tersebut—biasa melibatkan sekelompok kecil NGO advokasi dan organisasi pendidikan sipil—ia akan cenderung tidak mengaitkan proyek tersebut dengan proyek-proyek NGO lain yang dilakukan oleh program bantuan lain, baik yang terkait dengan kesehatan, pertanian, dan kependudukan sebagai contoh. Kedua dunia NGO—NGO demokrasi dan NGO pembangunan—diperlakukan sebagai dua dunia yang terpisah. Tetapi, seperti dalam pembahasan di bawah perihal kecenderungan mutakhir di kalangan penganjur masyarakat sipil AS untuk 'melokal', kedua dunia bantuan NGO yang berbeda ini pelan-pelan mulai beririsan.

7 Ibid.

8 Termasuk dalam sedikit contoh atas tulisan yang mengagumkan mengenai NGO-NGO dan pembangunan adalah David Hulme dan Michael Edwards, *NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort?* (New York: St. Martin's Press, 1997); John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations* (West Hartford, Conn.: Kumarian, 1990); dan Roger Riddell dan Mark Robinson, *NGOs and Rural Poverty Alleviation* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

Ledakan NGO

Beberapa negara transisional, terutama di Amerika Latin, telah bertahun-tahun memiliki sektor NGO yang aktif bahkan sebelum transisi memasuki pemerintahan demokrasi. Baik di Amerika Selatan maupun Tengah, kelompok-kelompok yang dikenal sebagai organisasi rakyat (*popular organization*)—organisasi petani, asosiasi komunitas, serikat buruh, organisasi guru—menggerakkan perlawanan terhadap pemerintah otokratis. Perkembangan demokrasi di kawasan ini membawa kelompok-kelompok ini beradaptasi dengan konteks politik yang baru, mencoba bergeser dari taktik *denuncia* (mengutuk) ke taktik *propuesta* (tawaran atau proposal). Ketika para penganjur demokrasi AS berubah arah ke bantuan masyarakat sipil pada 1990-an, mereka memasuki sektor NGO di beberapa negara penerima bantuan yang telah dipadati banyak kelompok dan memiliki sejarah politik yang rumit.

Meski demikian, di banyak negara transisional—di Eropa Timur, mantan Uni Soviet, Afrika sub-Sahara, dan Asia— NGO advokasi jarang didapati pada periode pemerintahan non-demokrasi. Di negara-negara ini bantuan dari donor Amerika Serikat dan negara Barat lain pada 1990-an telah memicu ledakan NGO. Meskipun negara-negara tersebut memiliki perbedaan sosial dan ekonomi yang besar, pola dasar ledakan NGO ini sangatlah serupa. Pada masa awal keterbukaan politik negara dan pemilu pertama, meledaklah pertumbuhan NGO. Di ibu kota, lusinan kelompok kecil tetapi intens dan aktif bermunculan, berfokus pada persoalan pemantauan pemilu, advokasi hak asasi manusia, dan pendidikan sipil. Segera setelah itu ratusan, bahkan ribuan, kelompok muncul, rentang kepedulian mereka meluas hingga mencakup banyak soal sosial dan ekonomi juga politik.

Hari ini, kira-kira sepuluh tahun setelah transisi awal, pelipatan jumlah NGO telah mencapai garis pertumbuhan mendatar. Di tengah inti dunia NGO di banyak negara terdapat lingkaran-lingkaran kecil yang relatif tumbuh ke dalam, lusinan kelompok advokasi berfokus pada hak asasi manusia, pendidikan sipil, soal perempuan, lingkungan, pengawasan media, dan tema demokrasi lain. Mereka hampir didanai donor secara penuh. Para pemimpin kelompok tersebut adalah orang-orang yang muda dan berorientasi Barat yang berbicara dalam bahasa Inggris dan juga lancar membicarakan istilah-istilah baru masyarakat sipil di dunia internasional. Para pemimpin ini memiliki ikatan dengan partai politik, tetapi bukan bagian dari kelas tradisional para pemimpin partai politik dan memiliki ikatan lemah dengan serikat buruh, asosiasi profesional nasional, gereja, dan or-



Jumlah LSM di mancanegara sejak 1987 mengalami *booming*. Di Perancis misalnya, terdapat sekitar 54.000, Filipina mencatat 27.000, sementara Bangladesh mempunyai lebih dari 10.000 LSM. Di Indonesia, jumlahnya ditaksir sekitar 4.000-7.000an, belum termasuk yang 'timbul-tenggelam' dan yang 'dadakan' karena ada proyek. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

ganisasi non-pemerintah lain yang lebih tradisional. Di kalangan mereka terdapat beberapa bintang yang menjadi tokoh terkenal di panggung nasional dan dicintai para donor Barat. Lingkungan NGO di luar lingkaran intinya merupakan kelompok-kelompok kecil yang terlibat dalam advokasi sipil dan pendidikan sipil di luar ibu kota, dengan akses dana luar negeri yang lebih kecil, struktur organisasi lebih lemah, dan lebih banyak memiliki agenda lokal dibanding nasional. Dengan dukungan donor, NGO-NGO yang berprivilese dari ibukota ini melakukan pelatihan dan asistensi lain untuk menolong lingkaran kedua meningkatkan ketrampilan advokasi dan struktur organisasinya.

Di kebanyakan negara transisional, ledakan NGO memiliki sejumlah efek mengembangkan demokrasi. Sebagai contoh, organisasi pemantau pemilu membantu mengurangi penipuan dan menyediakan informasi terpercaya perihal berbagai cara pelaksanaan pemilu. Kelompok hak asasi manusia terus menekan pemerintah untuk menghargai hak-hak politik dan sipil serta mendorong jaminan perlindungan hak asasi manusia dimasukkan dalam undang-undang baru yang sedang dirancang. Organisasi pengawas media dan kelompok anti-korupsi, transparansi pemerintahan, dan reformasi hukum telah menekan beberapa pejabat untuk memperhatikan soal-soal tersebut dan meningkatkan kesadaran setidaknya beberapa warga negara.



Kegiatan lobi internasional LSM, sangat terasa dalam berbagai konferensi tingkat tinggi (KTT) dunia seperti tentang perempuan di Beijing (1996), atau tentang masalah sosial di Kopenhagen (1995), di Kairo (1994), lingkungan hidup di Rio de Janeiro (1992) dan tentang HAM di Wina (1993). Selain terlibat dalam konferensi yang menghadirkan para menteri dan diplomat mancanegara tersebut, aktivis LSM biasanya menyelenggarakan pula Forum-LSM sebagai *counter conference* dengan mengajukan berbagai argumentasi tandingan. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

Di luar dan di atas capaian mereka dalam beberapa wilayah persoalan kerja, NGO advokasi biasa menyumbang demokratisasi dalam cara yang lebih luas. Mereka merupakan saluran beberapa pemuda berbakat yang ingin terlibat dalam urusan publik tetapi diasingkan oleh partai politik yang didominasi faksi yang kolot dan debat partisan yang bertele-tele. Kerja NGO memberikan kepemimpinan dan pelatihan manajemen bagi banyak pemuda—ketrampilan yang bisa dipakai untuk wilayah lain. NGO-NGO lokal telah terkait dengan jaringan NGO internasional—seperti jaringan NGO hak asasi manusia, perempuan, dan lingkungan—hingga membawa ide-ide dan sumber-sumber baru ke dalam negeri. Mereka telah membuka titik masuk baru bagi para donor, di samping kontak-kontak dengan lembaga negara yang sudah lebih akrab sekaligus rutin.

NGO-NGO perempuan sering menjadi sektor dunia NGO advokasi yang paling mengesankan di negara-negara transisional. Mereka berlipat-ganda secara cepat di berbagai kawasan. Komitmen para pemimpin dan anggotanya seringkali kuat, terutama dibandingkan dengan orang-orang di NGO advokasi yang hanya mempelajari kali-

mat-kalimat mereka dari buku petunjuk donor. NGO perempuan seringkali lebih mampu menjangkau konstituen yang lebih luas dibandingkan kebanyakan NGO lain dan menjembatani kesenjangan kota-desa yang umum terjadi di dunia NGO. Mereka mengajukan persoalan yang sangat dekat dengan kepentingan anggotanya, dan agenda mereka secara alamiah menggabungkan soal ekonomi dengan politik dan sosial. Sekarang masih sulit kita perkirakan hasil perkembangan luas peningkatan kesadaran yang masih muda ini dalam masyarakat yang baru menjalani demokratisasi di seluruh dunia. Tetapi jelas bahwa keterbukaan demokrasi, tidak peduli seberapa parsial atau problematik, telah membuka pintu perubahan bagi peran perempuan yang akan memiliki banyak efek positif dalam jangka panjang.

Korupsi, Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Persoalan-persoalan Lain

Meskipun merupakan tanda positif, peningkatan jumlah NGO advokasi yang pesat di negara-negara transisional memiliki banyak keterbatasan sebagai suatu bentuk pengembangan masyarakat sipil. Pertama, banjir dana Barat di banyak negara untuk organisasi-organisasi tersebut telah menghasilkan terlalu banyak jenis pertumbuhan atau jenis yang salah. Uang memikat banyak oportunis dan 'hiu' selain para aktivis sejati. Bagi beberapa orang kerja NGO telah menjadi gaya hidup, bukan sebagai perjuangan. Dan di masyarakat-masyarakat transisional ketika situasi ekonomi sungguh suram, seringkali kerja NGO menjadi pilihan gaya hidup yang lebih nyaman ketimbang pekerjaan lain. Korupsi dalam NGO sering terjadi, kenyataan yang para donor AS harus hadapi langsung dengan para NGO yang sering mereka singgung secara privat.[9] Beberapa NGO menggelembungkan laporan pengeluaran, memasukkan pegawai fiktif dalam buku, mengambil banyak gaji dari banyak pendana, dan secara umum mengambil keuntungan dari lingkungan dana yang seringkali terlalu kaya. Korupsi semacam ini selain buruk untuk dirinya sendiri, juga sering melahirkan kebencian pemerintah, partai politik, dan publik terhadap NGO. Para pekerja NGO sering dilihat oleh orang lain di negeri tersebut sebagai sektor yang congkak, digaji terlalu besar, dan egois. Sebagai contoh, di Nepal praktek NGO yang buruk terjadi kare-

9 Riset kecil yang sistematis mengenai korupsi di kalangan NGO negara-negara berkembang dan transisi telah dilakukan. Saya mengambil kesimpulan ini dari perbincangan dengan staf-staf lembaga donor dan para aktivis NGO di negara-negara tempat studi kasus berlangsung dan negara-negara tempat saya pernah bekerja.

na ada terlalu banyak dana sedang terlalu sedikit organisasi yang layak di ibukota, sehingga orang-orang Nepal membenci NGO.

Donor-donor Eropa, terutama negara-negara Skandinavia, yang terilhami gagasan solidaritas Utara-Selatan seringkali hanya menuntut akuntabilitas yang rendah untuk uang yang mereka berikan pada NGO-NGO. Kadang-kadang, ketika mereka melihat dengan lebih cermat bagaimana uang tersebut dibelanjakan, gambaran yang mereka dapat seringkali tidak bagus. Perwakilan dana Denmark di Nepal, sebagai contoh, mengatakan kepada saya bahwa audit bagi suatu hibah yang besar (kira-kira 1 juta dolar) pada NGO Nepal menemukan bahwa dana itu disalahgunakan secara parah, terutama masuk ke kantong para pemimpin NGO. Ia menyatakan keterkejutan bahwa orang-orang Nepal itu demikian rakus memakan hibah yang diterima organisasinya. Tetapi ketika saya tanya perihal hasil insiden ini, ia menjawab bahwa organisasinya telah memberikan hibah baru kepada NGO yang sama tetapi kali ini mereka akan mengawasi dengan lebih teliti.



Boom kelahiran LSM terbesar terjadi usai KTT Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro, 1992. Untuk pertama kalinya, sekitar 2.000 LSM peserta konferensi. Pada periode Post-Rio, PBB melonggarkan keikutsertakan LSM dalam berbagai KTT berikutnya serta sidang-sidang komite di kantor pusatnya. Sejak itu pula, berbagai pengaduan, ancaman, permohonan, protes, pernyataan, dan manifesto mewarnai seliweran aktivis LSM sebagai pelobi kepentingan masyarakat akar-rumput dan kelanggengan hidup bumi manusia. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

Kelompok-kelompok AS secara keseluruhan lebih teliti mengawasi uang yang diberikan kepada kelompok-kelompok lokal dibandingkan kebanyakan donor Eropa. Hal ini baik karena praktek audit yang lebih ketat maupun karena takut skandal bantuan tersebut akan menambah ketidakpercayaan kongres, sehingga menjadi senjata kongres untuk lebih banyak memotong bantuan luar negeri. Meski demikian, masalah tetap muncul. Sebagai contoh, organisasi Amerika didanai USAID yang bekerja untuk proyek pemberdayaan perempuan di Nepal menyewa delapan NGO Nepal untuk menjalankan beberapa pelatihan dan memaksa melakukan audit atas kedelapan kelompok tersebut setelahnya. Pada Setiap kelompok tersebut didapati menyalahgunakan dana, beberapa secara serius. Dalam kasus ini, seluruh kelompok yang terlibat dicoret dari proyek di masa depan.

Persoalan kedua adalah partisipasi. Pemberi dana sering berpikir bahwa NGO advokasi adalah kelompok yang mendorong partisipasi warga negara dalam skala besar, tetapi pada prakteknya ini tidak terjadi. Kebanyakan NGO advokasi yang baru terbentuk tersebut memiliki basis di ibukota negara transisional dengan memiliki basis dukungan rakyat yang lemah. Mereka adalah 'masyarakat sipil', tetapi sebenarnya mereka merupakan asosiasi elite yang dibentuk oleh sekelompok kecil orang yang memiliki pengetahuan keahlian. Advokasi mereka sering bertumpu pada persuasi berbasis keahlian yang ditujukan pada pejabat pemerintah, ketimbang mobilisasi atau pelibatan publik. Namun ada juga perkecualian, yaitu seperti

kelompok lingkungan yang melakukan kampanye publik yang besar, tetapi kelompok pelaku pendidikan sipil pun seringkali mencoba mendidik publik tanpa melibatkannya dalam kerja organisasi. Oleh karena itu, gagasan bahwa dengan mendukung pertumbuhan NGO advokasi maka para donor mendorong partisipasi yang lebih besar di negara transisional merupakan sesat pikir para donor.

Satu contoh tentang kepura-puraan 'kerja yang disebut partisipasi' yang dilakukan kelompok masyarakat sipil yang didanai AS adalah kasus Foundation for Democratic Progress di Zambia. FODEP dibentuk pada awal 1990-an sebagai usaha pemantauan pemilu dalam negeri yang didukung AS. Ia menjadi unsur penting strategi USAID untuk membangun masyarakat sipil di Zambia pada 1990-an, menerima ratusan ribu dolar dalam bentuk pelatihan dan dukungan dana langsung. Meski telah mendapat bantuan dana, manajerial, dan administratif yang intensif dari Amerika Serikat, FODEP gagal menjadi kelompok pendidikan sipil aktivis dan berorientasi-komunitas yang sebagaimana para pendana AS pikir Zambia butuhkan. Evaluasi USAID untuk yayasan tersebut pada 1997 menyimpulkan bahwa tidak ada bukti bahwa FODEP 'secara sungguh-sungguh menyediakan pendidikan sipil di level komunitas'.[10] Evaluasi tersebut secara kritis menganalisis metode dasar FODEP:

> Titik lemah lain dalam kerja FODEP adalah ia tidak berhasil menjalankan lokakarya bagi para 'relawan' tanpa memberikan uang duduk, *per diem*, dan uang transportasi. Total yang dibayarkan kira-kira 8 dolar per hari tanpa transportasi. Dalam banyak kasus, peserta lokakarya mendapat lebih banyak uang dari acara FODEP dibandingkan yang mereka dapat dari kerja sehari. Staf FODEP tidak senang dengan metode membayar seperti ini, tetapi menyatakan bahwa ini merupakan pola umum yang dilakukan kebanyakan organisasi yang disebut 'advokasi' di Zambia. USAID menyediakan dana untuk pembayaran ini. Jika USAID memutuskan untuk tidak mendanai lokakarya, FODEP sebagai organisasi akan hancur. Patronase dalam bentuk uang duduk dan *per diem* menciptakan keanggotaan aktif. Pada intinya, agen perubahan demokrasi haruslah bekerja dalam budaya politik patrimonial yang sama dengan para politisi: beri hadiah untuk dukungan yang diberikan klienmu.[11]

---

[10] USAID, *Zambia Democratic Governance Project: Final Evaluation* (Wahington, D.C.: USAID, 14 Maret 1997), hlm. 11.

[11] Ibid.

Persoalan lain perihal bantuan masyarakat sipil AS adalah soal keberlanjutan, yang akhir-akhir ini banyak dibahas di dunia donor dan penerima bantuan. Banyak NGO yang didanai Amerika Serikat dan donor lain atas nama penguatan masyarakat sipil, nyaris tergantung penuh pada dukungan dana luar negeri dan akan jatuh jika dana itu hilang. Dalam 'lomba' memberi bantuan masyarakat sipil ketika terjadi keterbukaan demokrasi, para pejabat AS cenderung tidak memikirkan keberlanjutan. Mereka lebih berpikir soal bagaimana bantuan itu sampai dan melahirkan kelompok, bukan mengkhawatirkan bagaimana kelompok tersebut akan mendukung dirinya sendiri dalam jangka waktu panjang. Ketika lahan telah matang, dengan NGO yang berlipat-ganda dan dana bantuan yang mulai surut atau kering, soal keberlanjutan mulai mendesak, namun bagi beberapa kelompok sudah sampai pada tahap terlambat.

Sebagai contoh, di Zambia barulah pada enam bulan terakhir dari masa komitmen bantuan lima tahunnya, USAID mensponsori lokakarya metode swadana untuk staf FODEP. Para pemimpin FODEP yang terkejut tidak mau percaya bahwa USAID akan mengakhiri bantuan karena mereka menarik kesimpulan dari referensi yang diberikan perwakilan USAID perihal 'rekanan' dengan FODEP bahwa dana mereka aman. Setelah USAID menghentikan bantuan, FODEP menciut tajam. Ia berusaha memperoleh dana dari donor-donor Skandinavia, tetapi tetap belum berhasil menggalang sumber dana dalam negeri yang signifikan. Para pejabat FODEP sekarang memendam kebencian mendalam terhadap USAID; meski telah diberi bantuan besar selama lima tahun, para pemimpin FODEP merasa diperlakukan dengan buruk oleh Amerika Serikat.

Reaksi para pejabat pemberi bantuan AS terhadap persoalan keberlanjutan NGO berbeda-beda. Beberapa percaya bahwa NGO-NGO berorientasi demokrasi merupakan bagian dari transisi politik awal dan memang tidak 'dimaksudkan' untuk hidup lebih lama. Atau dengan datar mereka mengatakan bahwa keberlanjutan bukan urusan mereka, silakan NGO-NGO itu mengurus diri mereka sendiri setelah donor pergi. Beberapa pemberi dana bicara banyak tentang cara membantu NGO lokal 'mencari beragam (*diversify*) sumber dana', tetapi maksud mereka sebenarnya adalah mengalihkan beban ke donor lain. Persoalan keberlanjutan jangka panjang yang mendasar ini hanya ditunda saja.

Beberapa pejabat pemberi bantuan, juga spesialis NGO internasional dan lokal, telah mencari cara-cara penggalangan dana dalam negeri untuk NGO-NGO di negara-negara transisional. Kesulitan yang dihadapi secara umum sangatlah besar: iuran keanggotaan atau



Negara-negara peminjam terbesar pada umumnya adalah negara-negara yang relatif lebih kaya, dan keuntungan meminjam ini umumnya menumpuk pada warganya yang lebih kaya. Kemudian, apabila sistem keuangan internasional sudah mendekati ambruk, sebagian besar akibat krisis ini dialihkan kepada si miskin. Kebanyakan negara berkembang menderita krisis keuangan dan ekonomi. Sementara puluhan juta rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinan, kebijakan penyesuaian struktural mencoba mengatasi krisis ini, dengan mengubah sumberdaya yang semakin langka menjadi sumber penghasil barang untuk dijual kepada para konsumen asing. (Sumber: David C. Korten, 2001)

sumbangan pribadi sulit dikumpulkan atau dipancing; seringkali tidak ada sponsor perusahaan karena kurang insentif, tradisi, atau memang uang itu sendiri; menarik bayaran untuk layanan atau terbitan biasanya hanya menghasilkan dana sedikit. Memang ada kisah sukses dan 'penggalangan sumber dana lokal' demikian sebutannya, kadang-kadang memang dapat menggantikan sebagian dana dari donor luar negeri.[12] Akan tetapi model NGO yang didorong oleh bantuan masyarakat sipil AS mungkin memang tidak pas digunakan sebagai pendekatan umum untuk membangun masyarakat sipil di negara-negara transisional. Model NGO profesional yang lahir dari masyarakat kaya, memiliki yayasan-yayasan pribadi pemberi hibah, kelas menengah yang besar dengan pendapatan relatif lebih luang, dan dunia usaha yang memiliki tradisi filantropi. Model ini tidak akan cocok untuk masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki syarat-syarat di atas.

Ilusi Ketidakberpihakan

Soal ketidakberpihakan di kalangan NGO juga merupakan persoalan sulit. Di negara-negara otoritarian dan semiotoritarian, atau negara yang tidak disukai pemerintah Washington, dukungan untuk NGO advokasi sering diberikan dengan harapan bahwa kelompok-kelompok tersebut akan menjadi oposisi. Pendekatan oposisi untuk pemberian bantuan bagi masyarakat sipil ini akan saya bahas di bagian terpisah nanti. Di negara-negara yang mengalami kemajuan transisi menuju demokrasi dan mulai menumbuhkan politik multi-partai yang sejati, bantuan masyarakat sipil AS sering menekankan nilai ketidakberpihakan. NGO-NGO advokasi diharapkan 'terlibat' secara politik, dalam pengertian menghadapi persoalan-persoalan melibatkan kebijakan pemerintah, tetapi 'tidak berpihak'—dengan kata lain tidak berafiliasi atau bekerja demi kubu politik tertentu. Pemberi bantuan kadang-kadang memang menyebut bahwa salah satu keuntungan yang diberikan oleh bantuan masyarakat sipil adalah bahwa NGO dapat menjadi tempat pelatihan bagi para politisi baru, tetapi dengan harapan bahwa NGO itu sendiri tidak menjadi kendaraan bagi agenda-agenda politik partai atau politisi tertentu.

---

[12] Mengenai isu keberlanjutan (sustainability) dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan NGO-NGO, lihat Ann Hudock, "Sustaining NGOs in Resource-Dependent Environments," *Journal of International Development*, vol. 7, no. 4 (1995), hlm. 653-67; J. Bennett dan S. Gibbs, *NGO Funding Strategies: An Introduction for Southern and Eastern NGOs* (Oxford: INTRAC, 1996); dan S. Vefter, "Resource Mobilization: The Business of *Grassroots Development*," Grassroots Development, vol. 19, no. 2 (1995), hlm. 2-11.

Tekanan dari para penganjur demokrasi AS terhadap nilai ketidakberpihakan mencerminkan pandangan mereka bahwa persoalan advokasi yang disukai oleh program-program masyarakat sipil AS, seperti hak asasi manusia, anti-korupsi, dan akuntabilitas pemerintah, adalah nilai-nilai universal dan bukan soal-soal partisan. Tampaknya hal ini juga menumbuhkan konsep ketidakberpihakan mitis (*mythic*) yang mereka bawa dari dunia NGO di Amerika Serikat: gagasan bahwa ada garis batas yang tegas antara advokasi yang tak berpihak dan politik partai. Pemberi bantuan dari AS akan menggelengkan kepala ketika NGO-NGO di negara-negara transisional ternyata terkait dengan partai politik atau ketika pemimpin NGO yang bersangkutan ternyata memiliki apa yang donor sebut dengan merendahkan sebagai 'agenda pribadi'—seolah-olah kelompok-kelompok AS yang bekerja mengembangkan hak-hak sipil, lingkungan, atau hak perempuan itu tidak pernah melibatkan diri dengan politik partai, mendukung calon, terang-terangan berpihak, atau menjadi kendaraan politik para pemimpinnya.

Ketidakberpihakan memang sulit dicapai oleh NGO advokasi dan tipe kelompok masyarakat sipil lain di negara transisional. Di banyak negara yang memakai atau kembali memakai sistem politik multi-partai, para elite sangatlah dipolitisir (meski masyarakat awam dengan cepat menjadi apatis dengan kehidupan politik). Partai-partai bersaing dengan keji untuk mengunggulkan diri, merebut sumber-sumber daya, meningkatkan pengaruh, dan menarik para elite lokal ke barisan mereka. Dalam situasi semacam itu, ruang untuk menjadi netral terlalu sempit. Dan ketika partai-partai politik mengelompokkan diri atas dasar loyalitas pribadi, jaringan klan, dan pembagian etnis, maka netralitas adalah ilusi. Sebagai contoh di Nepal, politik pasca-transisi ditandai—atau orang sebut dijerat—politisasi yang mengkhawatirkan, tiga partai terus-menerus berkelahi memperebutkan segala hal, tidak peduli seberapa kecil pun. Seluruh NGO di Nepal, tidak hanya kelompok advokasi tetapi juga NGO penyedia layanan (seperti NGO yang menjalankan klinik kesehatan atau program kesejahteraan anak-anak), mendapat tekanan luar biasa untuk mengikatkan diri dengan partai. Beberapa dari mereka berhasil menjaga independensi, tetapi kebanyakan gagal. Di Guatemala pada 1980-an, sektor NGO advokasi berkembang sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kediktatoran militer, dan terlibat dalam pertikaian hebat antara Kiri dan Kanan. Ketika perang sipil berakhir dan politik multi-partai mulai berkembang, sektor NGO tidak lagi sangat politis, tetapi ini merupakan proses yang berjalan pelan-pelan, mengingat warisan pertikaian ideologi yang demikian kuat.



Pada usianya yang ke-55, PBB mempunyai sekitar 190 negara anggota. Milyaran jiwa, langsung atau tidak, merasakan pengaruhnya lewat Dewan Keamanan, tentara perdamaiannya, bantuan bagi anak (UNICEF), bagi pengungsi (UNHCR), bantuan kesehatan (WHO) atau pangan (FAO). Tahun 1974, baru sekitar 1,5 persen bantuan pembangunan tersalurkan ke LSM Selatan. Jelang tahun 2000, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 40 persen. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

Visi Tocquevillean yang Baik (*Benevolent Tocquevillean Vision*)

Kita bisa mengajukan pertanyaan serius terhadap visi Tocquevillean yang baik yang mendasari bantuan AS untuk masyarakat sipil: masyarakat dengan warga negara biasa terlibat dalam segala jenis partisipasi publik yang saling beririsan, dengan ribuan kelompok sipil yang sungguh-sungguh dan rajin bekerja, tegas tetapi konstruktif menekan pemerintah yang enggan untuk pelan-pelan bersikap peka terhadap kebutuhan warga dan membuang kebiasaannya untuk bermalas-malasan dan korupsi. Pertama, jelas bahwa ini visi Amerika: ia bukan visi demokrasi-demokrasi lain yang telah mapan. Struktur dan peran masyarakat sipil di beberapa sistem demokrasi negara kontinental, terutama Prancis, sangat berbeda dengan cita-cita Tocquevillean karena pemerintah memberi dana yang lebih besar untuk NGO dan tidak banyak NGO independen yang melakukan advokasi seperti yang para penganjur masyarakat sipil Amerika pikir. Di negara-negara berkembang, orang tidak mudah percaya bahwa menciptakan partisipasi sipil sedemikian tinggi dan ribuan kelompok advokasi yang aktif dapat dilakukan di tengah masyarakat yang penuh dengan orang miskin dan berbagai kekuatan sosio-politik yang berusaha terus meminggirkan mereka. Kita juga sulit membayangkan pemerintahan yang sudah sangat rusak di banyak negara berkembang, terkhusus di Afrika tetapi juga di sebagian besar Amerika Latin dan sebagian Asia, segera akan mengalami reformasi yang membuat mereka bisa segera melakukan hal-hal seperti yang dibayangkan oleh gagasan partisipasi sipil massa.

Terlebih lagi, visi-visi asumsi itu perihal demokrasi—bahwa demokrasi merupakan ekspresi kepentingan warga negara yang baik, dan bahwa makin banyak advokasi makin baik—patut dipertanyakan. Tidak ada jaminan, seperti yang para pemberi bantuan pikir, bahwa melatih puluhan ribu rakyat sebagai advokat (kata 'pelobi' dan 'lobi' tidak pernah digunakan dalam program-program tersebut) dan menjamin pemerintah nasional dan lokal untuk bersikap terbuka terhadap advokasi akan menuju kemenangan kepentingan publik. Budaya lobi sama halnya dengan mendorong dominasi kepentingan swasta yang kuat sehingga mereka bisa belajar memanfaatkan jalan yang telah dibuka aktivis sipil dan kemudian mempecundangi aktivis-aktivis tersebut dengan kepemilikan sumberdaya dan kengototan yang lebih besar. Sekali lagi, tampaknya pemikiran mitis (*mythic*) perihal Amerika Serikat bekerja. Tampaknya para pemberi dana itu dengan sengaja hendak menyangkal kenyataan bahwa Kongres AS itu sendiri, yang memiliki keterbukaan menerima pengaruh dari kelompok

kepentingan akan model bantuan program AS, sangat dipengaruhi oleh kepentingan bisnis yang sangat kuat, bukan kepentingan publik NGO-NGO. Secara paradoks, para pemberi dana dari AS meyakini kebenaran sedunia bahwa advokasi oleh warga negara akan turut mengoreksi kelemahan akuntabilitas dan sistem perwakilan negara. Tetapi di Amerika Serikat, distorsi yang diakibatkan oleh para pelobi terhadap akuntabilitas dan keterwakilan Kongres dan legislatif negara melahirkan tuntutan reformasi yang meluas.

Ketika perkembangan NGO tengah berlangsung di beberapa negara transisional, NGO-NGO yang mewakili kepentingan bisnis jelas tumbuh lebih kuat dibandingkan NGO-NGO kepentingan publik. Sektor NGO yang paling efektif di Rumania adalah kelompok NGO yang mewakili kepentingan bisnis, seperti Dewan Nasional Usaha Kecil dan Menengah (National Council of Small and Medium Enterprise). Berbeda dengan NGO kepentingan publik, kelompok-kelompok ini memiliki sumber dana domestik sendiri (iuran keanggotaan dari bisnis), sekelompok orang berbakat, terorganisir, giat bekerja, dan terutama memiliki metode advokasi yang bergigi, semisal bisnis-bisnis yang menjadikan anggotanya menekan pemerintah berkenaan dengan soal tertentu sambil mengancam tidak membayar pajak. Di Zambia hal serupa terjadi, yaitu NGO-NGO yang paling mempengaruhi kebijakan pemerintah dan proses legislatif bukanlah NGO hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi Asosiasi Perusahaan Nasional (National Association of Manufacturers) dan kelompok-kelompok bisnis lain. Di beberapa negara, USAID mendukung NGO bisnis sebagai bagian dari program masyarakat sipil, dengan harapan mereka akan mengadvokasi anti-korupsi, reformasi pemerintahan, dan pengembangan *rule-of-law*. Meski demikian, agenda advokasi kelompok bisnis di masyarakat-masyarakat transisional dalam banyak kasus tidaklah begitu canggih, lebih banyak berkonsentrasi pada langkah-langkah yang secara khusus menguntungkan bisnis seperti upah minimum yang rendah, undang-undang lingkungan yang lemah, dan hak-hak buruh yang minimal.

Kajian Perbandingan

Campuran aspek positif dan keterbatasan pendekatan AS untuk mengembangkan masyarakat sipil dengan cara mendukung NGO-NGO advokasi ternyata berjalan berbeda-beda dalam seting yang berbeda. Kasus Rumania dan Nepal menunjukkan perbedaan yang nyata. Di Rumania, pemerintah AS secara aktif mendukung sektor NGO advokasi yang berkembang setelah kejatuhan Ceausescu. Dengan melihat perkembangan sektor tersebut, segera terlihat keter-

batasan program bantuan AS. Terutama di awal 1990-an, kebanyakan kelompok advokasi baru bekerja secara elitis dan didominasi oleh para intelektual yang kurang merasa perlu atau enggan bekerjasama dengan publik. Jumlah NGO tumbuh pesat seiring deret ukur, dengan kecenderungan menciptakan NGO atas dasar alasan-alasan yang salah—ketersediaan dana donor yang mudah, tren, dan oportunisme. Persoalan keberlanjutan menghantui sektor NGO dan hanya beberapa di antara mereka yang berhasil membangun dasar dalam negeri yang kuat.

Meski demikian, pada saat yang sama sektor NGO advokasi di Rumania terlanjur memainkan peran penting dalam proses demokratisasi di negara tersebut. Meski ada partai dominan yang tak begitu mendukung norma-norma demokrasi pada paruh pertama 1990-an, kelompok-kelompok advokasi terutama organisasi hak asasi manusia terus berusaha membuka dan memperluas peluang kebebasan berekspresi. Mereka menyuarakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, terutama hak untuk mempersoalkan kewenangan. Pada periode pasca-komunis, NGO-NGO advokasi merupakan surga bagi orang-orang yang giat dan berbakat yang ingin membantu membuka negara tetapi lebih memilih tidak bekerja dengan partai-partai politik yang bermasalah dan terpecah-belah. Kebanyakan orang-orang ini telah mendapatkan kemampuan memimpin dan organisasi yang berarti dari kerja mereka, kemampuan yang telah mereka terapkan dalam usaha advokasi yang makin canggih, meliputi wilayah yang makin luas seperti media, bisnis, dan pemerintahan. Efek-efek tersebut memang dramatis, dan seringkali dinyatakan secara berlebihan oleh NGO-NGO yang mempercayai diri mereka sebagai bagian utama dalam proses demokratisasi Rumania. Selain itu, bantuan AS untuk NGO-NGO advokasi hanyalah salah satu sumbangan yang ada; bantuan juga datang dari beberapa donor publik dan privat Eropa, juga yayasan pribadi AS. Neraca pembukuan (*balance sheet*) untuk bantuan AS jelas menunjukkan angka positif.

Nepal adalah kasus lain. Pada masa-masa setelah keterbukaan demokrasi pada 1990-1991, ia juga mengalami perkembangan NGO yang cepat dan tak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah AS, selain donor-donor Eropa yang juga aktif di Nepal, mendukung pertumbuhan kelompok advokasi di Katmandu dengan niat turut membangun masyarakat sipil Nepal. Akan tetapi capaian kelompok-kelompok ini jarang sekali melampaui masukan yang mereka terima, hasilnya hanyalah beberapa undang-undang baru dan sejumlah besar usaha 'peningkatan kesadaran' publik yang kabur.



Pelobi dunia dari WWF (World Wild Fund for Nature) misalnya, pernah mengeluarkan *International Advocacy Handbook* sebagai petunjuk bagi LSM kecil dalam percaturan konferensi internasional. Tak heran bahwa berbagai masalah kelompok minoritas, bangsa-bangsa terjajah dan nyaris terlupakan, menemukan forumnya. Tak jarang, LSM besar dan telah terdaftar di PBB, menjembatani LSM kecil yang mewakili kelompok 'sudra' dunia. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

Beberapa kelemahan ini bisa ditimpakan pada berbagai pemerintah yang berkuasa di Nepal sejak masa transisi. Secara keseluruhan, pemerintah-pemerintah tersebut tidak efektif dan loyo, mempersulit tugas NGO melakukan perubahan positif melalui tekanan atau kerjasama dengan pemerintah. Tetapi, sektor NGO itu sendiri jelas-jelas memiliki masalah. Ada terlalu banyak NGO advokasi dibentuk sehingga kebanyakan hanyalah cangkang kosong yang dibuat untuk menyerap limpahan dana para donor yang mengalir sejak transisi. Sektor ini secara keseluruhan juga memiliki hubungan buruk dengan sektor utama kehidupan politik lain termasuk pemerintah, partai, media, bisnis, dan donor yang makin sinis dengan hal yang mereka ciptakan sendiri. Sektor NGO secara meluas berciri digaji terlalu besar, korup, dan egois. Keberlanjutan menjadi masalah besar. Sektor ini hampir tergantung penuh pada dana luar negeri, dan sumber pendapatan dalam negeri yang bisa menyokong kantor yang nyaman, komputer terbaru, dan staf bergaji layak di kebanyakan NGO sangat sulit dicari di negara miskin seperti itu. Dalam waktu sepuluh tahun kurang, seluruh sektor organisasi baru ini—NGO advokasi berkinerja rendah—tumbuh meluas dan menciptakan ketergantungan tak sehat pada bantuan sehingga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat Nepal secara keseluruhan.

Pendekatan Oposisi

Seperti telah saya sebut di muka, salah satu varian dari bantuan masyarakat sipil AS adalah dukungan terhadap NGO advokasi sebagai suatu bentuk oposisi terhadap pemerintah yang Amerika Serikat yakini tidak punya komitmen dengan demokrasi—baik pemerintah yang secara politik stagnan maupun secara aktif mundur ke otoritarianisme. Pendekatan ini bisa berupa pemihakan yang melibatkan partai oposisi, seperti di beberapa negara Eropa Timur dan mantan Republik Soviet. Atau bantuan tersebut menjadi alternatif pendekatan partisan yang berorientasi pada partai: membantu NGO advokasi adalah cara tidak langsung untuk menentang pemerintah dibanding membantu partai oposisi; dan lagi di beberapa negara yang mengalami kemunduran politik tidak ada partai oposisi yang bisa didukung.

Bantuan AS untuk NGO advokasi Rumania pada paruh pertama 1990-an merupakan contoh pendekatan partisan dengan cara membantu sektor NGO yang pendana yakini berwatak pro-oposisi. Bantuan AS untuk kelompok-kelompok hak asasi manusia, koran independen, yayasan demokrasi, asosiasi intelektual, kelompok pemantau pers, dan organisasi-organisasi lain merupakan kunci dalam strategi menentang kekuasaan pemerintahan Iliescu dan membuka

ruang politik yang lebih luas. Di Zambia, bantuan AS (dan Eropa) untuk berbagai NGO yang terkait dengan demokrasi yang tumbuh setelah transisi 1991 merupakan 'tali hidup' (*lifeline*) pengembangan demokrasi pada pertengahan 1990-an setelah presiden Chiluba mengubah jalur demokrasinya dan berbelok menuju kekuasaan orang-kuat (*strong-man rule*). Pemberi dana berharap bahwa kelompok-kelompok ini akan menjadi sumber perlawanan yang terorganisir terhadap pemerintah dan akan menyediakan setidak-tidaknya ruang politik kecil yang akan menjadi dasar bangunan politik kelak. USAID mengikuti pendekatan ini di beberapa negara Afrika yang mengalami kemunduran pada 1990-an, seperti Etiopia dan Kenya, juga di banyak tempat di dunia, termasuk Asia Tengah dan Eropa Tenggara.

Jika masalah yang dihadapi adalah stagnasi dan ketidakpedulian terhadap demokrasi oleh kekuatan yang berkuasa, bantuan untuk NGO advokasi dapat menjadi sumbangan positif, seperti dalam kasus Rumania. Tetapi jika persoalannya adalah kemunduran akibat kekuatan politik mapan bertujuan membelokkan demokrasi dan mempertahankan kekuasaan mereka, maka pendekatan oposisi untuk bantuan masyarakat sipil tidak banyak berguna. Sebagai contoh, di Zambia Presiden Chiluba dengan keras menindas NGO-NGO independen yang mencoba mengadvokasi prinsip-prinsip demokrasi, seperti ketika ia menghukum kelompok pemantau pemilu yang melaporkan kesalahan-kesalahan pemilu nasional 1996. Beberapa kelompok advokasi independen terus bekerja, tetapi mereka tidak dapat menandingi kecenderungan negatif yang terjadi dalam kehidupan politik.

NGO-NGO advokasi secara umum menghadapi keterbatasan mendasar yang membuat mereka tidak mampu mendapat banyak kemajuan menghadapi penguasa yang kuat: mereka kecil, secara umum memiliki organisasi yang lemah; taktik advokasi mereka didasarkan pada pengandaian tentang pemerintah yang rasional namun tidak berbuat banyak atas kerja pemerintahan yang korup atau tertutup; mereka hanya sedikit mendapat dukungan rakyat dan sedikit kemampuan untuk menggerakkan rakyat melawan penindasan; dan ketergantungan mereka yang nyaris penuh pada dana luar negeri membuat mereka sangat mudah diserang sebagai agen pengaruh asing. Jika para donor Amerika Serikat atau yang lain ingin merancang program masyarakat sipil yang bisa sungguh-sungguh menciptakan perlawanan yang kuat terhadap otoritarianisme, mereka haruslah lebih banyak memperhatikan gerakan-gerakan sosial dan politik, jenis gerakan yang tidak bisa diperkirakan dan jauh lebih rumit dibandingkan dunia NGO teknokrat yang aman dan rasional. Pendekatan seperti



"Anggaran hibah ADB (untuk pengembangan statistik negara-negara anggota—*Red.*) setiap tahunnya menurun sekitar 10 persen. Penyebabnya adalah sumber-sumber pendanaan berkurang. Negara donor memperkecil jumlah bantuannya dan banyak negara donor tidak lagi berminat pada pemberian dana hibah atau untuk *technical assistance* (bantuan teknis)," kata Chief Economist Economics and Research Department ADB Ifzal Ali, usai menutup ADB/Paris21 Joint High Level Forum on Statistical Capacity Building for ASEAN Countries di Manila, Filipina, Sabtu (9/11). (Sumber: KCM, 11/11/2002)

itu mensyaratkan keterlibatan mendalam pada kehidupan sosial dan politik sehingga akan menjadi suatu usaha yang sangat *interventionistic* (dapat diintervensi), memakai perspektif jangka panjang, tidak seperti fokus jangka pendek dalam kebanyakan program bantuan, dan berkemungkinan gagal atau memiliki akibat tak diinginkan yang jauh lebih besar dibandingkan ambang toleransi para donor.

Melokal (*Going Local*)

Pada pertengahan 1990-an pemberi bantuan dari AS memperluas pendekatan mereka untuk bantuan terhadap masyarakat sipil, mengikuti pendekatan baru yang bisa saya sebut sebagai 'melokal (*going local*)'. Mereka makin banyak memberikan dana untuk kelompok advokasi di luar ibukota negara penerima bantuan, pada kelompok yang secara umum lebih kecil, kadang-kadang tidak begitu formal, yang bekerja di kota-kota propinsi, kota kecil, atau desa. Pada saat yang sama mereka memperluas jangkauan isu demokrasi, dari topik yang langsung terkait dengan demokrasi hingga isu sosial-ekonomi lain, mulai dari kesehatan publik dan kesejahteraan sosial, hingga hubungan tuan tanah-petani penggarap dan kondisi usaha kecil. Pendekatan lokal terhadap masyarakat sipil terkait dengan sikap lembaga negara AS yang terkait dengan bantuan demokrasi yang juga meningkatkan tekanan pada pemerintah lokal. Semakin lokal fokus NGO terhadap pemerintah lokal sebagai wilayah advokasi alamiah mereka, pada saat yang sama program bantuan AS makin banyak membantu kelompok-kelompok seperti itu dan lembaga-lembaga pemerintah lokal agar bekerjasama secara lebih produktif. Inisiatif Kerjasama Baru (New Partnership Initiative) USAID yang diluncurkan pada 1985 dan mendorong agar tiga perempat bantuan diberikan untuk pendekatan 'melokal' dengan misi USAID mendorong pengembangan program untuk penguatan pemerintah lokal, penguatan NGO advokasi lokal, dan perkembangan usaha kecil secara serentak.

Kecenderungan 'melokal' di bantuan masyarakat sipil AS mencerminkan evolusi alamiah metode pemberian bantuan AS. Sebagai penganjur demokrasi yang terlibat dengan masyarakat sipil, mereka menghadapi keterbatasan jika hanya bekerja dengan beberapa organisasi nasional. Mereka menyelesaikan hal ini dengan cara mencari lebih banyak kelompok yang menggeluti berbagai jenis persoalan. Di kebanyakan negara transisional, kesenjangan antara elite politik dan mayoritas penduduk sangat dalam, dan harus segera disadari bahwa program pengembangan masyarakat sipil haruslah menjembatani kesenjangan ini jika ingin menjadi gerakan yang bermak-

na. Meskipun perluasan pendekatan bantuan masyarakat sipil meliputi persoalan dan organisasi yang lebih luas, tetapi tetap ada keterkaitan dengan advokasi: bantuan diberikan pada NGO-NGO yang lebih kecil, bermarkas di luar ibukota, bertujuan sosial dan ekonomi tidak politik, tetapi tetap merupakan kelompok advokasi. Hasil dari perluasan ini, bantuan masyarakat sipil mulai beririsan dengan program bantuan lain, seperti bantuan yang terkait dengan kesehatan, kependudukan, pertanian, dan pengembangan usaha-kecil yang melibatkan NGO-NGO lokal. Program pengembangan demokrasi untuk mengembangkan ketrampilan advokasi asosiasi petani penggarap (*tenant*) bisa jadi ternyata melakukan pekerjaan yang sama dengan program bantuan yang terkait dengan pengembangan perumahan rakyat. Irisan ini tidak hanya terjadi antara program demokrasi AS dan program pengembangan sosial ekonominya, tetapi juga dengan kerja NGO internasional seperti Oxfam dan Action Aid yang berfokus pada pengembangan masyarakat akar rumput. Para wakil kelompok tersebut seringkali mencurigai atau membenci bantuan demokrasi AS (menganggapnya sebagai aksi neo-imperialisme mahakuasa) dan terkejut ketika mengetahui bahwa organisasi-organisasi lokal yang menjadi rekan mereka di bidang penghapusan kemiskinan dan pembangunan masyarakat ternyata juga terlibat dengan program bantuan demokrasi AS. Irisan ini tidak begitu luas, tetapi terus tumbuh.

Dengan melihat empat studi kasus kita dapati beberapa cara pendekatan 'melokal' program masyarakat sipil dari AS mewujudkan dirinya di berbagai bagian dunia. Di Rumania, fase pertama bantuan masyarakat sipil AS memuncak pada pertengahan 1990-an. Pemberi bantuan dari AS mulai percaya bahwa NGO-NGO yang berkantor di Bukares telah jenuh dengan dana donor dan bahwa pengembangan masyarakat sipil haruslah diperluas ke beberapa bagian negara. Fase kedua yang lebih ditujukan ke luar propinsi berlangsung seiring pendirian Program Jaringan Demokrasi (Democracy Network Program), upaya regional yang didanai USAID untuk mendukung bentuk-bentuk lokal pengembangan masyarakat sipil di Eropa Timur. Di Rumania, Program Jaringan Demokrasi memberikan pelatihan dan bantuan teknik pada NGO-NGO kecil Rumania yang bekerja di kota-kota kecil dan kota kecamatan dengan berbagai wilayah advokasi yang berbeda, juga kelompok-kelompok yang terlibat dengan pemberian layanan sosial dasar.

Di Nepal pada 1990-an, bantuan AS untuk masyarakat sipil juga bergeser dari NGO ibukota ke NGO yang lebih lokal, berfokus pada



Pada 2002, ADB telah menyetujui 89 jenis pinjaman untuk proyek pemberantasan kemiskinan di lebih dari 20 negara termasuk Afganistan, Bangladesh, Kamboja, Cina, Indonesia, India, Nepal, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Negara-negara donor juga telah meminta pengkajian komprehensif soal implementasi 'Strategi Pengurangan Kemiskinan' ADB. "Pengkajian itu diluncurkan pada 1999 untuk menciptakan garis-garis besar dalam proyek untuk memerangi persoalan sosial di banyak kawasan," kata Peter McCawley, kepala evaluasi kinerja ADB. (Sumber: KCM, 14/06/2003)

pemberdayaan perempuan. Dalam program ini, NGO-NGO Nepal (diabaikan oleh NGO-NGO Amerika yang menerima dana dari US-AID) menyediakan pelatihan bagi puluhan ribu perempuan Nepal baik di kota kecil maupun desa. Pelatihan ini mencerminkan pendekatan multi-faset untuk melakukan advokasi dan pemberdayaan. Masing-masing peserta pelatihan mendapat latihan baca-tulis dasar, hak-hak legal dan advokasi, dan hak-hak serta ketrampilan ekonomi (terutama yang terkait dengan pengembangan ekonomi kecil). Gagasannya adalah bahwa pemberdayaan individu haruslah berakar pada pendidikan dasar dan ketrampilan advokasi dan bahwa ketrampilan tersebut haruslah bersifat lintas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Evolusi pendekatan AS di Nepal mencerminkan kecenderungan bahwa bantuan masyarakat sipil dari AS ke beberapa negara Asia akan bergerak ke level lokal, bertema sosial dan ekonomi, dan terkait dengan agenda demokrasi dan pembangunan.

Di Zambia fase pertama bantuan masyarakat sipil AS—yang merupakan salah satu unsur program bantuan demokrasi lima tahun yang diluncurkan pada 1992—berupa program pendidikan sipil yang dijalankan oleh FODEP, suatu NGO berkantor di Lusaka seperti telah saya bahas di muka. Ketika program berlangsung, misi USAID di Lusaka memberikan hibah-hibah kecil pada kelompok-kelompok Zambia yang lain, termasuk kelompok yang berada di luar ibukota dan mendesak FODEP untuk memperluas cakupan kerjanya hingga seluas mungkin. Ketika misi ini merumuskan fase kedua program demokrasinya di akhir 1990-an, ia mencoba memperluas kerja masyarakat sipil hingga mencakup advokasi persoalan sosial dan ekonomi, tidak seperti tekanan fase pertama pada para pendidikan pemilih dan sipil.

Di Guatemala usaha masyarakat sipil USAID telah berubah dari fase yang sangat buruk di pertengahan 1980-an ketika kontraktor AS yang minim pengetahuan perihal negeri ini mengatur beberapa program pendidikan sipil yang superfisial hingga bertanggung jawab pada program yang lebih canggih untuk membantu NGO advokasi besar di Guatemala yang bergerak di persoalan perempuan, hak-hak rakyat adat, dan hak asasi manusia. Program itu tetap berfokus pada organisasi nasional; perhatian pada portofolio bantuan demokrasi untuk NGO di level lokal hanya datang sebagai bagian dari program pemerintah lokal. Gerakan 'melokal' yang lambat di Guatemala ini khas bantuan AS di Amerika Tengah dan Selatan, dan mencerminkan kenyataan bahwa di Amerika Latin bantuan demokrasi AS didominasi oleh pendekatan atas-bawah (hasil dari polarisasi politik pada



Dari tahun 1971 hingga 2002, hibah berupa *technical assistance* ADB di bidang statistik untuk Indonesia berjumlah 993.000 dolar AS untuk tiga proyek. Jumlah itu masih di bawah hibah untuk Vietnam, Filipina, dan Kamboja, tetapi di atas hibah untuk Singapura. Hibah *technical assistance* untuk Vietnam mencapai 1,2 juta dolar AS untuk dua proyek, Filipina 1,58 juta dolar AS untuk enam proyek, Vietnam 3,615 juta dolar AS untuk tiga proyek. Sementara, hibah *technical assistance* untuk Singapura senilai 34.700 dolar AS untuk satu proyek. (Sumber: KCM, 11/11/2002)

1980-an dan ketakutan para pejabat AS untuk melakukan pemberdayaan gerakan rakyat yang radikal).

Kecenderungan 'melokal' punya banyak keuntungan. Dengan melakukan pergeseran dari dunia elite NGO di ibukota ke berbagai level tenunan sosial di masyarakat penerima bantuan, pemberi dana beresiko lebih kecil mensponsori aktivitas yang terkait lebih longgar dengan mayoritas penduduk. Dengan melakukan program sosial dan ekonomi ketimbang bertahan dengan 'isu-isu demokrasi' yang abstrak dan sempit maka program tersebut lebih dekat dengan kepentingan rakyat. Terlibat dalam pemerintah lokal dan kabupaten ketimbang hanya pemerintah nasional dapat mengikat warga negara ke pemerintah dengan lebih langsung. Secara umum pendekatan lokal mungkin mendorong partisipasi meluas dalam urusan-urusan publik.

Di samping keuntungan-keuntungan ini, pendekatan lokal menghadapi tantangan dan persoalan. Bagi USAID dan organisasi bantuan lain, bekerja di level lokal lebih sulit. Pekerjaan semacam ini membutuhkan pengetahuan yang lebih rinci dan bernuansa perihal masyarakat penerima bantuan dibandingkan proyek bantuan yang hanya ditujukan pada level nasional, pengetahuan tampaknya hanya dimiliki beberapa orang di organisasi pemberi bantuan. Kerja ini juga membutuhkan derajat kelenturan birokrasi yang lebih tinggi. Memberi bantuan pada kelompok sipil yang kecil dan informal membutuhkan keluwesan mengelola jumlah uang yang kecil dan toleransi yang tinggi terhadap resiko penyalahgunaan dana—kualitas yang jarang dimiliki pemerintah AS.

Persoalan keberlanjutan tidak akan lenyap hanya karena bantuan diberikan ke NGO lokal ketimbang nasional. Apakah model NGO advokasi Barat cocok untuk masyarakat miskin masih belum dapat dipastikan. Kekurangan sumber dana dalam negeri untuk organisasi-organisasi advokasi merupakan persoalan yang lebih akut di desa ketimbang di kota besar sehingga menuntut pemberi dana untuk berupaya lebih keras mencari alternatif selain model NGO profesional. Sama halnya dengan asumsi bahwa peningkatan advokasi berarti peningkatan pengutamaan seluruh kepentingan publik, level lokal lebih baik ketimbang nasional juga hanyalah dugaan. Sistem kelompok kepentingan berlevel lokal yang mengadvokasi kepentingan mereka di depan lembaga pemerintahan lokal dapat dengan mudah diringkus oleh elite-elite lokal yang kuat, baik itu penguasa tanah atau pemilik bisnis lokal, kecuali dalam rancangan program bantuan tersebut diberi porsi pemikiran mengenai struktur kekuasaan lokal.

Terakhir, dan mungkin terpenting, bisakah upaya pengembangan masyarakat sipil berorientasi lokal ini benar-benar mengubah

masyarakat? Banyak upaya kecil dan ditujukan untuk membangun masyarakat sipil di pedesaan memanglah menguatkan dan membesarkan hati, tetapi sama sekali tidak jelas apakah upaya seperti itu dapat menghasilkan kekuatan perubahan yang besar. Banyak program pengembangan berbasis akar rumput dan komunitas dalam dua dasawarsa terakhir hanya menghasilkan oase perubahan yang tidak terkait dengan masyarakat di sekitarnya. Pendekatan lokal untuk bantuan masyarakat sipil menuntut kerendahhatian yang lebih besar di kalangan pemberi dana perihal kemampuan mereka melakukan perubahan berskala besar—diktum bermanfaat tetapi sulit diterima oleh para pemberi dana.

C. Pendidikan Sipil

Pendidikan sipil merupakan unsur umum portofolio bantuan demokrasi AS di seluruh dunia selama lima belas tahun terakhir. Gagasan dasarnya adalah mendidik warga negara-negara yang sedang melakukan demokratisasi tentang nilai-nilai, pengetahuan demokrasi, dan ketrampilan yang terkait dengan tujuan agar masyarakat memahami bagaimana demokrasi berjalan, menerima demokrasi sebagai cita-cita politik, dan menjadi warga negara yang partisipatif. Ada banyak upaya pendidikan sipil di negara penerima dana yang berfokus pada pemilu, secara khusus mengajarkan tujuan pemilu, mekanisme pemberian suara, dan para calon serta isu yang dipakai. Program-program semacam ini secara umum merupakan bagian dari program bantuan pemilu yang lebih besar. Upaya pendidikan sipil lain lebih berfokus pada pendidikan demokrasi yang lebih luas, termasuk informasi mengenai hak asasi manusia, undang-undang dasar, prosedur-prosedur demokrasi, dan nilai-nilai sipil. Beberapa metode pendidikan berbasis ruang kelas, sembari memasukkan bahan-bahan pendidikan sipil yang baru atau telah direvisi ke dalam pendidikan dasar, menengah, atau dewasa. Program-program lain menggunakan metode instruksi non-tradisional atau informal, termasuk drama, permainan peran, forum kelompok, dan latihan-latihan lain. Sementara program lain berbasis elektronik—pertunjukan televisi atau program radio yang menyampaikan pesan-pesan pendidikan sipil.

Pendidikan sipil sangat memikat bagi orang Amerika karena sudah menjadi gagasan Amerika bahwa sikap dan nilai-nilai demokrasi warga negara merupakan dasar suatu sistem demokrasi. Pemberi dana dan konsultan dari AS sering kembali dari misi penilaian di negara-negara transisional dengan hasil pengamatan yang akurat meski tidak terlalu mendalam yaitu bahwa orang-orang di



Dari 1971 hingga 2002, jumlah hibah *technical assistance* ADB di bidang statistik untuk 18 negara Asia mencapai 15,766 juta dolar AS. Negara-negara penerima hibah adalah Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, Indonesia, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Samoa, Singapura, Tajikistan, Turkmenistan, Vanuatu, dan Vietnam. (Sumber: KCM, 11/11/2002)

negara tersebut 'memang tidak mengerti demokrasi'. Tanggapan yang hampir refleks untuk situasi tersebut adalah merancang program pendidikan sipil, dengan keyakinan bahwa rakyat akan bisa cepat diajari memahami demokrasi dan bahwa begitu mereka memahami maka mereka akan menerima dan hal ini akan banyak memajukan demokratisasi. Bahwa kelompok pemilih Amerika sering memperlihatkan tingkat ketidakpedulian yang mencengangkan—sebagai contoh survei terakhir menunjukkan bahwa 40 persen orang dewasa Amerika tidak dapat menyebut siapa nama wakil presiden—agaknya tidak menggoyahkan keyakinan para pendidik sipil AS di luar negeri.[13] Daya tarik pendidikan sipil juga tumbuh dari upaya-upaya panjang semasa perang dunia untuk menularkan gagasan demokrasi ke rakyat di negara-negara komunis. Upaya tersebut mengandaikan bahwa pengetahuan demokrasi merupakan agen yang kuat untuk menghasilkan perlawanan dan pemberontakan besar terhadap pemerintah komunis. Bagi para penganut pendidikan sipil sebagai alat revolusi demokrasi, 1989 menguatkan keyakinan mereka. Pada 1990-an, para penganjur demokrasi AS mendorong pendidikan sipil tentang demokrasi di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan di berbagai tempat dengan keyakinan yang sama bahwa pengetahuan tentang demokrasi dapat menjadi agen transformasi.

Meskipun daya tarik bantuan pendidikan sipil kuat, hasil yang didapat sering mengecewakan. Di banyak negara transisional, pun di bagian-bagian Amerika Latin dan Eropa Timur tempat demokratisasi telah berjalan baik, keyakinan publik terhadap demokrasi mengalami kemandegan pada masa 1990-an, meski ada sangat banyak proyek pendidikan sipil yang didanai luar negeri. Pengalaman dari banyak upaya pendidikan sipil menunjukkan pelajaran yang jelas: instruksi formal jangka pendek tentang demokrasi yang menyampaikan demokrasi sebagai seperangkat prinsip dan proses umum hanya berdampak kecil bagi peserta pendidikan. Informasi semacam itu terlalu abstrak dan terlalu jauh dari hidup sehari-hari rakyat kebanyakan. Di banyak mantan sistem kediktatoran, rakyat sangat curiga dengan segala hal yang berbau propaganda politik, dan kadang-kadang program pendidikan yang dirancang sangat buruk menjadi propaganda itu sendiri.

Terlebih lagi pendidikan sipil di banyak negara transisional dibantah sendiri oleh praktek politik nyata. Rakyat sulit menerima

---

[13] Survei yang disponsori the Washington Post dan Harvard University ini, menemukan bahwa ketidaktahuan orang-orang Amerika akan sistem politik Amerika demikian meluas. *Washington Post*, 26 dan 29 Januari 1999, hlm. A1.

bahwa badan legislatif nasional merupakan badan yang berharga karena bertanggung jawab mewakili kepentingan mereka, ketika setiap malam mereka melihat sidang-sidang penuh pertikaian ribut dari parlemen yang korup dan tak berguna. Mengajari mereka bahwa pemilu sangatlah penting bagi demokrasi hanya berdampak kecil jika satu-satunya pemilu yang mereka kenal direkayasa oleh partai dominan untuk menanamkan kuku kuasanya lebih dalam. Ketika penganjur demokrasi menyebarkan informasi perihal demokrasi pada rakyat di negara-negara otoritarian, mereka meminta rakyat menerima cita-cita yang selalu lebih indah dibandingkan kenyataan politik yang ada di depan mata. Akan tetapi, ketika mereka bekerja di sistem demokrasi yang baru berkembang tantangan mereka dalam beberapa hal lebih berat: mereka berusaha menjual konsep demokrasi pada banyak orang yang telah menyadari perihal sistem demokrasi mereka yang penuh pertikaian. Di negara-negara transisional, tempat sistem demokrasi yang baru sedang tumbuh baik, hal ini tidak menjadi masalah, tetapi dalam situasi tersebut bentuk-bentuk pendidikan baru tentang demokrasi kurang dibutuhkan.



Cikal bakal Ornop di dunia dicatat pengamat sosial dari Perancis Alexis de Tocqueville (1805-1859) dalam kunjungannya ke Amerika pada tahun 1930-an abad ke-19. Saat itu dikatakan bahwa telah terjadi ketidakpuasan dan kegelisahan tentang keadilan sosial, meski telah terjadi peningkatan pendidikan dan pendapatan di lapisan bawah masyarakat. Maka mulai timbul gejala baru dalam demokrasi yaitu partisipasi dari kalangan bawah masyarakat yang gelisah. Gejala itulah yang dilihat sebagai cikal bakal timbulnya perkumpulan/perhimpunan sukarela (*voluntary association*). Selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, dengan melakukan berbagai kegiatan inovatif, perkumpulan dan perhimpunan itu juga bertindak sebagai pengimbang kekuatan negara. (Sumber: John Clark, 1995)

Hasil buruk dari upaya pendidikan sipil yang konvensional digarisbawahi oleh kajian mendalam, yang diperintahkan USAID dan dikerjakan oleh sekelompok ilmuwan sosial, tentang dampak program pendidikan sipil di dua negara, Polandia dan Republik Dominika.[14] Peneliti menggunakan metode sampling yang canggih untuk membandingkan, sebagai contoh, kelompok orang yang mendapat dan tidak mendapat berbagai tipe program pendidikan sipil AS dan mengevaluasi level partisipasi, ketrampilan, dan nilai demokrasi mereka. Kajian ini mendapati dampak level partisipasi dan pengetahuan politik yang terbatas (dan bahkan dampak terbatas itu pun pudar seiring waktu), dan hampir tidak ada efek apa pun pada nilai dan ketrampilan peserta. Serupa dengan ini, suatu kajian mengenai efek aktivitas pendidikan sipil AS di Zambia oleh para ahli yang turut merancang dan mengamati pelaksanaan aktivitas tersebut mendapati bahwa, "Efek pendidikan sipil itu pinggiran, sebagian kontradiktif, dan selektif secara sosial" (tidak memiliki dampak yang terukur kecuali pada orang Zambia yang kaya dan berpendidikan tinggi).[15]

---

[14] Christopher Sabatini, Gwendolyn Bevis, dan Steven Finkel, *The Impact of Civic Education Programs on Political Participation and Democratic Attitudes* (Washington, D.C.: Management Systems International, 27 Januari 1998.

[15] Michael Bratton dan Philip Alderfer, "The Effects of Civic Education on Political Culture: Evidence from Zambia," *World Development*, vol. 27, no. 5 (1999), hlm. 822.

Metode-metode pendidikan sipil yang lebih baik pelan-pelan menggantikan metode konvensional-formalistik yang mendominasi bantuan pendidikan sipil AS dari pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an. Bahan pengajaran yang ada sekarang makin menekankan penerapan praktis nilai-nilai dan pengetahuan sipil ketimbang prinsip-prinsip abstrak. Metode tersebut disesuaikan dengan kenyataan masyarakat yang akan memakainya. Selain itu, lebih sering digunakan metode pengajaran aktif, terutama permainan peran dan latihan kelompok. Sebagai contoh, subyek kebrutalan polisi pada suatu masa pernah disampaikan dalam suatu kuliah mengenai hak-hak hukum warga negara di suatu sistem demokrasi. Dalam program yang lebih mutakhir, subyek ini dibungkus dengan presentasi tentang beberapa kasus kebrutalan polisi terbaru yang terjadi pada komunitas lokal tersebut, diskusi dengan mengundang seorang polisi dan aktivis hak-hak asasi manusia, dan mungkin melakukan latihan permainan peran di mana para partisipan memainkan berbagai peran dan mempelajari strategi untuk meminimalkan penganiayaan. Ketika metode-metode pendidikan sipil menjadi makin tersedia dan praktis, metode tersebut menjadi mirip dengan latihan advokasi yang merupakan komponen kebanyakan program bantuan untuk advokasi NGO.

Kasus Guatemala dan Zambia banyak menunjukkan dasar-dasar dari bantuan pendidikan sipil AS. Di Guatemala, USAID mendanai beberapa pekerjaan sejak pertengahan 1980-an, mengambil pendekatan yang berlawanan untuk subyek tersebut. Dalam 1987-1989, Guatemala merupakan salah satu dari tiga negara Amerika Tengah yang menerima bantuan pendidikan sipil sebagai bagian dari 'Program Pendidikan untuk Partisipasi (Program of Education for Participation)' yang didanai USAID. Meskipun merupakan kerja yang relatif awal dibandingkan dengan gelombang bantuan demokrasi yang ada selama itu, proyek ini memiliki ciri-ciri pendidikan sipil pada tahap yang lebih lanjut. Proyek ini ditujukan untuk organisasi-organisasi akar rumput Guatemala, terutama organisasi yang peduli dengan perempuan; ia tidak berusaha menyampaikan abstraksi mengenai demokrasi tetapi 'program pendidikan non-formal partisipatif yang memampukan organisasi-organisasi komunitas mendefinisikan persoalan-persoalan mereka dan merancang strategi tindakan;'[16] dan metodenya lebih praktis dibandingkan dengan instruksi kelas. Bentuk-bentuk proyek yang telah relatif berubah ini mencerminkan asal-

[16] Management Systems International, *An Evaluation of the Program of Education for Participation* (Washington, D.C.: Management Systems International, Agustus 1989), hlm. v.

usulnya, yaitu beberapa pejabat USAID di Washington yang mengalami pendidikan sipil sejak 1960-an, juga keputusan mereka untuk memilih penghubung seorang Amerika yang memiliki pengalaman yang luas.

Beberapa tahun setelah akhir dari proyek yang relatif kecil itu (kira-kira diikuti oleh 1.000 orang Guatemala), misi USAID di Guatemala memulai program pendidikan sipil yang baru dan lebih luas. Program tersebut, yang juga berlangsung dua tahun, cukup berbeda. Pendidikan itu secara khusus dirancang "untuk memotivasi rakyat Guatemala berpartisipasi dalam proses pemilu". Pelatihan ini sangat bertumpu pada bahan-bahan yang tertulis formal, dengan judul yang tampaknya diambil dari kampanye pendidikan ulang (*reeducation*) Cina pada 1960-an—"Semua Orang Guatemala Setara dan Merdeka (*All Guatemalan are Equal and Free*)", salah satu pamflet lain berjanji memperlihatkan "Bagaimana Negara dan Pemerintah Dibuat untuk Melindungi Kehidupan Kita dan Bekerja untuk Pembangunan dan Kebaikan Kita Semua (*How the State and Government is Organized to Protect Our Lives and Work for the Development and the Good of All*)."[17] Proyek ini secara umum dipandang gagal oleh misi USAID karena kedangkalan pengetahuan penghubung Amerika perihal situasi lokal dan watak pesan dan metode pengajaran yang terlalu formal.[18]

Misi USAID di Guatemala berusaha mengambil pelajaran dari contoh buruk itu ketika merancang upaya-upaya lanjutan untuk memperkuat masyarakat sipil di akhir 1990-an. Programnya yang baru berfokus pada pengembangun NGO advokasi, menekankan isi pendidikan yang relevan dengan kelompok advokasi lokal ketimbang ideologi demokrasi yang abstrak, dan metode-metode yang praktis, belajar-sambil-praktek ketimbang mencetak banyak pamflet dan teks. Misi ini juga berusaha mencari tim proyek Amerika yang berkomitmen meleburkan diri dalam lingkungan lokal.

Di Zambia setelah Pemilu 1991, USAID merancang proyek pendidikan sipil besar yang merupakan program lima tahun dengan tujuan mengajari orang Zambia perihal nilai penting pemberian suara dan tentang prinsip dan praktek demokrasi secara umum. Proyek

---

17 America's Development Foundation, *Final Report of the Civic Education Project* (Alexandria, Va.: America's Development Foundation, tanpa tanggal), hlm. 8, 12.

18 Mengenai evaluasi terhadap beberapa program pendidikan sipil NED di Guatemala dan daerah lain di Amerika Latin, lihat Sally Yudelman dan Lucy Conger, *The Paving Stones: An Evaluation of Latin American Civic Education Programs* (Washington, D.C.: National Endowment for Democracy, Maret 1997).

yang dijalankan oleh FODEP ini gagal karena artifisialitas pengajaran prinsip-prinsip demokrasi abstrak pada penduduk yang sebagian besar miskin dan rakyat tak berpendidikan dengan partisipasi politik yang sangat sedikit. Proyek ini juga menghadapi lingkungan lokal yang menolaknya. Kebanyakan pengajaran mengenai nilai-nilai pemilu dimaksudkan untuk mendorong warga berpartisipasi dalam Pemilu Nasional 1996, tetapi pemilu tersebut ternyata menjadi masalah yang ditandai dengan penyingkiran calon presiden dari kelompok oposisi utama dan boikot untuk menentangnya. Jadi, pemilu itu sendiri mengingkari pelajaran dari program pendidikan sipil tersebut—proyek tersebut berakhir dengan pelajaran bahwa pemilu memang kadang-kadang menjadi kegiatan yang kacau-balau yang membuat nilai-nilai partisipasi warga negara diragukan. Seiring waktu, FODEP mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif, berusaha mengaitkan persoalan demokrasi dengan urusan sehari-hari penduduk desa. Akan tetapi, karena keterputusan total antara kehidupan sebagian besar penduduk desa Zambia dengan sistem politik formal, maka tugas pendidikan sipil itu sangatlah berat.

D. Melampaui Romantisme Masyarakat Sipil

Peningkatan perhatian di kalangan para penganjur demokrasi untuk memperkuat masyarakat sipil merupakan perkembangan positif dan penting. Ini merupakan koreksi bermanfaat terhadap tekanan bantuan demokrasi AS awal yang begitu sempit menekankan pemilu dan reformasi lembaga negara secara atas-bawah. Masyarakat sipil merupakan isu penghubung yang dibutuhkan negara-negara transisional untuk mengaitkan bentuk demokrasi mereka dengan substansi yang mereka kehendaki, memastikan bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi bukanlah kotak kosong dan ritual ompong. Ranah masyarakat sipil menawarkan pintu bagi para penganjur demokrasi untuk memasuki transisi demokrasi dan ranah ini sering berisi orang-orang yang berdedikasi dan terampil memajukan demokrasi. Selain itu, ia menawarkan kemungkinan melakukan proyek-proyek bermanfaat di berbagai skala, dari dukungan kecil untuk beberapa aktivis yang bekerjasama dalam satu proyek di satu lokal hingga kampanye besar-nasional yang melibatkan pengerahan ribuan relawan.

Ketika mereka berburu cepat memeluk gagasan masyarakat sipil yang sedang tren, para penganjur demokrasi dari AS sering melihat konsep ini dengan romantis, stereotip, atau terbatas, sementara konsep ini sendiri sebenarnya menarik meskipun menghipnotis. Mereka terlalu menekankan sektor tertentu di antara ranah masyara-



"Sekarang ini banyak LSM kuning yang menjadi *project hunter*. Mereka hanya mengejar proyek-proyek saja. Mereka kebanyakan berkantor di Gedung Badan Perencana Pembangunan Daerah. Ini sungguh berbahaya, jika LSM sudah berkonspirasi dengan pemerintah. Bagaimana mereka mau mengkritik pemerintah untuk melakukan *good governance* kalau LSM sendiri terlibat dalam proyek-proyek *bad governance*," jelas Laode dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (Sumber: KCM, 17/09/2003)

kat sipil yang sangat rumit: sekelompok organisasi (spesialis non-pemerintah yang terkait dengan kebijakan) yang menjalankan kerja advokasi dan pendidikan sipil yang terkait langsung dengan hal-hal yang pemberi bantuan pikir merupakan inti isu demokrasi, seperti pemantauan pemilu, transparansi pemerintahan, dan hak-hak politik dan sipil. Terkait dengan ini, para penganjur demokrasi menganut pandangan yang baik-tetapi-usang (*denatured, benevolent*) perihal peran masyarakat sipil dalam kehidupan politik sebagai proses politik penyusunan perundangan di balai kota (*town hall politics writ large*)—artikulasi paling baik dari kepentingan sekian laksa aktivis berpenampilan sopan yang bermain sesuai aturan, menyelesaikan konflik secara damai, dan tidak merusak apa pun.

Romantisisasi masyarakat sipil lebih memiliki akar di hati orang Amerika ketimbang konsep mitis (*mythic*) Tocquevillean tentang masyarakatnya sendiri, tetapi ini menimbulkan penyederhanaan besar-besaran terhadap karakter dan peran masyarakat sipil di negara-negara lain di seluruh dunia. Para penganjur demokrasi Amerika tidak banyak berusaha memahami masyarakat sipil dalam pengertian rumitnya di masing-masing masyarakat tradisional Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Pada intinya mereka mengabaikan sekian lapis klan, suku, kasta, asosiasi desa, kelompok petani, organisasi agama lokal, asosiasi etnis, dan semacamnya sebagai kompleksitas yang tak terselami dan tak berpengaruh langsung terhadap kerja advokasi demokrasi. Para penganjur demokrasi melakukan misi penilaian masyarakat sipil yang terburu-buru untuk negara-negara ini dan menyatakan bahwa "hanya ada sangat sedikit masyarakat sipil" karena mereka hanya mendapati sedikit NGO yang ter-Barat-kan (*Westernized*) yang melakukan kerja advokasi kepentingan publik dan tak berpihak di skala nasional.

Tiga donor asing, Novib (Belanda), Triple Eleven (Belgia), dan Sida (Swedia) tak lagi mengucurkan dana kepada YLBHI sejak akhir 2002. Mengapa mereka menghentikan kucuran dana? Menurut Dr. Kastorius Sinaga, terjadi perubahan politik lembaga donor. Ketiga lembaga donor itu memprioritaskan program konsolidasi demokrasi, penataan kelembagaan, dan isu desentralisasi. Indonesia digolongkan telah memasuki era dengan sistem yang demokratis. Isu *good governance* menggantikan isu *civil society* yang sejak 1980-an diperjuangkan kalangan LSM. (Sumber: KCM 27/06/2003)

Para penganjur demokrasi yang tukang mendorong perkembangan masyarakat sipil secara umum mengabaikan hubungan antara bentuk-bentuk masyarakat sipil tertentu dengan kondisi sosio-ekonomi negara sasaran. Mereka menyukai NGO advokasi dan beranggapan bahwa setiap negara dapat dan harus mendukung ribuan NGO seperti itu. Melalui program dana, mereka berusaha mengarbit perkembangan sektor NGO, memicu pelipatgandaan tanpa memperhatikan persoalan kapan masyarakat itu akan mengembangkan sumber-sumber untuk menghidupi dan mendukungnya. Secara ironis, NGO tersebut berakhir, jatuh ke dalam perangkap model kelembagaan yang sama dengan bencana yang menimpa sebagian besar bantuan demokrasi atas-bawah dan sebagian mendorong kemunculan kerja masyarakat sipil tersebut: mereka melihat pengembangan

masyarakat sipil sebagai persoalan pendirian bentuk kelembagaan tertentu (NGO advokasi), mengutamakan bentuk ketimbang isi, proses, atau kenyataan sosio-politiknya.

Setelah pola yang menimpa bantuan pemilu dan reformasi lembaga pemerintahan, para penganjur demokrasi mulai melewati fase bantuan pengembangan masyarakat sipil yang bergairah dan meledak-ledak, dan memasuki fase harapan yang lebih rendah serta perancangan program yang lebih canggih. Tekanan pada NGO advokasi masih kuat, tetapi para penganjur demokrasi mulai memberi perhatian besar pada persoalan-persoalan keterwakilan dan keberlanjutan yang bersifat kunci. Mereka lebih hati-hati mencari kaitan nyata antara NGO dengan sektor yang NGO klaim sebagai landasan aksinya, dan berusaha mendorong pengembangan organisasi-organisasi yang lebih representatif dan berakar. Mereka juga makin banyak memperkenalkan soal keberlanjutan kepada NGO penerima bantuan sejak awal ketimbang di akhir hubungan, dan lebih banyak menginvestasikan sumber dana untuk membantu NGO-NGO menemukan sumber uangnya dari dalam.

Dua wilayah utama evolusi bantuan masyarakat sipil adalah dorongan ganda 'melokal' dan mendukung NGO yang terlibat dalam advokasi persoalan sosial dan ekonomi ketimbang persoalan-persoalan yang langsung terkait dengan demokrasi. Seperti telah saya bahas dalam bagian awal tulisan ini, gerak lebih kuat mendukung NGO di desa, kota kecil, atau level kabupaten membuat para penganjur demokrasi mulai membantu membangun tenunan dasar budaya demokrasi. Memperluas jangkauan bantuan ke wilayah sosial dan ekonomi berarti mengaitkan gagasan advokasi sipil yang abstrak dengan persoalan-persoalan yang langsung dihadapi warga. Selain itu, dengan bekerja di level lokal dengan persoalan sehari-hari yang remeh-temeh para penganjur demokrasi mulai bersentuhan dengan dan mendukung berbagai kelompok masyarakat sipil yang sering lebih berakar dan luas, seperti organisasi komunitas dan asosiasi warga yang informal.

Setelah mereka makin berpengalaman, program bantuan masyarakat sipil juga makin memperhatikan nilai penting negara yang lebih tanggap dan efektif agar masyarakat sipil itu betul-betul berfungsi. Godaan awal dan impulsif untuk melihat masyarakat sipil sebagai alternatif atau sesuatu yang hadir tanpa kaitan langsung dengan negara telah mengabur. Program masyarakat sipil di level nasional dan lokal negara-negara transisional sekarang berusaha melakukan dialog yang produktif dengan lembaga-lembaga negara dan melihat negara dan masyarakat sipil sebagai rekan ketimbang musuh

(kecuali dalam konteks negara otoritarian ketika masyarakat sipil berperan lebih oposisional). Ketika program-program yang bertujuan mereformasi lembaga negara telah makin banyak melibatkan pendekatan masyarakat sipil, bantuan masyarakat sipil sendiri mulai mengadopsi gagasan hubungan simbiosis antara negara dan masyarakat sipil. Dengan cara ini sintesis alami antara dualisme pendekatan atas-bawah dan bawah-atas terhadap pengembangan demokrasi tercapai.

Berbagai jalur evolusi positif dalam bantuan masyarakat sipil ini masih dalam taraf penguatan. Ketika telah maju, program-program masyarakat sipil akan meningkat, tetapi ia tak akan memberikan hasil sangat besar pada keseluruhan masyarakat sipil di negara tersebut. Meskipun ranah masyarakat sipil seringkali lebih aksesibel dan tanggap terhadap bantuan luar negeri ketimbang lembaga negara, ia juga sangat luas dan berakar dalam pola dan kondisi sosio-ekonomi, kultural, dan historis setempat. Para penganjur demokrasi mulai banyak belajar apa yang mereka lakukan dalam ranah yang rumit ini, tetapi unsur utama dalam proses pembelajaran-diri mereka adalah menyadari betapa tinggi harapan mereka dan betapa terbatas kemampuan mereka menghasilkan perubahan besar-besaran.

Indonesia sekarang digolongkan sudah 'demokratis'. Perjuangan mengembangkan *civil society* tak lagi jadi *concern* dan komitmen lembaga donor asing. Seolah-olah *civil society* dengan segala nomenklaturnya sudah tercapai di Indonesia. Dulu secara gampang nomenklatur itu oleh LSM-LSM diterjemahkan dengan adanya satu musuh yang sama. Sosok Soeharto menjadi sosok musuh bersama. Maka ketika Soeharto jatuh, Mei 1998, gerakan reformasi menggantikan gerakan *civil society*. Pembicaraan tentang *civil society* menghilang, diganti reformasi. Tetapi, dalam riil politik dan kemasyarakatan, apakah semangat dan jiwa *civil society* sudah terlihat? Justru sebaliknya, orang mulai merindukan suasana sebelum reformasi, suasana ketika *civil society* diperjuangkan bersama. (Sumber: KCM 27/06/2003)



Imperialisme dan NGO-NGO[1]

James Petras[2]

As an opponent of the growth of neo-liberalism in the early 1980s, the US government, European states, and the World Bank increased funds being given to NGOs. According to this writer, there is a direct connection between the growth of social movements fighting neo-liberalism and the effort to put down this movement, and the creation of alternative action via NGOs. NGOs and the World Bank can agree on the need to fight "statism." NGOs critique the state using a "left" perspective and defending civil society, while (consciously or not) doing that in the name of the market. In fact, the World Bank, neo-liberal regimes, and Western foundations are co-opting and using NGOs to decrease the amount of resources controlled by the states by offering NGO-provided "social services" as compensation. Neo-liberal regimes destroy existing communities and flood nations with cheap imports, demand the payment of foreign debt, eliminate labor laws, and create an ocean of unemployed workers ready to work for low wages. NGOs are funded to create "self-help," "popular education" and work training programs in order to temporarily absorb small groups of urban poor, co-opt local leaders, and weaken anti-systemic struggles. In addition to sharp analysis, this article offers several case studies from Latin America, where the writer discusses the diverse dynamics of social movements.

---

[1] Tulisan yang saudah berupa terjemahan ini diperoleh dari Research, Education and Dialogue (REaD), Yogyakarta.

[2] James Petras adalah pengajar sosiologi State University of New York, Binghamton. Dia adalah salah satu co-author buku *Neo-liberalisme and Class Conflict in Amerika Latin* (Macmillan, 1997).

Awal 1980-an berbagai sektor di jajaran kelas-kelas penguasa neo-liberal yang memiliki pandangan lebih jauh ke depan menyadari bahwa kebijakan-kebijakan mereka telah menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat serta memprovokasi munculnya ketidakpuasan dalam skala luas. Maka, mulailah para politisi neo-liberal membiayai dan mempromosikan sebuah strategi paralel 'arus bawah', terhadap organisasi 'akar-rumput' yang berideologi 'anti-statis' guna melakukan intervensi pada kelas-kelas yang memiliki potensi konflik kelas, serta untuk menciptakan sebuah 'perlindungan sosial'. Organisasi-organisasi 'akar rumput' ini secara finansial bergantung pada sumber-sumber neo-liberal dan terlibat secara langsung dalam persaingan dengan gerakan-gerakan sosial-politik dalam meraih kesetiaan para pemimpin lokal dan para aktivis di berbagai komunitas. Pada 1990-an organisasi-organisasi ini, yang dideskripsikan sebagai '*non-governmental* (non-pemerintah),' telah berjumlah ribuan di seluruh dunia dan menerima nyaris US$ 4 milyar dana bantuan.

Neo-liberalisme dan NGO

Kebingungan dalam mempertimbangkan karakter politik dari organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) berpangkal dari sejarah awal mereka pada 1970-an, masa terjadinya hari-hari kediktatoran. Pada periode tersebut mereka aktif dalam menyelenggarakan *support* kemanusiaan bagi para korban kediktatoran militer dan mengadukan berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). NGO mendukung '*soup kitchens*'[3] yang mengijinkan keluarga-keluarga korban untuk menyelamatkan diri dari gelombang pertama perlakuan keji yang dipawangi oleh kediktatoran-kediktatoran militer neo-liberal.

Periode ini menciptakan imej baik bagi NGO, bahkan di antara kaum kiri. Mereka (NGO) adalah bagian yang diperhitungkan dalam 'kamp progresif'.

Bagaimanapun, sebentar kemudian keterbatasan NGO terungkap. Sementara mereka menyerang pelanggaran HAM yang dilakukan kediktatoran lokal, sangatlah jarang mereka mencela AS (Amerika Serikat) dan patron-patron Eropa yang membiayai dan menjadi penasihat utama mereka. Serta, tidak ada sebuah pun usaha serius untuk mengaitkan kebijakan-kebijakan ekonomi neo-liberal dan pe-

[3] Catatan penerjemah: '*soup kitchen*' merupakan istilah yang berasal dari kebiasaan—kaum Yahudi—di mana sop buatan sendiri dipercaya tidak saja berguna sebagai makanan, tapi juga untuk memulihkan kondisi psikis.

langgaran HAM dengan bentuk baru sistem imperialis. Jelas bahwa sumber dana luar negeri membatasi wilayah kritisisme dan aksi-aksi menegakkan HAM.

Sebagai lawan kutub dari pertumbuhan neo-liberalisme di awal 1980-an, pemerintah AS, negara-negara Eropa, serta Bank Dunia meningkatkan dana yang mereka kucurkan pada NGO. Terdapat sebuah hubungan langsung antara pertumbuhan gerakan-gerakan sosial yang bertujuan menentang model neo-liberal dan usaha-usaha untuk menumpas gerakan-gerakan tersebut dengan menciptakan bentuk-bentuk aksi alternatif melalui NGO. Poin mendasar dari titik temu antara NGO dan Bank Dunia adalah kesamaan mereka dalam melawan 'statisme'. Di permukaan, NGO mengkritik negara dengan menggunakan perspektif 'kiri' dalam mempertahankan masyarakat sipil, sementara sejatinya (sadar atau tidak) hal itu dilakukan atas nama pasar. Bagaimanapun, kenyataannya Bank Dunia, rezim-rezim neo-liberal, dan yayasan-yayasan Barat mengkooptasi dan menganjurkan NGO untuk mengurangi kekayaan nasional yang dikuasai negara dengan cara NGO menyediakan 'pelayanan sosial' sebagai kompensasi bagi para korban perusahaan-perusahaan multi-nasional. Dengan kata lain, selagi rezim-rezim neo-liberal menghancurkan komunitas-komunitas yang ada dengan membanjiri seluruh negeri akan impor-impor murah, memeras pembayaran hutang luar negeri, menghapuskan legislasi buruh, dan menciptakan lautan buruh berupah rendah serta samudera pengangguran; NGO didanai untuk menyelenggarakan proyek-proyek 'mandiri' (*self-help*), 'pendidikan populer', dan pelatihan-pelatihan kerja, supaya secara temporer dapat menyerap kelompok-kelompok kecil kaum miskin, mengkooptasi para pemimpin lokal, dan ini untuk meluluhkan berbagai perjuangan anti-sistem.

NGO menjadi 'wajah komunitas' dari neo-liberalisme, secara amat dekat NGO berhubungan dengan mereka yang berkedudukan di atas dan melengkapi kerja destruktif mereka dengan proyek-proyek lokal. Begitulah kaum neo-liberal mengorganisir suatu operasi 'penjapit' alias strategi ganda. Sialnya, begitu banyak kaum kiri memfokuskan perhatian semata pada 'neo-liberalisme' dari atas dan dari luar (International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia) dan bukannya juga mengarahkan perhatian ini pada neo-liberalisme dari bawah (NGO dan usaha-usaha mikro). Alasan utama dari terjadinya kekeliruan ini adalah perubahan dimana begitu banyak mantan-Marxis menjadi pendukung formula dan praktek NGO. Anti-statisme adalah tiket transit ideologis dari politik kelas ke 'pembangunan komunitas', yaitu dari Marxisme menjadi NGO.



Badan amal internasional tertua di Inggris, Save the Children Fund, didirikan pada 1919. Banyak di antara LSM internasional masa kini awalnya didirikan untuk membantu korban Perang Dunia II di Eropa. Termasuk di dalamnya Catholic Relief Services, CARE, OXFAM UK, the Danish Association for International Co-operation. (Sumber: OECD, 1988)

Secara tipikal ideolog-ideolog NGO memperbandingkan kekuasaan 'negara' dengan kekuasaan 'lokal'. Mereka berargumentasi, kekuasaan negara itu berjarak dari warganya, bersifat otonomi dan arbiter, serta cenderung mengembangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari kepentingan warganya, dan bahkan malah berlawanan. Sementara, kekuasaan lokal secara kepentingan tentulah lebih dekat dan lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Namun terpisah dari kasus-kasus historis—di mana hal ini merupakan satu kebenaran—argumentasi ini meninggalkan begitu saja hubungan hakiki antara kekuasaan negara dengan kekuasaan lokal; kebenaran simpel bahwa kekuasaan negara yang dipegang oleh kelas yang dominan dan eksploitatif akan menghancurkan segala macam inisiatif progresif lokal, sementara kekuasaan yang sama jika dipegang oleh tangan kekuatan-kekuatan progresif dapat mendorong inisiatif yang demikian.

Kontra posisi kekuasaan negara dan kekuasaan lokal telah dipergunakan untuk menjustifikasi peran NGO sebagai *broker* antara organisasi-organisasi lokal, donor-donor asing neo-liberal (Bank Dunia, Eropa, atau Amerika Serikat), dan rezim pasar bebas lokal. Namun tetap saja, efeknya adalah memperkuat rezim-rezim neo-liberal dengan cara memutuskan *link* antara perjuangan-perjuangan lokal dan organisasi-organisasi lokal dengan gerakan-gerakan politik nasional atau internasional. Penekanan pada 'aktivitas lokal' sebenarnya melayani rezim-rezim neo-liberal, sebab hal itu mengizinkan beking asing dan domestik untuk mendominasi kebijakan sosio-ekonomi makro dan mengarahkan bagian terbesar sumberdaya negara menuju subsidi. Hal ini demi mempermudah kaum kapitalis untuk mengekspor serta institusi-institusi finansial untuk ikut bermain.

Jadi, sementara kaum neo-liberal mentransfer keuntungan yang didapat dari kepemilikan negara ke penguasaan privat kaum kaya, NGO bukannya menjadi bagian dari resistensi serikat buruh dan petani. Malah sebaliknya, mereka aktif dalam proyek-proyek pribadi skala lokal, mempromosikan wacana-wacana usaha kecil mandiri (*self-help*) dalam komunitas-komunitas lokal dengan cara memfokuskan diri pada usaha-usaha mikro. NGO membangun jembatan ideologis antara kapitalis berskala kecil dengan penarikan keuntungan monopoli dari adanya swastanisasi—semua itu atas nama 'anti-statisme' dan pembangunan masyarakat sipil. Sementara kaum kaya mengakumulasi kekaisaran finansial gila-gilaan dari swastanisasi, kaum profesional kelas menengah yang bekerja di NGO mendapatkan sejumlah kecil dana untuk membiayai kantor-kantor, transportasi, dan aktivitas ekonomi skala-kecil.

Poin politis yang penting adalah bahwa NGO mendepolitisasi sektor-sektor penduduk, merusak komitmen mereka terhadap pekerja publik (pegawai negeri), dan mengkooptasi para pemimpin potensial ke dalam proyek-proyek kecil. NGO absen dari perjuangan-perjuangan guru sekolah negeri ketika rezim-rezim neo-liberal menyerang pendidikan publik dan guru-gurunya. Jikalau menunjukkan dukungan, meski amat jarang, NGO mendukung pemogokan-pemogokan dan protes-protes menentang upah yang begitu rendah dan pemotongan anggaran sosial. Karena dana pendidikan mereka datang dari berbagai pemerintah neo-liberal, mereka menghindari solidaritas dengan guru-guru sekolah negeri dalam perjuangannya. Pada prakteknya, kata '*non-governmental*' diterjemahkan menjadi aktivitas-aktivitas anti-'membelanjakan uang untuk kepentingan umum, membebaskan segunung dana bagi kaum neo-liberal untuk mensubsidi para eksportir kapitalis, sambil sejumlah kecil dana bisa dikucurkan pemerintah pada NGO.

Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi *non-governmental* bukanlah *non-governmental*. Mereka menerima dana dari pemerintah-pemerintah berbagai negara di seberang lautan, ataupun mereka bekerja sebagai sub-kontraktor bagi pemerintah-pemerintah lokal. Sering secara terbuka mereka berkolaborasi dengan agen-agen *governmental* baik dalam negeri maupun luar negeri. 'Sub-kontrak' macam ini meruntuhkan keandalan kerja kaum profesional melalui kontrak tetap, menjadikan mereka sebagai gerombolan profesional yang memiliki ketergantungan (berdasar kontrak). NGO tidak berada dalam penyelenggaraan program-program komprehensif jangka panjang di mana kekayaan negara dapat dipergunakan. Lebih baik bagi mereka untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan terbatas bagi kelompok-kelompok sempit komunitas masyarakat. Lebih penting lagi, program-program mereka ini tidak lebih berharga bagi rakyat lokal, melainkan lebih bermanfaat bagi para donor luar negeri. Dalam pengertian tersebut NGO merusak demokrasi dengan merenggut program-program sosial dari tangan rakyat lokal serta para pejabat terpilihnya, mengalihkannya pada penciptaan kebergantungan pada pejabat-pejabat tak terpilih di seberang negeri jauh sana dan pejabat-pejabat lokal yang ditunjuk olehnya.

NGO membelokkan perhatian rakyat dan juga perjuangan-perjuangan dari anggaran nasional menuju pada *self-exploitation* bagi pelayanan-pelayanan sosial lokal. Hal ini memungkinkan kaum neo-liberal untuk memotong anggaran sosial dan mentransfer dana-dana negara guna mensubsidi tunggakan-tunggakan hutang yang parah yang ditanggung oleh bank-bank swasta, serta menyediakan pinjaman



Menurut Korten, strategi program pengembangan dari LSM-LSM yang berorientasi pada pembangunan tercermin dalam empat generasi: 1) Generasi pertama mengutamakan *relief and welfare*; 2) Generasi kedua (muncul sejak 1970-an) mengutamakan *scale self reliant local development* atau *community development*; 3) Generasi ketiga terlibat dalam *sustainable system development*; dan 4) Generasi keempat sebagai fasilitator gerakan masyarakat (*people's movement*). (Sumber: Onny S. Priyono, 1996)

dana bagi para eksportir. *Self-exploitation* (*self-help*) berarti bahwa, untuk tujuan membayar pajak pada negara dan tidak mendapat imbalan apapun, rakyat harus bekerja lembur dengan sumberdaya amat marginal, dan tidak perlulah mengeluarkan energi untuk memperoleh pelayanan-pelayanan negara yang terus diterima oleh kaum borjuasi. Secara lebih fundamental, ideologi NGO mengenai 'aktivitas voluntaristik pribadi' menghancurkan pengertian yang dikandung dalam kata 'umum' atau 'publik': yaitu ide bahwa pemerintah mempunyai obligasi untuk merawat dan memelihara warganya, serta melayani warga dengan kehidupan, kebebasan, dan jaminan kebahagiaan; dan bahwa tanggung jawab politik negara adalah esensial bagi kesejahteraan hidup warga negara. Berlawanan dengan catatan mengenai tangung jawab terhadap publik ini, NGO membantu perkembangan ide neo-liberal mengenai tanggung jawab pribadi terhadap problem-problem sosial dan pentingnya sumberdaya pribadi untuk menyelesaikan problem-problem itu. Sebagai akibatnya, mereka mejatuhkan beban ganda di bahu kaum miskin yang terus membayar pajak guna membiayai negara neo-liberal supaya dapat melayani kaum kaya, tetapi kaum miskin ini ditinggalkan begitu saja dengan *self-exploitation* pribadi untuk mengurusi segala macam kebutuhan mereka.

NGO dan Gerakan-gerakan Sosial-Politik

NGO menitikberatkan proyek, bukannya gerakan. Mereka 'memobilisasi' rakyat untuk berproduksi di sisi marjinal, tetapi bukan menggerakkan mereka untuk berjuang demi mengontrol alat-alat produksi utama kekayaan. Mereka memusatkan perhatian pada pendampingan teknikal finansial proyek, bukan pada kondisi-kondisi struktural yang terbentuk setiap harinya dalam kehidupan rakyat. NGO mengkooptasi bahasa-bahasa kaum kiri: 'kekuatan popular', 'pemberdayaan', 'kesetaraan gender', 'pembangunan berkesinambungan', 'kepemimpinan dari bawah', dll. Masalahnya adalah istilah-istilah ini dikaitkan pada sebuah kerangka kerja mengenai kolaborasi para donor dan agen-agen pemerintah yang mensubordinasi aktivitas praksis menjadi politik-politik non-konfrontasional. Sifat lokal aktivitas NGO berarti bahwa 'pemberdayaan' tidak akan pernah jauh dari sekedar mempengaruhi area-area kecil kehidupan sosial, dengan sumberdaya terbatas, dan di tengah syarat-syarat yang diizinkan oleh negara neo-liberal dan makro ekonominya.

NGO-NGO beserta para staf profesional pasca-Marxis mereka secara langsung mempunyai kompetensi dalam gerakan-gerakan sosial-politik untuk merebut pengaruh dari kaum miskin, para pe-

rempuan, dan mereka yang dikucilkan secara rasial. Ideologi dan praktek mereka mengalihkan perhatian rakyat dari sumber dan solusi kemiskinan (mereka lebih meninjau ke bawah dan ke dalam daripada melongok ke atas dan ke luar). Sebagai tawaran solusi, mereka lebih memilih untuk membicarakan usaha-usaha mikro, daripada bicara mengenai penghapusan elsploitasi yang dilakukan oleh bank-bank asing. Hal ini berdasarkan catatan mereka bahwa problem tersebut merupakan satu dari inisiatif individual ketimbang pengambilalihan pendapatan negara yang lari ke luar negeri. Bantuan dana NGO mempengaruhi sektor-sektor kecil di dalam masyarakat, menghadirkan kompetisi antar komunitas karena terbatasnya sumberdaya, membangkitkan berbagai perselisihan serta persiangan inter dan intra komunitas, dengan demikian mengikis solidaritas kelas. Hal sama juga berlaku di antara kaum profesional: masing-masing menjadikan NGOnya untuk memperoleh bantuan luar negeri. Mereka bertanding dengan cara menyajikan proposal-proposal yang lebih cocok di benak para donor asing, sambil tentulah mengklaim bahwa mereka bicara atas nama pengikutnya.

Efek jaringannya adalah perkembangbiakan NGO memfragmentasikan komunitas-komunitas miskin menjadi pengelompokan-pengelompokan sektoral dan sub-sektoral, yang tidak mampu melihat gambaran sosial yang lebih besar yang melingkupi mereka. Bahkan kelompok-kelompok ini juga lebih tak mampu untuk bersatu dalam perjuangan melawan sistem. Pengalaman baru-baru ini juga menunjukkan bahwa proyek-proyek yang dibiayai donor asing semasa berlangsungnya 'krisis' politik dan sosial memang menentang status quo. Namun sekali gerakan-gerakan telah surut, para donor itu mengalihkan dananya pada 'kolaborasi' ala NGO, memantapkan proyek-proyek NGO ke dalam agenda kaum neo-liberal. Hal yang kemudian menjadi item dominan dalam agenda pendanaan adalah proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi selaras dengan 'pasar bebas' ketimbang organisasi sosial demi perubahan sosial.

Struktur dan sifat NGO, dengan postur 'apolitis' mereka dan fokus mereka pada *self-help*, mendepolitisasi dan mendemobilisasi kaum miskin. Mereka medorong proses-proses elektoral yang diajukan oleh partai-partai neo-liberal dan media massa. Pendidikan politik mengenai sifat imperialisme, dan juga mengenai basis kelas dari neo-liberalisme, perjuangan kelas antara para eksportir dan buruh kontrak atau borongan, semua itu dihindari. NGO lebih senang untuk mendiskusikan 'kaum yang tersisihkan', 'kaum tak berdaya', 'kemiskinan ekstrem', 'diskriminasi gender', 'diskriminasi rasial', dll.,



Dalam KTT Sosial di Kopenhagen, para demonstran merusak stan Bank Dunia dan menolak diskusi dengan meneriakkan yel-yel tentang kegagalan lembaga donor tersebut. Beberapa LSM mencoba melakukan perubahan 'dari dalam' dan meneruskan informasi tentang proyek yang dianggap 'membahayakan' negara miskin atau masyarakat luas. 'Bank Information Centre' dari Washington misalnya, berhasil 'menekan' Bank Dunia agar mau menerjemahkan rencana programnya ke dalam bahasa negara lokasi proyek. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

tanpa pergi lebih jauh untuk bisa melampaui simptom-simptom superfisial dan menuju sistem sosial yang memproduksi segala macam kondisi yang mereka diskusikan tersebut. Melibatkan kaum miskin ke dalam ekonomi neo-liberal melalu 'aksi voluntaristik pribadi' sepenuhnya, NGO menciptakan sebuah dunia politis di mana kehadiran dari solidaritas dan aksi sosial hanya selubung semata bagi kompromi konservatif dengan struktur kekuasaan internasional dan nasional.

Bukanlah kebetulan ketika NGO telah menjadi dominan di daerah-daerah tertentu, maka aksi-aksi politik kelas yang independen berangsur-angsur luntur, dan neo-liberalisme melenggang tak tersaingi. Garis dasarnya adalah bahwa pertumbuhan NGO bertepatan dengan tercurahnya dana di bawah naungan neo-liberalisme dan makin dalamnya jurang kemiskinan di mana-mana. Meskipun terdapat berbagai klaim mengenai kesuksesan-kesuksesan lokal di banyak tempat, kekuatan neo-liberalisme secara keseluruhan tetap tegak tak tergoyahkan dan NGO-NGO dengan cepat mencari tempat dalam celah-celah kekuatan tersebut.



Menurut Eldrige, model pendekatan LSM ada tiga: 1) *high level partnership*, yakni *grassroots development* yang diwujudkan dengan kerjasama antara LSM dengan program pembangunan resmi seraya mencari peluang untuk mempengaruhi rancangan dan implementasinya agar lebih mengarah kepada partisipatori; 2) *high level politics*, yakni *grassroots mobilization* dengan menggalakkan gerakan penyadaran sosial, kemampuan mengelola diri sendiri, dan kelompok sasaran khusus; dan 3) *empowerment at the grassroots*, yakni dengan pemberdayaan masyarakat. (Sumber: M.M. Billah, 1997)

Perihal pemformulasian alternatif-alternatif telah juga dihalangi dengan berbagai cara yang lain. Banyak orang yang dulu merupakan pemimpin gerakan-gerakan gerilya dan sosial, para pemimpin serikat buruh, dan organisasi-organisasi perempuan yang populer, kemudian dikooptasi oleh NGO. Tak diragukan lagi, beberapa dari mereka tertarik karena adanya harapan—ataupun ilusi—bahwa NGO akan memberi akses menuju jantung kekuasaan, di mana hal ini memungkinkan mereka melakukan beberapa hal yang signifikan untuk perjuangan. Namun dalam sembarang kasus, tawarannya begitu menggiurkan: bayaran yang tinggi (terkadang bahkan dalam masa krisis keuangan), prestise dan dikenal para donor luar negeri, berbagai konferensi dan jaringan di luar negeri, staf pegawai, dan relatif lebih aman dari tindak represi. Sebagai kontrasnya, gerakan-gerakan sosial-politik menawarkan sedikit sekali keuntungan material meskipun memberikan respek yang lebih besar serta independensi, dan yang lebih penting, kebebasan untuk menantang sistem politik dan ekonomi. NGO dan para pendukung perbankan mereka dari luar negeri (Inter-American Development Bank, Bank Dunia, dll.) mempublikasikan *newsletter* yang menampilkan berbagai kisah kesuksesan usaha-usaha mikro dan proyek-proyek *self-help* lainnya—tentulah tanpa menyebut tingkat kegagalan yang tinggi, seperti tingkat kosumsi yang mengalami penurunan, pasar dibanjiri oleh barang-barang impor berharga murah, dan spiral suku bunga, seperti yang tengah terjadi di Meksiko (juga Indonesia—*Red.*).

Bahkan, 'berbagai kesuksesan' itu hanya mempengaruhi secuil fraksi kecil dari total kaum miskin dan hanya sukses pada tingkat di mana (kelompok-kelompok) yang lain tidak dapat memasuki pasar yang sama. Bagaimanapun, nilai propaganda dari kesuksesan usaha mikro individual adalah penting dalam membantu mengembangkan ilusi bahwa neo-liberalisme itu adalah fenomena popular. Seringnya ledakan massa dengan kekerasan yang terjadi di wilayah-wilayah di mana usaha-usaha mikro tadi berada, jelas menyiratkan bahwa ideologi itu tidaklah hegemonis dan NGO memang belum dapat menggantikan tempat gerakan-gerakan kelas yang independen.

Puncaknya, NGO-NGO membantu perkembangan sebuah tipe baru dari kolonialisme dan kebergantungan secara ekonomi dan kultural. Proyek-proyek didesain, atau setidak-tidaknya disetujui, berdasarkan 'garis-garis pedoman' dan berbagai prioritas dari pusat-pusat bercokolnya kaum imperialis serta insttitusi-institusi mereka. Proyek-proyek itu teradministrasi dan 'dijual' kepada komunitas-komunitas. Evaluasi-evaluasi dilakukan oleh dan untuk institusi-institusi imperialis. Perubahan prioritas pendanaan atau evaluasi yang jelek berakibat pada terjadinya *dumping* terhadap kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, lahan-lahan pertanian, dll. kelompok kerjasama dalam proyek. Semua hal dan orang didisiplinkan secara cepat untuk menuruti tuntutan para donor dan para evaluatornya. Para raja baru ini mengawasi dan memastikan terjadinya konformitas dengan tujuan, nilai, dan ideologi kaum donor, sebaik kelayakan penggunaan dana yang diturunkannya. Di mana 'kesuksesan-kesuksesan' muncul, yakni mereka secara parah bergantung hingga harus melanjutkan dukungan luar negeri, sebab tanpanya, kolapslah mereka.

Dalam banyak cara, sturktur-struktur hirarkis dan bentuk-bentuk transmisi dari 'dana bantuan' dan 'pelatihan' ini mirip derma di abad kesembilanbelas, dan para promotor tak jauh beda dengan para misionaris. NGO menitikberatkan '*self-help*' dalam menyerang 'paternalisme dan kebergantungan' terhadap negara. Dalam kompetisi antar NGO untuk memenangkan para korban neo-liberal ini, mereka menerima subsidi penting dari rekan-rekan mereka di Eropa dan AS. Ideologi *self-help* menekankan penggantian kerja publik oleh tenaga sukarelawan, dan secara bertingkat menempatkan kaum profesional untuk dikontrak secara temporer. Filosofi mendasar kaum intelektual NGO adalah untuk mentransformasikan 'solidaritas' ke dalam kolaborasi dan subordinasi terhadap makro-ekonomi neo-liberalisme, dengan cara mengalihkan fokus perhatian dari sumber-sumber daya yang dikuasai segelintir orang kelas kaya menuju pada *self-exploitation* yang dilakukan kaum miskin.

Namun, sementara begitu banyak NGO dengan cepatnya menjadi alat-perkakas neo-liberalisme, terdapat juga minoritas kecil yang berusaha membangun strategi alternatif yang mendukung politik anti-imperialis dan politik kelas. Tak satu pun dari mereka memperoleh kucuran dana dari Bank Dunia, ataupun agen-agen pemerintah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Mereka ini mendukung upaya-upaya untuk mengaitkan kekuatan perjuangan-perjuangan lokal pada perjuangan-perjuangan demi kekuasaan negera. Mereka mengaitkan proyek-proyek lokal pada gerakan-gerakan sosial-politik nasioonal: mengokupasi lahan-lahan luas milik pribadi, mempertahankan milik publik, dan kepemilikan negara menantang perusahaan-perusahaan multi-nasional. Mereka mengadakan solidaritas bagi gerakan-gerakan yang terlibat dalam perjuangan penyitaan tanah. Mereka mendukung perjuangan-perjuangan perempuan yang berkait dengan perspektif-perspektif kelas. Mereka dapat mengenali pentingnya politik dalam mendefinisikan perjuangan-perjuangan lokal, terutama yang mendesak sifatnya. Mereka percaya bahwa organisasi-organisasi lokal harus berjuang pada level nasional dan bahwa para pemimpin nasional harus dapat diperhitungkan oleh para aktivis lokal.

Beberapa Contoh Kasus di Amerika Latin

Marilah kita tengok beberapa contoh mengenai peran NGO dan hubungan mereka dengan neo-liberalisme serta imperialisme di negara-negara yang spesifik.

Bolivia

Pada 1985 pemerintah Bolivia meluncurkan programnya yang dinamai Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy, NEP) dengan dekrit: membekukan upah selama empat bulan sementara laju inflasi tahunan rata-rata berkisar 15.000 persen. NEP membatalkan segala kontrol harga dan mengurangi ataupun mengakhiri subsidi-subsidi yang disediakan pemerintah bagi makanan dan bahan bakar. Program ini juga meletakkan dasar bagi swastanisasi sebagian terbesar usaha milik negara dan pemecatan terhadap para pekerja sektor publik. Pemotongan luar biasa besar dalam program-program kesehatan dan pendidikan mengeliminasi sebagian terbesar jasa pelayanan publik. Kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural ini (Structural Adjustment Policy, SAP) didesain dan didiktekan Bank Dunia dan IMF, serta disetujui pemerintah-pemerintah serta bank-bank AS dan Eropa. Angka kemiskinan di Bolivia berbiak secara geometrik (laju deret ukur). Pemogokan-pemogokan umum yang

berkepanjangan dan konfrontasi-konfrontasi dengan kekerasan mengikuti hal tersebut. Sebagai responnya, Bank Dunia serta pemerintah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menyediakan dana yang masif guna membiayai sebuah 'program pengurangan kemiskinan'. Bagian terbesar uang tersebut langsung ditujukan pada agen pemerintah Bolivia, yaitu the Emergency Social Fund (ESF), yang mengalirkan dana bantuan ke NGO-NGO untuk pengimplementasian program. Jumlah dana itu bukannya tidak signifikan: pada 1990 total dana bantuan luar negeri adalah US$ 738 juta.

Bagai jamur, jumlah NGO di Bolivia tumbuh cepat dalam merespon dana internasional: awal 1980 terdapat 100 NGO, pada 1992 ada 530, dan terus bertambah. Nyaris semua NGO itu diarahkan menuju penanganan-penanganan berbagai problem sosial yang tercipta akibat kebijakan pasar bebas pemerintah Bolivia dan Bank Dunia, problem-problem yang tak dapat lagi dihadapi institusi-institusi negara yang telah terbuka belangnya. Dari puluhan juta dolar yang dialokasikan pada berbagai NGO, cuma 15-20 persen yang sampai ke tangan kaum miskin. Sisanya tersedot habis untuk membayar biaya administratif dan gaji para profesional. NGO-NGO Bolivia berfungsi sebagai kaki-tangan negara dan diadakan untuk mengkonsolidasikan kekuatan negara. Tingkat kemiskinan absolut tetap sama saja dan kebijakan-kebijakan neo-liberal yang menyebabkan derita jangka panjang malah dilindungi NGO-NGO itu. Sementara tak juga menyelesaikan masalah kemiskinan, program-program NGO yang teradministrasi malah memperkuat rezim sekaligus memperlemah oposisi terhadap SAP. NGO-NGO, dengan anggaran mereka yang besar, mengeksploitasi kelompok-kelompok yang rentan terhadap serangan dan mampu meyakinkan beberapa pemimpin oposisi bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan bila bekerjasama dengan pemerintah. Komentar seorang pengamat tentang peran NGO-NGO itu dalam 'program pemberantasan kemiskinan', "Jika program-program NGO ini tidak menciptakan dukungan langsung, setidaknya ini mereduksi oposisi potensial bagi pemerintah dan program-programnya."

Ketika para guru sekolah negeri di kota La Paz melakukan pemogokan untuk memprotes upah sebesar US$ 50 sebulan dan kondisi kelas tempat belajar yang riuh dan jelek, NGO-NGO mengabaikannya. Saat epidemi kolera dan demam kuning menjangkau seluruh negeri, program-program *self-help* NGO-NGO tak punya daya apapun, padahal sebuah program kesehatan masyarakat yang komprehensif tentu akan berhasil mencegahnya. NGO betul-betul menyerap banyak intelektual Bolivia yang sebelumnya adalah orang kiri, dan membelokkan mereka ke dalam golongan orang yang memaafkan



Ketika kebanyakan badan-badan bantuan internasional didirikan, diasumsikan bahwa fungsi utama badan-badan bantuan tersebut adalah untuk mengalihkan modal investasi dalam bentuk pinjaman dan hibah dari negara maju ke negara berkembang. Badan-badan ini menimbulkan permintaan untuk devisa, dan suatu kepentingan tersendiri dalam kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan ekspor, mengganti barang produksi lokal dengan barang impor, atau menarik modal investasi asing, bantuan hibah dan pinjaman—semuanya itu untuk dilembagakan dalam apa yang kemudian menjadi organisasi-organisasi internasional yang sangat kuat. (Sumber: David C. Korten, 2001)

sistem neo-liberal. Seminar-seminar mereka mengenai 'masyarakat sipil' dan 'globalisasi' telah mengaburkan fakta bahwa pengeksploitasi terburuk (para pemilik tambang pribadi, para eksportir agro-bisnis baru, dan para konsultan yang dibayar mahal) adalah anggota-anggota dari 'masyarakat sipil', dan bahwa SAP adalah sebuah rancangan kaum imperialis untuk membuka lebar-lebar pintu gerbang sumberdaya alam dan mineral dalam negeri supaya bisa dijarah tanpa aturan.

Chile

Di Chile pada masa kediktatoran Pinochet 1973-1989, NGO memainkan sebuah peran penting dalam menyibak pelanggaran-pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi, menyiapkan berbagai studi kritis mengenai model neo-liberal, menyokong program-program *soup kitchens*, dan lain-lain program pemberantasan kemiskinan. Jumlah NGO berlipat ganda dengan datangnya musim perjuangan-perjuangan popular yang masif antara 1982-1986 yang mengancam akan terjadinya penumbangan kediktatoran. Di wilayah-wilayah yang lebih luas di mana mereka harus mengungkapkan ideologi, mereka katakan itu adalah orientasi menuju 'demokrasi' dan 'pembangunan dengan keadilan'. Dari jumlah hampir dua ratus NGO, kurang dari lima dari mereka yang menyajikan analisis kritis dan penjelasan mengenai *link* antara imperialisme AS dengan kediktatoran, kaitan antara Bank Dunia yang mendanai kebijakan-kebijakan pasar bebas dengan tingkat kemiskinan sebesar 47 persen.

Pada Juli 1986, terjadi sebuah pemogokan umum yang sukses—satu kelompok gerilya bahkan nyaris berhasil membunuh Pinochet—dan AS bergegas mengirimkan seorang wakil, yaitu Gelbard,[4] untuk menjadi *broker* suatu transisi elektoral antara sektor-sektor yang lebih konservatif dari kaum oposisi dengan Pinochet. Sebuah kalender elektoral segera diadakan, plebisit diorganisir, dan partai-parta peserta pemilu kembali dimunculkan. Sebuah aliansi antara kaum Kristen Demokrat dan kaum Sosialis ditempa adanya dan bahkan aliansi ini kemudian memenangkan plebisit, mengakhiri kekuasaan Pinochet—tetapi tidak mengakhiri komando Pinochet atas angkatan bersenjata dan polisi rahasia. Aliansi ini kemudian memenangkan kursi kepresidenan.

---

[4] Catatan Redaksi: Sebagai informasi, Mei 2000, orang yang sama dengan tujuan sama, juga dikirim ke Indonesia. Terima kasih kepada penerjemah atas informasinya.

Gerakan-gerakan sosial yang memainkan peranan vital dalam mengakhiri kediktatoran malah termarjinalisasi. NGO berbelok dari mendukung gerakan-gerakan itu menjadi berkolaborasi dengan pemerintah. Kaum profesional NGO Socialist dan Christian Democratic menjadi menteri dan pelayan-pelayan pemerintah. Mereka yang semula mengkritik pedas kebijakan-kebijakan pasar bebas Pinochet kemudian malah menjadi penyelenggaranya. Alejandro Foxley, yang sebelumnya adalah Presiden CIEPLAN (sebuah institusi riset utama), di depan umum berjanji untuk terus mengatur indikator-indikator makro-ekonomi dengan cara yang sama dengan yang dilakukan menterinya Pinochet. NGO-NGO diinstruksikan para donor asing agar mengakhiri dukungan terhadap gerakan-gerakan akar rumput yang independen, dan bergabung berkolaborasi dengan rezim neoliberal sipil yang baru. Sur Profesionales, satu dari NGO-NGO penelitian yang terkenal, mengadakan riset mengenai 'kecenderungan terhadap kekerasan' di daerah-daerah kumuh—yang amat berguna bagi polisi dan rezim baru dalam melakukan represi terhadap gerakan-gerakan sosial yang independen. Dua dari kepala peneliti lembaga itu (dengan spesialisasi studi gerakan-gerakan sosial) menjadi menteri-menteri pemerintah yang mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi, yang kemudian menciptakan pendapatan yang paling timpang antara si kaya dan si miskin dalam sejarah orang Chile.

Link-link eksternal yang dimiliki NGO-NGO dan setumpuk ambisi profesional para pemimpinnya telah memainkan peran utama dalam penghancuran kejayaan gerakan massa popular. Kebanyakan pemimpin NGO menjadi fungsionaris pemerintah yang mengkooptasi para pemimpin lokal, sambil melunturkan majelis-majelis komunitas ala masyarakat umumnya. Berbagai wawancara yang dilakukan kepada para perempuan yang aktif di daerah kumuh Lo Hermida mengungkap peralihan ini dalam periode pasca-pemilu, "NGO-NGO mengatakan pada kami, karena demokrasi telah datang, maka tak perlu lagi melanjuntkan program-program (*soup kitchen*) itu. Kalian semua tak memerlukan kami." Secara cepat NGO-NGO mengkondisikan para aktivis mereka agar mendukung rezim pasar bebas yang 'demokratis'. Para fungsionaris NGO terus melanjutkan penggunaan retorika partisipatori mereka untuk meningkatkan perolehan suara bagi partai-partai mereka di pemerintahan, dan untuk mengamankan berbagai kontrak pemerintah.

Satu dampak yang amat menohok mengenai NGO-NGO di Chile adalah hubungan mereka dengan 'gerakan-gerakan kaum perempuan'. Apa yang sebelumnya dimulai sebagai suatu kelompok yang menjanjikan di pertengahan 1980-an secara berangsur-angsur diam-



Donatur dan pemerintah lebih berminat mendukung LSM yang mengadakan campur tangan dalam pemberian bantuan peringanan dan kesejahteraan yang secara langsung menghilangkan penderitaan daripada mendukung LSM yang berupaya mengadakan perubahan struktural yang mendasar. Jadi, kontraktor pelayanan umum maupun LSMP cenderung menghindari pertentangan dan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang tidak melawan struktur yang ada. (Sumber: David C. Korten, 2001)

bil alih oleh NGO-NGO yang mempublikasikan berbagai *newsletter* mahal dari kantor-kantor mereka yang tertata apik. Para 'pemimpin' yang pindah dan tinggal di lingkungan bergaya menyajikan benar gambaran jumlah aktivis perempuan yang makin menyusut. Selama berlangsungnya Konferensi Feminis Amerika Latin di Chile pada 1997, satu kelompok militan dari kaum feminis awam Chile ('kaum otonomis') mengajukan kritik radikal terhadap para feminis NGO yang tergadai habis pada subsidi-subsidi pemerintah.

Brasilia

Gerakan sosial yang paling dinamis di Brasilia adalah the Landless Rural Workers Movement (MST, Gerakan Buruh Tani yang Tak Punya Lahan). Dengan lebih dari lima ribu organiser dan beberapa ratus ribu simpatisan dan aktivis, gerakan ini telah secara langsung terlibat dalam ratusan lebih aksi pendudukan tanah beberapa tahun belakangan. Dalam satu konferensi yang diorganisir MST pada Mei 1996—saya bicara dalam konferensi tersebut—salah satu bahan perdebatan adalah peran NGO-NGO. Seorang wakil dari sebuah NGO Belanda tiba-tiba muncul dan berniat untuk ikut berpartisipasi. Waktu ia diberitahu bahwa pertemuan ini sifatnya tertutup, ia mengatakan balik kepada mereka bahwa ia memiliki 'proposal' bagi pendanaan pengembangan masyarakat (harganya US$ 300 ribu), lalu orang ini diperkenankan masuk. Dalam pengertian yang bukannya tak pasti, para pemimpin MST mengatakan pada si wakil NGO Belanda bahwa mereka tidak melakukan perdagangan, dan bahwa bagaimanapun, MST merancang 'proyek-proyek' mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri dan mereka tidak membutuhkan para tutor NGO.

Belakangan, rapat politik para perempuan MST mendiskusikan pertemuan yang baru-baru saja terjadi dengan NGO-NGO feminis yang memiliki basis kerja di daerah rural. Para perempuan dari MST dengan tegas mengajukan sebuah perspektif kelas, dikombinasikan dengan aksi langsung (okupasi-okupasi tanah), dan perjuangan demi reformasi agraria dengan kesetaraan gender. Para profesional NGO menuntut keras agar para perempuan yang tergabung dalam MST keluar dari organisasi-organisasi mereka, dan para profesional ini mendukung sebuah program minimalis tentang reformasi-reformasi feminis yang keras. Hasil akhir pertemuan ini adalah persetujuan taktis untuk menentang kekerasan rumah tangga, mendaftarkan perempuan sebagaimana kepala keluarga, dan mendorong perwujudan kesetaraan gender. Para perempuan MST, kebanyakan adalah anak perempuan dari para petani yang tak memiliki lahan, mempersepsikan para profesional NGO sebagai para pengejar karir yang



Menurut Jim Ife, pemberdayaan (*empowerment*) berarti '*providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*'. (Sumber: Jim Ife, 1995)

punya sifat suka memecah-belah dan tidak berkehendak untuk menantang elite-elite politik dan ekonomi yang menindas kaum tani. Meskipun mereka ini memiliki berbagai kritik terhadap para kawan lelaki mereka, para perempuan MST ini jelas merasakan daya tarik yang lebih besar terhadap gerakan daripada kepada para 'feminis' NGO-NGO yang menganjurkan kolaborasi kelas.

Dalam diskusi kami, MST membedakan NGO-NGO yang memberi kontribusi kepada gerakan (berupa uang, sumberdaya, dll.) untuk membiayai perjuangan kelas, dan NGO-NGO yang secara esensial dalam misinya malah memfragmentasi dan mengisolasi para petani, sebagaimana ini adalah kasus MST dengan banyak proyek-proyek NGO *pentecostal* dan yang dibiayai USAID serta Bank Dunia.

El Salvador

Di seluruh Amerika Latin, kaum petani militan telah menyuarakan kritisisme serius terhadap peran dan politik mayoritas NGO-NGO yang ada, khususnya mengenai sikap patronase dan keinginan mendominasi yang ditunjukkan NGO-NGO ini di balik retorika mereka yang semanis madu mengenai 'pemberdayaan masyarakat' dan partisipasi. Saya menjumpai hal ini secara langsung dalam kunjungan saya ke El Salvador, di mana saya bicara dalam seminar untuk Alianza Democratica Campesino (ADC, atau Aliansi Petani Demokratis) yang dihadiri 26 organisasi petani dan buruh tani tak punya lahan.

Sebagian kolaborasi kami melibatkan pembangunan bersama sebuah proyek pembiayaan untuk penelitian yang ditujukan pada kaum tani dan sebuah pusat pelatihan. Bersama para pemimpin ADC, kami mengunjungi sebuah agen swasta Kanada, CRC SOGEMA, yang di-subkontrak CIDA (Canadian International Development Agency), agen bantuan asing milik pemerintah Kanada. Mereka mengadministrasikan sebuah paket bantuan senilai Ca $25 juta bagi El Salvador. Sebelum kunjungan kami, seorang pemimpin ADC telah mengadakan diskusi informal dengan sebuah lembaga asosiasi CRC SOGEMA yang dijalankan orang-orang El Savador. Pemimpin ADC tersebut menjelaskan proposal dan nilai penting untuk menstimulasi penelitian partisipatori yang berbasis petani. Waktu itu, 'wakil' dari CRC SOGEMA mulai menggambar sebuah sosok di atas kertas. Ia menunjuk bagian kepala, "Itu," dia bilang, "adalah para NGO. Mereka berpikir, menulis, dan menyiapkan berbagai program." "Sementara dia ini," si wakil CRC SOGEMA menunjuk bagian tangan dan kaki, "adalah para petani. Mereka ini menyediakan data-data dan mengimplementasikan proyek-proyek tadi."

Episode yang baru diungkapkan ini adalah latar belakang pertemuan formal kami dengan kepala CRC SOGEMA. Direktur itu mengatakan kepada kami bahwa uangnya telah ditandatangani untuk diterima sebuah NGO milik orang El Savador: yaitu FUNDE (Fundacion Nacional para el Desarrollo, alias Yayasan Nasional untuk Pembangunan), sebuah firma konsultan yang beranjak menjadi profesional. Dia mendorong para pemimpin petani untuk bekerjasama dan ikut terlibat sebab, nyonya itu bilang, hal tersebut akan 'memberdayakan'. Pada saat terjadinya pembicaraan ini, menjadi jelas bahwa orang Salvador yang jadi asosiasi CRC SOGEMA adalah orang yang telah sebelumnya mengungkapkan pandangan yang menyakitkan hati mengenai hubungan antara NGO-NGO (bagian kepala) dan para petani (bagian tangan dan kaki) adalah sebuah '*link*' antara FUNDE dan SOGEMA. Para pemimpin ADC merespon bahwa meski secara teknis FUNDE itu kompeten, 'kursus-kursus' dan penelitian-penelitian mereka tidak memenuhi kebutuhan para petani dan mereka memiliki sikap serta tabiat yang paternalistik terhadap kaum petani. Ketika Direktur Kanada itu meminta contoh, para pemimpin ADC mengaitkan insiden 'gambar politik' dan peran yang diserahkan pada petani dalam gambar itu.



Dirangsang sebagian oleh keberhasilan Bank Grameen di Bangladesh dan Lembaga untuk Kebebasan dan Demokrasi di Peru, sekarang diakui secara luas bahwa apabila hambatan-hambatan prosedural dan finansial sistemik untuk menolong diri sendiri dihilangkan, maka golongan miskin merupakan resiko kredit yang baik sekali dan sangat efektif dalam menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Kata si direktur SOGEMA, hal ini adalah sebuah 'insiden yang amat disayangkan', tetapi mereka sama sekali tidak berhubungan dengan FUNDE. Jika ADC berkeinginan untuk punya pengaruh, disarankan paling baik memperolehnya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan FUNDE. Para pemimpin ADC kemudian menengarai bahwa rancangan proyek dan tujuan-tujuannya dielaborasi bersama para profesional kelas menengah, sementara para petani diundang untuk berkolaborasi dengan cara menyediakan data dan menghadiri 'seminar-seminar' mereka. Dalam perasaan terganggu sekaligus tak nyaman, si direktur meminta pertemuan diakhiri. Para pemimpin petani berang, "Kenapa pula kami digiring untuk percaya bahwa mereka (agen Kanada) tertarik dengan ikut berpartisipasinya petani, demokrasi, dan segala tetek-bengek lainnya, sementara mereka malah membagus-baguskan NGO-NGO yang tidak menghadirkan seorang petani pun? Studi itu takkan dibaca bahkan oleh seorang petani, juga tidak akan relevan sama sekali bagi perjuangan kami demi tanah. Ia akan cuma menyangkut 'modernisasi' dan bagaimana cara menipu petani agar mau pergi dari tanahnya, dan membelokkan lahan-lahan itu menjadi berbagai pertanian komersial atau daerah-daerah pariwisata!"

Kesimpulan

Para manajer NGO telah menjadi cakap dalam mendesain proyek-proyek. Mereka mentransmisikan retorika baru tentang 'identitas' dan 'globalisme' ke dalam gerakan-gerakan populis. Aktivitas dan teks-teks mereka mempromosikan kerjasama internasional, *self-help*, usaha-usaha mikro, dan menempa ikatan-ikatan ideologis dengan kaum neo-liberal sambil mereka mendorong rakyat masuk dalam ketergantungan ekonomis terhadap donor luar negeri. Setelah satu dekade berlangsungnya aktivitas NGO, para profesional ini telah 'mendepolitisasi' dan 'menderadikalisasi' seluruh area kehidupan sosial: perempuan, lingkungan, dan organisasi-organisasi pemuda. Di Peru dan Chile, di mana NGO-NGO telah berdiri kokoh, gerakan-gerakan sosial yang radikal telah lenyap.

Perjuangan-perjuangan lokal atas isu-isu mendesak seperti makanan dan gizi-lah yang bisa memelihara kemunculan gerakan-gerakan. Tentu saja NGO-NGO menitikberatkan hal 'lokal', tetapi masalah krusialnya adalah arah mana yang harus diambil oleh aksi-aksi lokal: apakah mereka perlu mengangkat isu-isu besar mengenai sistem sosial dan mengaitkannya dengan kekuatan-kekuatan lokal lainnya guna menghadapi negara dan para beking imperialisnya, ataukah mereka hanya melongok ke dalam, sambil menatap penuh minat kepada dana luar negeri serta terpecah-belah menjadi segerombolan pemohon subsidi eksternal yang saling bersaing. Ideologi NGO menyiratkan pilihan terakhir.

Para intelektual NGO begitu sering menulis tentang 'kerjasama' tetapi tanpa menyinggahi pokok persoalan mengenai 'harga' serta syarat-syarat aman bekerjasama dengan rezim-rezim neo-liberal dan agen-agen dana bantuan asing. Dalam peran mereka sebagai mediator dan *broker*, meluapnya dana luar negeri dan kesesuaian dana bagi proyek-proyek dalam penerimaan donor dan penerima dana lokal, 'urusan-urusan yayasan' dipesan dalam tipe politik baru yang serupa dengan '*labor contractors*' (*enganchadores*) yang terjadi di masa yang belum lama berlalu: mengumpulkan para perempuan menjadi satu untuk 'dilatih', mendirikan firma-firma skala mikro yang disubkontrakkan pada produsen-produsen yang lebih besar ataupun para eksportir yang memperkerjakan buruh dengan upah amat murah. Politik baru dari NGO pada hakekatnya adalah politik para komprador: Mereka tidak memproduksi satu pun produk nasional, mereka malah mengaitkan para pengucur dana asing dengan buruh-buruh lokal (usaha-usaha mikro yang bersifat *self-help*) untuk memfasilitasi kelanggengan rezim neo-liberal. Para manajer NGO secara fundamental adalah aktor-aktor politik yang memiliki proyek dan beng-

kel pelatihan yang tidak membuahkan satu pun dampak ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan kaum buruh dan tani. Aktivitas-aktivitas mereka nyata telah berpengaruh dalam menceraikan rakyat dari perjuangan kelas dan memasukkannya dalam bentuk-bentuk kolaborasi dengan para penindas mereka.

Guna membenarkan pendekatan ini, para ideolog NGO sering menghiba-hibakan 'pragmatisme' atau 'realisme' serta mengutip kemunduran yang dialami kaum kiri revolusioner, kejayaan gilang-gemilang yang dialami kapitalisme di Timur, 'krisis Marxisme', hilangnya berbagai alternatif, kedigdayaan AS, berbagai kudeta dan represi yang dilakukan militer. '*Possibilism*' ini digunakan untuk meyakinkan kaum kiri agar bekerja di relung-relung pasar bebas yang dipaksakan Bank Dunia dan SAP (yaitu IMF—*Red.*), serta mengurung politik sebatas pada parameter-parameter elektoral sebagaimana dipaksakan militer.

'*Possibilism*' yang pesimistik dari para ideolog NGO ini benar-benar cuma satu sisi. Mereka memfokuskan pandangan pada kejayaan-kejayaan elektoral neo-liberal dan tidak melihat protes-protes massa dan pemogokan-pemogokan umum yang terjadi pasca-elektoral, yang memobilisasi sejumlah besar rakyat dalam aktivitas ekstra parlementer. Mereka menatap pada kematian komunisme di akhir 1980-an dan tidak pada kebangkitan kembali gerakan-gerakan sosial yang radikal di pertengahan 1990-an. Mereka menggambarkan paksaan-paksaan militer terhadap para politisi terpilih tanpa menengok tantangan-tantangan terhadap militer yang dilakukan oleh kaum gerilyawan Zapatista, pemberontakan-pemberontakan kaum urban di Tjaracas, dan pemogokan-pemogokan umum di Bolivia. Dalam satu kalimat, kaum *possibilist* terlampau menatap berbagai dinamika perjuangan yang bermula dari level sektoral atau lokal di dalam parameter-parameter elektoral militer, dan kemudian terdorong untuk menaikkan dan melampaui batas-batas tersebut guna menutupi kegagalan-kegagalan kaum *possibilist* memuaskan berbagai tuntutan dan kebutuhan elementer rakyat.



UNICEF dan badan-badan internasional menyerukan diadakannya perluasan pelayanan sosial, terutama dengan menghantam gejala-gejala utama kemiskinan seperti kematian ibu dan anak dengan menggunakan 'peluru ajaib' yang terarah, teknis, cepat selesai, dan populer secara politik. Pemberian bantuan pangan langsung, bisa mengalihkan perhatian masyarakat agar melupakan suatu keadaan tanpa keadilan sosial yang menyebabkan dan mempertahankan kemiskinan. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Pragmatisme NGO-NGO tersebut cocok benar dengan ekstremisme kaum neo-liberal. Sepanjang 1990-an kita telah menyaksikan suatu radikalisasi kebijakan-kebijakan neo-liberal, dirancang untuk mencegah krisis dengan cara menangani: investasi dan para oportunis spekulatif yang lebih menguntungkan bank-bank luar negeri dan perusahaan-perusahaan multi-nasional, seperti minyak bumi di Brasilia, Argentina, Meksiko, Venezuela; pembayaran upah yang lebih rendah dan jaminan sosial yang lebih sedikit; pemutihan pajak yang lebih besar (tentu bukan bagi rakyat mayoritas); dan eliminasi se-

mua legislasi yang bersifat protektif terhadap kaum buruh. Struktur kelas kontemporer Amerika Latin sekarang ini lebih *rigid* dan negara lebih secara langsung terikat dengan kelas penguasa daripada sebelum-sebelumnya. Ironinya adalah kaum neo-liberal kini tengah menciptakan struktur kelas yang terpolarisasi yang jauh lebih dekat pada paradigma Marxis mengenai masyarakat, ketimbang visi-visi milik NGO.

Inilah mengapa Marxisme menawarkan sebuah alternatif riil terhadap NGO-isme. Di Amerika Latin, terdapat intelektual-intelektual Marxis yang menulis dan bicara demi kepentingan gerakan-gerakan sosial dalam perjuangan, mereka mempunyai komitmen untuk berbagi konsekuensi-konsekuensi politik yang sama. Merekalah intelektual-intelektual 'organik' yang secara mendasar merupakan bagian dari pergerakan—sumber yang menyediakan analisis dan pendidikan bagi perjuangan kelas untuk rakyat, sebagai lawan dari jajaran intelektual-intelektual NGO 'pasca-Marxis' yang terbenam dalam dunia institusi-institusi, seminar-seminar, yayasan-yayasan luar negeri, konferensi-konferensi internasional, dan laporan-laporan birokratis. Para intelektual Marxis ini mengenali sifat sentral perjuangan-perjuangan lokal, namun mereka juga memahami benar bahwa kesuksesan dari perjuangan-perjuangan tersebut tergantung pada sebuah perluasan hasil-hasil konflik antar kelas untuk menghantam negara pada level nasional.

Apa yang mereka tawarkan bukanlah 'solidaritas' hirarkis dari dana bantuan luar negeri dan kolaborasi dengan neo-liberalisme, melainkan solidaritas kelas, dan di dalam kelas, solidaritas kelompok-kelompok tertindas (perempuan dan kulit berwarna) melawan para pengekplotasi dari luar negeri dan domestik. Fokus utama mereka bukanlah mengenai dana, yang pada prakteknya memecah-belah kelas dan mebuat pasif kelompok-kelompok kecil untuk jangka waktu terbatas, melainkan pada aksi bersama yang dilakukan anggota-anggota kelas yang sama, berbagi ekonomi mereka bersama, dan melakukan perjuangan berbahaya secara bersama demi kemajuan kolektif.

Kekuatan intelektual-intelektual Marxis yang kritis terletak pada fakta bahwa ide-ide mereka senada dengan realitas-realitas sosial yang terus berubah. Polarisasi kelas dan berbagai konfrontasi dengan kekerasan yang makin sering terjadi adalah sebuah kejelasan. Jadi, sementara dalam pengertian institusional secara jumlah kaum Marxis itu lemah, secara strategis mereka ini kuat semenjak mereka mulai melakukan hubungan dengan generasi baru kaum militan revolusioner, dari kaum Zapatista di Meksiko hingga MST di Brasilia.


KORAN INI CUKUP KRITIS, PANTAS JADI KORAN WAJIB DI KANTOR LSM..
BUKAN... ITU KARENA KORAN INI PALING BANYAK IKLAN LAPTOP-NYA..
KOMPAS
KOALISI ANTI GOSIP
sabikom@yahoo.com

Pengerahan Sosial dari Utara ke Selatan:
Kebun Binatang dan Eksperimen Sosial?

Pantoro Tri Kuswardono[1]

Relations between NGOs and donor agencies contain many ambiguities. Pressures and critiques on donor agencies does not affect the high number of funding requests from NGOs to donor agencies. Relations with donor agencies begin with noble goals, i.e., providing energy for social change programs. Donor agencies then explain procedures that must be followed if an institution wants to funding for their activities. In reality, the money is given on the basis of the interests and ideological background of the donor agency. This writing identifies the character of various donor agencies along with their funding allocation model. Some donor agencies have a mandate to work alongside states' foreign policies, while others are based in private corporations with a philanthropic bent. This diversity of character determines the program of social change designed by each NGO. In this NGO-donor "market", an increasing number are setting aside their most important work, that is, how to work for the people who are experiencing oppression.

---

[1] Pantoro Tri Kuswardono adalah Program Officer Natural Resources Management and Indigenous People's Rights di sebuah lembaga dana di Kupang.

Pendahuluan

Pengucuran dana-dana bantuan bersifat hibah di Indonesia secara terbuka membawahi satu gagasan besar yang berjudul penguatan masyarakat sipil (*civil society*), semenjak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998. Layaknya yang terjadi pada negara fase kritis, bahkan mirip dalam situasi pasca-konflik, segera saja serombongan donor berdatangan dan membuka kantornya di Indonesia, mulai dari yang bersifat merespon cepat dalam menangani kejatuhan ekonomi dan konflik sosial, hingga donor-donor yang secara lugas menyatakan 'mendukung penguatan masyarakat sipil dan turut mengawal proses transisi menuju 'demokrasi sejati".

Dalam jangka kurang dari satu tahun, tiba-tiba saja seluruh Ornop (organisasi non-pemerintah) dari Jakarta hingga pelosok-pelosok kepulauan mendapat 'program yang lain daripada yang lain': penguatan kapasitas untuk mendorong penguatan masyarakat sipil menuju pemerintahan yang bersih dan demokratisasi. Ragam kegiatan pun berubah. Debat publik, upaya-upaya perubahan kebijakan menuju kebijakan yang pro-rakyat dan pro hak asasi manusia, pendidikan politik, pendidikan kritis, dan banyak kegiatan 'konsientisasi' dikerjakan di mana-mana, semuanya nyaris dengan gagasan yang sama: 'mengawal transisi menuju demokrasi'.

Dalam situasi kejatuhan ekonomi dan adanya kucuran dana yang besar untuk sektor-sektor di luar kegiatan yang *an-sich* kesejahteraan, angkatan kerja dari garda depan tumbangnya Soeharto memperoleh pilihan baru untuk memenuhi idealisme sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup. Jumlah aktivis mahasiswa yang membludak dan sulit mencari kerja dalam sekejap memasuki sektor mata pencaharian baru, yakni bekerja di organisasi non-pemerintah dan badan-badan bantuan luar negeri yang berkantor di Indonesia.

Tak hanya itu, pasokan energi yang besar dalam rangka mengawal transisi menuju demokrasi memacu tumbuhnya Ornop di seluruh wilayah kepulauan, tidak berbeda jauh dengan menjamurnya Ornop di Rusia pasca tumbangnya rezim Stalinis.[2] Di wilayah Nusa Tenggara Timur di mana saya tinggal dan bekerja, kantor kami bekerjasama dengan lebih dari sepuluh 'mitra' Ornop yang berumur tidak lebih dari 3 tahun. Itu belum termasuk Ornop-ornop lain yang bermunculan bak jamur di musim hujan.[3]

---

[2] Henry, Laura, 'Sponsored Democratisation: Environmentalists Bearers of Civil Society in Rusia', makalah untuk pertemuan ilmuwan politik 2001 di San Francisco.

[3] Hal yang sama juga terjadi di Afrika seperti diungkapkan Maria Nzomo dalam makalahnya 'Civic Capacity for Poverty Alleviation; Some Lessons for Development Theories and Practice'.

Dari sisi kuantitas, bertambahnya jumlah Ornop dengan agenda yang sama jelas merupakan potensi dan kekuatan penting dalam mengawal transisi menuju demokrasi. Hanya saja, jumlah Ornop yang besar dengan agenda, kepentingan, serta perspektif masing-masing dalam melihat persoalan merupakan kerumitan tersendiri dalam mengawal transisi menuju demokrasi.

Daftar pekerjaan rumah yang begitu banyak merupakan persoalan tersendiri bagi para sponsor demokrasi dan pembangunan alias para donor. Donor mendapatkan sejumlah dana dari para pendukung di negara asalnya, baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan raksasa yang semuanya tentu memiliki kepentingan ekonomis, politis, maupun ideologis. Bisa dikatakan tak ada satu sen pun yang disumbang oleh para sponsor yang tidak mengandung kepentingan. Semuanya mengandung kepentingan dan sejatinya harus dipertanggungjawabkan di muka para penyumbangnya.

Apa buktinya? Sederhana sekali. *Pertama,* semua donor dapat dipastikan memiliki dokumen-dokumen program yang lengkap dan rinci hingga skenario yang harus terjadi pasca intervensi program. Tujuan besar, *output* tahunan, dan dampak yang diharapkan pasca program yang dijabarkan secara rinci dan detil tersimpan rapi di kantor pusat negara-negara asal penyumbang dan kantor-kantor cabang, serta juga diedarkan kepada para pihak calon penerima dana. Beberapa dokumen juga menjelaskan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan donor, sehingga calon penerima dana tahu dan bisa menduga cocok-tidaknya program serta anggaran yang mereka ajukan dengan program dan kapasitas donor.

Kedua, hampir semua donor memiliki prosedur pengajuan dana bagi para pihak yang ingin mendapatkan bantuan. Dalam prosedur tersebut, secara resmi dan tegas tertulis sejumlah daftar pertanyaan tentang untuk apa dana tersebut digunakan, dan apakah sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dicita-citakan oleh donor. Jika sebuah lembaga donor berpikir bahwa hak asasi manusia perlu ditegakkan maka hal tersebut akan ditanyakan dan dikaji dalam setiap proposal yang diajukan. Demikian juga soal gender, kelestarian lingkungan, hingga proses pengajuan usulan pun akan dikaji, apakah sudah dikonsultasikan dengan rakyat dan seterusnya. *Ketiga,* kepada siapa dana dikucurkan pun bisa menggambarkan kepentingan apa yang dibawa donor-donor kepada kelompok-kelompok masyarakat di negara penerima.

Meskipun demikian, tidaklah sesederhana itu menuduh donor memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Mengapa? Karena dari banyak konsep, kajian, hingga prosedur programatik dan budget yang



Bantuan bagi penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur rata-rata Rp 100 miliar-Rp 200 miliar per tahun sejak 1993. Hingga 2002, dana yang mengalir ke daerah berpenduduk 3,8 juta jiwa, lewat 22 lembaga internasional, Rp 598,7 miliar. Namun, penduduk miskin tetap banyak, 1,3 juta jiwa (31,9 persen). (Sumber: KCM, 13/08/2003)

ada dalam siklus pendanaan donor, sedikit banyak merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari seruan banyak pihak yang memiliki gagasan-gagasan dan cara pandang terhadap pembangunan, kesejahteraan, hak asasi manusia, demokrasi, kelestarian lingkungan, gender, dan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda (*diffable*)[4] di berbagai belahan dunia, termasuk dari negara-negara Dunia Ketiga yang menerima dana. Dengan demikian secara simplistik, bisa dikatakan bahwa donor pun mengusung kepentingan rakyat Dunia Ketiga, bahkan kepentingan rakyat yang paling tertindas.

Betapa tidak, dengan kemampuannya mengakses dan menambang informasi lebih dari Ornop-ornop negara penerima bantuan, donor mampu membiayai penyelidikan-penyelidikan sosial, yang dilakukan dengan metode konvensional maupun metode partisipatif. Ratusan bahkan ribuan ahli disewa untuk menyelidiki persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah yang dianggap kondisinya akan menjadi lebih baik jika menerima dana donor. Beberapa donor juga mewajibkan staf dan konsultan ahlinya untuk bertemu dan berdialog langsung dengan rakyat ketika hendak menyusun program. Kadang kala donor-donor bahkan menghibahkan dananya bagi Ornop-ornop untuk melakukan penyelidikan sosial.

Lalu dimana letak persoalannya? *Toh* seluruh prosedur untuk mendukung proyek demokrasi dan kesejahteraan rakyat sudah dilalui. Hampir seluruh persoalan dan pandangan tentang kemiskinan, penindasan, dan peminggiran, sudah ditampung dan diurai dari konsep hingga dokumen dan anggaran si donor. Apa lagi yang harus dipersoalkan? Kenyataannya, banyak yang perlu dipersoalkan, bahkan pada taraf yang substansial. Relasi kuasa dan pertanggungjawaban serta pengaruh terhadap proses transformasi sosial dalam proses penambangan dana di negara-negara penyumbang dan pengalirannya kepada rakyat di negara-negara Dunia Ketiga ternyata perlu diperiksa ulang.

***

Selama 5 tahun terakhir, saya bekerja sebagai 'opsir' dalam sebuah lembaga donor lokal yang memiliki kontrak kerja dengan lembaga donor asing. Tidak mudah melompat dari seorang demonstran

---

[4] Frase ini adalah frase pengganti bagi frase 'orang cacat' (disable). Dalam konteks ini bahkan pergantian kata-kata dan frase dalam dokumen-dokumen donor adalah bagian dari hasil perjuangan banyak pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap golongan-golongan tertindas, terdiskriminasi, dan terpinggirkan.

dan aktivis gerakan mahasiswa menjadi opsir lembaga donor, yang bertugas menjajakan program dan dana bagi Ornop-ornop dan organisasi-organisasi rakyat yang menjadi mitra tempat saya bekerja. Pengalaman menjadi bagian dari gerakan mahasiswa yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan jauh dari prosedur proyek kemudian menjadi opsir yang harus mengawasi dan patuh pada prosedur proyek untuk menjamin lancarnya aliran pipa dana dari penyumbang kepada yang disumbang, menghasilkan sederetan pertanyaan bagi saya. Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga donor adalah bagian dari sebuah gerakan transformasi sosial? Jika ya, gerakan transformasi sosial yang mana? Selanjutnya, layakkah gerakan transformasi sosial memiliki prosedur dan pengelolaan aliran dana untuk 'penguatan rakyat' yang mirip dengan prosedur proyek pemerintah dan perusahaan? Apa dampaknya jika demikian? Dalam tulisan ini, saya tidak juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tetapi lebih menjabarkan pandangan dan pengalaman selama 5 tahun bekerja di sebuah lembaga donor.

Asal Usul Dana dan Tipologi Donor

Moda pengerahan dana yang berbeda mengandung konsekuensi dan implikasi yang berbeda pula, tanpa memandang jenis organisasinya, baik sukarela, kontraktor pelayanan umum,[5] organisasi-organisasi filantropis elitis, maupun agensi-agensi bantuan milik pemerintah. Pengerahan dana bahkan merupakan spektrum tersendiri dalam organisasi-organisasi–organisasi untuk pembangunan dan gerakan transformasi sosial.

Sebelum membahas donor dan gerakan transformasi sosial, tentunya yang patut kita periksa adalah spesies dari donor dan tipologi pengerahan energi negara-negara penyumbang. Korten dalam bukunya *Menuju Abad ke-21*, menjabarkan beberapa bentuk dan tipologi organisasi-organisasi yang berperan dalam pembangunan berpusat rakyat (Korten 1990). Sebagai orang yang berpengalaman panjang bekerja dengan berbagai organisasi-organisasi pembangunan, Korten mengungkapkan setidaknya ada tiga spesies organisasi yang punya peran, saling bergantung sekaligus bertentangan satu dengan yang lainnya. Tipe-tipe organisasi tersebut adalah pemerintah, bisnis, dan sukarela.[6]

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan paksa untuk menjamin ketertiban umum serta mampu memaksa distribu-



Hingga tahun 2002 jumlah LSM di Indonesia yang tercatat di Departemen Dalam Negeri mencapai angka 13.500 LSM. Angka tersebut belum termasuk LSM yang tidak tercatat. Dari jumlah tersebut, 90 persen LSM yang ada di Indonesia didanai pihak asing. (Sumber: KCM 13/01/2003)

5 Korten, 1990, hlm. 159.
6 Ibid. hlm. 157-165.

si alokasi sumberdaya dan kekayaan, suatu cara yang tidak akan mampu dilakukan oleh organisasi-organisasi bisnis maupun sukarela.[7] Sedangkan organisasi-organisasi bisnis memiliki peran serta yang mengkhususkan diri untuk mengumpulkan kekuatan ekonomi.[8] Memproduksi serta menjual barang dan jasa adalah pekerjaan utama dari bisnis, baik untuk kepentingan profit dan non-profit.[9] Masih menurut Korten, organisasi-organisasi non-profit kadangkala menggunakan ukuran-ukuran keberhasilannya persis seperti bisnis, yaitu ukuran finansial dan pasar.[10] Sementara sektor ketiga adalah organisasi-organisasi sukarela. Organisasi sektor ini mengkhususkan pada pengumpulan kekuatan terpadu yang mengandalkan kemampuan mereka untuk memakai nilai-nilai bersama dalam memobilisasi sumberdaya manusia dan keuangan.[11]

Dari caranya memperoleh dana, organisasi dapat dikelompokkan menjadi Kontraktor Pelayanan Umum (KPU),[12] organisasi sukarela, organisasi donor privat, dan donor pemerintah. Kontraktor Pelayanan Umum mendapatkan dananya dari badan-badan dunia, agensi-agensi bantuan luar negeri pemerintah, organisasi bisnis profit, maupun individu yang memiliki dana dengan sifat kontraktual. Sebagaimana layaknya kontraktor, mereka menjual jasa pada para penyumbang sesuai dengan 'tujuan-tujuan umum yang ditetapkan penyumbang'[13]. Siapa yang menjadi pelanggan dan pasar dalam hal ini adalah para donatur, komoditasnya adalah kapasitas yang dimiliki organisasi untuk menjalankan keinginan donor.

Dengan berani saya ambil kesimpulan bahwa yang dijelaskan oleh Korten tentang Kontraktor Pelayanan Umum adalah jika organisasi tersebut, baik untuk kepentingan profit maupun non-profit, memperolah dana dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan tujuan mereka yang memiliki uang. Di sisi lain, organisasi-organisasi donor banyak pula yang bersifat sukarela dan bergerak untuk tujuan organisasi yang 'disesuaikan'[14] dengan kepentingan konstituen (ang-

---

7 Ibid. Hlm. 159.
8 Loc. cit.
9 Ibid. hlm. 160.
10 Loc. cit.
11 Ibid. hlm. 161.
12 Di sini saya mengadopsi langsung istilah Korten tentang organisasi yang bersifat sebagai kontraktor pelayanan umum karena cara organisasi ini mendapatkan dana adalah dengan menjual jasa dan keahlian untuk mendistribusikan dana dalam rangka mencapai tujuan-tujuan penyandang dana.
13 Ibid. hlm. 160.
14 Saya menekankan kata 'disesuaikan', karena banyaknya kontroversi dan perdebatan tentang bagaimana sebuah organisasi donor sukarela mendapatkan mandat untuk mencari dana bagi tujuan-tujuan pembangunan ataupun transformasi sosial.

gota-anggotanya) dan kelompok-kelompok yang dibantunya. Meski demikian antara KPU dan organisasi donor sukarela bukanlah sesuatu yang hitam-putih tetapi merupakan spektrum.

Organisasi-organisasi sukarela seperti keluarga besar Oxfam, VECO, Plan International dan banyak yang lain, di satu sisi menjalankan peran-peran yang dilakukan oleh organisasi sukarela. Pembelaan, pendidikan publik, hingga demonstrasi sering dilakukan karena hal tersebut adalah mandat dari organisasi masing-masing. Oxfam America (OA) dan Oxfam Community Aid Abroad (OCAA) Australia misalnya, adalah organisasi yang aktif mengkampanyekan hak-hak masyarakat asli (*indigenous people*) di berbagai belahan dunia. Mereka juga memiliki pandangan yang kritis terhadap industri-industri ekstraktif seperti pertambangan dan isu-isu perburuhan, juga terhadap bantuan luar negeri negara asal.[15]

Dalam menjalankan program-program yang demikian, organisasi seperti yang disebutkan di atas menjalankan mekanisme layaknya organisasi sukarela. Pengerahan sosial di negara penyumbang bukan saja berupa dana, tetapi juga kekuatan massa dan tekanan untuk menghentikan praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi di negara-negara lain tempat organisasi tersebut bekerja.

Organisasi-organisasi sukarela di negara-negara Utara seringkali memiliki tiga karakter: (1) sebagai organisasi sukarela yang aktif memperjuangkan penghapusan kemiskinan struktural, (2) sebagai kontraktor pelayanan umum, dan (3) sebagai penyandang dana bagi organisasi-organisasi di negara Dunia Ketiga.[16] Sebagai organisasi sukarela, mereka memperoleh dana dari para simpatisan dan anggota-anggota individual, baik yang menyumbang secara reguler dalam jum-



Tekanan badan penyandang dana membuat banyak instansi pemerintah, khususnya Bappenas melakukan kerjasama dengan LSM internasional maupun nasional, seperti WSSPLIC dengan CARE International Indonesia. Berdasarkan pengalaman Bank Dunia antara 1973 sampai 1988 (15 tahun), 6 % dari total proyek yang mendapatkan dukungan dana dari Bank Dunia melibatkan LSM. Pada 1998, lebih dari sepertiga proyek yang disetujui oleh Bank Dunia melibatkan LSM. (Sumber: IBK Yoga Atmaja, 2003)

---

15 Oxfam America misalnya tidak pernah merekomendasikan organisasi-organisasi yang termasuk dalam "the Family of Oxfam" dan organisasi-organisasi mitranya untuk menerima dana dari USAID (United States Agency for International Development) karena menurut Oxfam America, bantuan USAID selalu bernuansa politis yang memberi keuntungan pada pemerintah Amerika Serikat.

16 Ciri khas lain organisasi sukarela di negara Utara yang memiliki tiga karakter ini adalah—karena sifat dasarnya yang voluntaris—adanya aturan-aturan balas karya dan penggunaan fasilitas sewajarnya. Biasanya staf tetap organisasi voluntaris digaji mendekati standar minimum dari aturan penggajian yang ditetapkan oleh negara-negara di mana organisasi tersebut berada. Berikutnya staf organisasi voluntaris dilarang keras menggunakan atau membelanjakan uang organisasi secara berlebihan dalam perjalanan tugas, maka digunakan hotel kelas standar, pesawat kelas ekonomi, restoran kelas standar, penggunaan kendaraan umum, dan sebagainya.
Hal ini berbeda dengan organisasi-organisasi donor yang memiliki karakter kontraktor pelayanan umum ataupun donor-donor yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Gaji dan penggunaan fasilitas staf organisasi donor kadang-kala amatlah mewah, seperti gaji yang luar biasa tinggi, hotel di atas bintang empat, pesawat kelas eksekutif, sewa kendaraan, dan sebagainya.

lah kecil maupun dalam jumlah besar.[17] Organisasi-organisasi ini biasanya berhubungan erat dengan banyak tipe organisasi maupun kelompok masyarakat di banyak negara penerima. Mereka mendapatkan dana dengan 'menjual' dalam arti melakukan pendidikan publik, kampanye, dan propaganda atas persoalan-persoalan yang dianggap penting untuk diatasi kepada para pendukungnya di negara masing-masing. Ketersediaan dana organisasi donor sukarela amat tergantung pada kemampuan 'bagian pemasaran' organiasasi tersebut menjual isu kepada masyarakat negara organisasi yang bersangkutan berasal.

Saat jumlah dana yang dihimpun para pendukung tidak mencukupi, organisasi-organisasi donor sukarela seringkali bertindak sebagai kontraktor pelayanan umum agar dapat memenuhi tujuan organisasinya. Menjual jasa kepada agensi-agensi pemerintah adalah salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh organisasi-organisasi donor sukarela ini. Cara yang lain adalah mendirikan unit-unit bisnis yang memiliki standar etika yang tinggi (untuk menjaga citra organisasi), yang keuntungannya dipergunakan bagi kepentingan pendanaan berbagai program pembangunan dan kemanusiaan, demokratisasi, hak asasi manusia, kesejahteraan, dan gender.

Sebagai organisasi sukarela yang memiliki visi atas keadilan, pengerahan sosial (termasuk dana) untuk isu spesifik juga dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Oxfam dengan mengangkat isu-isu tertentu seperti kampanye tentang konflik di Balkan, isu pertambangan, perdagangan yang adil, dan sebagainya. Pengerahan sosial untuk isu spesifik biasanya diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kampanye, pendidikan publik, dan advokasi, kepada para pemegang kebijakan di negara asal, badan-badan dunia, serta kucuran dana bagi rakyat negara-negara yang memiliki persoalan. Pada pengerahan seperti ini, seluruh perangkat organisasi, seksi program luar negeri (*overseas programme*), seksi advokasi dan kampanye, dan seksi pengerahan dana bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari isu yang dibawakan. Dalam hal ini organisasi-organisasi Utara, seperti menjalankan fungsi sebagai organisasi sukarela bahkan

---

[17] Kadangkala para individu yang menyumbang jumlah besar memiliki posisi yang istimewa dalam prosedur-prosedur pertanggungjawaban organisasi. Mereka menuntut pelaporan tersendiri atas dana yang mereka berikan dalam jumlah besar. Organisasi seperti Plan Internasional misalnya, malah melaporkan penggunaan setiap uang sumbangan dari '*foster parent*' kepada *foster parent* di negara asal. Cara yang sama juga dilakukan oleh Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Indonesia (GN-OTA).

organisasi gerakan sosial[18] yang mendorong terjadinya solidaritas internasional dan perubahan cara mengurus penghuni bumi.

Sementara itu, di sisi yang lain, organisasi-organisasi donor sukarela kadang kala mau tidak mau ikut serta terarah untuk mengerahkan energinya sesuai dengan kebijakan luar negeri asalnya. Alasannya, organisasi-organisasi ini mencoba mengawal kebijakan luar negeri negara Utara dalam bentuk bantuan maupun hutang agar tidak semakin merusak situasi. Karena itu, program-program 'semi' yang menandingi gagasan-gagasan yang didominasi pemerintah Utara dijalankan di negara yang sama, pada lokasi yang sama meski dengan aktor berbeda. Kadang kala pula, meski sulit dibedakan antara kepentingan bisnis dengan ideologinya, organisasi donor sukarela 'menjual' jasanya pada agensi pemerintah untuk menyalurkan dana, agar dapat mengintersepsi aliran dana bagi negara penerima dan tidak salah sasaran.

Tipe organisasi donor yang lain adalah organisasi-organisasi donor privat yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan atau kaum elit Utara yang memiliki semangat filantropis yang tinggi. Organisasi-organisasi yang termasuk dalam kategori ini misalnya Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Kettering Foundation, Yayasan Rio Tinto, Open Society Foundation, dan sebagainya. Adapula yang tidak berupa organisasi, tetapi berupa bagian dari departemen 'pengembangan masyarakat' sebuah perusahaan. Untuk yang terakhir ini, misi yang dibawa amat jelas: memperkuat citra perusahaan sebagai anggota masyarakat yang baik dan peduli pada sesama. Motif varian terakhir ini tentu saja meningkatkan profit bagi perusahaan induk.

Biasanya organisasi-organisasi donor yang dibentuk oleh perusahaan memperoleh dana abadi dari dividen saham-saham yang diberikan oleh perusahaan induk.[19] Ada pula yang mendapatkan dana lewat bunga deposito dana abadi yang dihibahkan perusahaan pembentuknya. Relasi antara organisasi-organisasi donor yang dibangun oleh perusahaan juga berbeda-beda. Ada yang terlepas dan tidak mempunyai hubungan hirarki adapula yang masih memiliki hubungan-hubungan hirarki.

Organisasi-organisasi yang memiliki dana abadi, baik berupa deposit di bank maupun prosentase saham perusahaan, lebih independen dalam mengelola dan mengucurkan dananya. Ketergantungan organisasi ini terhadap kesediaan pihak luar untuk mendukung



Menurut wakil ketua YLBHI Riswan Lapagu, ketergantungan LSM pada pihak asing tidak baik jika berlangsung terus-menerus dan permanen. Ketergantungan ini tidak hanya dapat mengubah *style* LSM, akan tetapi, juga bisa mengubah paradigma dan orientasi, bahkan mungkin juga ideologi perjuangan LSM. Ia mencontohkan betapa kini YLBHI mengalami kesulitan pendanaan yang luar biasa setelah enam tahun bergantung pada pihak asing. (Sumber: KCM 13/01/2003)

[18] Anders Uhlin dalam makalahnya 'Civil Society and Trans-national Democratisation' membedakan organisasi-organisasi penguatan masyarakat sipil sebagai Ornop, organisasi gerakan sosial, dan gerakan sosial itu sendiri (Uhlin, 2000).

[19] Annual Report Ford Foudation 2001, www.fordfound.org.

program-program amatlah minim. Bunga deposito ataupun dividen dari saham yang dimiliki oleh yayasan-yayasan ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi misi filantropis organisasi.

Organisasi keempat adalah donor-donor atau agensi pemerintah untuk bantuan luar negeri. Organisasi ini memperoleh dana langsung dari pemerintah suatu negara untuk didistribusikan sebagai hibah kepada negara penerima demi kepentingan pembangunan. Karakter organisasi ini dari segi visi dan misi tidak pernah terlepas dari kebijakan luar negeri pemerintah negara yang bersangkutan. Hal yang paling jelas adalah persoalan mandat organisasi untuk menyalurkan bantuan, disesuaikan dengan kebijakan luar negeri pemerintah yang bersangkutan.

Penguatan Rakyat Selalu Butuh Energi

Dalam bentuk apapun, setiap pencapaian tujuan, baik untuk tujuan-tujuan transformasi sosial, penggemukan tabungan rakyat, ataupun gerakan politik demi kekuasaan maupun kolonisasi selalu membutuhkan energi: ide dan informasi, manusia, waktu, dan tentu saja dana. Ketika saya masih duduk di bangku kuliah, persoalan pengerahan sosial manusia, waktu, ide, dan dana adalah bagian utama dari kurikulum pendidikan aktivis.



Banyak LSM, bahkan beberapa LSM yang paling besar, menganggap perannya hanya terbatas pada tindakan-tindakan sampingan yang terutama bertujuan menghilangkan akibat-akibat kemiskinan di antara orang-orang yang dapat menjangkau mereka secara langsung. Mereka jarang mempunyai fokus strategi yang jelas, seringkali tidak memiliki kemampuan teknis, dan kelihatannya enggan bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Pengerahan sosial seperti itu tak berubah ketersediaannya. Hal yang berubah adalah cara-cara menjamin ketersediaannya, yang pada kenyataannya berimplikasi pada pola relasi antara penyedia, perantara, dan penerima. Implikasi lebih jauh adalah pada pencapaian tujuan dari pengerahan sosial tersebut.

Persoalan yang hendak dikemukakan di sini adalah apakah pengerahan sosial dan pengaliran dana menyumbang pada transformasi sosial, menghilangkan ketergantungan, dan menjadikan dunia lebih adil? Jawabannya, ya dan tidak. Semuanya amat tergantung pada bagaimana proses pengerahan sosial di seluruh bagian dilakukan, baik pada penyumbang, perantara, dan penerima. Ini berarti, berangkat dari bagaimana rencana-rencana pengerahan sosial didesain hingga tingkat yang paling detil, mulai dari penambangan informasi, cara membaca informasi, produk gagasan yang dihasilkan, prosedur-prosedur teknis diciptakan, tata cara pemilihan rekan kerja maupun kontraktor, hingga ke mekanisme pertanggungjawaban setiap sen dana yang dialirkan kepada penyandang dana.

Howell dan Pearce, dalam bukunya *Civil Society and Development a Critical Exploration*, menulis tentang bagaimana para donor mencoba memanufaktur terciptanya masyarakat sipil dari luar.

Gambaran yang ditulisnya adalah bagaimana lembaga-lembaga donor privat, pemerintah, maupun sukarela melakukan perubahan program menuju penguatan masyarakat sipil pada akhir 1980-an.[20] Howell menjabarkan kegagalan-kegagalan program penyesuaian struktural, meluasnya korupsi, dan otoritarianisme di negara-negara Dunia Ketiga mendorong Bank Dunia dan donor-donor pemerintah untuk mengubah kebijakan bantuannya. Berikutnya, kemunculan gelombang demokratisasi di negara-negara Selatan[21] serta rekonseptualisasi Ornop dalam melihat pembangunan secara lebih luas, semakin memacu perubahan program DFID (Department for International Development) milik pemerintah Inggris menuju penguatan masyarakat sipil.[22]

Meskipun demikian, diskursus tentang masyarakat sipil di kalangan donor merupakan hal yang kabur. Pada awalnya, donor menerjemahkan masyarakat sipil sebagai organisasi-organisasi *intermediaries*, yang berbeda dengan pasar karena tidak menghasilkan laba, serta berbeda dari pemerintah karena tidak punya kuasa untuk memerintah.[23] Namun demikian, seiring dengan derasnya wacana yang didorong para akademisi maupun aktivis, pendefinisian ini kemudian berubah pada hal yang lebih luas.

Namun demikian, apakah gambaran yang diciptakan para donor merupakan gambaran yang sama dengan gambaran rakyat di negara-negara penerima? Pada kenyataannya, dominasi atas gagasan tetaplah milik donor ketika mereka sudah menetapkan ke arah mana saja dukungan dialirkan. Ke negara mana sebaiknya dana dialirkan, pada organisasi mana saja, pada kegiatan apa saja amat tergantung dari kepentingan politik-ekonomi luar negeri negara-negara penyumbang, ataupun interpretasi donor terhadap demokrasi, masyarakat, ataupun penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Howell mengatakan bahwa negara-negara Utara serta organisasi-organisasinya memiliki kecenderungan atas gambaran yang sama dalam mendefinisikan masyarakat sipil.[24] Mekanisme segitiga (pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil), menjadi acuan utama dalam mengerahkan energi sosial ke negara-negara Dunia Ketiga yang miskin, korup, dan boros. Secara sistematik pula, gambaran ini direproduksi lewat program-program donor privat dan pemerintah.

---

20 Howell, 2001, hlm. 93-102.
21 Akatiga, Jurnal *Analisis Sosial*, Vol. 7 No. 2 Juni 2002, hlm. 20.
22 Op. cit. hlm. 99.
23 Ibid. hlm. 112.
24 Howell, 2001, hlm 118.

Malah, jika ada ruang untuk memeriksa lebih lanjut, gambaran-gambaran program donor dan lembaga keuangan dunia, secara tidak sengaja cukup kompak dalam mengembangkan keseimbangan segitiga ini. Bank Dunia misalnya, mengerahkan dan menjamin hutang-hutang negara kreditur untuk berbagai proyek yang memperkuat sistem pelayanan pemerintah serta mengembangkan sistem bisnis yang efisien dan sesuai pasar bebas.[25] Sebagai pengimbang, donor-donor privat kemudian memperkuat sektor ketiga sang 'masyarakat sipil' agar terwujud pemerintahan yang bersih dan efisien, serta melayani ekonomi pasar bebas.

Dinamika Relasi Ornop-Donor di Negara Penerima

Di sisi penerima dana, persoalan pendanaan adalah persoalan yang genting dan cenderung kronis. Dalam keberadaannya yang lebih dari 30 tahun, Ornop-ornop di Indonesia, terutama golongan yang biasa disebut sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), amat bergantung pada dukungan dana negara-negara Utara. Karakter Ornop-ornop yang beragam dan membentuk rentang spektrum, menggunakan ciri-ciri seperti yang diungkapkan Korten, yaitu organisasi sukarela dan kontraktor pelayanan umum. Sedangkan menurut Fakih, karakter Ornop terbentang dalam suatu spektrum yang disebut sebagai Ornop-ornop konformis, reformis, dan transformatif;[26] kategorisasi yang kadangkala menghasilkan arogansi-arogansi tersendiri bagi Ornop-ornop yang memiliki pelayanan advokasi kebijakan, pendidikan kritis, dan pendidikan popular (akan dibahas pada bagian lain).



Banyak LSM sendiri tidak mengetahui dengan jelas apakah mereka merupakan organisasi sukarela yang terutama didorong oleh nilai-nilai, atau kontraktor pelayanan umum yang didorong oleh pasar. Ada beberapa LSM yang terlibat dalam pekerjaan bantuan internasional menganggap pihaknya sebagai kontraktor pelayanan umum, tetapi pertanyaan mengenai apakah organisasi mereka sebenarnya didorong oleh pasar atau oleh nilai-nilai, membuat banyak golongan profesional LSM merasa canggung. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Tetapi benarkah batasan-batasan yang dijelaskan dalam spektrum karakter Ornop, baik oleh Korten dan Fakih, masih berlaku hingga sekarang?[27] Menurut saya, hal ini semakin kabur di era pasca

---

25 Baca laporan pelaksanaan Country Asisstance Strategy Bank Dunia untuk Indonesia, 2001. Dokumen ini menjelaskan sektor-sektor yang didanai oleh berbagai lembaga dunia dan negara di Indonesia baik hutang maupun hibah (umumnya International Financial Institutions (IFIs), G-7, MIGA, dan agensi-agensi pemerintah Utara) dalam berbagai program. Seluruhnya menyambungkan efesiensi dan minimasi peran pemerintah, penguatan sektor bisnis terutama yang menunjang investasi dan ekspor, pengelolaan lingkungan hidup sebagai cadangan pengerukan, dan pengawasan oleh masyarakat sipil yang kuat tapi pro-liberalisme.

26 Fakih, 1996, hlm. 122.

27 Pada periode tertentu, saat donor-donor masih hanya mendanai kegiatan-kegiatan kesejahteraan dan tidak menunjang transformasi sosial, Ornop-ornop konformis bisa dikategorikan juga sebagai kontraktor pelayanan umum. Tetapi ketika donor-donor juga mendanai dan mendorong terjadinya proses transformasi sesuai dengan agendanya, Ornop transformatif pun bisa menjadi kontraktor pelayanan umum.

Soeharto. Baik Howell, Henry, dan banyak pengamat, serta juga diakui secara jujur oleh para 'pekerja'[28] maupun aktivis Ornop, mobilitas gerak Ornop akan segera menurun jika donor-donor berhenti mendukung. Situasi ini kemudian menjadi umum setelah tumbangnya Soeharto. Euforia reformasi dan keterbukaan, meluapnya angkatan kerja yang diagung-agungkan sebagai penumbang rezim, serta banjir donor, menyumbang pada situasi ini. Betapa tidak, menurut apa yang saya alami di awal 1990-an dan berdasarkan cerita-cerita aktivis veteran yang sudah bergerak jauh sebelum saya kuliah di zaman Soeharto, kesukarelaan dan kesediaan untuk berkorban jauh lebih tinggi dibanding setelah Soeharto jatuh. Para aktivis rela mengorbankan kesenangannya, untuk pergi ke ruang-ruang rakyat secara sembunyi-sembunyi bahkan dengan biaya sendiri atau patungan, demi mendorong terjadinya gerakan sosial menumbangkan rezim otoriter.

Setelah Soeharto, diiringi banjir donor,[29] angkatan kerja yang jumawa—tetapi sudah tidak lagi memperoleh kesempatan untuk memasuki lapangan kerja akibat krisis ekonomi—segera membentuk Ornop (dengan kepentingan ideologis dan perut yang sulit dibedakan) dan ikut dalam persaingan mendapat hibah dari donor. Ornop kemudian menjadi sektor tenaga kerja baru yang dulunya barangkali tidak pernah ada.[30] Ornop sendiri, karakternya cenderung seperti bunglon baik secara organisasi maupun manusianya. Ada yang aktivis, ada yang pekerja, dan banyak yang keduanya. Di satu sisi, Ornop adalah organisasi yang independen dan berani bernegosiasi dengan donor tentang program-program yang transformatif, bahkan cenderung revolusioner. Tetapi kadangkala dia amat pragmatis dan menjadi sekadar kontraktor pelayanan umum, meski isu yang dibawanya 'transformatif'.[31]

Visi yang terbatas, atau bahkan terlalu luas sehingga sulit diterjemahkan secara riil, atau visi yang tidak sesuai dengan kapasitas yang

---

28 Saya membedakan pekerja Ornop dan aktivis Ornop. Pekerja Ornop adalah orang yang bekerja di Ornop demi mencari kesejahteraan semata. Pekerja Ornop umumnya bekerja berdasarkan proyek dan ketersediaan dana.

29 Hingga saat ini saya belum menemukan tulisan atau pamflet dari aktivis Ornop maupun pengamat sosial yang menjelaskan mengapa donor-donor di luar lembaga-lembaga keuangan dunia dan agensi pemerintah juga turut membanjiri kepulauan Indonesia.

30 Pada buku yang sama, Howell juga menjelaskan bahwa krisis dunia tahun 1970-an membangkitkan sektor tenaga kerja baru di Ornop-ornop utara. Hal ini masih berlangsung hingga sekarang.

31 Di masa transisi yang tak kunjung selesai, istilah kegiatan transformatif pun perlu diperiksa ulang. Banyak donor mendanai kegiatan-kegiatan yang mendukung transformasi sosial, tetapi apakah dijalankan secara tepat dan berdampak transformatif, dan apakah Ornop penerima dana belajar tentang transformasi yang dijalankan atau hanya sekedar menjalankan pekerjaan? Walahualam.

dimiliki; munculnya Ornop-ornop; dan membludaknya jumlah aktivis maupun pekerja Ornop membawa terang dan gelap bagi transformasi sosial. Kenyataannya, kemunculan Ornop-ornop dengan program advokasi perubahan kebijakan, pengawasan atas jalannya pengurusan negara, gender, dan hak asasi manusia, membuat para pengurus kantor negara mulai berhati-hati dalam menjalankan kebijakannya.

Namun pada saat yang sama pula, Ornop bersaing satu sama lain memperebutkan popularitas publik dan pengaruh politik, serta prestasi menyelesaikan program tepat waktu. Secara samar,[32] persaingan ini boleh jadi adalah persaingan memperebutkan dana-dana dari donor yang ada. Semakin berprestasi berarti semakin disayang donor, yang artinya kestabilan pendanaan untuk tujuan ideologis maupun kesejahteraan Ornop. Kadangkala persaingan itu cukup ideologis karena perbedaan visi dan metode-metode kerja. Tetapi yang saya amati, persaingan yang muncul lebih banyak karena kepentingan berprestasi di depan donor masing-masing, dan yang tidak pernah disadari bahwa '*booming*' donor tidak berlangsung selamanya. Donor akan berhenti jika periode programnya selesai dan belum tentu akan dilanjutkan.

Donor cukup berperan dalam menghasilkan persaingan-persaingan antar Ornop yang kadang begitu terbuka di tingkat akar rumput.[33] Donor sendiri perlu menunjukkan prestasinya baik sebagai kontraktor, organisasi sukarela yang memiliki konstituen, maupun sebagai agensi pemerintah Utara. Kehilangan pamor akibat gagal mendistribusikan dana dalam waktu yang ditentukan serta tidak mampu menunjukkan bukti-bukti administratif, bisa berakibat fatal bagi para donor. Mereka yang organisasi sukarela bisa kehilangan pendukung, yang kontraktor kehilangan proyek, sedangkan yang agensi pemerintah bisa dituduh korupsi keuangan. Kekuatiran yang sama dengan Ornop-ornop di negara penerima.

---

[32] Dalam menjalankan keseharian sebagai opsir lembaga donor, dalam satu lokakarya saya mendengar adanya gurauan, "...berdoa menurut donor masing-masing," di kalangan aktivis Ornop. Semua tertawa, seperti menertawai diri sendiri, lalu kompak mengecam donor atau Ornop yang tunduk begitu saja pada keinginan donor. Tetapi di sela-sela lokakarya, orang-orang yang tadi kompak mengecam donor mulai mendekati saya secara pribadi (bahkan ada yang sembunyi-sembunyi) untuk meminta dukungan dana bagi organisasinya.

[33] Di salah satu kampung yang pernah saya kunjungi, rakyat terbagi dalam kelompok-kelompok yang didampingi Ornop yang berbeda. Kelompok-kelompok ini bahkan bersaing satu sama lain baik dalam kesejahteraan maupun politik desa. Kelompok yang satu menjelek-jelekkan kelompok yang dikelola Ornop lain, sementara yang lain juga bertindak sama terhadap kelompok yang satunya.

Di beberapa tempat, meski persaingan itu ada, tetapi kematangan berpikir serta kemauan belajar antar para aktivis Ornop mulai berhasil mengelola persaingan menjadi energi yang positif. Di salah satu pulau di tempat saya bekerja, perundingan-perundingan antar Ornop, bahkan dengan organisasi rakyat (petani) yang mulai berkembang, mulai merefleksikan dampak dari seluruh pekerjaan Ornop baik yang pernah dikategorikan konformis hingga yang transformatif. Dari mereka yang bekerja untuk peningkatan pendapatan, hingga yang menggalang kekuatan rakyat untuk merubah kebijakan publik.

Secara perlahan, dan tidak begitu rapi,[34] sebagian Ornop mulai memperluas cakrawalanya dalam menerjemahkan transformasi sosial, yakni tidak semata-mata pada prosedur-prosedur politik, tetapi juga menyangkut penguasaan alat-alat produksi, membangun organisasi rakyat yang kuat, dan agenda-agenda untuk merebut pasar. Secara berani pula, banyak Ornop mulai membicarakan dan mengaitkan keseharian program mereka dalam rangka pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dimana, untuk hal ini banyak donor terutama badan-badan pemerintah sedikit alergi.[35] Dari segi pendanaan, aliansi-aliansi taktis Ornop yang tidak terstruktur, juga mulai menyumbangkan dana programnya untuk kepentingan bersama, serta berani mensubversi agenda-agenda donor secara taktis.[36]

Implikasi lain dari banjir dana adalah tersedianya suplai berlebih. Dalam satu diskusi, seorang kawan yang biasa menjadi konsultan lembaga donor bercerita tentang situasi suatu pulau di mana jumlah Ornop lebih banyak daripada jumlah desa. Katanya, "Di pulau itu orang kampung membutuhkan waktu lebih dari 7 hari dalam satu minggu. Mengapa? Karena setiap hari mereka memiliki kegiatan bersama dengan institusi-institusi lain mulai dari Ornop, pemerintah, dan institusi agama. Mereka bilang, 7 hari satu minggu tidak cukup, bahkan 8 hari pun mungkin belum cukup."



Ada desakan pada organisasi sukarela untuk menjadi kontraktor pelayanan umum: (1) Kelelahan karena keuangan selalu di antara kebertahanan dan iming-iming donatur; (2) Ketegangan yang dihadapi untuk berjuang melawan kepentingan, nilai dan praktek yang mapan; (3) Dengan tumbuhnya organisasi, sulit mempertahankan konsensus atas nilai dan komitmen; (4) Adanya perasaan wajib moral untuk menjamin jaminan pekerjaan staf yang dibayar; (5) Keyakinan bahwa dengan kontrak akan diperoleh dana lebih besar yang memungkinkan organisasi melakukan hal-hal yang dirasa penting; dan (6) Tekanan donatur untuk 'memprofesionalkan' staf dengan menambah pakar yang mungkin tidak menghayati nilai-nilai organisasi. (Sumber: David C. Korten, 2001)

---

34 Jika pengelolaan konflik begitu rapi, bagi saya itu malah menimbulkan kecurigaan. Mengapa? Karena dialektika perubahan sebetulnya tidak terjadi tetapi merupakan sebuah rekayasa.

35 Wacana penegakan hak ekonomi, sosial, dan budaya barangkali merupakan bagian yang paling terbelakang dalam gerakan HAM di Indonesia. Banyak donor yang juga tidak terlalu mendorong aktivitas yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, bisa jadi karena penguatan pada hak-hak ini dapat menggangu agenda neo-liberalisasi di negara ini.

36 Pengalaman saya berhadapan dengan banyak Ornop, sebagian di antara mereka memiliki minat yang tinggi untuk menerima program dari banyak donor. Jika diperiksa, seringkali program dari donor tidak berkaitan dengan visi organisasi. Beberapa bahkan bersedia mengubah visinya sesuai dengan program masing-masing donor agar bisa menerima dukungan dana.

Di kalangan donor sendiri, aliansi ideologis adalah hal yang sulit dilakukan. Donor-donor amat jarang melakukan pertemuan resmi, kecuali yang tergabung dalam jaringan tertentu, seperti keluarga Oxfam untuk membicarakan apa yang sebaiknya dilakukan bersama dan tidak saling tumpang-tindih di negara di mana program-program mereka dijalankan. Persaingan untuk memenangkan gagasan lewat jumlah uang yang dikucurkan seringkali membuat para donor tidak terlalu berpikir lebih jauh tentang implikasi kucuran dana dan dominasi gagasan atas para penerima dana. Umumnya donor lebih menekankan sisi administratif dari sebuah program, menghabiskan dana tepat pada waktunya, memastikan pelaporan tepat pada waktunya, serta memastikan bahwa dana yang dikucurkan tidak di-'belok'-kan[37] penggunaannya.

Rakyat: Kebanjiran Ide Kebanjiran Kegiatan, Namun Berdayakah?

Ujung terakhir dari pengerahan sosial adalah rakyat. Kucuran dana donor, kegiatan yang dilakukan oleh Ornop, hingga kucuran dana langsung ke masing-masing rumah ditujukan kepada rakyat. Kaum yang diagung-agungkan sebagai tuan dari segala pembangunan tetapi sering juga menjadi penonton, boneka, atau korban persaingan.

Visi dan cara pandang lembaga-lembaga pengerahan dana serta agen-agen penyalur (donor dan Ornop) terhadap persoalan yang dialami rakyat, memiliki implikasi yang berbeda-beda terhadap rakyat. Hal yang paling fatal dari perbedaan visi dan metode bekerja untuk, demi, atau dengan rakyat adalah saat ketergantungan rakyat terhadap infus material maupun gagasan dari luar justru menguat, ketika lembaga-lembaga pengerahan dana dan penyalurnya menyentuh kehidupan mereka.

---

[37] Di-'belok'-kan di sini bermakna ganda: pertama tidak dikorupsi oleh staf-staf Ornop, kedua tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam rencana. Faktanya, sebuah dinamika sosial seringkali tidak bisa diprediksi lewat perencanaan semata. Situasi yang berubah dan menghasilkan sebuah momentum sering menuntut reaksi yang cepat untuk memperluas gerakan dan menghasilkan dampak yang lebih jauh dari tujuan-tujuan program dan proyek. Banyak donor tidak peduli dengan dinamika macam ini sehingga apapun alasannya, jika sebuah kegiatan berada di luar perencanaan maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Donor yang lain kadangkala menanggapinya dengan mengucurkan dana tambahan agar Ornop tidak kehilangan momentum, meski implikasinya adalah memanjakan Ornop karena kemudahan-kemudahan memperoleh dana ini. Tanggapan lain, menerapkan mekanisme perubahan kesepakatan sehingga dana yang sudah dialirkan selalu bisa menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Implikasi untuk yang terakhir ini adalah, Ornop dapat menanggapi momentum yang muncul meski tidak optimal, tetapi dapat juga memancing kreativitas Ornop itu sendiri untuk mengerahkan energi sosial dari aktor-aktor lain.

Tetapi menyoroti persoalan ketergantungan rakyat juga tidak bisa dilihat secara hitam-putih, melainkan perlu dilihat dalam sebuah spektrum. Mengapa? Karena yang namanya tingkat ketergantungan rakyat amat beragam; dari yang bergantung sepenuhnya pada energi dari luar (gagasan, skil, dan dana), ketergantungan gagasan atau *skill*, dana saja, sampai yang betul-betul siap bermitra sejajar dengan institusi-institusi lain, atau bahkan siap mengurus dirinya sendiri (*self governing*).

Dalam melihat ketergantungan, jumlah Ornop yang sukses membangkitkan kesadaran aktif rakyat relatif sedikit. Gejala yang paling mudah dilihat adalah, bahkan untuk pertemuan kampung yang melibatkan rakyat, Ornop hampir selalu menyediakan dana dari tahun ke tahun. Klaim Ornop terhadap programnya adalah program milik rakyat, tetapi mengapa untuk milik dan kepentingannya sendiri, rakyat tidak berminat membiayai?

Persoalan ini ternyata cukup kronis dan disumbang oleh banyak faktor dari Ornop, donor, maupun pemerintah. *Pertama,* kebiasaan sebagian Ornop, donor, serta pemerintah menyediakan uang duduk bagi rakyat jika hadir dalam pertemuan-pertemuan sebagai ganti jam kerja mereka. *Kedua,* rasa belas kasihan yang berlebihan dari Ornop maupun donor terhadap rakyat, sehingga melecehkan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi aktif dan ikut patungan dalam membiayai kegiatan. *Ketiga,* terbatasnya visi dan ketrampilan Ornop dalam melakukan pekerjaan pemberdayaan yang utuh, yang menghasilkan kesadaran aktif bukan kesadaran kognitif semata. Para staf yang kurang berpengalaman biasanya cukup senang ketika rakyat mendengarkan atau berdiskusi dan berdebat, tetapi tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti kenapa rakyat bersedia hadir dan mengapa mereka bersedia atau tidak bersedia ikut patungan.

Persoalan kedua adalah kegagalan memperluas medan kesadaran, baik secara visi maupun jumlah. Kritik yang dijatuhkan Korten terhadap Ornop adalah eksklusivitas terhadap kelompok dampingan.[38] Korten dalam pengamatannya, melihat bahwa Ornop cenderung enggan bekerja dengan kelompok rakyat yang lebih luas, mereka lebih suka bekerja dengan kelompok-kelompok kecil dan cenderung steril terhadap persoalan lain di luar persoalan kelompok. Pandangan ini mulai berubah meski amat lambat, karena dalam perkembangannya Ornop juga secara sukarela maupun dipaksa oleh donor dan rakyat, mulai melihat pentingnya memperluas cakupan kerja. Persoalan yang dihadapi rakyat pada kenyataannya tidak bisa dipilah-pilah berdasar-



Tidak kurang dari 11 lembaga internasional penting yang memiliki program besar berkaitan dengan isu-isu partisipasi dan *good governance* di Indonesia. Selain World Bank (Bank Dunia) dan ADB, dapat disebutkan UNDP, USAID—termasuk di dalamnya CSSP dan NRM—GTZ, CIDA, JICA, DFID, British Council, Ford Foundation, dan Tifa Foundation. Sedangkan Ornop internasional yang memiliki program partisipasi dan *good governance* yang cukup penting di Indonesia saat ini adalah NDI, Pact, CARE, dan The Asia Foundation. (Sumber: Hetifah Sj. Sumarto, 2003)

[38] Korten, 1990, hlm. 161.

kan isu yang dipilih Ornop maupun donor. Rakyat hidup bersama di satu wilayah dengan segala macam persoalannya. Mulai dari mencari makan hingga persoalan politik tingkat lokal, nasional, bahkan global, yang berimplikasi pada kehidupan sehari-hari.

Tetapi dengan visi Ornop yang terbatas, apalagi jika visi tersebut dipaksakan oleh donor, tetap saja yang terjadi hanyalah perubahan kegiatan-kegiatan semata, bukan perubahan mendasar cara kerja. Di Indonesia, aktivis Ornop secara jujur harus mengakui bahwa proses depolitisasi di zaman Soeharto amat sukses dalam menghasilkan amnesia terhadap sejarah dan prestasi-prestasi politis gerakan rakyat di awal abad ke-20.[39] Jarang sekali ditemukan Ornop yang memahami makna dari perluasan kesadaran, pengorganisasian rakyat, serta politisasi kerja mereka untuk transformasi sosial. Implikasinya adalah, penguatan rakyat yang berujung pada terbentuknya organisasi-organisasi rakyat tidak berbeda jauh atau bahkan serupa dengan Ornop, baik visi, program, kegiatan, dan prosedur-prosedurnya. Lebih jauh lagi, organisasi rakyat terdorong untuk turut menikmati kucuran dana dari donor-donor.[40]

Bagi sebagian aktivis maupun eks-aktivis yang bekerja di donor, tuntutan macam ini amatlah dilematis. Di satu sisi, seluruh agenda pengerahan sosial adalah menuju rakyat. Di sisi lain, apakah tepat membiarkan rakyat turut terlena dalam arena ketergantungan terhadap donor, padahal cita-cita tertinggi yang diimani adalah melepaskan rakyat dari ketergantungan ekonomi, ideologis, dan politis.

Sementara bagi donor, mendanai langsung organisasi rakyat merupakan prestasi tersendiri. Karena tanpa perantara, seluruh pengerahan sosial langsung menuju sasarannya. Namun demikian, hal ini tidaklah mudah karena menuntut pertanggungjawaban administratif kepada organisasi-organisasi rakyat tidaklah semudah kepada Ornop. Belum lagi persoalan legal formal, karena organisasi rakyat banyak yang tidak berbadan hukum.

Persoalan ketiga, sebagai *raison d'etre* dari seluruh kerja pengerahan sosial, rakyat berada dalam posisi yang mengambang. Tidak menjadi tuan, tidak pula menjadi pelayan. Tidak menjadi donor tapi *emoh* dikatakan pengemis. Klaim pengerahan sosial dari ujung pe-

---

39 Meski Takeshi Shiraisi secara cemerlang mendeskripsikan gerakan-gerakan rakyat di awal abad ke-dua-puluh lewat bukunya *Jaman Bergerak* namun di kalangan Ornop buku ini sepertinya tidak begitu populer, apalagi menjadi inspirasi untuk membangun gerakan.

40 Dalam satu kongres masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur, rakyat menuntut dirinya diperkuat agar dapat mengakses dana dari donor. Mereka minta dilatih untuk menyusun proposal agar dapat mengelola dana. Pasalnya, ada kekecewaan dari rakyat karena Ornop tidak sepenuhnya memenuhi aspirasi mereka.

nyumbang, pengawal pipa, hingga pengecer di lapangan adalah seluruh agendanya 'dikonsultasikan' oleh rakyat. Jadi yang diperlukan dari rakyat hanyalah pendapat semata, bukan tali ikatan yang jelas alur pertanggungjawabannya. Padahal, konon rakyatlah sang tuan, Ornop lokal adalah pelayan, sedangkan donor adalah pemberi vitamin atas cita-cita rakyat. Tetapi mengapa rakyat sulit merencanakan, menentukan, menyetujui, atau menolak apa yang ditawarkan oleh para pelayan dan *supplier* vitamin.

Secara 'tidak sadar', ternyata donor dan Ornop melanggengkan dan terus melatih kepatuhan terhadap kuasa atas dana. Waktu yang terbatas ditambah prosedur-prosedur yang diciptakan oleh donor, sesungguhnya setali tiga uang dengan pengelolaan proyek ala pemerintah dan perusahaan.[41] Model ini jelas menempatkan donor sebagai pemilik dari seluruh kegiatan. Prosedur proyek diciptakan agar setiap sen dana tepat dikerjakan sesuai dengan rencana. Model pertanggungjawabannya pun mengalir ke atas, tidak ke bawah atau bisa jadi mutual.

Dalam proses evaluasi, yang bertanya selalu pihak donor, yang menjawab adalah rakyat. Tidak pernah ada proses di mana rakyat menanyakan kepada donor apa peran mereka dalam seluruh proses ini yang menjamin donor akan menjawab jujur sebagai aliansi rakyat. Jawaban donor selalu diplomatis dan basa-basi, tidak sekonkret jawaban rakyat terhadap pertanyaan donor. Umumnya prosedur partisipatif yang dijalankan lebih menonjolkan formalitas konsultasi, yang tidak memiliki pertalian tanggung jawab. Tidak ada mekanisme rakyat untuk mengontrol dan mempertanyakan tindakan atau perilaku donor secara langsung, seperti donor mengevaluasi kerja-kerja Ornop dan rakyat dengan tali tanggung jawab yang jelas. Posisi donor yang tidak terikat, lebih tepat seperti penjaja keliling yang menawarkan bantuan kepada Ornop maupun rakyat. Tidak ada ikatan antara rakyat dan penjaja keliling seandainya sang penjaja tidak lagi melewati depan rumahnya.



Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan: 1) penekanan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya; proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material, dan 2) pemberdayaan yang dipengaruhi konsientisasi Paulo Freire. (Sumber: Onny S. Prijono, 1996 dan Paulo Freire 1972)

[41] Prosedur pengelolaan model proyek ini tampaknya sudah menjadi satu pakem tersendiri. Akuntabilitas atas aliran dana adalah satu-satunya alasan mengapa prosedur-prosedur ini dijalankan dan direproduksi terus-menerus. Padahal prosedur ini cukup kaku, menyebalkan, dan tidak dinamis dalam menanggapi perubahan. Namun tak ada satu pihak pun yang mencoba memeriksa dampak prosedur ini terhadap dialektika sosial yang didorong gerakan perubahan.

Kesimpulan

Dengan demikian apakah donor memiliki peran penting dalam perubahan transformasi sosial? Tidak ada jawaban yang tegas, donor bisa bermanfaat karena memang perubahan membutuhkan energi, tetapi juga bisa menyesatkan jika aktor-aktor gerakan perubahan kecanduan bantuan, dan mati akal ketika industri bantuan tidak lagi ada. Beberapa aktivis mengatakan bahwa di depan donor organisasi-organisasi bersifat sedikit oportunistik, sedikit *manut* (patuh—Red.) dan *manggut* (mengangguk—Red.) yang penting bisa mendapatkan logistik. Persoalan bahwa kemudian dana disubversi untuk urusan gerakan yang lebih radikal atau sedikit lain dari kehendak donor adalah perkara yang lain dan sah-sah saja dilakukan.

Donor pun bisa tutup mata atas subversi dana yang dilakukan Ornop ataupun organisasi rakyat yang diberi dana. Apa yang penting, prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban kuitansi-kuitansi berjalan lancar, dan tak ada satu sen pun digunakan untuk keuntungan pribadi. Beberapa kelompok Ornop malah berstrategi dengan menempatkan anggota-anggota aliansinya untuk bekerja di lembaga donor, sehingga ketersediaan dana terjamin demi kelancaran agenda-agenda perubahan.

Pandangan ini berlaku ketika organisasi-organisasi di negara penerima memandang donor atau organisasi internasional berada di luar lingkar perubahan. Mereka bisa menjadi kawan dan bisa juga menjadi lawan, semuanya tergantung pada tawar-menawar agenda antar pemberi dan penerima.

Namun cara pandang ini barangkali hanya berlaku jika agenda-agenda perubahan bersifat lokal dan tidak terlalu terkait dengan perubahan di tingkat global. Dalam kerangka sebuah perubahan, tentunya relasi-relasi global perlu diperiksa. Selain hubungan ekonomi-politik antara penguasa negara dan modal versus rakyat negara Dunia Ketiga, hubungan antar rakyat pada skala global pun perlu dikaji ulang.

Mengkaji relasi donor dan penerima, tidaklah sesederhana mengkategorisasi visi, pembagian peran, prosedur-prosedur pendanaan, dan pertanggungjawaban. Lebih dari itu, yakni melihatnya dalam hubungan yang bersifat ekonomi-politik antar negara serta melihat solidaritas dan visi antar rakyat di seluruh dunia. Kucuran dana yang disumbang kepada negara Selatan umumnya adalah residu keuntungan, pendapatan berlebih, dan besarnya pembayaran pajak. Semakin untung satu negara, semakin besar residu yang bisa disumbangkan pada negara lain, walaupun belum tentu semakin untung

semakin berderma.[42] Padahal banyak negara Utara yang mengeruk keuntungan besar dari pengerukan sumberdaya alam negara Selatan, kebijakan perdagangan yang timpang, dan investasi langsung maupun tidak yang mengeksploitasi buruh dan merusak lingkungan. Dari keuntungan itu, sedikit disumbangkan ke negara-negara Selatan dengan berbagai tujuan, termasuk mempercepat putaran keuntungan lagi.

Oswaldo de Rivero dalam bukunya *Myth of Development* mengatakan dunia sekarang—dengan kemerosotan ekonomi, ketidakstabilan politik, infrastruktur ekologis yang rontok, kemerosotan cadangan sumberdaya alam, pertambahan penduduk yang tinggi, dan konflik yang cenderung menghasilkan *chaos* di negara-negara Selatan—sedang menuju pembelahan atas dua kelompok besar: kaum aristokrat dan kaum barbar. Dunia aristokrat Utara yang kaya, bersih, dan stabil versus dunia Selatan yang miskin dan barbar. Perbedaan kelas bukan lagi dalam tingkatan negara tetapi dunia, Utara versus Selatan, dan perbedaan ini semakin tajam. Negara aristokrat Utara (negara, modal, dan rakyat) berhadapan dan Selatan yang barbar.[43] Artinya, solidaritas antar rakyat negara Utara dan Selatan pun semakin sulit diharapkan menuju satu cita-cita yang sama.

Seandainya Rivero benar, maka proses-proses pengerahan sosial dari Utara ke Selatan—meminjam istilah Hendro Sangkoyo—tidak berbeda dari pengelolaan kebun binatang. Negara Selatan (Dunia Ketiga) adalah kebun binatang dengan rakyat sebagai binatang-binatangnya. Rakyat di Selatan selalu diperiksa perilaku dan kesehatannya, diberi makan, diberi vitamin, dilatih, tetapi tetap tidak berdaya di dalam sangkar. Se-oportunis dan secerdik apapun organisasi-organisasi di Selatan mengambil dana dari Utara untuk tujuan perubahan sosial, tetap tidak akan mengubah posisi rakyat negara Selatan. Perubahan bisa terus terjadi, tetapi hanya untuk diamati dalam ruang pamer sekaligus laboratorium eksperimen para perencana dan pendana, tetapi tidak mengubah nasib rakyat Dunia Ketiga secara signifikan.



Pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) mencakup tiga hal penting: 1) berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat; 2) bersifat subyektif dan memihak kepada masyarakat tertindas, dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan; dan 3) menggerakkan partsisipasi dan etos swadaya masyarakat. (Sumber: H.M. Yakub, 1985)

---

42 Dalam risetnya, German dan Randel menunjukkan bahwa GDP (Gross Domestic Product) per kapita negara Utara meningkat terus hingga tahun 2000, tetapi pada jangka waktu yang sama jumlah bantuan (*aid*) yang disumbang per kapita terus menurun.

43 Rivero, 2001, *Myth of Development; Non-viable economics of 21st Century.*

Pustaka

Catatan-catatan Pribadi Penulis.

De Rivero, Oswaldo (2001), *Myth of Development: Non viable Economics in 21st Century*, London: Zed Books.

Fakih, Mansour (1996), *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesial*, Yogayakarta: Pustaka Pelajar.

German, Tony, dan Randel, Judith (2001), 'Never Reacher, Never Meaner', website Reality of Aid.

Henry, Laura (2001), 'Sponsored Democratisation;Environmentalists as Bearers of Civil Society in Russia', Makalah untuk Pertemuan Tahunan American Political Scientist Association, San Fransisco.

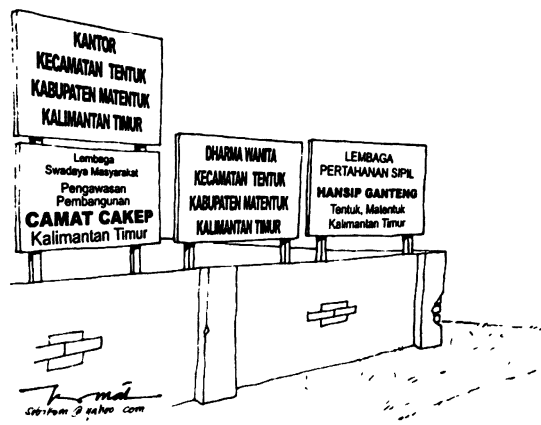
Howell, Jude, dan Pearce, Jenny (2001), *Civil Society and Development: A Critical Exploration*, London: Lynne Rienner Publisher.

Korten, David (2001), *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nzomo, Maria (2001), 'Civic Capacity for Poverty Alleviation: Some Lessons for Development Theory and Practice', Makalah untuk Konferensi International CDAS, Universitas McGill Montreal, Canada.

Suryanto, Cahyo (2002), 'Gerakan *Good Governance* "untuk" Indonesia', Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 2 Juni 2002, AKATIGA.

World Bank (2002), *Indonesia Country Assistance Strategy*.



■ KASUS

Interaksi Donor-Ornop Kalimantan Timur

Koesnadi Wirasapoetra[1]

The wealth of natural resources of East Kalimantan have sparked desire among different parties wanting to control those resources. This wealth has also led to conflict, primarily caused by struggle over mining and forest management. This conflict is more pronounced in certain areas according to their model of development, which emphasizes exploitation of natural resources. In this type of condition, the growth of NGOs rises and falls according to what problems are faced. This article prioritizes several NGO models that have appeared based on attention to the problems of local people. Paradigms also change in accordance with the developing dynamics of social movement discourse, such as critiques of the concept of development. Through the approach popularized by George J. Aditjondro, the writer engages in an ideological reading of the stages of NGO development along with the relationships with donor agencies. The complex relations of donors and NGOs is important to problematize, considering that this funding and these problems involve many people. Indirect involvement affects the model and orientation of the programs carried out in the field.

[1] Koesnadi Wirasapoetra, aktif di Yayasan Padi Indonesia, Kalimantan Timur.

Ornop Tidak Lahir Begitu Saja

Kalimantan Timur adalah salah satu propinsi terkaya di Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Kekayaan tersebut berupa bahan tambang dan mineral deposit, hasil hutan baik kayu maupun non kayu, serta berbagai kekayaan hayati yang ada di darat maupun di laut. Penduduk asli yang lebih dikenal sebagai masyarakat adat berbagai kelompok suku telah lama mewarisi dan mengembangkan model pengelolaan sumberdaya alam dalam beragam bentuk penggunaan lahan yang ditandai dengan penggunaan tata nama yang sangat lengkap dan rinci. Selama masa pemerintahan Orde Baru, sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim)—terutama yang tinggal di pedesaan—tidak bisa menikmati kekayaan alam yang melimpah tersebut. Mengapa demikian?

Catatan hasil penelitian yang dilakukan pemerintah Kaltim pada 1998, memperkirakan potensi sumberdaya alam yang ada, mencakup sektor kehutanan dengan luas 21,1 juta hektare dan sektor pertambangan serta minyak bumi dan gas berskala raksasa, dengan deposit minyak sebesar 219,69 *billions stock tank barrels*, gas ± 3.495,82 *billions standard cubic feet*, kondensat 232,2 *billions stock tank barrels*, emas ± 2,2 juta ons, dan batu bara ± 5 milyar ton. Di samping sumber-sumber alam tersebut, Kalimantan Timur juga memiliki kandungan nikel, antiminit, besi, timah hitam, seng, rutil, perak, gypsum, intan, kaolin, kristal, pasir, kuarsa, fosfat, sirtu, dan lain-lain. Potensi perairan Kaltim juga cukup besar, terdiri dari perairan laut ± 12 juta hektare, perairan sungai/danau ± 2,7 juta hektare, dan pertambakan ± 134 ribu hektare.

Dari hasil pengelolaan sumberdaya alam Kalimantan Timur tersebut, pada 1998 terdapat 74 jenis komoditas yang telah diekspor ke 67 negara tujuan dengan total nilai ekspor non-migas sebesar US$ 1,52 milyar, dimana secara nasional menduduki peringkat ke-6. Ironisnya, di daerah yang sekaya ini penduduk miskin mencapai ± 700 ribu jiwa atau 31,6% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur. Kondisi ini diperparah lagi dengan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, akibat kebakaran hutan 1998 seluas 520 ribu hektare, puso/gagal panen tanam para petani seluas ± 124 ribu hektare, serta bencana banjir di berbagai tempat.

Alam adalah syarat kehidupan semua makhluk. Perubahan sikap paling utama terhadap alam berlangsung pada tingkat konsep. Ternyata dalam konsep yang dijalankan negara, alam tidak lagi diperlakukan sebagai ekosistem, melainkan sebagai sumberdaya. Dalam

rumusan pro-kapital, alam direduksi menjadi sumberdaya alam. Dalam konteks ini, pembangunan telah mengubah wajah alam secara drastis lagi—suatu kenyataan hidup yang tidak pernah dijumpai di zaman sebelumnya.

Tidak ada paham selain paham pembangunan yang begitu besar pengaruhnya, khususnya di Indonesia sejak Orde Baru. Sebagai suatu 'agama', pembangunan selalu membutuhkan lokasi untuk mewujudkan proyek-proyek, baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta. Dalam hal ini, secara sederhana dapat dikatakan: tak ada pembangunan tanpa alam. Pembangunan juga sering disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal hubungan pembangunan dengan alam tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga politik, sosial, budaya, dan hukum. Sebagai konsekuensi dari model pembangunan politik yang otoriter, segala bentuk aktitivas rakyat harus patuh dan tunduk pada berbagai instrumen hukum serta manipulasi dan kekerasan yang digunakan institusi politik otoriter.

Peninggalan pembangunan di Kalimantan Timur yang tak terselesaikan hingga saat ini adalah konflik sumberdaya alam yang terkait dengan eksploitasi sumberdaya alam. Termasuk dalam hal ini antara lain, hutan tanaman industri, hutan rakyat, tanah, Hak Pengusaha Hutan (HPH), bahan tambang, kawasan konservasi, perkebunan kelapa sawit, serta minyak dan gas. Konflik atas penggunaan alam adalah konsekuensi model pembangunan yang dipraktekkan Orde Baru yang bertumpu pada eksploitasi tanah dan bahan mentah berskala besar. Berbagai peraturan negara cenderung mengabaikan kehidupan sosial budaya yang berlaku, serta hak-hak masyarakat atas kepemilikan/penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan alam. Di banyak tempat telah berlangsung perkelahian sengit antar warga serta antara warga dengan pemerintah atau pengusaha.

Keadaan seperti ini memberi ruang tumbuh bagi sebuah gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap moda pembangunan di Kalimantan Timur. Gerakan dimulai sekitar tahun 1980-an. Ketika itu hanya ada satu-dua lembaga tempat berkumpulnya mereka yang peduli. Basis-basis gerakan biasanya di emperan kampus dan alam terbuka. Awalnya tidak banyak yang dapat dilakukan komunitas-komunitas kecil tersebut. Proses belajar dimulai dengan interaksi para aktivis di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Secara jujur, awal pertumbuhan dan perkembangan Ornop (organisasi non-pemerintah) di Kalimantan Timur bersandar pada Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1984, yang lebih mempertegas hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan dapat berperan serta dalam pe-



Masalah pembangunan yang kritis untuk 1990-an bukanlah pertumbuhan. Masalahnya adalah transformasi. Transformasi ini harus menangani tiga kebutuhan pokok masyarakat global kita: (1) keadilan, (2) berkelanjutan, dan (3) ketercakupan. (Sumber: David C. Korten, 2001)

ngelolaan lingkungan hidup. Gerakan dibangun untuk membela lingkungan hidup.

Perkembangan Ornop dan LSM di Kalimantan Timur

Bagian berikut ini membahas Ornop di Kalimantan Timur. Penggunaan istilah Ornop merupakan hasil konvensi reposisi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menjadi Ornop pada 1999, ketika Indonesia berada dalam transisi politik. Saat itu istilah LSM dinilai maknanya sudah banyak dikaburkan penguasa.

Ornop mulai tumbuh di Kalimantan Timur kurang-lebih sejak awal 1980-an. Pada awal 1990-an Ornop kritis mulai tumbuh dan jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Ada beberapa pendorong tumbuhnya Ornop di Kalimantan Timur berdasarkan pengamatan 20 tahun terakhir ini. *Pertama*, Ornop yang tumbuh atas dasar kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang memperoleh perlakuan tidak adil rezim Orde Baru. *Kedua*, Ornop yang tumbuh atas dasar kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan alam, atau sebagai tindak lanjut dari program terdahulu yang menghasilkan ikatan kerjasama antar pesertanya. *Ketiga*, Ornop yang tumbuh atas hasil kolaborasi beberapa Ornop untuk menangani masalah secara spesifik. Biasanya Ornop ini berbentuk jaringan kerja, konsorsium, kelompok kerja, atau forum.

Sementara itu, LSM di Kalimantan Timur tumbuh dan berkembang sejak awal 1996, ketika pelaksanaan proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), penyaluran dana Bank Dunia, dan proyek Community Development (CD) perusahaan besar minyak, pertambangan, dan perhutanan, 'mewajibkan' keikutsertaan LSM di dalamnya. Wajar bila kemudian LSM tumbuh dan berkembang bagaikan jamur di musim hujan; ada gula pasti ada semut.

Di samping itu, LSM dipropagandakan secara gencar pada tahun yang sama oleh penguasa dan organisasi kepemudaan, agar masuk dalam daftar Organisasi Kemasyarakatan di bawah naungan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan terdaftar di Kantor Sosial Politik Pemerintah. Dengan siasat seperti ini, praktis semua langkah kerja LSM di Kalimantan Timur dapat dipantau dan bahkan diatur. Menurut taksiran awal, jumlah LSM seperti ini di Kalimantan Timur mencapai angka ribuan, serta tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Dapat dikatakan setiap dinas pasti mendirikan LSM, begitu pula para anggota partai atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), pensiunan maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil) aktif, dosen, wartawan, bahkan pensiunan TNI (Tentara Nasinal Indonesia) atau polisi. Mudahnya tata-cara pendirian LSM juga mendorong perkembangan yang

luar-biasa pesat ini. Siapapun dapat mendirikan LSM hanya dengan bermodalkan akte notaris, mendaftarkan diri ke Kantor Pemerintahan (Sosial Politik), punya stempel, dan bisa menulis proposal program.

Di tengah hegemoni pembangunan yang juga menggunakan LSM sebagai instrumennya, justru kalangan Ornop mengalami kebuntuan. Berbagai usaha ke arah transformasi sosial—penciptaan dunia yang secara mendasar baru dan lebih baik—seakan-akan menemui jalan buntu. Pada pemerintahan transisi, peluang politik untuk demokratisasi semakin terbuka. Di sisi lain realitas politik menunjukkan bahwa rezim lama belum sepenuhnya tumbang. Susunan penguasa masih terdiri dari kalangan militer dan kekuatan-kekuatan lama yang otoriter.

Menggalang Isu, Disorientasi Gerakan Ornop

Dekade 1980-an, pergerakan aktivis Ornop berpusat pada perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme di Indonesia dan Kalimantan Timur. Pada dekade 1990-an, tema gerakan Ornop di Kalimantan Timur bergeser dan berkembang dari perlawanan terhadap model pembangunan yang imperialistis dan menjajah, menuju penanganan dampak pembangunan. Masalah kunci untuk Kalimantan Timur adalah pengelolaan sumberdaya alam yang dibagi dalam sektor-sektor modal seperti: perhutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Tumbuh dan berkembangnya masalah sektoral ini berdasar pada kepentingan kerjasama antara Ornop dengan lembaga donor yang mengacu pada agenda pembangunan yang sama. Lewat tema-tema seperti hak asasi manusia, hukum, tanah (agraria), kebudayaan, demokratisasi, dan lain sebagainya, Ornop mempersoalkan dampak-dampak pembangunan. Meskipun demikian, harus diakui bahwa cukup banyak aktivis Ornop yang menganggap bahwa pembangunan adalah bebas dari kepentingan, dan bahwa kegagalan pembangunan disebabkan oleh kesalahan strategi atau pendekatan, dan bukan karena kelirunya agenda atau teori pembangunan itu sendiri.

Dari sejarah dan perjuangannya, Ornop di Kalimantan Timur tumbuh dan berkembang bersama lembaga donor. Bila George J. Aditjondro membagi Ornop dalam dua kelompok, yaitu Ornop Kelompok Kiri dan Ornop Kelompok Kanan, maka kondisi perkembangan Ornop di Kalimantan Timur dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jenis aktivitasnya.

Pertama, Ornop transformasi sosial. Karakter Ornop transformasi sosial adalah kelompok Ornop yang memiliki kekuatan pikiran untuk melawan penguasa dan berusaha mencari model-model pembaruan menuju perubahan. Jenis Ornop seperti ini di Kalimantan Timur



Ada beberapa jenis sumberdaya yang memerlukan perlindungan di negara Selatan. Di antara yang paling penting adalah: (1) kekayaan sumberdaya alam termasuk minyak, mineral, hutan dan tanah luas untuk lahan pertanian; (2) lisensi untuk ekspor dan impor kuota yang memberikan kekuasaan nyaris monopoli atas barang-barang dan komoditas yang melintasi garis batas negara; (3) hibah hak monopoli dalam industri, kadang-kadang dalam bentuk penguasaan atas badan usaha milik negara; dan (4) dana bantuan asing dan kredit komersial asing. (Sumber: David C. Korten, 2001)

tidak banyak, dapat dihitung dengan jari sebelah tangan (nyaris mengalami disorientasi gerakan). Ornop jenis ini tidak memperoleh banyak simpati dari Ornop lainnya, karena sifatnya keras, cenderung radikal dalam melakukan pendekatan, tidak mengenal kompromi, bahkan dicurigai sebagai aliran kiri (sosialisme-komunis). Basis gerakannya cenderung mengakar dengan masyarakat.

Kedua, Ornop reformis. Jenis Ornop ini sangat vokal dalam melakukan advokasi kebijakan pemerintah. Mereka sangat reformis, lihai dalam membuat dan mengkritisi sebuah undang-undang, peraturan, sampai pasal per pasal. Jenis Ornop ini mudah melakukan kompromi, dengan tujuan pemecahan menang-menang (*win-win solution*), dan lebih meyakini bahwa advokasi di dalam sistem akan menghasilkan perubahan kebijakan. Basis gerakannya cenderung elitis.

Ketiga, Ornop developmentalis. Jenis Ornop ini sangat vokal dalam mengkritisi pembangunan, khususnya pada pendekatan hal-hal teknis. Mereka bermaksud memperbaiki kegagalan pembangunan yang dianggap keliru dan salah pendekatan kepada masyarakat. Ornop jenis ini tidak banyak menyentuh secara serius pada tingkat kebijakan, karena kebijakan dianggap sudah baik, yang belum baik adalah pelaksanaannya. Perencanaannya sangat partisipatif dan detil, lengkap dengan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis-nya (petunjuk teknis). Banyak Ornop dan LSM termasuk dalam kategori ini.

Aliran Pendanaan yang Berpengaruh

Dari perjalanan interaksi Ornop dan lembaga donor di Kalimantan Timur, setidaknya ada empat skema interaksi kerjasama.

Skema 1

Aliran dana dari lembaga donor diberikan kepada Ornop besar (istilahnya: BINGO—Big NGO) yang berbentuk lembaga, jaringan kerja, forum, dan konsorsium. BINGO kebanyakan berkedudukan di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, atau kota-kota besar lainnya. BINGO memiliki jaringan kerja, baik berupa anggota maupun partisipan program di daerah yaitu Ornop (LINGO—Little NGO). Tidak semua LINGO dapat bekerjasama dengan BINGO. Kerjasama didasarkan pada hubungan baik, isu yang sama, hubungan anggota, atau karena perkawanan semata. Aliran dana dari BINGO ke LINGO ini dilanjutkan ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok masyarakat.

Pada kerjasama dan interaksi ini, biasanya masyarakat dan LINGO berperan melegitimasi sebuah proposal BINGO. Proses perencanaan program tidak selalu melibatkan masyarakat dan LINGO.

Skema 2

Aliran dana dari lembaga donor diberikan kepada kontraktor program yang berbentuk institusi program. Biasanya kontrak ini dalam bentuk *programme grant*, umurnya bisa 1 sampai 3 tahun, setelah habis bisa dilanjutkan, bisa juga tidak (atau bubar). Dari kontraktor program ini dana disalurkan kepada BINGO, dilanjutkan ke LINGO, kemudian ke masyarakat atau melalui kelompok masyarakat.

Dalam skema kedua ini, jenis-jenis program sudah ditentukan oleh kontraktor, isu-isu telah dirumuskan para kontraktor. BINGO dan LINGO adalah pelaksana kegiatan, dan kerjasama didasari oleh kesamaan bidang dan sasaran kegiatan.

Skema 3

Aliran dana dari donor diberikan kepada pemerintah, untuk disalurkan kepada kontraktor (bisa BINGO, bisa kontraktor pengusaha). Dari kontraktor aliran dana diberikan kepada LINGO dan dari sini dana mengalir ke masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Skema 4

Aliran dana dari donor yang berasal dari perusahaan daerah, nasional, maupun internasional, biasanya melalui program Community Development (CD). Aliran dana ini diberikan kepada kontraktor (LSM) besar di daerah maupun di Jakarta untuk melaksanakan program CD bagi perusahaannya. Dari kontraktor, aliran dana masuk ke LSM-LSM di daerah untuk menjalankan program yang telah dirumuskan bersama masyarakat, baik melalui kelompok masyarakat maupun langsung kepada masyarakat.

Di samping keempat skema tersebut, ada pola aliran dana yang belum jelas diketahui oleh Ornop dan masyarakat, yang disebut aliran dana gaib atau Skema 5. Perusahaan-perusahaan multinasional memberikan dana ke lembaga donor, baik melalui mekanisme kerjasama langsung maupun mekanisme yang diatur oleh negara, dalam bentuk sumbangan perusahaan kepada negara untuk disalurkan ke negara asal pendapatan sebagai bantuan kemanusiaan.



Setiap tahun, Bank Dunia membagi-bagi rata-rata 22,5 miliar US dolar bantuan pembangunan kepada penguasa korup dan untuk berbagai proyek besar yang merusak lingkungan dan memperlebar kesenjangan sosial. Itulah sinyalemen mengapa banyak LSM Utara menganggap Bank Dunia sebagai musuh nomor satunya. Sebaliknya, banyak LSM Selatan yang menilai Bank Dunia sebagai sumber dana dan *partner* pembangunan. (Sumber: Ivan A. Hadar, KCM 07/03/2000)

Skema 1	Skema 2	Skema 3	Skema 4
Donor ↓ Kontraktor ↓ Jaringan Kerja, Forum, atau Konsorsium, ↓ Ornop ↓ Kelompok Masyarakat ↓ Masyarakat	Donor ↓ Kontraktor Bentuk Program ↓ Jaringan Kerja, Forum, atau Konsorsium ↓ Ornop ↓ Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Donor ↓ Pemerintah ↓ Kontraktor ↓ Ornop ↓ Masyarakat	Donor Coorporation ↓ Kontraktor ↓ LSM ↓ Masyarakat

Pustaka

Wirasapoetra, Koesnadi (2000), 'Menata Hubungan Rakyat dan Negara, dalam Pemulihan Krisis di Kalimantan', *paper* Lokakarya Penanggulangan Krisis di Regional Kalimantan, Samarinda, September 2000.

Wirasapoetra, Koesnadi (1996), 'Kolonisasi Sawit di Tanah Paser', kertas kerja untuk Advokasi Perkebunan Besar Kelapa Sawit di Indonesia, PADI Indonesia.

INFID (1999), 'Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil; Reposisi dan Peran Ornop di Indonesia'.

PLASMA (2000), 'Membongkar Mitos Membangun Peran', *Proceeding* Lokakarya Inisiatif Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kalimantan Timur, Agustus 2000.

Magnis-Suseno, Frans (1999), *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopsi ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prabowo, Hary (2002), *Perspektif Marxisme; Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*, Yogyakarta: Jendela.

Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 1 Tahun I 1999: Masyarakat Sipil.

Wirasapoetra, Koesnadi (1999), 'Bencana Ekologi Gambut; Gerakan Perlawanan Masyarakat Adat Dayak Ngaju terhadap PLG 1 juta hektar', April 1999 (belum dipublikasikan).

■ KASUS

Bergelut Melawan Bayangan Sendiri[1]

Pengalaman Yayasan Wisnu dalam Membangun Basis Logistik

IBK Yoga Atmaja[2]

External funding support is a classic problem among NGOs. Efforts to build independence will not succeed if NGOs do not have a strong logistical/financial base. They will be like a motorcycle without gasoline; an NGO cannot set its programs into motion without resources. Since Yayasan Wisnu, in Bali, was founded ten years ago, it has been struggling to create its own financial base through various methods. First, its staff worked to develop idealistic activities, but found many problems in the field. Second, they worked with aid from donors, which created an "addiction," was not useful, and did not promote continuity. Third, they worked together with the private sector where they could find a similar social vision, which was not easy. The final method was collaboration with the communities Yayasan Wisnu works with, developing a financial base together with the lower classes. Yayasan Wisnu is now building itself on this foundation, with various consequences.

---

1 Sebagian tulisan ini diambil dari buku *Menyemai Benih Di Lahan Imajiner* (Yayasan Wisnu, 2003) karangan penulis.

2 IBK Yoga Atmaja adalah Direktur Program Yayasan Wisnu, Bali.

Pendahuluan

Ketika Jawa dikeruk habis oleh kolonial Belanda, Bali sama sekali belum disentuh. Bali baru dilirik untuk dieksploitasi Belanda saat terjadi persaingan dengan Inggris pada akhir abad ke-19. Di samping karena letaknya sangat dekat dengan Jawa, juga agar tidak berkurang luas tanah jajahannya. Tetapi apa yang dapat dikeruk kolonial Belanda dari pulau yang kecil ini? Jika hanya mengandalkan hasil bumi dari pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk membiayai operasional pemerintahan tidak akan cukup. Kolonial Belanda kemudian melihat potensi yang lain dari Bali. Kondisi sosio-kultural masyarakat Bali dilihat sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat tetirah pegawai-pegawai kolonial Belanda dari Jawa setelah menginspeksi tanah jajahannya di bagian Timur. Tetirah menjadi cikal-bakal pengembangan pariwisata untuk mendukung biaya operasional pemerintah kolonial mengeruk Bali.



Pergeseran nama Ornop menjadi LSM sebenarnya menimbulkan perbedaan arti dan perbedaan makna yang mendasar. Landasan Ornop adalah untuk *no governmentalism*, sedangkan LSM adalah *auto governmentalism*. Dengan kata lain yang dibangun LSM bukan non-kepemerintahan, tetapi keswadayaan dan kemandirian. Formalisasi kemudian dilakukan oleh pemerintah terhadap LSM melalui UU no. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian diatur pula dengan UU no. 8 tahun 1985 tentang Keormasan dan Instruksi Mendagri no. 8 tahun 1990. (Sumber: IBK Yoga Atmaja, 2003)

Ketika di Jawa sangat marak dengan LSM[3] di tahun 1970-an, di Bali LSM baru berkembang awal tahun 1990-an. Perkembangan LSM di Jawa disebabkan karena reaksi sebagian masyarakat yang kecewa terhadap pembangunan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kucuran dari badan penyangga dana pembangunan internasional. Perkembangan LSM di Bali yang agak lambat, bukan berarti bahwa persoalan dasar yang dihadapi masyarakat di Bali muncul belakangan dibanding dengan persoalan yang muncul di Jawa atau daerah lain di Indonesia. Ketersediaan dan keterbatasan informasi dan ruang berkreasi lebih menjadi persoalan utama untuk mengalirkan saluran yang tersumbat itu. Barangkali karena terlambat berkembang, kucuran dana tersebut sangat sedikit dan tinggal sisa-sisanya saja ke LSM di Bali. Selanjutnya dibuat kesan bahwa Bali sudah sangat maju dibanding dengan daerah lain di Indonesia, sehingga bukan menjadi daerah prioritas bagi lembaga penyandang dana untuk menebarkan uangnya.

Imej yang sudah terlanjur berkembang ini semakin mempersulit LSM di Bali memperoleh dukungan dana dari luar untuk melaksanakan kegiatannya. Banyak LSM Bali yang timbul, banyak juga yang tenggelam. Hanya sedikit saja LSM yang kemudian mampu bertahan. Sangat boleh jadi hal ini selanjutnya menyebabkan pola pengelolaan LSM, terutama dalam mengerahkan atau memobilisasi logistik menjadi agak berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Per-

---

3 Dalam tulisan ini, istilah LSM tidak dibedakan menjadi Ornop atau NGO, walaupun secara substansi memberi arti yang sangat berbeda.

hatian yang besar terhadap pembangunan basis logistik lembaga, juga mempengaruhi arah gerak LSM dalam berkegiatan.

Tulisan ini lebih membahas tentang satu model pengelolaan basis logistik atau pendanaan salah satu LSM di Bali, yaitu Yayasan Wisnu Bali. Basis logistik tidak dapat berdiri sendiri dengan sejumlah program yang dilakukan. Oleh sebab itu diceritakan pula secara singkat tentang keterkaitan dengan program. Dalam perjalanan mengelola lembaga, Yayasan Wisnu Bali tidak membuat sebuah sistem yang sudah baku, tetapi berjalan berdasarkan kebutuhan kontekstual sampai membentuk model dengan sendirinya. Model pengelolaan yang terbentuk sampai saat ini juga belum baku, karena masih diperlukan penyesuaian dan pengembangan yang lain.

Mempersiapkan Logistik

Yayasan Wisnu didirikan 25 Mei 1993 berkaitan dengan keprihatinan akan biaya besar yang harus ditanggung rakyat Bali sebagai akibat dari maraknya perkembangan pariwisata massal di Bali. Saat itu pariwisata sedang mengalami perkembangan yang paling pesat. Seperti terlihat pada Tabel 1, peningkatan terbanyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah pada 1993 dan terus meningkat setiap tahunnya. Usaha untuk merefleksikan perjalanan pariwisata, kemudian menjadi elitis, tidak membumi, dan hampir ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat pada saat itu. Padahal dampak terhadap kerusakan lingkungan terlihat dengan jelas. Isu lingkungan yang diusung oleh Yayasan Wisnu menjadi sangat tidak populer, bahkan terkesan menghambat pembangunan. Ungkapan bahwa orang Bali sudah sadar lingkungan sejak dahulu, yang dapat dibuktikan dengan masih dilakukannya upacara untuk bumi, untuk ternak, untuk pohon, untuk bibit, dan yang lainnya selalu menghiasi halaman surat kabar di Bali, seakan memberi pertanda supaya Yayasan Wisnu tidak mengusik pembangunan pariwisata lewat isu lingkungan.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan yang Masuk ke Bali 1987-1999

Tahun	Jumlah
1987	309.294
1990	450.729
1993	885.516
1996	1.140.988
1999	1.355.799

Sumber: Dinas Pariwisata Bali, 2000

Pariwisata yang rawan terhadap isu, menjadikan pemerintah dan beberapa pengusaha sangat responsif (baca: paranoid) dalam menanggapi gejala, atau kegiatan yang kemungkinan dapat mengganggu kestabilan. Pemikiran orang Bali, harus dibuat sedemikian rupa bahwa Bali tidak dapat hidup tanpa pariwisata. Oleh karena itu, segenap aspek kehidupan harus selalu digandeng dengan kepentingan pariwisata. Beberapa kesuksesan pariwisata selalu diungkapkan untuk meyakinkan bahwa pariwisata adalah andalan masa depan Bali.[4]

Sebagaimana sebuah lembaga baru, pendirian Yayasan Wisnu dimulai dengan idealisme yang tinggi untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat Bali. Idealisme, ternyata ada batasnya. Bekerja terusmenerus tanpa ada imbal-balik atau masukan yang memadai, membuat segala energi yang tercurah cepat habis. Dalam pengalaman Yayasan Wisnu, pembatasnya sangat jelas sekali yaitu uang. Saya sadar sekali bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa ada uang sama sekali, segala ide atau gagasan hanya menjadi angan-angan belaka. Beberapa orang kemudian mulai rontok satu persatu, dengan segala alasan yang tentunya masuk akal. Sebagian lagi masih berusaha bertahan mencari jalan keluar dengan selalu bertanya di sana-sini.

Kemudian kami baru mengetahui bahwa ternyata dengan modal ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk proposal ke lembaga penyandang dana, dapat juga digunakan untuk mencari uang. Walaupun demikian, tidaklah mudah untuk memperoleh uang dari lembaga dana. Sebagian besar proposal yang kami kirimkan banyak sekali yang ditolak, dan bahkan tidak ada kabar beritanya. Dari keterangan yang termuat di surat, alasan yang sering ditulis di antaranya adalah Bali tidak merupakan wilayah kerja dari lembaga donor, karena Bali sudah dianggap makmur, tidak sesuai dengan program yang sedang dijalankan, tidak memenuhi syarat yang dimaui lembaga donor, dan lain-lain.

Akhirnya, ada lembaga donor dari Kanada yang mau membiayai ide Yayasan Wisnu untuk mengelola lingkungan dalam sebuah proyek yang nilainya sangat kecil dengan durasi dua bulan. Setelah dua bulan tentunya harus mendapatkan proyek lagi, kalau masih ingin bertahan. Begitu seterusnya yang terjadi, tanpa kami dapat mencari alternatif cara yang lain.

---

[4] Tulisan mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan di Bali secara lengkap dapat dibaca di buku *Ekowisata Rakyat, Lika-Liku Ekowisata Di Desa Pelaga, Tenganan, Sibetan dan Nusa Ceningan*, IBK Yoga Atmaja, Yayasan Wisnu, 2002

Durasi proyek yang pendek-pendek tentunya sangat melelahkan. Dan yang lebih parah lagi adalah terjadi perubahan di pola pikir secara perlahan-lahan yang tidak terasa oleh semua orang. Idealisme tinggi yang menggebu di awalnya, secara perlahan menurun, hanya akibat tuntutan terhadap masalah perut. Nilai proyek yang tidak seberapa diusahakan diperas habis-habisan agar dapat digunakan untuk operasional lembaga di masa tidak ada proyek. Berapapun itu besarnya atau apapun alasannya hal itu sudah dinamakan korupsi. Walaupun terdapat berbagai alasan seperti: uang proyek tidak digunakan untuk memperkaya lembaga atau pribadi, tetapi digunakan untuk pembiayaan pasca proyek, atau alasan lainnya.

Kelakuan ini menjadikan posisi Yayasan Wisnu semakin sulit, untungnya tidak berlangsung lama. Kami akhirnya memilih untuk memperkuat pengelolaan internal organisasi baik dari sisi keuangan maupun administrasinya terlebih dahulu, daripada menjalankan kegiatan di bidang lingkungan, sesuai dengan ide awal pendirian lembaga. Tetapi untuk memperkuat kondisi internal organisasi, terutama memperbaiki kondisi finansial tidaklah mudah. Banyak sekali keterbatasan yang dipunyai seperti: memilih usaha apa yang paling cocok dilakukan dan tidak bertolak belakang dengan ide dasar pendirian Yayasan Wisnu. Untuk berusaha yang biasa saja tidaklah mudah, apalagi usaha tersebut dibatasi dengan label lingkungan. Keterbatasan yang kedua adalah masalah modal yang sangat terbatas, bahkan dikatakan tidak ada. Sedangkan potensi yang ada di personil Yayasan Wisnu hanya di bidang lingkungan. Ketiga, dengan tidak mempunyai logistik minimal, kecenderungan konflik internal sangat tinggi, yang biasanya dipicu oleh hal-hal yang sifatnya sangat sepele.

Setelah menimbang-nimbang antara potensi yang ada, akhirnya dipilih berusaha dalam bidang pengangkutan dan pengelolaan sampah. Usaha ini tidak bertentangan dengan ide awal pendirian lembaga, tidak memerlukan modal, dan yang lebih penting, orang atau masyarakat yang diambil sampahnya tidak merasa keberatan, bahkan merasa senang karena membantu sebagian permasalahan mereka. Tetapi kepuasan kerja yang dilakukan, tidak membawa dampak pada perbaikan kondisi finansial. Usaha ini kemudian lebih ditujukan pada pengelolaan sampah hotel. Dengan kerjasama itu Yayasan Wisnu memperoleh uang karena mengelola sampah, serta dapat membuat model percontohan penanganan sampah hotel. Sedang hotel berbintang lima mendapat citra yang bagus, karena mengelola sampahnya secara bertanggung jawab. Dengan segala kelemahannya dan selalu jatuh bangun, pelan-pelan tapi pasti, usaha ini mulai memperlihatkan hasilnya.



Dalam waktu kurang dari tiga puluh tahun (sejak 1970) terdapat lebih dari 3000 kelompok Ornop dan organisasi sejenis yang tersebar tidak saja di kota-kota Jawa, melainkan telah meluas ke pelbagai daerah terpencil sampai di kawasan yang tidak mudah dijangkau hampir di seluruh Indonesia. (Sumber: IBK Yoga Atmaja, 2003)

Selama lima tahun membangun basis logistik melalui usaha sampah, cibiran yang mempertanyakan apakah Yayasan Wisnu berbentuk LSM atau usaha bisnis yang berbaju yayasan sering kali terdengar. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus dipilih ketika membangun basis logistik lembaga. Idealnya, usaha dan kegiatan berlangsung beriringan, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan jumlah personil yang terbatas. Pemikiran yang terjadi ketika memilih menyiapkan keuangan yang mantap pada saat itu sangat sederhana. Untuk mendampingi masyarakat supaya berdaya, tentu lembaga harus mampu memberdayakan dirinya terlebih dahulu. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka sama saja bohong mampu 'menyuruh' atau mengharapkan masyarakat berdaya. Hal ini mirip dengan pemerintah yang menasihati masyarakat supaya transparan dan tidak korupsi. Padahal masyarakat sendiri akan menilai siapa sebetulnya yang tidak transparan dan korupsi.

Pengelolaan sampah bekerjasama dengan hotel, secara finansial cukup membantu biaya rutin lembaga, tetapi kami selalu merasa terganggu ketika mendiskusikan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh usaha pengolahan sampah hotel? Apakah saling menguntungkan? Ternyata setelah bergelut melawan bayangan sendiri, kami menganggap bahwa pihak hotellah yang paling diuntungkan oleh hal tersebut. Yayasan Wisnu entah sadar atau tidak sadar pada saat itu, karena kondisi yang terjepit telah dijadikan kuda tunggangan oleh hotel. Walaupun usaha ini tetap dijalankan, tetapi pelan-pelan harus segera diubah pengelolaannya, agar sesuai dengan tujuan pendirian lembaga dalam memberdayakan masyarakat terhadap akses dan kontrol lingkungan. Tujuan lembaga seperti tersebut, menunjukkan bahwa keberpihakan harus berada di masyarakat karena merupakan konstituen utama. Untuk mencapai tujuan itu, masih diperlukan lagi tambahan biaya yang dicari dari lembaga dana yang bersedia bekerjasama.

Pada saat itu, Yayasan Wisnu beruntung memperoleh komitmen kontrak tiga tahun dari sebuah lembaga dana di Jakarta, meski sebetulnya jangka waktu kontrak hanya selama satu tahun yang dapat diperpanjang selama tiga kali. Bantuan dana pada tahun pertama sangat membantu Yayasan Wisnu dalam melaksanakan program-programnya, karena proyek yang dibiayai sesuai dengan rencana strategis lembaga, yaitu tumbuhnya masyarakat terorganisir. Setelah itu, ternyata mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Pergeseran yang terasa di internal lembaga adalah perubahan kemandirian secara finansial yang dibagi bersama lembaga dana dan selanjutnya menjadi semakin tergantung. Dengan semakin tergantung, pola kekua-

saan lembaga berubah menjadi semakin kecil. Segala sumber daya yang ada di lembaga kemudian banyak tersedot waktu dan energinya untuk keberhasilan sebuah proyek, dan bukan keseluruhan program strategis yang ada dalam lembaga. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa kontrak pelaksanaan proyek hanya berlangsung sampai tahun kedua, di samping oleh sebab yang lainnya.

Kondisi semacam ini, memaksa pembangunan di bidang logistik mengalami perubahan kembali. Dua bangunan logistik yang pernah dilakukan, ternyata selalu menempatkan masyarakat atau konstituen utama lembaga dalam posisi yang terpisah. Pembangunan basis logistik yang pertama, Yayasan Wisnu menganggap bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar sangat rendah, untuk itu perlu diberi contoh agar cepat sadar melalui beberapa kegiatan yang dianggap mampu menyadarkan masyarakat sekaligus memiliki keuntungan ekonomis. Posisi yang terpisah ini masih sama ketika Yayasan Wisnu mengubah pola pengelolaan sampah dengan bekerjasama dengan hotel. Yayasan Wisnu dengan pihak hotel memposisikan diri memiliki kesadaran yang lebih terhadap lingkungan. Keuntungan dari usaha ini digunakan untuk membantu meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan terhadap masyarakat.

Melihat kelemahan terdahulu, maka pola pengembangan diubah dengan menempatkan masyarakat dan Yayasan Wisnu membangun basis logistik secara bersama-sama dan swadaya dalam sebuah wadah yang dinamakan Jaringan Ekonomi dan Wisata Desa (JED). Jaringan ini dimiliki oleh Desa Sibetan, Tenganan, Pelaga, Nusa Ceningan, dan Yayasan Wisnu. Bentuk wadah ini seperti koperasi sekunder dan perseroan terbatas. Hal ini disebabkan karena keanggotaan dalam jaringan tidak hanya individu, tetapi juga beberapa lembaga atau kelompok yang ada di tingkat desa. Struktur yang dipakai mirip dengan koperasi sekunder, tetapi tidak menggunakan istilah anggota seperti biasanya koperasi. JED menggunakan istilah pemilik. Pemilik lebih mengkondisikan bahwa mereka memang berada di atas posisinya, dan cenderung harus bertanggung jawab, sedang anggota lebih cenderung bahwa mereka hanya sebagai pengikut, padahal di koperasi anggota itu adalah pemilik juga.

Modal utama JED berdiri adalah kepercayaan. Meskipun prinsipnya sangat sederhana, dalam kenyataan tidaklah mudah menerapkan. Ujian pertama pembuktian dalam membangun kepercayaan adalah menyetor saham dan membayar iuran pemilik jaringan. Modal keseluruhan pemilik yang sudah disetor adalah Rp 25 juta dari rencana total saham sebesar Rp 250 juta. Adanya setoran saham minimal, membuat JED mampu menjalankan operasionalnya serta sema-



Lingkungan hidup menjadi masalah utama dalam pemilihan presiden 1988 di Amerika Serikat. Tiap calon bersaing untuk membuktikan dirinya sebagai pendukung lingkungan hidup yang agresif. Sebagai pengakuan betapa isu-isu lingkungan hidup telah mendominasi berita selama 1988, edisi pertama majalah *Time* tahun 1989 mengangkat 'Bumi yang Terancam Punah' sebagai 'Planet Tahun Ini' dan mengingatkan kita semua tentang adanya bencana lingkungan hidup. (Sumber: David C. Korten, 2001)

kin menumbuhkan sikap saling percaya.

Belajar pengalaman dari kegagalan koperasi maupun kelompok usaha yang diinisiasi oleh LSM atau yang lainnya, Yayasan Wisnu tidak mengembangkan koperasi primer atau kelompok terkecilnya terlebih dahulu. Yayasan Wisnu bersama masyarakat justru mengembangkan supra struktur yang lebih besar dahulu. Pilihan ini diambil dengan mengacu pada kondisi lingkungan di masyarakat dampingan yang cenderung homogen, sehingga apabila terjadi konflik cenderung untuk didiamkan atau diredam. Jika tidak dapat diredam, biasanya organisasi itu cenderung membubarkan diri. Pengembangan JED terlebih dahulu, baik sistem manajemen kerja maupun keuangannya, dinilai lebih strategis. Rasa *ewuh-pakewuh* yang biasa terjadi di tingkat desa, dapat dikurangi karena bisa 'diingatkan' anggota dari desa lain yang tidak mempunyai *vested interest* tertentu kecuali mengembangkan organisasi JED. Dengan demikian, sistem manajemen yang sudah disepakati dapat berjalan. Untuk mengembangkan koperasi di tingkat desa menjadi lebih mudah, karena sudah ada contoh yang dapat dilihat.

JED adalah jaringan komunikasi antar desa untuk pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumberdaya alam dan budaya secara berlanjut. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan ekonomi dan pariwisata. Usaha ekonomi yang dilakukan JED adalah usaha distribusi. Usaha distribusi hasil bumi ini dipilih karena selama ini masyarakat kesulitan memasarkan hasil buminya. Beberapa contohnya, salak sewaktu musim harganya sangat rendah dan kopi hanya dijual biji mentahnya saja. Dengan adanya usaha distributor hasil bumi milik bersama, maka kopi dari Banjar Kiadan-Pelaga dapat masuk ke desa-desa lain dalam satu jaringan. Demikian juga salak dari Banjar Dukuh-Sibetan. Setelah itu, berkembang pemikiran untuk mengelola kebutuhan pokok dan didistribusikan ke desa. Pemikiran ini berawal dari cerita bahwa semua orang setiap hari perlu berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan harian. Daripada semua orang ke pasar, maka urusan berbelanja dititipkan atau diserahkan kepada satu lembaga di tingkat desa atau di tingkat jaringan. Untuk sementara barang yang dapat dititipkan adalah beras, gula, kopi, dan minyak.

Untuk usaha pariwisata, yang dilakukan oleh jaringan adalah mengelola sebuah *travel* untuk program ekowisata. Seperti diketahui, usaha pariwisata sedikitnya terdiri dari 8 tingkat dari *wholeseller*, *travel*, *tour leader*, *tour guide*, sampai dengan *local guide*, dan portir di tingkat yang paling rendah. Dari 8 tingkat tersebut, hanya 2 tingkat terbawah yang paling dikuasai masyarakat lokal. Dengan adanya *travel* milik masyarakat, setidaknya distribusi keuntungan dapat

mulai terbagi secara lebih adil di tingkat desa atau masyarakat. Prinsip usaha *travel* di jaringan adalah, bahwa usaha ini tidak dimaksudkan untuk mengubah masyarakat dari sektor pertanian ke sektor jasa pariwisata. Usaha *travel* dirintis, karena masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk sektor pariwisata. Apabila ada wisatawan masuk ke desa masing-masing, masyarakat dapat memandu serta menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai persyaratan standar minimal.

JED lebih mengutamakan usaha di sektor riil dan tidak melakukan usaha simpan-pinjam, karena berdasarkan pengalaman di tingkat desa, usaha ini selalu bermasalah. JED bukannya menganggap bahwa usaha ini tidak penting, tetapi lebih mengutamakan pengurangan konflik yang mungkin terjadi sebelum sebuah sistem berjalan dengan baik. Selain itu, juga berkembang pemikiran bahwa usaha simpan-pinjam adalah reproduksi perilaku pemerintah yang suka berhutang dan diturunkan kepada masyarakat. Untuk membentuk unit simpan-pinjam, JED justru memulainya dengan membuat dana simpanan cadangan sosial khusus. Dana ini disetor oleh setiap individu yang menjadi bagian dari JED setiap bulan. Dana ini diharapkan akan menjadi dana abadi lembaga JED.

Kini JED telah berusia hampir satu setengah tahun. Secara struktural, model pengelolaan ini telah berubah sangat mendasar, tetapi perkembangan usaha agak tersendat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi bukan pada komitmen atau kepercayaan untuk berjalan, tetapi lebih pada kurangnya pengalaman berusaha dan kekagetan dengan loncatan pemikiran dalam berusaha bersama. Dalam perencanaan awal, JED memang didesain sebagai usaha kelas menengah, agar jika menguntungkan dapat membiayai program-program kegiatan di tingkat desa maupun tingkat gabungan desa. Oleh sebab itu, desain JED menuntut beberapa konsekuensi logis mengenai jumlah modal yang harus disetor. Dengan terbatasnya modal yang masih disetor masing-masing desa, secara finansial, keuntungan usaha belum tampak. Berjalannya sebuah sistem manajemen di JED merupakan pengalaman berharga yang tidak dapat diukur jumlah materi uangnya.

Perjalanan JED membangun basis logistik masih harus dibuktikan lebih nyata. Semua orang tidak dapat menebak, apakah lembaga ini akan bubar atau terus berkibar, waktu yang akan menentukan. Dari masyarakat, tidak ada yang berani menyatakan bahwa mereka akan sukses dengan Jaringan Ekowisata Desa, tetapi keyakinan yang terpancar membuat optimis, karena berjalan dengan rel yang tepat, yaitu mempersiapkan pondasi secara matang.



"Untuk melepaskan diri dari *donor agency* atau bantuan asing adalah hal yang sulit. Karena itu, kita harus memikirkan penggalangan dana publik. Namun, di Indonesia ini ternyata lebih mudah membuat proposal ke *donor agency* daripada bersusah-payah meyakinkan masyarakat untuk mau menyumbang," kata Riswan Lapagu, wakil ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Sumber: KCM 13/01/2003)

Penutup

Selama sepuluh tahun berdiri, Yayasan Wisnu telah mencoba 4 model dalam membangun basis logistik. Model pertama biasa disebut dengan model idealis, dimana dengan kekuatan sendiri berusaha membangun usaha. Kekuatan yang paling besar hanyalah idealisme dan semangat yang tinggi untuk membuktikan kemampuan memberi contoh kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang diperoleh hanyalah idealisme yang tidak membumi. Berbagai masalah riil yang dihadapi selalu dikembalikan kepada bentuk ideal yang seharusnya terjadi, yang pada kenyataannya tidak menjawab persoalan.

Model kedua adalah model bantuan lembaga dana dari luar. Model ini bagi personil di Yayasan Wisnu, menimbulkan efek narkoba. Staf seolah-olah merasa aman dalam bekerja karena mendapat honor atau gaji yang layak, sementara dalam kenyataannya kondisi ini hanyalah mampu bertahan sementara. Fungsi lembaga donor sebetulnya mirip fungsi donor darah, darah secukupnya hanya diberikan kepada pasien saat membutuhkan. Hanya saja pada model bantuan ini, yang terjadi adalah organisasi menjadi ketagihan atau kecanduan. Dosis yang diminta pun menjadi sering dan kuantitasnya semakin banyak. Tak ada yang dapat mengobati kondisi ini selain kemauan keras diri sendiri untuk segera sembuh.

Model ketiga adalah kerjasama dengan sektor swasta. Model ini sebetulnya cukup ideal dalam mendukung keberlanjutan finansial lembaga andai swasta yang diajak bekerjasama memiliki visi sosial yang baik. Namun mencari kerjasama dengan sektor swasta yang sepaham dengan program kerja Yayasan Wisnu sangat sulit karena jumlahnya sangat sedikit. Pemaksaan untuk bekerjasama, pada awalnya sangat mungkin terjadi. Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, konflik pemikiran di antara personil Yayasan Wisnu semakin bertambah ruwet, karena sulit membedakan antara visi sosial dan visi bisnis. Walau dalam teori, hal itu sangat mungkin dilakukan.

Keempat adalah model kolaborasi dengan masyarakat dampingan. Model ini sangat berlainan dari tiga model sebelumnya yang dijalankan Yayasan Wisnu. Model ini menekankan pembangunan logistik bersama dengan konstituen. Asumsi awal yang dipakai adalah, jika JED mampu secara finansial, maka kemampuan Yayasan Wisnu dan masyarakat konstituen akan meningkat juga. Dalam kenyataannya, perkembangan usaha untuk membangun logistik di model ini justru mengalami hambatan yang paling besar. Hambatan utama adalah jumlah uang yang beredar di tingkat desa sangat kecil, walaupun konstituen di seluruh anggota JED sangat loyal. Hambatan ini akan

teratasi jika JED mampu menambah jumlah konstituen di lain desa. Namun demikian, menurut pengalaman Yayasan Wisnu, inilah salah satu alternatif pembangunan basis logistik yang memberikan pondasi paling kuat dibandingkan dengan model terdahulu.

Berdasarkan pengalaman, membangun basis logistik yang berkelanjutan harus berpijak pada potensi yang ada. Hal ini sangat berlainan dengan pelaksanaan program, yang biasanya didasarkan pada masalah untuk coba diselesaikan. Karena yang dicari masalah, maka yang akan diperoleh adalah masalah juga. Andai masalah ini kemudian dicari pendanaannya ke lembaga donor, maka dana ini akan menjadi masalah dalam hal keberlanjutan, yang otomatis upaya pemecahannya juga akan bermasalah.




KALAU DI LUAR NEGRI ORNOP JUAL POSTCARD...
KIRIM KIRIMAN KARTU POS NDAK MEM-BUDAYA DI SINI....
YANG MEM-BUDAYA, YA JUAL NOMER..!!
IBM
e-mail
sobikom@yahoo.com

■ KASUS

Penggalangan Dana bagi Perubahan Sosial

Longgena Ginting[1]

Changes in international politics, according to the author, are shifting towards conservative political policy that does not attend to many questions in the NGO community. Not only changes in political rules but also the economic recession affect funding sources. The NGO community is facing a basic problem, from the level of independence to ensuring program sustainability. Efforts to mobilize funding from the people, which has already become a key part of movements in many developed countries, are not yet optimal in Indonesia. This writer says that, based on various findings, the people have significant unused potential, primarily in the sector of funding and support for social change programs. There will clearly be various positive effects if NGOs begin to develop funding from local people. In addition to ensuring the continuity of programs, this can also lead to relatively permanent public funding. Efforts to mobilize local funding require the NGOs to build their capabilities, particularly in terms of developing connections, which require changes at the paradigmatic level within the organization. These paradigms will affect organizational structure, activists' attitudes, and the organization's character. This work will push the growth of NGOs as independent entities that work for the public interest.

---

[1] Longgena Ginting adalah Direktur Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Jakarta.

"Uang adalah satu-satunya hal yang menggerakkan dunia."
_Publius Syrus (42 SM)

"Penggunaan uang yang terbaik bukan untuk menghasilkan lebih banyak uang tetapi membuat uang menjadi lebih berguna bagi kehidupan."
_Henry Ford (1863-1947)

Dalam sebuah tulisan singkatnya, Sutoro Eko menggambarkan bahwa saat ini Ornop (organisasi non-pemerintah) sedang menghadapi setidaknya empat masalah besar, yaitu: (1) masalah internal yang menyangkut manajemen, organisasi, keuangan, dan lain-lain, yang terkait dengan akuntabilitas dan keberlanjutan Ornop yang sebagian besar tergantung pada donor asing; (2) masalah relasi Ornop dengan elemen lain, terutama dengan pemerintah dan masyarakat, yang terutama belum terbangunnya hubungan yang bersendikan kepercayaan; (3) masalah penguatan dan strategi gerakan sosial yang terkait dengan bagaimana merumuskan strategi aksi pemecahan masalah yang sering tidak relevan dalam membuahkan perubahan yang berarti; serta (4) Ornop menjadi bagian dari polarisasi masyarakat sipil yang justru malah sering mengotak-kotakkan elemen masyarakat sipil yang sibuk dengan sektornya sendiri serta gagal membangun aksi-aksi kolektif.[2]

Dalam beberapa artikel lain, penulis seperti James Petras dan Saleh Abdulah juga banyak membahas secara kritis keberadaan Ornop khususnya dengan isu-isu pendanaan.[3] Meskipun berbeda dalam cara memandang masalah, para penulis tersebut mengangkat isu yang cukup krusial tentang eksistensi dan akuntabilitas Ornop. Bila dianalisis lebih lanjut, sebenarnya argumentasi-argumentasi tersebut bermuara pada hal-hal bagaimana Ornop membangun hubungan dengan konstituennya dan bagaimana ia membangun sistem pendanaan secara lebih akuntabel. Namun sayang sekali belum banyak wacana atau usulan yang membahas atau menawarkan pilihan-pilihan yang harus diambil Ornop untuk menjawab permasalahan tersebut secara tuntas, meskipun masalah ini merupakan bagian terpenting untuk menjawab relevansi posisi dan peran Ornop di tengah perubahan yang justru dicita-citakannya.

Saat ini Ornop berada di tengah jalan yang sedang menentukan pilihan terhadap masa depannya di tengah publik dan di tengah situasi yang senantiasa berubah.Tulisan ini ingin menawarkan sebuah

---

2 Majalah *FLAMMA*, Volume 8/April 2003, IRE Yogyakarta.

3 Baca Imperialisme Abad 21 tulisan James Petras bersama Henry Veltmeyer dan baca juga tulisan Saleh Abdullah dalam **wacana** Edisi 14 Tahun III 2002.

gagasan yang hendak menjawab pertanyaan substansi tersebut tanpa terjebak dalam sebuah diskusi hanya di tingkat wacana. Tulisan ini juga sekaligus menawarkan strategi yang harus dipertimbangkan oleh Ornop Indonesia untuk menjawab dua hal kunci tentang keberadaan Ornop di masa-masa mendatang: legitimasi dan akuntabilitas Ornop.

Pendahuluan

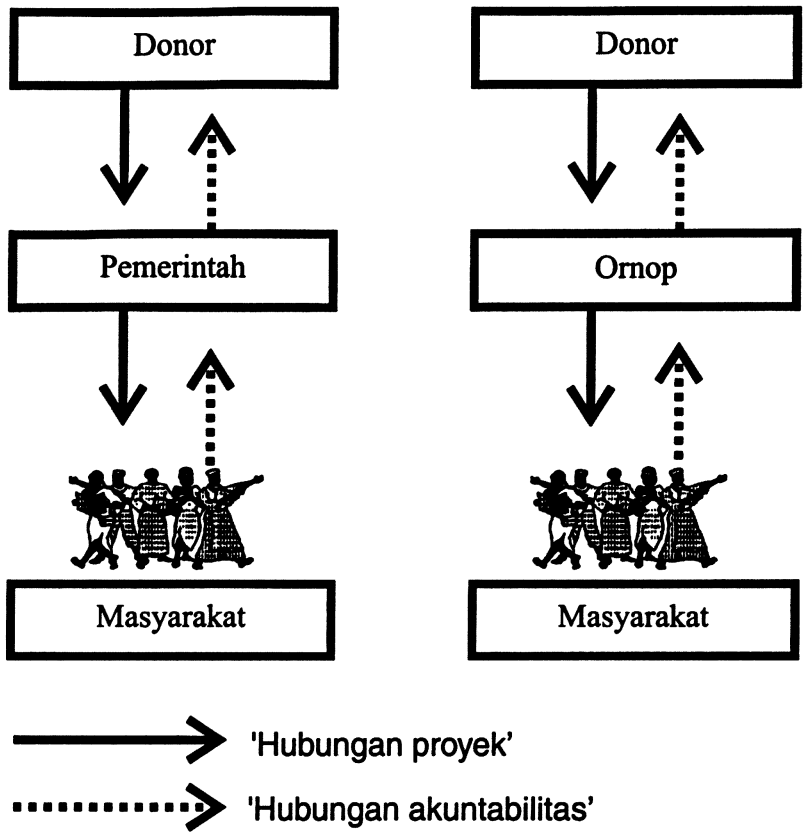
Tak seorangpun dapat menyangkal bahwa uang merupakan salah satu alat signifikan dalam sebuah organisasi, termasuk Ornop atau organisasi-organisasi non-profit (nirlaba), untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dan memenuhi misinya. Berbagai akses yang dimiliki Ornop Indonesia selama ini dalam memperoleh dukungan dana dari badan-badan donor—Ornop internasional, yayasan, korporasi nasional dan internasional, atau bantuan pemerintah—tidak saja telah mendorong dan membantu banyak Ornop untuk berkembang, tetapi di sisi lain telah pula menghasilkan ketergantungan Ornop yang tinggi terhadap donor.

Dalam hal pendanaan, sesungguhnya Ornop di Indonesia tidak berbeda banyak dengan negaranya. Selain mengandalkan penerimaan pajak dan pendapatan ekspor, pemerintah menggantungkan sumber-sumber pendanaannya dari donor-donor asing baik bilateral maupun multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB), dan yang terakhir adalah dari IMF (International Monetery Fund). Bila dana-dana pembangunan tersebut sebagian besar merupakan hutang (*loan*), maka kalangan Ornop mendapatkan hibah (*grant*) dari donor-donor asing—sebagian Ornop malah menikmati dana-dana yang berasal dari hutang luar negeri—yang sebagian merupakan dana-dana pembangunan internasional dari negara-negara industri.

Dana yang berasal dari donor-donor ini kemudian digunakan untuk dana-dana pembangunan oleh pemerintah atau dana program atau proyek oleh Ornop. Arus uang jelas terlihat turun dari donor ke pemerintah (atau Ornop) dan selanjutnya turun ke masyarakat. Pola dalam hubungan seperti ini adalah searah, yaitu dalam hubungan pelaksanaan proyek hubungannya adalah hubungan dari atas ke bawah, dan sebaliknya dalam hubungan akuntabilitas hubungan itu menjadi dari bawah ke atas.



Terdapat empat persepsi diri LSM: 1) LSM sebagai bagian integral pemerintah (istilah yang digunakan adalah mitra pemerintah); 2) LSM sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat (jembatan antara pemerintah dengan masyarakat); 3) LSM yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam berhadapan dengan negara (pendamping rakyat); dan 4) LSM yang lebur dan menyatu dengan rakyat (menyatu dalam organisasi kelompok basis). (Sumber: S. Onny Prijono, 1996)



Dalam banyak hal barangkali Ornop lebih baik akuntabilitasnya dalam pengelolaan arus 'proyek' dibandingkan pemerintah. Begitu pula dalam hal perencanaan dan membangun kepemilikan (*ownership*) proyek, Ornop dapat mengklaim bahwa mereka lebih baik. Namun apabila dilihat dari hubungan arus akuntabilitas Ornop dengan masyarakat (konstituen), sesungguhnya Ornop tidak jauh berbeda dengan pemerintah. Pola hubungannya pun nyaris menjadi hubungan yang searah antara subyek dengan obyek. Pada bagian lain dari tulisan ini, akan diperlihatkan bagaimana pola hubungan itu apabila sumber pendanaan Ornop berasal dari bawah (masyarakat itu sendiri) dan pola hubungannya menjadi subyek dengan subyek.

Kerentanan Pendanaan Ornop Indonesia Jangka Panjang

Sebagian besar Ornop menggantungkan dirinya terhadap sejumlah kecil lembaga-lembaga donor (*funder*). Sangat jarang Ornop kita yang memiliki lebih dari 10 donor, malah banyak di antaranya yang hanya mengandalkan dana dari 2-3 donor atau malah donor tung-

gal. Bisa dibayangkan bila beberapa donor di antaranya menghentikan bantuan atau kerjasama berakhir, maka dapat dipastikan Ornop tersebut akan kelabakan. Untuk mengantisipasi hal ini, banyak Ornop yang menabung uang dari kegiatannya (*saving*), yang dalam jangka panjang tidak juga dapat banyak membantu. Disadari atau tidak, hal ini menempatkan organisasi-organisasi tersebut berada dalam kerentanan keberlanjutan pendanaan yang sangat tinggi.

Hal yang aneh, sudah lebih dari tiga dekade sejarah Ornop Indonesia, belum banyak inovasi pendanaan untuk mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus mengurangi kerentanannya terhadap ketersediaan dan keberlanjutan dana. Kalaupun ada, inovasi tersebut masih terbatas berupa pendirian unit-unit usaha (penjualan buku, penyediaan jasa, dll.) atau masih secara konvensional menggalang dana dari pihak lain seperti dari perusahaan-perusahaan (*corporate fundraising*). Untuk cara yang pertama, usaha tersebut kenyataannya tidak akan pernah mencukupi kebutuhan Ornop secara penuh, dan untuk cara yang kedua, tetap tidak akan menjawab masalah ketergantungan dengan pihak luar, karena hanya memindahkan ketergantungannya kepada pihak lain.

Ketergantungan terhadap lembaga donor, juga sering membuat Ornop sering harus 'menyesuaikan' diri dengan berbagai keterbatasan yang melekat pada badan-badan dana, seperti daur proyek lembaga donor (yang biasanya sangat terbatas), wilayah kerja dan isu yang ditangani, atau tidak jarang pula dengan kepentingan donor itu sendiri. Selain memiliki kepentingan, donor-donor juga mempunyai orientasi, wilayah kerja, dan jangka waktu kerja tertentu. Saat ini, beberapa lembaga donor bahkan sudah menyatakan akan memindahkan tempat layanan mereka dari Indonesia.

Komunitas Ornop dengan cita-cita besar yang diusungnya, seperti promosi demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia), penguatan kapasitas masyarakat sipil, peningkatan partisipasi publik, keadilan, dan lain-lain, tentu saja tidak mudah menerjemahkan misinya ke dalam rencana kerja yang harus dibatasi daur proyek yang pendek atau keterbatasan dana, dan isu-isu lain yang biasanya melekat secara inheren di lembaga donor. Dalam kondisi demikian, mau tidak mau banyak Ornop harus melakukan akrobat untuk memastikan bahwa rencana-rencana program mereka *fit* dalam seluruh batasan tersebut.

Inilah kesulitan utama Ornop yang menggantungkan seluruh pendanaan dari pihak donor, dimana mereka tidak pernah dapat menjalankan keseluruhan misinya seperti yang dimandatkan tanpa harus melakukan penyesuaian seperlunya. Dengan kata lain, Ornop kita sebenarnya berada di antara misinya (*mission-driven*) dengan



Menurut Laode dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), ada dua cara pertanggungjawaban LSM kepada publik, yakni menjelaskan kepada publik melalui media massa tentang berapa dana yang mereka terima dan dari lembaga-lembaga donor mana saja. Kedua, mereka juga perlu mempertanggungjawabkan melalui laporan tahunan kepada publik tentang program-program yang telah mereka lakukan. (Sumber: KCM, 17/09/2003)

misi donor (*donor-driven*). Dalam situasi seperti ini, tak jarang Ornop harus melakukan kompromi-kompromi pragmatik. Derajat kompromi ini sangat bervariasi dari satu Ornop ke Ornop yang lain, dan biasanya semakin demokratis lembaga tersebut, semakin rendah derajat kompromi tersebut.

Tidak banyak pula yang menyadari bahwa lembaga-lembaga donor non-pemerintah (yayasan atau Ornop internasional) juga menyandarkan sebagian besar sumber pendanaan dari pemerintah negara mereka. Meskipun menggalang dana dari anggota atau individu-individu (publik), lembaga-lembaga ini juga mengandalkan bantuan pemerintah untuk program-program internasionalnya. Untuk itu, lembaga-lembaga donor ini harus senantiasa menjaga perbedaan-perbedaan kepentingan mereka dengan kepentingan politik (terutama politik internasional) pemerintahnya untuk tetap dapat memperoleh dukungan finansial.

Bandul politik pemerintahan dunia saat ini yang cenderung bergeser ke kanan atau ke arah yang lebih konservatif, membuat perbedaan kepentingan pemerintah dengan lembaga-lembaga tersebut semakin berjarak. Banyak pemerintah di dunia ini yang semakin tidak senang dengan cara-cara lembaga ini mendanai kegiatan-kegiatan yang kritis, yang membangun perlawanan atau mengadvokasi masalah-masalah sosial, terutama terhadap simbol-simbol kapitalisme. Bahkan untuk lembaga dana yang moderat sekalipun, meruncingnya perbedaan tersebut semakin tidak terhidarkan. Dalam kondisi demikian, pemerintah-pemerintah tersebut dapat memilih mengurangi dananya bagi lembaga-lembaga donor atau membuat paket-paket bantuan dengan isu-isu yang menjadi pilihan mereka, salah satunya seperti saat ini isu mengenai terorisme.

Di samping itu semua, resesi global telah membuat sumber-sumber dana dari banyak yayasan internasional yang mengandalkan dana abadi (*trust fund*) mengalami penyusutan berarti karena krisis ekonomi global yang berpengaruh terhadap investasi yang mereka tanamkan di pasar-pasar modal. Akhirnya, sumber-sumber dana dari luar tak lama lagi menjadi sumber yang tidak dapat dipertahankan.

Dengan demikian secara singkat, akibat pola hubungan Ornop dengan lembaga donor yang telah berjalan sekian lama berakibat terhadap masalah-masalah sebagai berikut:

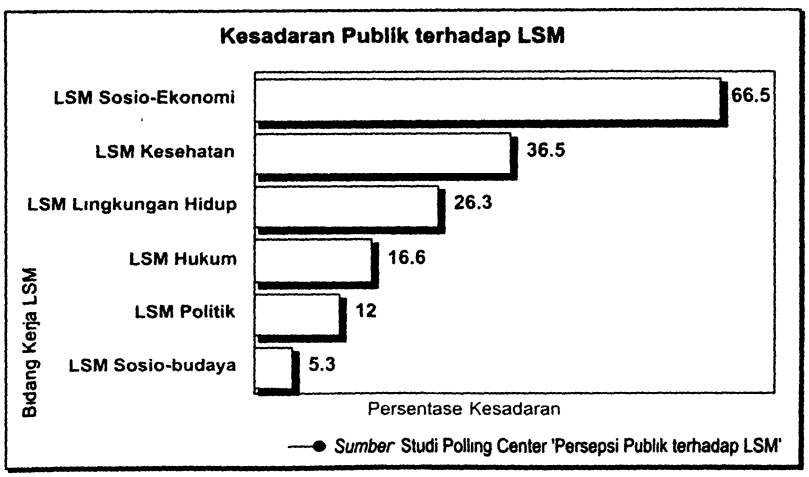
- Dukungan *funding* jarang untuk jangka panjang (lembaga donor biasanya *project oriented* dan dapat memindahkan area kerja)
- LSM tidak punya pendanaan yang berkelanjutan dan stabil

Dalam salah satu laporannya yang sangat berpengaruh, Bank Dunia menyatakan bahwa "pemerintah adalah sentral dalam pembangunan ekonomi dan sosial, tidak sebagai penyedia langsung pembangunan, tetapi sebagai partner, katalis, dan fasilitator". (Sumber: World Bank, 1997)

- Mudahnya mencari *funding* asing berakibat misi LSM sering berubah sesuai dengan keinginan *funding*
- Menurunnya kredibilitas dan legitimasi LSM di mata publik
- Menurunnya pengaruh LSM terhadap pemerintah dan legislatif–"Tidak punya pencapaian, tidak punya power"
- LSM tidak punya hubungan baik dengan konstituen

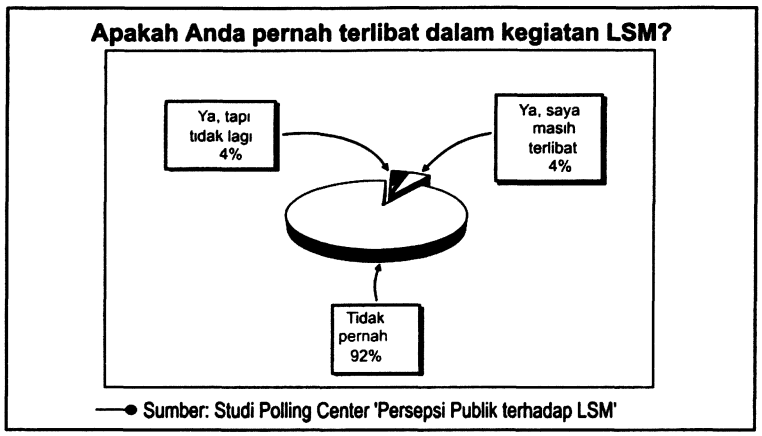
Hubungan dan Persepsi Masyarakat terhadap Ornop

Ornop adalah sebuah entitas publik yang unik. Dia lahir dari ruang-ruang demokrasi dan memilih menggunakan alat-alat demokrasi untuk menjalankan misinya. Sekarang Ornop telah tumbuh menjadi bagian penting dari perkembangan kehidupan warga sipil di seluruh dunia. Karena Ornop begitu plural, maka persepsi mengenai eksistensinya juga menjadi sangat beragam. Meskipun cukup sering menjadi sumber berita bagi media massa, kenyatannya, Ornop tidaklah terlalu dikenal masyarakat luas sebagaimana yang kita bayangkan. Hasil jajak pendapat 'Persepsi Publik terhadap LSM', memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat kita yang mengetahui keberadaan LSM.[4] Pemahaman masyarakat sendiri mengenai LSM bukanlah melulu mengenai hal-hal yang positif, justru Ornop banyak dipahami secara miring oleh publik. Bila dibagi dalam bidang kerjanya, LSM sosio-ekonomi merupakan jenis Ornop yang paling dikenal oleh publik, kemudian disusul oleh LSM Kesehatan, LSM Lingkungan Hidup, LSM Hukum, LSM Politik dan LSM Sosio Budaya (lihat tabel di bawah).[5]



4 Jajak pendapat dilakukan oleh Polling Center pada 2002.
5 Op. cit.

Jajak pendapat yang sama juga memberikan gambaran mengenai minimnya keterlibatan atau partisipasi publik dalam LSM. Ini memang menjadi semacam tantangan bahwa kenyataannya, LSM selain belum begitu populer, keterlibatan masyarakat di dalamnya juga sangat kecil. Sebanyak 92% responden dalam jajak pendapat tersebut menyatakan tidak pernah terlibat dalam LSM, sementara 4% menyatakan pernah terlibat tetapi saat ini tidak terlibat lagi, dan hanya 4% yang menyatakan tetap terlibat dalam LSM.[6]



Persepsi lain yang kerap muncul mengenai LSM adalah bahwa LSM merupakan lembaga kaya dan mengelola uang dalam jumlah besar. Stigma buruk juga tidak jarang ditempelkan ke LSM seperti misalnya 'penjual kemiskinan', 'agen kepentingan asing', 'elite baru', dan lain sebagainya. Stigma ini terutama mengental pada masa Orde Baru dimana kontrol terhadap informasi melalui media massa masih begitu kuat.

Kenyataannya, persepsi ini tidak saja terbangun di kalangan masyarakat luas. Terbatasnya pemahaman mengenai LSM juga membuat kalangan pejabat pemerintah maupun legistatif memandang LSM secara berbeda-beda pula. 'Ketertarikan' terhadap dunia LSM sering kali terbatas pada dari mana dan bagaimana LSM memperoleh pendanaan. Tidak jarang sebagian waktu dari acara-acara *hearing* dengan DPR mempertanyakan hal-hal tersebut. Ketika mendapati bahwa LSM mendapatkan dananya dari luar negeri, maka tak jarang di kalangan tersebut berkembang persepsi bahwa LSM mewakili kepentingan asing, dsb.

---

[6] Op. cit.

Realitas ini memang menyedihkan, dimana legitimasi sosial Ornop ternyata masih rendah. *Representativeness* atau kepentingan yang diwakili Ornop juga dianggap tidak kuat karena memang tidak dapat dibuktikan melalui basis-basis sosialnya yang kuat. Kalangan anggota parlemen masih sering membandingkan 'perwakilan sosial' Ornop dengan 'perwakilan politik' yang mereka miliki. Misalnya, anggota parlemen sering menyatakan bahwa mereka masing-masing mewakili lebih dari 350 ribu orang—meskipun sebenarnya mereka hanya diangkat dan mewakili partainya. Di sinilah letak persoalannya, bahwa 'perwakilan sosial' Ornop masih belum dibuktikan dengan perwakilan basis massa konstituen secara riil. Dibandingkan dengan ormas-ormas (organisasi masyarakat), basis-basis legitmasi sosial kalangan Ornop masih terlalu kecil untuk berhadap-hadapan dengan pihak-pihak yang secara politik 'mewakili' masyarakat.

Masalah ini seharusnya tidak dilihat sebagai masalah sepele oleh Ornop, apalagi Ornop yang mencita-citakan sebuah transformasi sosial, tanpa pernah memikirkan pengembangan basis-basis dan sumber legitimasi sosial mereka.

Filantropi dan Sektor Nirlaba

Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani yang berarti 'kasih manusia'. Di masa modern ini, keinginan baik atau humanitarianisme sering diungkapkan dalam pemberian donasi uang atau bantuan tenaga. *Charity* atau karitas berasal dari kata Latin yang berarti 'cinta' dalam arti untuk melakukan hal-hal yang baik. Akar kata-kata ini mengingatkan kita tentang alasan mendasar dari pekerjaan kebanyakan Ornop.

Filantropi adalah salah satu sistem terorganisir yang terbesar di dunia. Sistem filantropi terbesar di dunia terdapat di Amerika Serikat. Bila diasumsikan sistem ini sebagai sebuah industri tunggal maka ia akan mewakili 10% dari angkatan kerja dan mewakili 5% dari GDP (Gross Domestic Product) di Amerika Serikat.[7] Jutaan organisasi nirlaba di dunia yang tidak memiliki hubungan struktural dengan negara menggantungkan hidupnya dari sistem filantropi yang terorganisir ini.

Karena ukuran dan perkembangan sektor nirlaba yang luar biasa, ia menarik perhatian pemerintah, peneliti, dan kalangan akademik untuk meregulasi bagaimana sektor nirlaba ini berfungsi, sementara banyak pula yang berpikiran bahwa meningkatnya kesadaran publik



Asian Development Fund ADF) adalah sejenis dana dari ADB yang dipinjamkan ke sejumlah negara anggotanya—terutama yang paling miskin dengan bunga rendah. ADF merupakan program yang didukung 25 negara donor. Dana itu selalu ditambahkan, yang dipelopori Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa setiap empat tahun sejak diluncurkan pada 1973. (Sumber: KCM, 14/06/2003)

7 Kim Klein, *Fund-raising for Social Change*, Chardon Press-Oakland, CA, edisi keempat.

dan aturan-aturan sukarela yang berprinsip pada standar-standar etik dapat menyediakan aturan yang cukup bagi sektor ini, tanpa harus diatur oleh negara.

Kesalahpahaman terbesar tentang filantropi di dunia ini adalah bahwa dana bagi lembaga non-pemerintah atau organisasi nirlaba, berasal dari perusahaan atau yayasan-yayasan. Kenyataannya, sumber dana terbesar bagi kegiatan nirlaba berasal dari sektor publik. Pada 1999, jumlah dana bagi sektor non-profit di Amerika Serikat mencapat $190,16 miliar, dengan sumber-sumber sebagai berikut:

Sumber Kontribusi bagi Kegiatan Nirlaba di Amerika Serikat

Asal Kontribusi	Jumlah (miliar dolar)	Prosentase
Individu	143,71	75,6%
Yayasan	19,81	10,4%
Warisan	15,61	8,2
Perusahaan	11,02	1,8

(Sumber: Kim Klein, 2001)

The Independent Sector, sebuah lembaga riset dan advokasi di Amerika Serikat mendapatkan hasil penelitian bahwa 82% sumber dana yang berasal dari individu berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah. Jumlah sumbangan dari kelas masyarakat ini jauh lebih besar dari masyarakat kelas menengah ke atas.[8]

Sektor publik yang terdiri dari individu-individu adalah sumber pendanaan yang terbesar di dunia dan menjadi sumber pendanaan bagi organisasi nirlaba di hampir seluruh belahan dunia. Di Indonesia, hal itu tidaklah jauh berbeda, dan diperkirakan masyarakat Indonesia menderma hingga Rp 3 triliun per tahun untuk kegiatan-kegiatan sosial atau sektor nirlaba ini.

Siapa yang Menerima?

Untuk memahami dunia filantropi ini, kita harus melihat tidak saja yang memberi tetapi siapa saja yang menerima sumbangan tersebut. Dengan perubahan prosentase sedikit dari tahun ke tahun, terdapat pola konsisten bahwa hampir dari separuh uang yang disumbangkan mengalir ke organisasi-organisasi agama. Di Amerika Serikat, jumlah sumbangan ke sektor ini mencapai hingga 43% pada 1999.

[8] Op. cit.

Penyaluran Sumbangan yang Diperoleh di Amerika Serikat pada 1999[9]

Disalurkan ke ...	Jumlah (Miliar)	Prosentase
Keagamaan	$81,73	43,0%
Pendidikan	$27,46	14,4%
Kesehatan	$17,95	9,4%
Pelayanan Sosial	$17,36	9,1%
Hadiah ke Yayasan	$15,11	7,9%
Seni-Budaya	$11,07	5,8%
Pemanfaatan Sosial	$10,94	5,8%
Lingkungan	$ 5,83	3,1%
Hubungan Internasional	$ 2,65	1,4%

(Sumber: Giving USA, 2000)

Belum ada data lengkap di Indonesia kemana sumbangan-sumbangan tersebut mengalir, tetapi organisasi-organisasi keagamaan (sumbangan biasanya diberikan dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah) merupakan salah satu tempat sumbangan ini diberikan. Di Indonesia, menurut PIRAC, peringkat kedua dan ketiga sumbangan tersebut mengalir untuk bantuan bagi bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll.) dan kesehatan (sakit jantung, AIDS, dll.). Sementara masalah lingkungan hidup menempati urutan ketujuh. Bagi organisasi-organisasi lingkungan di Indonesia, ini merupakan peluang besar karena mereka dapat menghubungkan masalah-masalah lingkungan dengan masalah bencana alam dan kesehatan (alasan kedua dan ketiga orang menyumbang).

Meskipun porsi sumbangan masyarakat untuk keagamaan adalah yang tertinggi, studi PIRAC menunjukkan bahwa 77% orang Indonesia menyumbang ke organisasi-organisasi non-agama. Studi yang sama memperlihatkan bahwa donasi setiap orang Indonesia cukup tinggi, mencapai hingga rata-rata Rp. 238.887,- per orang per tahun, dan jumlah ini masih hampir sama pada masa pasca-*krismon* (krisis moneter).

Untuk melihat tingginya jiwa derma masyarakat, dapat dilihat dari berbagai pengumpulan sumbangan bagi peristiwa bencana alam di Indonesia. Banyak media massa cetak maupun elektronik yang berpartisipasi dalam pengumpulan dana dari masyarakat ini. Tingkat pengumpulan dana ini bisa dilakukan dengan cepat dan dengan hasil yang cukup fantastis. Pengumpulan sumbangan oleh tiga media (Kompas, Republika, dan Suara Pembaruan) pada 2001 memperlihatkan bahwa media ini berhasil mengupulkan rata-rata Rp 7



Dalam pengkajian ke-8 program ADF—yang melibatkan dana sebesar 5,6 miliar dolar AS (untuk periode 2001-2004)—negara-negara donor ADB meminta penekanan lebih kuat harus dilakukan soal transparansi dalam pembuatan keputusan, serta akuntabilitas. Tekanan para donor itu adalah layak, besar dugaan bahwa dana ADF melenceng penyalurannya. Terkadang dana ADF yang seharusnya dialokasikan untuk orang miskin itu, mengalir ke kantong pejabat yang menjadi kepala proyek di negara-negara penerima dana ADF. (Sumber: KCM, 14/06/2003)

[9] Giving USA, 2000.

hingga Rp 16 juta setiap hari dengan besar sumbangan per orang rata-rata mencapai Rp 400 ribu hingga Rp. 700 ribu (lihat tabel di bawah).

Perolehan Dompet Bengkulu di Tiga Media 2001

Media	Kompas	Republika	Suara Pembaharuan
Periode	41 hari	38 hari	46 hari
Total Penerimaan	Rp 674.780.312,-	Rp 576.183.902,-	Rp 311.726.290,-
Jumlah penyumbang	959	1.140	669
Rata-rata per hari	Rp 16.458.000,-	Rp 15.163.000,-	Rp 6.777.000,-
Rata-rata per penyumbang	Rp 704.000,-	Rp 505.000,-	Rp 465.000,-

Sumber: Galang, Edisi 1, Tahun I, Januari 2001

Hal ini juga terjadi dengan pengumpulan bantuan untuk bencana banjir yang dikumpulkan oleh 16 media massa cetak dan elektronik di Jakarta pada April 2002, yang mencapai lebih dari Rp 9,3 miliar.[10]

Filantropi atau derma sesungguhnya merupakan tradisi di banyak kelompok masyarakat kita. Salah satunya adalah budaya *jimpitan*, dimana setiap rumah mengumpulkan beras *sejumput* untuk berbagai keperluan sosial di desa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa spirit filantropi yang ada di masyarakat merupakan potensi sumber besar pendanaan bagi kegiatan-kegiatan sosial dan nirlaba di Indonesia. Sebuah contoh sukses sistem filantropi yang dibangun di Indonesia adalah Dompet Dhuafa.

Mengapa Publik Menyumbang?

Dalam sebuah lokakarya, Zaim Saidi dari PIRAC, narasumber ketika itu, bertanya kepada peserta, "Mengapa publik tidak memberi uang kepada Ornop?" Selain sangat sedikit yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, ternyata jawabannya pun salah. Jawaban atas pertanyaan sederhana tersebut: "Karena Ornop tidak pernah meminta!"

Ada banyak alasan mengapa orang memberi uang kepada organisasi nirlaba. Alasan umum sangat bervariasi dari mulai tingkat konsumerisme hingga tradisi kepercayaan yang mendalam. Beberapa orang menyumbang karena mereka suka publikasi yang diter-

[10] *Galang* Edisi 3, Tahun II, April 2002.

bitkan atau karena mereka menerima *merchandise* (gelas, stiker, payung, dll.) yang diberikan. Sebagian lagi menyumbang karena sudah merupakan tradisi lingkaran sosial mereka.

Pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ada banyak alasan mengapa orang memberi. Orang menyumbang karena mereka peduli dengan isu; mereka percaya pada organisasi, mereka berpikir analisis kelompok tersebut, visi dari solusi yang ditawarkan adalah benar. Alasan lain, kadang-kadang orang memberi karena mereka merasa bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki. Beberapa yang lain menyumbang agar dianggap peduli dan telah melakukan sesuatu bagi lingkungannya atau juga ingin menjadi orang yang mendukung prinsip-prinsip yang diyakininya.

Banyak alasan orang menyumbang, tetapi kenyataannya sebagian besar orang menyumbang adalah karena mereka diminta, dan dengan diminta mengingatkan mereka tentang apa yang mereka peduli. Dengan diminta, mereka juga menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang memiliki prinsip dan baik hati terhadap orang-orang yang memiliki nilai-nilai tersebut.

Secara sekilas, banyak orang yang berpikir bahwa institusi-institusi agama menerima banyak dana karena teologi yang mereka kembangkan, misalnya sumbangan ke agama merupakan 'investasi' bagi dunia akhirat, atau sumbangan ke agama dilakukan untuk menghindari cobaan, dan sebagainya. Meskipun ini diyakini oleh banyak penyumbang sebagai alasan untuk memberi, sebenarnya motivasi ini saja tidak cukup. Jadi mengapa organisasi agama menerima hampir separuh dari seluruh dana yang berasal dari publik? Di samping mereka menawarkan nilai (*values*) yang besar kepada masyarakat, mereka memintanya!

Mari kita lihat cara institusi-institusi agama menggalang dana:

- Mereka meminta setiap kesempatan yang ada, misalnya pada saat pemuka-pemuka agama memberikan layanan kepada umat (gereja-gereja setidaknya melakukannya seminggu sekali);
- Mereka membuat menyumbang menjadi mudah: sebuah kantung diedarkan ke setiap orang tanpa pandang bulu dan bentuk sumbangan tidak terbatas dalam bentuk mata uang apa pun atau sistem pembayaran apa pun. Setiap orang yang hadir, apakah orang yang kebetulan hadir, atau orang yang rutin, hingga orang yang sangat loyal, diberikan kesempatan sama untuk menyumbang, kaya maupun miskin, perempuan atau laki-laki, muda atau miskin;



Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak Apong Herlina, serta Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin mengaku selama ini sudah menjalankan transparansi dalam sistem pelaporan mereka. Misalnya, ICW secara rutin telah melaporkan keuangan, program, bahkan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga auditor independen. Bagi publik yang ingin mengetahui, bisa mengakses melalui situs ICW. (Sumber: KCM 18/09/2003)

- Mereka membuat orang mudah menyumbang termasuk kepada orang yang tidak rajin beribadah, juga menyediakan kesempatan menyumbang sebulan atau bahkan setahun sekali;
- Mereka menyediakan berbagai pilihan untuk disumbang tergantung apa yang diinginkan, seperti program pendidikan, kesehatan, anak, dan sebagainya.

Penggalangan Dana bagi Perubahan Sosial

Peningkatan akuntabilitas dan legitimasi, keberlanjutan dan stabilitas pendanaan, serta membangun organisasi yang didorong oleh misinya (*mission-driven organisation*) adalah justifikasi bagi Ornop untuk menggalang pendanaan dari publik (*public fund-raising*). Penggalangan dana dari publik dapat menjadi alat bagi perubahan sosial yang efektif karena penggalangan dana dari publik akan membangun hubungan secara langsung dengan basis pendukung (konstituen). *Fund-raising* juga merupakan sebuah kepemimpinan sosial dan dapat menjadi alat pendidikan politik bagi para pendukung.

Fund-raising dari publik dapat menjawab dua prinsip-prinsip penting dalam penggalangan dana, yaitu:

- Diversifikasi sumber dana: Awas, satu sumber dana jangan melebihi 30% budget organisasi.
- Targeting: Mengenali donatur-donatur dan membuat hubungan dengan mereka secara langsung (*direct marketing*).

Selain itu, dengan *fund-raising* dari publik kita dapat mengembangkan unsur-unsur penting bagi Ornop dalam melaksanakan *fund-raising*, karena mudah memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: (*Growth, Involvement, Visibility, Efficiency and Stability*, GIVES)

→ *Growth*: pertumbuhan pendapatan dan donatur
→ *Involvement*: keterlibatan donatur dalam organisasi
→ *Visibility*: membangun dukungan publik dan membangun citra organisasi yang diinginkan di mata publik
→ *Efficiency*: memilih ongkos untuk penggalangan dana yang paling rendah
→ *Stability*: membangun keberlangsungan pendanaan jangka panjang

Siapa saja bisa melakukan *fund-raising*, dan tak ada ilmu khusus untuk melakukan *fund-raising* karena semua kegiatannya masuk akal. Aktivis adalah *fund-raiser* terbaik karena dia terlibat dengan

seluruh kegiatan organisasinya, sehingga ia merupakan orang yang tahu bagaimana menggambarkan dan meyakinkan calon-calon donatur tentang apa yang dilakukan oleh organisasi. Dengan membangun hubungan secara langsung dengan pendukung, *fund-raising* sesungguhnya adalah sebuah kepemimpinan sosial, dan dapat menjadi alat bagi perubahan sosial, karena:

- *Fund-raising* adalah kepemimpinan (*leadership*).
- *Fund-raising* adalah *friend raising:* membangun hubungan dengan banyak individu yang memiliki nilai sama (*like-minded people*).
- *Fund-raising* adalah membangun gerakan perubahan sosial karena dapat menjadi alat untuk mengembangkan nilai-nilai (*community of values*) yang ingin ditawarkan kepada publik.
- *Fund-raising* adalah transformasi sosial: para *friends* baru ini akan menjadi donatur, relawan, dan pendukung politik.
- *Fund-raising* adalah pendidikan, karena melalui kontak langsung, kita dapat mengembangkan proses pendidikan politik atau lingkungan

Penggalangan Dana dari Publik

Fund-raising dari publik (dari basis individu-individu yang luas) tidak semata-mata bertujuan mengumpulkan uang. *Fund-raising* publik sebenarnya mencari donator, bukan donasi (sumbangan). Karena itu, istilah yang lebih tepat untuk ini adalah *friend-raising*, bukan *fund-raising*. *Friend-raising* dari publik dapat memberikan keuntungan kepada Ornop, seperti antara lain:

- Sumber dana yang berkelanjutan dan stabil
- Sosialisasi misi dan isu Ornop ke publik (pendidikan politik)
- Mengembangkan konstituen yang jelas dan aktif, membangun potensi mobilisasi konstituen
- Akuntabilitas publik, untuk tetap memperoleh dukungan publik Ornop harus membangun akuntabilitasnya
- Tidak tergantung pada donor—*mission-driven*

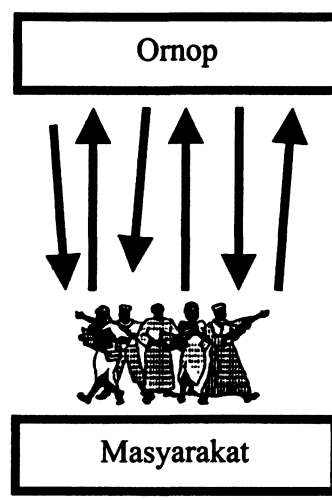
Perdebatan mengenai penggalangan dana dari publik sebenarnya telah sama tuanya dengan sejarah Ornop itu sendiri. Di Indonesia, sayangnya hal tersebut masih sekedar menjadi diskusi tanpa pernah mulai dilaksanakan. Beberapa aktivis malah fobi dengan *fund-raising* publik. Selain telah dimanjakan oleh lembaga dana, masih kuat melekat di kalangan Ornop bahwa meminta uang dari masyarakat itu tidak mudah, masih lebih mudah membuat 5-10 lembar proposal dan diajukan kepada lembaga donor, perusahaan, atau pemerintah.



Pinjaman dan hibah besar yang diberikan oleh badan-badan bantuan internasional hampir pasti membuat orang tidak mau lagi memikirkan bagaimana memanfaatkan sumber lokal secara lebih efektif, dan menjadikan mereka lebih tergantung kepada sumber-sumber luar. Badan-badan ini terlalu terkendali oleh perubahan-perubahan politik jangka pendek sehingga tidak bisa membuat komitmen jangka panjang dengan proses perubahan institusional yang lamban dan sulit. (Sumber: David C. Korten, 2001)

Lembaga dana pada akhirnya menjadi candu bagi Ornop, sehingga Ornop tidak pernah memikirkan bagaimana membangun sumber-sumber dana dari masyarakat luas, yang justru dibelanya. Hal ini membuat Ornop lupa membangun basis-basis sosial mereka, karena tidak memperoleh benefit finansial darinya. Pada akhirnya, pola hubungan yang terbangun bukanlah pola hubungan timbal-balik dan tingkat dinamikanya menjadi sangat rendah. Akhirnya, masyarakat (publik) tetap tidak pernah menjadi subyek dalam relasi tersebut.

Dengan *fund-raising* publik, pola hubungan Ornop dengan masyarakat akan bersifat timbal-balik. Untuk mendapatkan dukungan dari publik, Ornop harus membangun hubungan langsung dengan basis individu-individu yang luas. Dalam hubungan tersebut, Ornop sekaligus pula dapat mengembangkan proses pendidikan sebagai alat komunikasi. Dengan dukungan yang luas dari publik, Ornop akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Ornop sendiri harus membangun akuntabilitas publik, khususnya kepada para pendukungnya.



Kekuatan Sumbangan Berbasis Individu yang Luas

Basis donor-donor individual yang luas dan pertumbuhan sumbangan individu kepada organisasi sangat penting bagi pertumbuhan dan ketercukupan dana sebuah organisasi. Selanjutnya, menggantungkan diri pada basis luas individu akan meningkatkan kemampuan organisasi terhadap penentuan diri sendiri (*self-determintation*), dan tidak menentukan program berdasarkan apa yang akan didanai lembaga donor.

Membangun basis luas donor-donor individu memberi organisasi-organisasi non-pemerintah kebebasan maksimum untuk menjalankan misi mereka. Ornop tetap dapat memanfaatkan dana-dana hibah dari luar untuk mengembangkan program khusus, bantuan teknis, modal proyek, atau kebutuhan jangka pendek lainnya. Dengan menggantungkan pendanaan dari publik, Ornop juga dapat membangun sumber pendanaan yang jauh lebih stabil. Bandingkan tingkat kestabilan pendanaan dari sejumlah kecil (biasanya berjumlah 2 hingga 10) lembaga donor dengan jumlah donor indidual yang sangat banyak, bisa mencapai puluhan atau ratusan ribu.

Penggalangan dana dari publik tidak saja menghasilkan uang (malahan uang bukan hasil utama yang ingin diperoleh) tetapi yang lebih penting lagi memperoleh dukungan sosial dan konstituen yang lebih jelas. Penggalangan dana publik telah terbukti dapat menjadi alat mobilisasi konsitituen yang mendukung organisasi. Penggalangan dana publik berarti kita juga sedang menggalang basis dukungan politik dari publik. Pada akhirnya, semakin banyak individu yang menyokong pendanaan sebuah organisasi maka semakin tinggi pula legitimasi organisasi tersebut.

Hanya organiasi akuntabel yang akan didukung publik secara luas. Dengan demikian, selain menggalang dana dari publik Ornop juga harus membangun akuntabilitas publiknya. Dengan mendapatkan dana dari publik (*client*) akuntabilitas Ornop tidak lagi kepada lembaga donor tetapi kepada publik yang kepentingannya dibela, sekaligus juga yang menyokongnya. Melalui penggalangan dana dari publik, Ornop sekaligus mensosialisasikan misi dan isunya kepada publik. Kegiatan sosialisasi ini sesungguhnya dapat menjadi proses pendidikan politik yang efektif.

Fund-Raising Publik adalah Membangun Hubungan

Bila kita bertanya kepada sesorang, "Apa tujuan dari *fund-raising*?", banyak orang akan berpikir, "Alangkah tololnya pertanyaan itu", dan mungkin akan langsung menjawab, "Tentu saja mencari uang". Kenyataan bertahun-tahun menunjukkan, satu-satunya cara agar Anda dapat mengumpulkan dana adalah dengan mengembangkan basis donor individual yang setia dan mendukung organisasi kita. Tujuan dari *fund-raising* adalah membangun hubungan. Artinya, tujuannya adalah menggalang donor bukan menggalang uang.

Inti manajemen dari penggalangan dana publik adalah memelihara hubungan dan meningkatkan kedekatan penyumbang (donatur) kepada organisasi. Penggalangan dana publik adalah hubungan yang dua arah. Organisasi harus memastikan bahwa sudah tersedia sebuah



Sikap sebagian besar aparat pemerintah yang condong negatif terhadap LSM muncul karena kuatnya pandangan bahwa pemerintah dan aparatnya-lah penanggungjawab tunggal pembangunan. Sikap seperti ini tidak berarti bahwa pemerintah menutup partisipasi masyarakat termasuk LSM dalam proses pembangunan, asal sebatas mendukung dana dan tenaga, bukan berupa pemikiran alternatif memaknai pembangunan itu sendiri, maupun proses perencanaan, strategi dan pelaksanaannya. Faktor lain berkait dengan rasa kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan LSM dipakai sebagai wahana penyebaran ideologi asing yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan budaya politik Indonesia. (Sumber: Lukman Sutrisno, 1995)

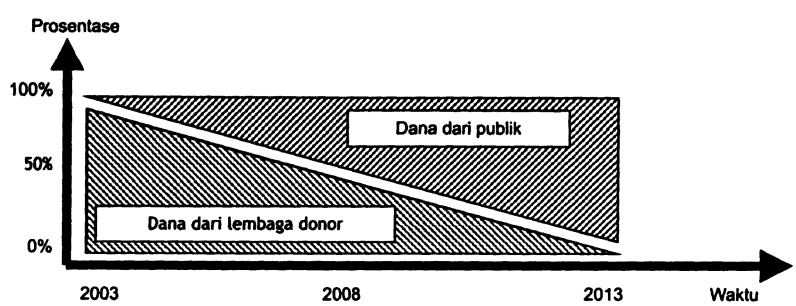
sistem untuk menjamin agar hubungan ini bisa langgeng. Artinya, organisasi harus membangun hubungan dengan donornya (publik) sebagai individu-individu manusia, bukan sebagai mesin ATM yang hanya dihubungi ketika dibutuhkan dan selebihnya diabaikan.

Untuk mulai membangun hubungan dengan basis donor individual, dapat dimulai dengan cara langsung (*direct mailing* atau surat,*foot canvass* atau dari rumah ke rumah, telepon, *email*, atau pun melakukan *event* khusus) dan cara tidak langsung (iklan di media massa, *website*, poster, brosur atau leaflet).

Penggalangan dana dari publik bukanlah pekerjaan yang cepat. Mungkin dia adalah pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Hal ini karena inti manajemen penggalangan dana dari publik adalah *membangun* dan *memelihara* hubungan. Pada tahun-tahun pertama, organisasi bahkan mungkin belum memperoleh uang tetapi sudah mendapatkan sejumlah donatur-donatur individual.

WALHI sendiri ingin membangun sistem penggalangan dana publik untuk 10 tahun ke depan. Pada akhir tahun kesepuluh, WALHI menargetkan akan memiliki sedikitnya 50 ribu orang donatur individual. Kerja sepuluh tahun harus merupakan sebuah proses belajar yang berkesinambungan. Mulai 2003 hingga 2013, WALHI akan dapat mengurangi dana dari lembaga donor sekaligus meningkatkan dana yang bersumber dari publik. Proyeksi tersebut dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Proyeksi Penggalangan Dana WALHI 2003-2013



Penutup

Penggalangan dana publik harus dimulai dengan mengubah paradigma organisasi. Perubahan paradigma tersebut harus tercermin dalam bangun-struktur organisasi, sikap aktivis, hingga citra organisasi yang hendak dibangun di mata publik. Umumnya, bangun-struktur Ornop hanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu administrasi (*supporting system*) dan program. Ibarat kaki, maka organisasi seperti ini tidak stabil karena tidak ditopang oleh sebuah kaki yang lain, yaitu penggalangan dana. Dengan struktur organisasi 'tiga kaki' maka organisasi tersebut menjadi lebih stabil. Artinya secara struktur, organisasi tersebut harus memiliki bagian atau unit yang secara khusus menjalankan fungsi-fungsi penggalangan dana. Ketiga kaki tersebut harus tetap dalam sebuah kesatuan yang utuh, sehingga menjadi lebih terpadu dan saling menunjang.

Perubahan paradigma lain yang penting adalah dengan mengembangkan produk-produk sosial atau nilai (*values*) yang dapat ditawarkan kepada publik. Produk sosial atau *value* inilah yang sesungguhnya akan 'dibeli' publik. Selain itu, perubahan paradigma penting lainnya adalah *sense* atas biaya (*cost*) yang dikeluarkan organisasi untuk sebuah kegiatan dan hasil yang akan diperoleh. Selama ini, kerap kita melihat berbagai kegiatan pertemuan mahal menghabiskan hingga puluhan juta yang hanya mampu menghasilkan 'rencana kerja' dan 'rekomendasi untuk pertemuan kembali'.

Penggalangan dana publik berprinsip 'dimulai dari diri sendiri'. *Board* atau dewan sebagai 'pemilik' organisasi adalah kunci keberhasilan dari penggalangan dana dari publik. Tanpa dukungan dari *board*, penggalangan dana publik sulit berhasil. *Board* berperan sentral dalam penggalangan dana, yakni mengarahkan strategi penggalangan dana, memberi legitimasi, sekaligus terlibat dalam kegiatan-kegiatan penggalangan dana. Ada sebuah *joke* (lelucon) yang dapat menggambarkan fungsi *board* dalam penggalangan dana, yaitu 3G: *Give money, Get money or Get out.*

Oleh karenanya, selain disebabkan pertimbangan ideologi dan politik, keputusan beberapa Ornop untuk menghentikan kerjasama dengan sejumlah lembaga donor asing pada April yang lalu, juga harus ditempatkan dalam konteks membangun momentum memulai penggalangan dana dari publik dan melepaskan diri dari ketergantungan candu lembaga donor. Demi keberlangsungan Ornop itu sendiri, ia harus melepaskan ketergantungan pada lembaga-lembaga donor asing.



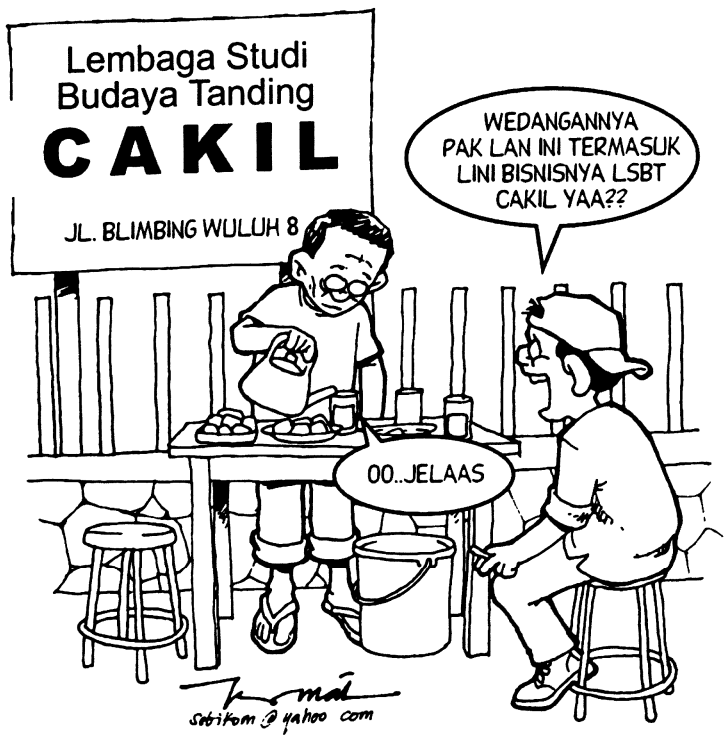
Invasi negara-negara maju ke Irak di awal tahun ini mendorong WALHI memutuskan kerjasama dengan negara-negara donor yang terlibat dalam invasi tersebut. Lembaga donor yang diboikot antara lain USAID, DFID dari Inggris, dan AusAid. Awal tahun ini WALHI tengah menjalin kerjasama dengan USAID untuk program pengembangan kelembagaan demokrasi bernilai Rp 2,5 milyar. Lembaga itu juga tengah dalam proses negosiasi kerjasama dengan DFID dan AusAid untuk menjalankan program senilai Rp 8 milyar. (Sumber: KCM, 25/03/2003)

Pustaka

Klein, Kim (2001), *Fund-raising for Social Change*, 4th ed, Chardon Press, Oackland, USA.

Klein, Kim (2000), *Fund-raising for the long haul*, Chardon Press, Oackland, USA.

Bennet, J. dan Gibbs, S. (1996), *NGO Funding Strategies, An introduction for Southern and Eastern NGOs*, INTRAC publication, UK.



Teknik Yang Papa Mengemis kepada Yang Kaya

Hary Prabowo[1]



Menggalang Dana:
Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan

Penulis : Michael Norton
Penerjemah : Masri Maris
Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
Jakarta, 2002
542 + xxiv

Buku berjudul *Menggalang Dana* dengan sub-judul *Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan* ini secara sekilas sudah menjelaskan suatu perspektif dari posisi kelasnya. Ada semangat pengemisan yang ditawarkan; ada optimisme yang coba diterbitkan dengan menuntun mereka yang tidak punya dana untuk senantiasa mengemis. Persoalan siapa yang menuntun dan siapa yang harus dituntun tentu juga sudah tergambar jelas, yakni negara-negara Utara kepada negara-negara Selatan. Dengan demikian menuntun menggalang dana merupakan wujud determinasi atas sekitar 3,8 milyar masyarakat miskin yang hidup berjubel dan bertebaran di planet negara-negara Selatan, mereka yang mengusung sejarah nasib kelam membentang selama berabad-abad dalam teka-teki gelap dan memenjara mereka dalam kamp kemiskinan. Dan buku tebal ini cukup dermawan dengan menawarkan metode pemecahan teka-teki gelap yang menyiksa kaum miskin di negara Selatan ini: mengemislah! Pembangunan nasib dengan cara mengemis! Mengemis kepada siapa? Tidak lain kecuali kepada kaisar-kaisar di kerajaan uang negara-negara Utara yang menghisap negara-negara Selatan. Mengetuk hati para majikan besar un-

[1] Hary Prabowo, seorang penulis, tinggal di Yogyakarta.

tuk sedekah dari sedikit sisa tumpukan harta karun mereka.

Metode berpikir dari suatu perspektif ideologis harus mampu menjelaskan inter-relasi posisi ini. Sebelum kita membaca lebih jauh dan mempraktekkan buku panduan yang lumayan tebal dan terperinci ini, perlu kiranya mengujinya terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan nakal. Mengapa musti ada kegiatan penggalangan dana yang tentu saja alirannya dari pihak-pihak berlimpah kepada pihak-pihak tak punya dana? Mengapa negara-negara Utara berlimpahan dana sementara negara-negara Selatan tak punya dana? Dari mana sebenarnya akumulasi dana yang melimpah-ruah yang dihimpun perusahaan-perusahaan kaya di Utara sana? Bukankah negara-negara Utara lewat pembuktian sejarah telah merampok kekayaan alam dan tenaga buruh-buruh murah di negara Selatan? Apa sebenarnya peran fungsional yang tengah dimainkan LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarkat) yang menyalurkan dana untuk masyarakat? Apakah bentuk-bentuk *charity* akan mampu menyelesaikan masalah mendasar kemiskinan rakyat di dunia ini atau malah mengaburkan lantas menjinakkan kesadaran mereka? Dan masih berderet-deret pertanyaan yang pantas kita alamatkan kepada pihak-pihak terkait dalam relasi penghisapan manusia atas manusia dalam masyarakat kontemporer ini. Tidak sepantasnya suatu agenda berjalan dalam mata kegiatan kerakyatan tanpa meneliti motif-motif kepentingan yang berpusar di dalamnya. Untuk itulah kita musti jelas melihat maksud dan tujuan buku ini ditulis. Mengapa motif itu hadir dan dalam rangka apa motif tersebut melakukan operasi metodis pada skala tindakan bersama masyarakat atau mengatasnamakan masyarakat?

Buku ini diterbitkan untuk suatu klaim motif yang sangat mulia dan visioner. Cobalah kita simak ungkapan ini: "..menggalang dana memberikan kepada Anda "manfaat yang tersembunyi", antara lain kesempatan untuk menjadi pelopor perubahan bagi perbaikan kondisi kehidupan manusia, dan untuk meyakinkan orang lain perlunya membantu kegiatan Anda; kesempatan untuk membela dengan efektif hak asasi manusia—yang merupakan kunci menuju kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia; dan kesempatan yang unik untuk memainkan peranan di dalam sebuah visi masyarakat baru tempat kita semua hidup aman dan damai" (lihat sampul belakang). Bisa kita bayangkan betapa bermakna kerja menggalang dana ini karena telah ambil peran kepeloporan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan apa yang bisa kita katakan "surga warga dunia" yakni menuju masyarakat baru yang bahagia, adil, sejahtera, aman, dan damai. Bila kita usut lebih lanjut, cita-cita mulia masa depan tersebut tampaknya akan dibangun dengan pilar metodis 'mengemis' kepada kelas majikan kaya. Dengan seruan kata lain, mari kita lancarkan gerakan mengemis demi mewujudkan surga bagi warna dunia. Saya pikir cara ini tidak jauh beda dengan apa yang diperankan secara dramatis oleh para pengemis di pinggir jalan; kaum papa yang menampilkan diri dalam rupa penderitaan yang berlarut-larut: pakaian sobek dan kumal, meng-

gendong anak kecil, bersimpuh dengan kaki dibalut darah karena kusta, serta ditopang berbagai adegan cara mengemis yang diciptakan sedramatis mungkin untuk mengetuk belas kasihan orang lewat. Bukankah mereka juga menggalang dana, bahkan jauh lebih independen karena *vis a vis* untuk perut kosong dan nasib papa mereka secara langsung.

Dalam tingkatan tertentu, bentuk-bentuk penggalangan dana merupakan tingkatan yang lebih maju dan perbaikan metodis yang terus-menerus dalam sejarah pengemisan dari kaum papa kepada kaum kaya. Titik tolak mereka tetaplah dari situasi yang berhakekat semangat 'kantong kosong' menuju 'kantong berisi' yang akan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Buku *Menggalang Dana* ini tampaknya menawarkan metode-metode mengemis yang jauh lebih maju, sistematis, efektif, dan empiris. Bahkan juga dilampirkan contoh-contoh sukses dari pengalaman menggalang dana di berbagai belahan dunia. Jelas bentuk penggalangan dana ini tidak dengan cara klasik model pengemis jalanan namun dirancang dengan metode dari berbagai organisasi, manajemen, dan operasional. Jangan dibayangkan petugas dari penggalang dana ini seperti pengemis berkostum jembel duduk di jembatan penyeberangan, namun telah terjadi revolusi kostum yang luar biasa, karena berhadapan dengan bos-bos kaya dengan lobi dan ketrampilan tinggi yang sangat ditentukan teknik meyakinkan yang bagus. Boleh juga dinyatakan sebagai bentuk Organisasi Pengemisan Terpadu, sebab dana yang mereka raih bukan lagi dalam hitungan recehan dan ribuan tapi mencapai milyaran rupiah. Apakah Anda tetap percaya dengan pesan utopis bahwa cara mengemis ini akan mampu menghadirkan surga warga dunia tersebut? Pertanyaan ini bisa kita simpan untuk direnungkan secara lebih mendalam.

Untuk siapa buku ini diterbitkan? Buku ini oleh pihak yang menerbitkan dimaksudkan sebagai buku pegangan yang handal untuk agen-agen Utara sebagai penyalur aliran dana yakni barisan LSM-LSM atau OMW (Organisasi Masyarakat Warga) untuk memulai rencana penggalangan dana secara strategis. Mereka adalah jajaran Dewan Pengarah LSM, direktur dan staf organisasi, para sukarelawan, serta para konsultan yang mendapat bayaran dari jasa memberikan nasihat kepada klien untuk menggalang dana (hal. 7). Di sisi lain, buku ini juga menawarkan kerangka berpikir bagi LSM atau OMW tentang cara meraih dana untuk keberlangsungan organisasi nirlaba dengan lancar dan jangka panjang. Dengan memperkenalkan strategi menarik perhatian para donor (baik dari kaum majikan, pemerintah, individu) untuk menyumbangkan dana, tenaga, dan sumbangan lainnya, buku ini mendorong proses di mana masyarakat warga akan turut berpartisipasi menjadi mitra yang aktif dalam pekerjaan LSM atau OMW (hal. xxiii).

Buku ini disusun dalam 8 bab secara sistematis. Bab Pertama memaparkan tentang mengapa menggalang dana itu penting dan tantangan yang dihadapi para penggalang dana. Adapun fokus kupasan buku ini langkah pertamanya ada di Bab Dua, pada sebuah halaman yang diawali dengan kutipan ten-

tang kiat indah menggalang dana: "Menggalang dana adalah sebuah kerja ilmu. Tetapi aturannya lebih seperti pelangi daripada sebuah rumus. Anda harus melukiskan dengan paduan warna dan perasaan yang halus. Dan Anda pasti sukses bila Anda melukis dengan rasa kasih dan persahabatan" (Ekaterina Kim, Contacts-I, Moskow). Proposisi ini secara tidak langsung menjelaskan siapa yang dihadapi oleh pasukan penggalang dana: kaisar-kaisar di kerajaan uang dan para penentu kebijakan, dan tentu saja nasib masyarakat, dari sebuah perusahaan atau negara. Mereka acapkali digambarkan sebagai filantropis-filantropis dengan peradaban luhur, taat pada Tuhan, cita rasa hidup yang tinggi, halus budi, dan penuh tata krama sehingga harus dihadapi dengan tata krama yang seimbang, tutur kata yang halus, penuh kasih dan persahabatan. Kita tentu tidak mungkin mengawali percakapan persuasif ini dengan pernyataan: "Sudah layakkah upah buruh di perusahaan Anda? Atau kenapa pabrik tambang Anda mencemari lingkungan dan menuai protes dari warga sekitar?" betapapun mungkin Anda datang dari sebuah LSM lingkungan yang paling getol mengkampanyekan gerakan anti pencemaran lingkungan. Tidak sepantasnya Anda berkonfrontasi dengan pihak yang secara tidak langsung menjadi 'majikan' Anda yang sekian lama *bikin* dapur Anda mengepul.

Lazimnya sopan-santun seorang pengemis yang minta belas kasihan, Anda dituntut tata krama yang lebih besar dalam melakukan pendekatan pribadi terhadap para majikan tersebut. Hal ini penting karena kerja menggalang dana tidak semata-mata menengadahkan tangan model pengemis pinggir jalan, atau mengirimkan surat edaran dan proposal mohon sumbangan kemudian Anda menunggu jawaban. Harus diingat bahwa kerja ini adalah jenis kegiatan yang mengetuk belas kasihan orang kaya, di mana tindakan memberi sumbangan selalu dilandasi oleh keyakinan, harapan, dan kemurahan hati mereka. Lebih dari itu, buku ini juga menyarankan Anda untuk lebih dahulu mempelajari sudut pandang para donor. Seorang pendonor selalu mempunyai alasan tertentu untuk melempar dermanya. Sebagai contoh, donor mendukung kegiatan pemberantasan narkoba karena mungkin ia sendiri dulu bekas *user* akut yang sudah insaf, atau orang-orang yang dicintainya menderita karena mereka korban narkoba. Atau, donor mendukung kegiatan penyelamatan kura-kura karena pendonor punya hobi menonton film kura-kura ninja, dan lain sebagainya. Inilah faktor penting bagi para penggalang dana untuk mempelajari dahulu sudut pandang para donor sebelum menawarkan proyek-proyek yang akan diprogramkan. Kerja kombinasi antara rayuan, kesesuaian agenda proyek dengan visi donor, teknik komunikasi, kegigihan dan kepercayaan diri merupakan apa yang disebut dengan 'melukis pelangi' seperti saran tersebut. Seluk-beluk kerja ini menuntut para penggalang dana bahkan memahami suasana hati, hobi, dan *concern* utama pendonor. Dalam skala tertentu, bahkan ruang dan waktu di mana Anda bertemu dengan donor juga sangat mempengaruhi keputusan.

Tanpa pemahaman ini maka Anda akan kesulitan meyakinkan pendonor.

Seorang penggalang dana juga harus pintar menangkap setiap peluang yang terbuka. Misalnya, ketika seorang donor terkemuka menang dalam perkara pengadilan dan memperoleh ganti rugi dalam bentuk uang, pastikan surat Anda meminta sumbangan sudah ada di meja kerjanya esok hari. Atau jika ada perusahaan besar baru saja mengumumkan mendapat laba besar atau kontrak besar di daerah Anda, maka sebuah surat yang Anda susun dengan baik untuk meminta sumbangan mungkin akan membuahkan hasil. Untuk memantau setiap peluang yang ada maka seorang penggalang dana harus punya banyak relasi dari kalangan birokrat dan pebisnis, rajin memantau perkembangan berita lewat media massa dan sumber informasi lainnya. Sebagai pengemis Anda dituntut tak hanya duduk bersimpuh di perempatan jalan tapi bergerak cepat dalam membaca dan menangkap setiap peluang.

Bab Tiga buku ini mengupas strategi menggalang dana. Strategi menggalang dana adalah tulang punggung kegiatan penggalangan dana, memberikan perhatian penuh dari langkah awal, mengelola organisasi dana, menentukan kebutuhan dan teknik bertahan agar organisasi penggalang dana ini terus berlangsung. Hakekat LSM adalah organisasi peminta-minta, bukan organisasi produsen yang produktif dalam menghasilkan nilai baru (uang akumulatif). Boleh juga dikatakan bahwa LSM adalah organisasi 'modal dengkul' yang hidup-matinya nyaris bertumpu pada kerja meminta-minta, maka alangkah baiknya saran buku ini untuk benar-benar mematangkan strategi menggalang dana secara jangka panjang diperhatikan. Saran buku ini adalah dengan mengembangkan dana abadi, mengembangkan modal yang ada sehingga LSM, yang *notabene* mengklaim sebagai lembaga nirlaba ini, pada perkembangannya 'dipaksa' situasi untuk memasuki hukum-hukum perdagangan yang tentu harus mengambil keuntungan. Inilah sisi kontradiktif, lembaga nirlaba harus masuk kancah hukum bisnis sehingga mampu menghasilkan keuntungan-keuntungan untuk kelangsungan hidup LSM yang bersangkutan. Buku ini juga menganalisis bahwa alangkah riskan bila suatu LSM terlalu bergantung pada satu sumber bagi seluruh kebutuhannya. Terlalu bergantung pada satu donor dapat berakibat kontrol jatuh ke tangan donor, karena ia punya kekuatan untuk mendiktekan apa-apa yang harus dikerjakan organisasi dan menentukan arah yang harus ditempuh organisasi. Bergantung pada satu sumber dapat mengakibatkan resiko gagal—organisasi tidak akan mampu bertahan hidup jika bantuan dana dipotong atau dihentikan sama sekali. Hal ini lazim terjadi karena donorlah sebagai pihak yang memberi uang dan pasti punya kepentingan tertentu.

Karena alasan inilah maka buku ini menyarankan untuk memperluas landasan sumber dananya dengan cara meminta sumbangan donor besar dan mengembangkan sumber-sumber dana baru. Disebabkan hakekat LSM adalah organisasi peminta-minta maka saran buku ini tak jauh-jauh dari kegiatan yang mencerminkan watak pengemisan. Cara

yang ditempuh adalah mengembangkan dana abadi atau hibah, mengembangkan sumber dana yang independen dan pasti, misalnya memperbesar jumlah anggota atau menyelenggarakan malam dana yang sukses yang mampu memupuk pendapatan organisasi, juga mulai memasuki sektor riil dengan menjual jasa yang dapat menghasilkan uang, mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen sosial, pendidikan, dsb., yang menjalankan programnya dari hasil pajak masyarakat (hal. 56-57).

Berbagai teknik sederhana merumuskan strategi juga dipaparkan buku ini. Di antaranya teknik matrik Ansoff, sebuah teknik di mana Anda dapat menentukan cara yang terbaik untuk mendapatkan pendukung baru dan menggunakan teknik baru. Teknik ditempatkan di eksis horisontal sementara pendukung ditempatkan di eksis vertikal. Dalam teknik ini nantinya akan ditemukan berbagai kemungkinan: apakah Anda tetap menggunakan metode-metode yang telah dipakai dengan pendukung lama, mengembangkan pasar dana baru, mengembangkan kegiatan baru di mana Anda bisa meminta para donor untuk mendukungnya, atau bahkan Anda bisa meminta anggota untuk memasukkan LSM Anda sebagai penerima warisan dalam surat wasiat sebuah keluarga kaya-raya. Dalam matrik Ansoff ini juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda agar bisa mengembangkan metode penggalangan dana yang melibatkan pendukung baru dan teknik baru sama sekali, walaupun langkah ini tentu mengandung resiko karena belum teruji.

Selain teknik matrik Ansoff, buku ini juga menyarankan menggunakan metode yang sudah lama dikenal yakni SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Sebuah kerangka analisa untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman terhadap organisasi Anda. Selain SWOT juga ada analisis PEST yang digunakan untuk memahami lingkungan tempat penggalangan dana dilakukan, agar memperoleh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penggalangan dana. Secara khusus PEST menyelidiki berbagai faktor di lingkungan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Sebagai contoh:

Faktor Politik: Apakah Pemilu tahun depan akan membawa perubahan pada pemerintahan? Jika ya, apa dampaknya pada LSM? Apakah undang-undang tentang yayasan LSM yang sedang dibahas di parlemen akan memudahkan kegiatan menggalang dana atau apakah akan mempersulit?

Faktor Ekonomi: Apa dampak dari penyesuaian struktural tahun depan pada kegiatan penggalangan dana Anda? Apa pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekarang ini dan apa peluang yang terbuka bagi penggalangan dana baru? Apa dampak bila negeri Anda masuk dalam jaringan perdagangan regional tahun depan? Apa dampaknya jika bantuan luar negeri dari pemerintah ke pemerintah dan pengeluaran dana dari Utara ke Selatan turun 15%?

Faktor Sosial: Apa dampak pertumbuhan bidang pariwisata pada negeri Anda dan pada kegiatan penggalangan dana? Apa dampak pertumbuhan penduduk kota?

Faktor Teknologi: Apa peluang

yang muncul ketika perbankan memperkenalkan sistem transfer dana elektronik? Apa dampak dan perubahan besar pada sistem pos? Apa peluang yang muncul dari perluasan program televisi dan radio ke pedesaan?

Semua faktor di atas tentu saja akan mempengaruhi organisasi dan kegiatan LSM Anda dalam menggalang dana. Mungkin tidak banyak yang bisa Anda perbuat berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut, namun Anda tetap harus memperhitungkan faktor-faktor itu bila Anda mengembangkan strategi jangka panjang dan membangun program penggalangan dana.

Nyawa dari buku sejumlah 542 halaman ini ada di Bab Enam yang berjudul 'Teknik Menggalang Dana'. Bab ini menjelaskan semua cara yang pernah digunakan untuk menggalang dana secara terperinci, dari membentuk kelompok penggalang dana lokal sampai bergerak mencari sumbangan dari rumah ke rumah, surat langsung, mengadakan malam dana, mendapatkan bagian warisan orang kaya, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat asing dan meminta sumbangan secara besar-besaran. Ciri seorang pemimpin penggalang dana yang baik juga dirinci, bagaimana ia harus ahli dalam organisasi, memperhatikan detil sampai hal-hal terkecil agar segala berjalan lancar, mampu memimpin, mendorong dan mengelola kelompok sukarelawan yang melaksanakan pekerjaan, dan ia juga harus pandai menilai orang sehingga bisa memanfaatkan kemampuannya dalam kerja tim penggalang dana (hal. 427).

Lebih terperinci lagi, bab ini juga menggambarkan berbagai kegiatan menggalang dana di tingkat lokal. Anda bisa menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan amal yang melibatkan publik luas seperti *coffee morning*, gerak jalan, napak tilas, malam kesenian, konser musik, makan malam dilanjutkan dengan dansa dan pesta, lelang, pasar malam, olahraga massal, atau bisa juga mengedarkan kotak amal dari rumah ke rumah. Secara kreatif, kegiatan laksana judi yang menghasilkan uang pun disarankan untuk meraup dana seperti lotre, lomba ketangkasan, atau undian berhadiah. Sebelum Anda buru-buru menjalankan acara amal, buku ini juga memberi kiat menarik berupa lima unsur mutlak dalam kegiatan amal, yakni: (1) Anda harus bisa menghadirkan bintang tamu yang punya daya tarik luas; (2) Anda harus menggalang sponsor untuk menanggung sebagian besar biaya acara; (3) Anda harus mengorganisir media massa agar Anda mendapat liputan luas; (4) Anda harus mampu menampilkan profil organisasi amal Anda; dan (5) Anda harus pastikan pengunjung acara amal Anda dari kalangan atas yang siap merogoh kocek untuk sedekah yang Anda incar itu. Semua bentuk kegiatan penggalangan dana ini diterangkan satu demi satu berikut contoh sukses dalam berbagai kegiatan di berbagai negara. Salah satunya, dicontohkan bagaimana sebuah Action Aid acara malam dana di Kenya, suatu acara yang dihimpun untuk memecahkan masalah air yang dihadapi penduduk Malka Galla, berhasil meraup dana sebanyak £ 75.000 atau menurut mata uang setempat sekitar Ksh 1,2 juta (hal. 267). Juga Community Chest di Hongkong melalui acara jalan santai sejuta orang

berhasil menghimpun dana HK$ 181 juta untuk dibagikan sebagai hibah pembangunan dan hibah kesejahteraan masyarakat (hal. 275).

Buku ini diakhiri dengan sebuah lampiran yang menjelaskan tentang pengujian, cara memanfaatkan peraturan mengenai bebas pajak bagi dana yang diberikan untuk tujuan amal. Selain itu juga menampilkan kode etik praktek menggalang dana di sekolah-sekolah; tukar pakai daftar nama penyumbang dengan daftar dari organisasi amal lainnya; dan pedoman cara menyewa konsultan. Berbagai kode etik ini diambil dari kode etik yang digunakan oleh Institute of Charity Fundraising Managers (ICFM), Inggris.

Secara umum buku *Menggalang Dana* ini tentu bermanfaat bagi Anda yang hendak bekerja menggalang dana menuju cita-cita mulia seperti yang diharapkan buku ini: "...kesempatan untuk membela dengan efektif hak asasi manusia—yang merupakan kunci menuju kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia; dan kesempatan yang unik untuk memainkan peranan di dalam sebuah visi masyarakat baru tempat kita semua hidup aman dan damai." Namun sebelum Anda menjalankan kaidah-kaidah metodis penggalangan dana atau apa yang bisa juga dikatakan bentuk pengemisan yang maju ini, Anda musti memahami apa hakekat kerja menggalang dana ini. Sebagai bentuk pengemisan, betapapun maju metodenya Anda harus kritis mengapa Anda menggalang dana dari kaisar-kaisar di kerajaan uang untuk kaum *kere* pengusung nasib derita yang jumlahnya lebih dari 3 milyar di kolong planet kita saat ini. Anda harus memahami sejarah yang membentang dari kolonisasi sampai neo-kolonial di mana relasi uang dan kuasa kelas terus berlangsung dengan semakin massif dan pongah—khususnya di jurang antara negara-negara Utara dan Selatan.

Dengan mengetahui hakekat persoalan dari sejarah masyarakat ini maka Anda akan mengerti sumber masalah sebenarnya. Siapa dan apa sejatinya sumber perkara yang menderitakan umat manusia di planet bumi ini. Berikutnya, Anda bisa melakukan pilihan-pilihan tindakan sadar; setidaknya Anda bisa membedakan antara melakukan kerja-kerja 'menyapu sampah' di jalanan setiap hari atau akan menghancurkan 'biang dari segala biang sumber sampah' bagi penderitaan umat manusia saat ini. Sebab dua hal prinsipil ini sangatlah penting untuk disadari. Semoga pembaca buku ini semakin sadar bahwa segala bentuk pengemisan—betapapun canggih dan efektif, hakekatnya bertolak dari relasi dominasi yang tidak adil. Bilamana Anda tetap akan meneruskan pekerjaan macam ini, semoga Anda menjadi pengemis yang sadar posisi!

Daftar Akronim

3G	:	Give money, Get money or Get out
ADB	:	Asian Development Bank
ADC	:	Alianza Democratica Campesino (lihat APD)
ADF	:	Asian Development Fund
AIDS	:	Acquired Immunodeficiency Syndrome
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	:	Aliansi Petani Demokratis (lihat ADC)
AS	:	Amerika Serikat (lihat US)
ATM	:	Automatic Teller Machine (Anjungan Tunai Mandiri)
AusAid	:	Australian Aid
AWAC	:	Aid Watch Commission
BINGO	:	Big NGO (lihat NGO)
BUILD	:	Breakthrough Urban Initiatives for Local Development
CARERE	:	Cambodia Reintegration and Rehabilitation Program
CD	:	Community Development
CEIP	:	Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.
CGI	:	Consultative Group on Indonesia
CIDA	:	Canadian International Development Agency
CIREFA	:	International Conference on Central American Refugees
CIS	:	Commonwealth of Independent States
CRS	:	Catholic Relief Services
CSD	:	Commission on Sustainable Development
CSO	:	Civil Society Organization (lihat LSM, NGO, Ornop)
CSSP	:	Civil Society Support and Strengthening Program

DFID	:	Department for International Development
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
ECHO	:	European Community Humanitarian Office
ECOSOC	:	Economic and Social Council
ECP	:	Extended Cooperation Program
ESF	:	Emergency Social Fund
FAO	:	Food and Agriculture Organization
FODEP	:	Foundation for Democratic Progress, Zambia
FUNDE	:	Fundacion Nacional para el Desarrollo, El Salvador (lihat YNP)
G-7	:	Group of Seven; forum ekonomi dan politik tujuh negara industri utama dunia: Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sejak Rusia bergabung pada 1998, menjadi Group of Eight.
Gapri	:	Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
GATT	:	General Agreement on Tariffs and Trade
GEF	:	Global Environment Facility
GIVES	:	Growth, Involvement, Visibility, Efficiency and Stability
GDP	:	Gross Domestic Product
GN-OTA	:	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, Indonesia
GNP	:	Gross National Product
GONGO	:	Government NGO
GTZ	:	Gesellschat fur Technische Zusammenarbeit
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HPH	:	Hak Pengusaha Hutan
ICFM	:	Institute of Charity Fundraising Managers, Inggris
ICNL	:	International Center for Not-for-Profit Law
ICPD	:	International Conference on Population and Development
ICW	:	Indonesia Corruption Watch
IDT	:	Inpres Desa Tertinggal (Inpres: instruksi presiden)
IFAD	:	International Fund for Agricultural Development
IFI	:	International Financial Institution
IGO	:	Inter-Governmental Organization
ILO	:	International Labor Organization
IMF	:	International Monetary Fund
INGO	:	International NGO (lihat NGO)
INSTRAW	:	International Training Institute for the Advancement of Women
IRI	:	International Republic Institute

JED	:	Jaringan Ekonomi dan Wisata Desa
JPS	:	Jaring Pengaman Sosial
KDF	:	Kecamatan Development Fund
KGRP	:	Komisi Gabungan Cina-Amerika untuk Rekonstruksi Pedesaan
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPU	:	Kontraktor Pelayanan Umum
krismon	:	krisis moneter
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
LEDA	:	local economic development agencies
LIL	:	Learning and Innovation Loan
LINGO	:	Little NGO (lihat NGO)
LSD	:	Lembaga Sosial Desa
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat (lihat CSO, NGO, Ornop)
LSMP	:	Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah
NDI	:	National Democratic Institute
NED	:	National Endowment for Democracy
NEP	:	New Economic Policy
NGO	:	Non-Governmental Organization (lihat CSO, LSM, Ornop)
OA	:	Oxfam America
OCAA	:	Oxfam Community Aid Abroad, Australia
OECD	:	Organization for Economic Cooperation and Development
OED	:	Operational Evaluation Department
OMW	:	Organisasi Masyarakat Warga
ormas	:	organisasi masyarakat
Ornop	:	organisasi non-pemerintah (lihat CSO, LSM, NGO)
OS	:	Organisasi Sukarela
OSCE	:	Organization for Security and Co-operation in Europe
PAHO	:	Pan American Health Organization
PARinAC	:	Partnership in Action
PARUL	:	Poverty Alleviation through Rural-Urban
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat UN)
PEST	:	Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi
PIRAC	:	Public Interest Research and Advocacy Center
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PRODERE	:	Development Program for Refugees, Displaced and Repatriated Persons in Central America
SAP	:	Structural Adjustment Policy

SU	:	Sidang Umum
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UE	:	Uni Eropa
UK	:	United Kingdom
UN	:	United Nations
UNAIDS	:	United Nations Joint Program on HIV/AIDS
UNCED	:	United Nations Conference on Environment and Development
UNCTAD	:	United Nations Conference on Trade and Development
UNDCP	:	United Nations International Drug Control Program
UNDP	:	United Nations Development Program
UNEP	:	United Nations Environmental Program
UNESCO	:	United Nations Education, Science and Culture Organization
UNFPA	:	United Nations Population Fund
UNGA	:	United Nations General Assembly
UNHCR	:	UN High Commisioner for Refugees
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UNIDA	:	United Nations Industrial Development Organization
UNIFEM	:	United Nations Development Fund for Women
UNRRA	:	United Nations Relief and Rehabilitation Administration
UNRWA	:	United Nations Relief and Works Agency
US	:	United States (lihat AS)
USAID	:	United States Agency for International Development
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WFP	:	World Food Program
WHO	:	World Health Organization
WWF	:	World Wild Fund for Nature
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
YNP	:	Yayasan Nasional untuk Pembangunan, El Salvador (lihat FUNDE)

Daftar Hibah Sejumlah Lembaga

Bagian ini memberikan gambaran jumlah hibah sejumlah lembaga untuk wilayah kerja Indonesia dan Asia, beberapa disertai deskripsi program yang didanai. Sumber-sumber data adalah Ford Foundation Annual Report 2001 dan www.fordfound.org, KEHATI Annual Report 2001 dan www.kehati.org, serta YAPPIKA Annual Report 2001-2002. Laporan-laporan tahunan (*annual reports*) ini dapat diakses di INSIST Library; ketentuannya lihat di www.insist.or.id.

Ford Foundation 2001 (berbahasa Inggris)

A. Asset Building and Community Development		
1. Economic Development (tidak ditemukan)	**2. Community and Resource Development Environment and development**	**3. Human Development and Reproductive Health Sexuality and reproductive health**
	Foundation-administered project $ 40,000 A program associateship in the Jakarta office to support the Community and Resource Development portfolio, and provide exposure to international philanthropy. Hasanuddin University $ 153,000 To develop a multi-stakeholder comunity forestry program involving villagers, local government agencies, university researchers and NGOs.	Austaralian National University (Australia) $ 200,000 For a study on gender and sexual health in four countries of Southeast Asia: Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam. Fatayat Nahdlatul 'Ulama $ 240,000 For education and outreach on Islam, women's reproductive rights and pluralistic values. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga $ 150,000 To hold a seminar course on Islam, gender and reproductive health. KaPal Perempuan $ 210,000 For alternative education to improve women's autonomy, pluralistic values and leadership in three Indonesian provinces.

	Lampung, University of $ 85,000 For a collaborative research program for community forestry in the watershed of Bandar Lampung city. Pesticide Action Network North America Regional Center (San Francisco, CA) $ 100,000 For community-based monitoring of agricultural development projects funded by multilateral banks. Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (Thailand) $ 15,000 To review and assess its policy in Indonesia in order to develop a collaborative program with local institutions. Yayasan Damar $ 192,000 To develop alternative models of village-based collaborative forest management that promote the rehabilitation and sustainable use of forest resources to benefit local communities Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia $ 100,000 To develop and implement a forset certification monitoring system and promote public awareness of the role of certification in the sustainable management.	Mataram University $ 120,000 To develop an integrated reproductive health services system and a socio-economic empowerment program for female traditional earthenware makers on Lombok island. Pacific Institue for Women's Health (Los Angeles, CA) $ 310,000 To collaborate with the Indonesian Partnership in Health and Humanity Foundation on education programs on emergency contraception among industrial and commercial sex workers. Yayasan Hotline Surabaya $ 140,000 For an innovative pilot project to integrate reproductive health care at the subdistrict level in the province of East Java, Indonesia. Yayasan Kalyanamitra $ 95,700 For publications and institutional development to advance the concept and ideology of women's human rights in Indonesia. Yayasan Kesehatan Perempuan $ 320,000 To assist with the start-up and for applied research to protect women's rights to avoid unsafe abortion. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia $ 330,000 For reproductive health advocacy, training and community-based consumer watch groups in six major cities. Yogya Institute of Research, Education and Publication $ 485,000 For a resource and training center for media, gender and reproductive health, including AIDS.

B. Peace and Social Justice		
1. Human Rights and International Cooperation	**2. Governance and Civil Society**	
Human Rights	***Civil Society***	***Governance***
Foundation-administered project $ 100,000 To explore strategies to increase tolerance for and appreciation of diversity in the context of the transitional justice process in Indonesia.	Foundation-administered project $ 250,000 For a program associate and to promote research, networking and expansion of knowledge about citizen participation, village government reforms and best practices in local government. Indonesian Legal Aid Foundation $ 188,000 To train peasent organizations in six provinces on human rights and develop their advocacy skills and managerial capacity. Jari Indonesia $ 166,000. To build capacity and accountability for a network of nongovernmental organizations monitoring state-initiated development projects. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) $ 54,000 For activities to increase the accountability and transparency of civil society organizations in West Sumatra. Lembaga Pusat Informasi Advokasi Rakyat $ 231,000 For monitoring and advocacy on the rights of marginalized people in the East Nusa Tenggara. Technology, University of (Sydney, Australia) $ 400,000 For a comparative study of third-sector governance in Asia.	Akatiga Foundation $ 275,000 For research and applied policy analysis on land, labor and small-scale enterprises and to conduct an internal evaluation and assess the prospects for an endowment campaign. Combine Resource Institution $ 220,000 To coordinate a community-base information network for development planning in three Indonesian provinceses. Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah $ 173,000 For research and dissemination of culturally sensitive discourses and practices of good governance among younger Islamic leaders. Institute for Research and Empowerment $ 144,000 For applied research on village governance and accountability in Central Java. Lesa-Demarkasi $114.000 For research on local politics and to monitor village election in West Nusa Tenggara province. Perhimpunan Lp3es $ 200,000 For a multistakeholder pilot program to encourage citizen participation in the planning and implementation of rural infrastructure development projects. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta $ 153,000 For curriculum review, training of lecturers and pilot projects for participatory rural development and democratic village governance.

	Yayasan Adi Karya Ikapi $ 200,000 To revitalize regional publishing through book subsidies, reading campaigns and the promotion of alternative retail and distribution networks. Yayasan Bandung Institute of Governances Studies $ 167,000 For research and campaigns on good governance and to monitor budgets and public service delivery in Bandung. Yayasan Duta Awam $ 220,000 For community-based monitoring of agricultural development projects funded by multilateral banks. Yayasan Peduli Sesama $ 26,000 For civic education for village leaders in East Nusa Tenggara. Yayasan Pirac $ 14,300 To increase knowledge and awareness about philanthropic giving and resource mobilization strategies in Indonesia.	Yayasan Gita Pertiwi $ 186,000 For a coalition of civil society organizations in Solo to launch a campaign for improved public services and establish a citizen forum. Yayasan Indonesian Police Watch $ 150,000 For police oversight, dialogues on democratic policing and a study tour. Yayasan Institut Studi Arus Informasi $ 100,000 To develop the capacity to publish a magazine monitoring media in Indonesia. Yayasan Kelola $ 38,000 To strengthen the organizational skills and advocacy capacity of coastal people in North Sulawesi. Yayasan Leksip Kalimantan Timur $ 148,000 For policy analysis, networks and other activities to advance workers' rights and promote labor cruises in East Kalimantan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia $ 226,000 To establish transportation service consumers' groups and for training and technical assistance to promote development of a public transportation sector responsive to consumer rights and protection. Yayasan Pattiro $ 172,000 For institutional networking and strengthening of village and subdistrict level community institutions in West, Central and East Java. Yayasan Pembangunan Masyarakat Kesuma Multiguna $ 120,000 To establish and operate local citizen forum and citizen bureaus in five metropolitan Jakarta neighborhoods.

		Yayasan Pengembangan Kawasan $ 168,000 For a pilot project to encourage better public services and establish citizen advisory bureaus in seven Indonesian provinces. Yayasan Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Eltayasa) $ 150,000 To establish and promote community forums and citizen charters in four cities in Sumatra. Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan $ 167,000 For research on local politics, civic education for underprivileged members of village councils and a clearinghouse on local politics and village governance. Yayasan Riau Mandiri $ 268,000 For the Indonesian Partnership in Local Government to develop and implement models for public participations in government in Bandung, Solo and Riau. Yayasan RIDeP $ 82,000 To collect, systematize and disseminate important documents, including oral histories, relating to the transition to democracy in Indonesia, 1997-2000. Yayasan Smeru $ 200,000 For activities to widen public dialogue about critical social and economic issues.

C. Education, Media, Arts and Culture	
1. Education, Knowledge and Religion *Higher education and scholarship*	**2. Media, Arts and Culture** *Arts and Culture*
Indonesian International Education Foundation $ 211,000 To strengthen higher education in Indonesia through in-country graduate scholarships in the humanities and social sciences and participation of academic administrators in international forums.	Arts Council of Jakarta $ 138,000 To bring live performances of music, dance and theater into Jakarta high schools and offer extracurricular instruction in traditional Indonesian arts to students. Asialink Centre at the University of Melbourne (Australia) $ 192,000 For internships and residencies in Australia for Indonesian arts managers and artists and workshops in Indonesia on arts management and practice. Foundation-administered project $ 250,000 For workshops, meetings, learning activities and translations relating to issues of media, arts and culture. Indonesian Society for Performing Arts $ 110,000 For a leadership transition and for activities to promote traditional Indonesian arts. Kelola Foundation $ 493,000 For programs to strengthen management and professionalism in Indonesian arts and culture organizations. Sekolah Tinggi Seni Indoensia $ 55,000 For a seminar series and graduate courses on the performing arts and to publish the seminar papers. TheatreWorks Limited (Singapore) $ 225,000 For Arts Network Asia, which promotes artistic exchange and sharing of knowledge among Asian artists. Wianta Foundation $ 10,500 For performance of Gambuh, a classical Balinese art form combining dance, music and theater, and to produce a video compact disk for sale to tourists and as a promotional tool. Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan $ 196,000 For activities to strengthen respect for Indonesia's oral traditions and cultural diversity, evaluate the present state of oral traditions and implement revitalization projects.

	Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan $ 30,000 To plan the redesign of Indonesia's arts education curriculum, changing the focus from Western to traditional Indonesian arts. Yayasan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Surakarta $ 140,000 For workshops, research and teaching programs to promote appreciation for and tolerance of traditonal culture in Muslim schools. Yayasan Cudamani $ 37,500 For teaching, research and performances of traditional Balinese arts and for collaborative work to develop innovative new works combining traditional Balinese theater with modern techniques. Yayasan Desantara $ 140,000 For discussions in Islamic religious schools on artistic freedom and tolerance of cultural diversity. Yayasan Indonesia $ 185,000 For literature appreciation programs sending Indonesian authors to read their works and discuss them with students in schools and universities throughout Java and Sumatra. Yayasan Realino $ 60,000 For research and seminars on Indonesian cultural and post-colonial studies. Yayasan Utan Kayu $ 240,000 For the Religion, Society and Freedom of Expression project to sponsor arts events and related discussions highlighting issues of cultural difference and the need for tolerance.

KEHATI 2001

A. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Yayasan Jambatan (Sulawesi Tengah)
Rp 24,395,000
Menyelenggarakan lokakarya sosialisasi isu Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (TRIPs-WTO) untukmasyarakat umum di Sulawesi Tengah.

Walhi D.I. Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 34,175,000
Studi kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di 4 kabupaten dan 1 kotamadya di DIY.

KAPPALA (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 119,185,000
Kegiatan pendidikan lingkungan dan kampanye penyadaran masyarakat melalui radio dan kelender untuk menunjang gerakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan umbi-umbian lokal.

Langkah Bocah (Daerah Isrimeawa Aceh)
Rp 60,685,000
Mengembangkan program pendidikan anak-anak untuk menunjang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan umbi-umbian lokal.

Fakutas Pertanian, Universitas Bengkalan (Madura, Jawa Timur)
Rp 49,385,000
Kampanye konservasi tanaman obat dan "hak atas kekayaan komunal" melalui radio, seni pertunjukan tradisional dan seminar publik.

Yayasan Dalas Langit (Kalimantan Selatan)
Rp 90,340,000
Mengelola berbagai kegiatan advokasi kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan.

Hijau Gerakan Peduli Lingkungan (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 49,885,000
Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat luas dan guru-guru dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam .

Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (Kalimantan Selatan)
Rp 120,940,000
Mengembangkan keanekargaman pendidikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Selatan.

Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (Kalimantan Selatan)
Rp 82,470,000
Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media massa.

Klub Indonesia Hijau 09 (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 42,235,000
Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat luas dan guru-guru dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam.

Konphalindo (Jakarta)
Rp 132,900,000
Advokasi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan produk transgenik.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan)
Rp 144,635,000
Advokasi mengenai isu-isu yang berhubungan dengan produk transgenik.

Yayasan Taratak Bukittinggi (Sumatera Barat)
Rp 57,185,000
Studi mengenai peran kenagarian di wilayah Sumatera Barat untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Yayasan HAMIM (Jawa Timur)
Rp 23,395,000
Mengembangkan program pendidikan lingkungan di Jember, Jawa Timur, melalui pelatihan fasilitator bagi para guru, fasilitas pembentukan jaringan guru untuk mengembangkan dan menguji-coba modul pendidikan lingkungan.
Bina Lestari Alam (Jawa Timur)
Rp 42,470,000
Mengembangkan program pendidikan lingkungan di Jember, Jawa Timur, melalui pelatihan fasilitator bagi para guru, fasilitas pembentukan jaringan guru untuk mengembangkan dan menguji-coba modul pendidikan lingkungan.
Kelompok Peduli Lingkungan (Jawa Timur)
Rp 81,160,000
Mengembangkan program pendidikan lingkungan di Jember, Jawa Timur, melalui pelatihan fasilitator bagi para guru, fasilitas pembentukan jaringan guru untuk mengembangkan dan menguji-coba modul pendidikan lingkungan.
Konphalindo (Jakarta)
Rp 146,234,500
Menyelenggarakan Forum Keanekaragaman Hayati Indonesia 2001.
Indonesian Center for Environmental Law (Jakarta)
Rp 79,300,000
Diskusi kebijakan bertema "Reformasi Kebijakan yang Berhubungan dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam menuju Pengelolaan yang Berkeadilan".
BIO FORUM (Bogor, Jawa Barat)
Rp 49,988,500
Menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan bagi LSM lokal untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu-isu bioprospeksi dan pembajakan hayati (biopiracy).
Yayasan Ulayat Bengkulu (Bengkulu)
Rp 125,520,000
Mengembangkan modul pendidikan lingkungan dan keanekaragaman hayati untuk guru dan siswa sekolah dasar, serta masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Kissah Teater Bocah (Lampung)
Rp 11,042,500
Meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan melalui pementasan teater anak berjudul, "Bencana di Negeri Hijau".
Kelompok Sandiwara Ogah Mundur (Depok, Jawa Barat)
Rp 14,890,000
Kampanye penyadaran masyarakat melalui diskusi dan pementasan drama tradisional (lenong).
Yayasan Merah-Putih Palu (Central Sulawesi)
Rp 120,190,000
Mengembangkan modul pendidikan lingkungan berdasarkan pengetahuan tradisional dari masyarakat adat di Sulawesi Tengah.
Asia Pacific Information Network on Medicinal and Aromatic Plants (Bogor, Jawa Barat)
Rp 6,000,000
Menyebarkan kepada masyarakat luas informasi pemanfaatan tanaman obat dan aromatik yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri.
Gita Pertiwi (Solo,Jawa Tengah)
Rp 30,200,000
Pendokumentasian kegiatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan aneka kacang-kacangan lokal di Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai media pembelajaran untuk penyadaran masyarakat.
IMPALA UNIBRAW (Jawa Timur)
Rp 29,900,000
Pendidikan lingkungan dan advokasi kepada kelompok-kelompok pencinta alam.
Yayasan HAMIM (Jawa Timur)
Rp 39,600,000
Diskusi monitoring dan evaluasi untuk menelaah metode dan pendekatan yang tepat untuk pendidikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di tingkat nasional dam daerah.
Yayasan Anak Peduli Lingkungan (Jawa Barat)
Rp 34,530,000
Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat lokal dalam pelestarian penyu dan habitatnya di sepanjang Pantai Selatan, Tasikmalaya, Jawa Barat.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Kerja Pemberdayaan Agro Tani (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 155,970,000
Pendampingan masyarakat, riset pasar dan produksi, dan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi dan mendukung gerakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan umbi-umbian lokal.

PPLH Seloliman (Jawa Timur)
Rp 46,895,000
Mengembangkan bank benih untuk melestarikan padi dan tanaman obat lokal.

Forum Swadaya Masyarakat (Jawa Timur)
Rp 49,852,000
Mengembangkan sistem pengobatan tradisional berbasis masyarakat di lima desa di Sumenep, Madura untuk mendukung pelestarian tanaman obat.

Sekretariat Bersama Buntok-Serikat Masyarakat Pengelola Ekosistem Air Hitam (Kalimantan Selatan)
Rp 11,700,000
Lokakarya inventarisasi potensi kawasan dan metode penggunaan penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis untuk mengembangkan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di kawasan Sungai Puning, Kalimantan Selatan.

KSM Mekar Sari (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 11,812,500
Lokakarya desa dan pertemuan koordinasi, penyediaan benih dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dan kegiatan penunjang lain untuk melestarikan dan memanfaatkan umbi-umbian lokal secara berkelanjutan.

Paguyuban Petani Desa Sawahan (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 11,812,500
Lokakarya desa dan pertemuan koordinasi, penyediaan benih dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dan kegiatan penunjang lain untuk melestarikan dan memanfaatkan umbi-umbian lokal secara berkelanjutan.

KSM Lestari Pertiwi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 11,812,500
Lokakarya desa dan pertemuan koordinasi, penyediaan benih dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dan kegiatan penunjang lain untuk melestarikan dan memanfaatkan umbi-umbian lokal secara berkelanjutan.

KSM Tri Manunggal (Daerah Isrimewa Yogyakarta)
Rp 11,812,500
Lokakarya desa dan pertemuan koordinasi, penyediaan benih dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dan kegiatan penunjang lain untuk melestarikan dan memanfaatkan umbi-umbian lokal secara berkelanjutan.

Simpul Jaringan Bio Region Jawa-Bali (Jawa-Madura-Bali)
Rp 324,445,545
Mengembangkan jaringan kerjasama di antara mitra kerja KEHATI di wilayah Jawa-Madura-Bali.

Paguyuban Guyub Rukun Desa Agrodadi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 27,795,000
Lokakarya desa dan pertemuan koordinasi, penyediaan benih dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat dan kegiatan penunjang lain untuk melestarikan dan memanfaatkan umbi-umbian lokal secara berkelanjutan.

LPMA Borneo Selatan (Kalimantan Selatan)
Rp 24,990,000
Meingkatkan kapasitas kelembagaan melalui penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan stakeholders kunci.

Serikat Masyarakat Pengelola Ekosistem Air Hitam (Kalimantan Selatan)
Rp 15,000,000
Pemetaan dengan menggunakan sistem informasi geografis untuk kawasan sekitar Sungai Puning, Kalimantan Selatan.

LPMA Borneo Selatan (Kalimantan Selatan)
Rp 48,975,000
Penelitian tentang aturan adat untuk menunjang revitakisasi nilai lokal untuk kegiatan konservasi.
Pusat Studi Asia-Pasifik, Universitas Gadjah Mada (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 59,910,000
Studi tentang pengelolaan sumber daya alam dengan perspektif gender di ekosistem mangrove,di Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah.
Serikat Masyarakat Pengelola Ekosistem Air Hitam (Kalimantan Selatan)
Rp 28,560,000
Lokakarya untuk menyusun aturan untuk pengelolaan sumber daya alam di kawasan Sungai Puning.
LPMA Borneo Selatan (Kalimantan Selatan)
Rp 16,550,000
Audit keuangan untuk kegiatan tahun 2000 oleh auditor independen.
KAPPALA (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 14,865,000
Audit keuangan untuk kegiatan tahun 2000 oleh auditor independen.
Kelompok Kerja Pemberdayaan Agro Tani (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 11,050,000
Audit keuangan untuk kegiatan tahun 2000 oleh auditor independen.
Sekber Buntok-Serikat Masyarakat Pengelola Ekosistem Air Hitam (Kalimantan Tengah)
Rp 52,700,000
Pertemuan perencanan tingkat desa dan antardesa untuk membangun pemahaman bersama untuk kegiatan pelestarian di kawasan Sungai Puning.
Yayasan Biosfer Manusia (BIOMA) (Kalimantan Timur)
Rp 147,710,000
Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan ekologi sumber daya hutan di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

C. Program Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Yayasan Rumsram (Biak, Papua)
Rp 47,834,000
Lokarya evaluasi dan perencanaan Program PPKH di Kepulauan Padaido unutk tahun 2001-2002.
Pusat Studi Asia-Pasifik, Universitas Gadjah Mada (Daerah Istimewa Yogyakarta)
Rp 11,165,500
Publikasi dan distribusi dua buku yang merupakan hasil penelitian di Kepulauan Padaido dan Pegunungan Arfak.
Yayasan Rumsram (Biak, Papua)
Rp 444,119,750
Penyusunan tat ruang dan serangkaian kegiatan untuk menciptakan pengelolaan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat yang mencakup aspek hukum, sosial dan ekonomi di Kepulauan Padaido, Biak, Papua.
Yayasan PERDU PAPUA (Manokwari, Papua)
Rp 237,720,000
Memperkuat nilai-nilai (*igya ser hanjop*) dan kelembagaan lokal untuk menopang kegiatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di Pegunungan Arfak, Manokwari, Papua.
LP3BH Papua (Manokwari, Papua)
Rp 129,805,000
Memperkuat nilai-nilai (*igya ser hanjop*) dan kelembagaan lokal untuk menopang kegiatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di Pegunungan Arfak, Manokwari, Papua.
Yayasan Alam Lestari (Sumba, East Nusa Tenggara)
Rp 403,520,100
Meningkatkan kapasitas lokal untuk untuk mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan penyagga Taman Nasional Laiwanggi-Wanggameti, Sumba Timur.
Yayasan Bina Lestari Bumi Cendrawasih (Manokwari, Papua)
Rp 93,260,000
Memperkuat nilai-nilai (*igya ser hanjop*) dan kelembagaan lokal untuk menopang kegiatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di Pegunungan Arfak, Manokwari, Papua.

D. Hibah Penelitian Skala Kecil di Taman Nasional Kerinci Seblat

Yayasan Citra Budaya Indonesia (Sumatera Barat)
Rp 22,300,000
Publikasi majalah untuk anak-anak yang berisi informasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Kerinci Seblat.

A. Penguatan Forum LSM

Forum LSM DIY (Yogyakarta)
Rp 115,689,382
Memperkuat kegiatan Forum dengan kegiatan advokasi dan lobby, pendidikan hak politik masyarakat, pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, dan dana operasional.

FIK-Ormop Sulawesi Selatan (Makassar)
Rp 136,545,948
Memperkuat kegiatan Forum dengan kegiatan advokasi dan lobby, dialog kebijakan dan publik, pendidikan hak politik masyarakat, seminar tentang otonomi daerah, pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, dan dana operasional.

FSSM-NTT (Maumere)
Rp 213,462,730
Memperkuat kegiatan Forum melalui kampanye, memberi pendidikan hak politik masyarakat, melakukan pert emuan rutin, pelayanan terhadap mitra, dan pelatihan terhadap kepemimpinan yang baik serta dana operasional.

Foker LSM-Papua (Jayapura)
Rp 118,256,345
Memperkuat kegiatan forum melalui kampanye untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian antar etnis, melak ukan pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, serta dialog publik dan dana operasional.

Koalisi NGOHAM (Banda Aceh)
Rp 91,093,987
Memberi dukungan terhadap para Ornop, penggalian rumusan resolusi konflik, melakukan dialog dan pertemuan antar berbagai pihak untuk mencari penyelesaian konflik di Aceh.

B. Pendidikan Masyarakat

SANRES NTT (Maumere)
Rp 68,656,794
Program meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan advokasi kebijakan terhadap isu-isu pengelolaan sumber daya alam di NTT.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nadhlatul Ulama D.I. Yogyakarta (LKPSM NU DIY) (Yogyakarta)
Rp 69,461,275
Program untuk mengembangkan kesadaran kritis dalam masyarakat melalui seni budaya pesantren.

Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) (Yogyakarta)
Rp 27,605,050
Program penyadaran gender untuk aktivis pemuda Nahdatul Ulama-Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Batuan Hukum-Nusra (LBH Nusra) (Maumere)
Rp 29,430,000
Program pemetaan partisipatif untuk mendukung kegiatan advokasi dan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) (Banda Aceh)
Rp 53,517,585
Program pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan gender.

Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat (SULOH) (Banda Aceh)
Rp 87,706,910
Program pengembangan dan penguatan organisasi tani Aceh melalui pendidikan dan penerbitan media alternatif.

Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)
Rp 58,086,513
Program membangun pemerintah lokal yang demokratis dalam fokus membangun pemerintah desa dan badan perwakilan desa di Kabupaten Lembata.

Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) (Bulu Kumba)
Rp 51,503,000
Program penguatan organisasi masyarakat sipil dalam era otonomi daerah di Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan.
Yayasan Pengembangan Bambu Flores (YPBF) (Maumere)
Rp 156,651,800
Program konservasi keanekaragaman hayati melalui program radio komunitas untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup dan advokasi hak-hak petani dan hak atas sumber daya alam.
Yayasan Lembaga Konsumen-Sulawesi Selatan (YKLSS) (Makasar)
Rp 24,513,643
Studi kasus yang bertujuan untuk mempromosikan perencanaan anggaran yang bersifat partisipatif dan transparan di Kabupaten Pengkep, Sul Sel.
Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA) (Kupang)
Rp.7,500,000
Menerbitkan buku yang berjudul "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat".
LAPERA (Yogyakarta)
Rp 20,668,000
Program pendidikan masyarakat sipil di sekitar pedesaan wilayah Yogyakarta.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat
Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (YTMI) (Makasar)
Rp 66,000,000
Program konservasi pohon bakau serta mendukung kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat.
Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)
Rp 71,871,000
Program pengembangan pertanian terpadu untuk 10 desa di pulau Lembata-NTT.
Yayasan Lembaga Konsumen-Sulawesi Selatan (YLKSS) (Makassar)
Rp 31,700,000
Program perkembangan pertanmian organik sayur-sayuran di sekitar kota Makassar.
Yayasan Hivlak (Tual)
Rp 111,912,500
Untuk program hukum dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat di daerah pesisir di pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara.
Yayasan Bina Mandiri (YBS) (Ende)
Rp 40,071,590
Program pengembangan pertanian terpadu di Ende-NTT.
Yayasan Karya Swadaya (YKS) (Maluku Tenggara)
Rp 8,333,000
Kontribusi terhadap program agro-forestry untuk membantu melindungi sumber daya alam.
Yayasan Satyapila (Aceh Tenggara)
Rp 23,457,794
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan.
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia-Papua (PKBI) (Jayapura)
Rp 68,491,069
Program pengembangan tanaman obat-obatan serta memperkuat kearifan local di Jayapura-Papua Barat.
Yayasan Agape (Yogyakarta)
Rp 32,000,000
Program usaha untuk memulihkan kesuburan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan petani melalui budidaya tanaman jarak dan empon-empon di Dusun Pudak-Yogyakarta.
Yayasan Paramitha (Malang)
Rp 13,232,149
Diskusi untuk melihat isu-isu yang berkembang di Jawa Timur sekaligus melihat spektrum Ornop di wilayah tersebut.
ELTAYASA (Bukittinggi)
Rp 25, 066,400
Lokakarya untuk mendiskusiskan isu otonomi daerah ssekaligus melihat spektrum Ornop di daerah Sumatera Barat.

C. Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat

BEKATIGADE (Yogyakarta)
Rp 104,902,750
Program untuk pemberdayaan perempuan melalui dukungan terhadap usaha kecil, fasilitas jaringan antara sesama kelompok usaha perempuan.

Yayasan Tengko Situru (YTS) (TanaToraja)
Rp 76,930,000
Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan untuk membangun usaha kecil, untuk usaha petani sutera.

WALDA (TanaToraja)
Rp 6,900,000
Kontribusi program yang bertujuan untuk membantu komunitas lokal dan menghimpun sumber daya ekonomi.

Yayasan Membagi Kasih (YMK) (Atambua)
Rp 45,900,000
Program untuk bantuan kelompok usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta membangun jaringan usaha kecil tersebut.

Yayasan Agape (Yogyakarta)
Rp 3,800,000
Dukungan akhir untuk 2 tahun program yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan perempuan dan membangun skema kredit serta aktivitas peningkatan kapasitas.

Yayasan Bina Mandiri (Fak-Fak)
Rp 13,188,000
Bantuan untuk membangun usaha kecil dan koperasi lokal di Fak-Fak Papua Barat.

Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA) (Kupang)
Rp 11,860,000
Meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui skema kredit dan usaha koperasi kredit.

YAKARMANI (Tual)
Rp 36,545,000
Program untuk menghasilkan pendapatan lokal dan membangun skema kredit komunitas di Tual-Maluku.

LEKMAS (Makassar)
Rp 13,031,500
Penguatan serikat pekerja (buruh) melalui dukungan usaha kecil di Makassar-Sulawesi Selatan.

Yayasan Daur Ulang Aceh (YADUA) (Banda Aceh)
Rp.9,900,000
Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha daur ulang dan skema kredit kelompok.

Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)
Rp 40,000,000
Membangun koperasi lokal dimana para petani mempunyai toko untuk memasarkan hasil pertanian mereka dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

D. Dialog Kebijakan Nasional

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) (Jakarta)
Rp 65,500.000
Meningkatkan pertisipasi publik dalam advokasi untuk proses pembuatan kebijakan tentang pertambangan.

SAMAK (Banda Aceh)
Rp 60,955,000
Meningkatkan transparansi penggunaan APBN untuk kemanusiaan dan pembangunan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat Aceh.

SAMAK (Banda Aceh)
Rp 23,467,000
Seminar tentang transparansi APBN dan perencanaan strategis.

Forum Perjuangan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA)
Rp 2,000,000
Kontribusi pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kasus Aceh melalui kampanye di Jakarta yang terdiri atas pameran foto dan seminar dengan tema "Dua Hari Bersama Rakyat Aceh".

WALHI Kalimantan Selatan (Banjarmasin)
Rp 8,100,000
Dialod interaktif untuk konflik resolusi atas sumber daya alam di Kalimantan Selatan.

Bina Desa (Jakarta)
Rp 2,000,000
Dukungan logistik untuk mendukung aksi petani untuk mendorong reforma agraria.

LPIST (Jakarta)
Rp 3,000,000
Seminar publik untuk merefleksikan kinerja Presiden Megawati yang berjudul: Suara Dari Arus Bawah: 100 Hari Pemerintahan Megawati.

Kontras (Jakarta)
Rp 2,000,000
Kampanye publik tentang Maluku yang sedang berada dalam situasi konflik, tema kampanye adalah: "Kembalikan Maluku Kami".

BACA&LAWAN

Buku-buku terbitan kami terbagi atas serial: (1) Seri Gerakan Sosial Baru, (2) Seri Komik, (3) Seri Ideologi, (4) Seri Penulis Muda, dan (4) Tanpa Seri.

Seri Gerakan Sosial Baru



Islam Kiri
Jalan Menuju Revolusi Sosial
Eko Prasetyo
I, Oktober 2003
Rp 35.000,-

Sebagai 'kelanjutan' dari buku *Islam Kiri: Melawan Kapitalisme Modal* (Agustus 2002), buku ini menjelaskan bagiamana konsep revolusi dalam Islam. Lewat buku ini akan diperoleh gambaran bagaimana sejarah revolusi kaum Kiri dan bagaimana sejarah gerakan Islam dalam menjalankan revolusi.



Gelombang Perlawanan Rakyat
Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia
Francis Wahono, Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, Jeffrey Winters, R. Yando Zakaria, dkk.
I, Oktober 2003
Rp 35.000,-

Bicara gerakan sosial tak bisa dilepaskan dari struktur dan sistem sosial yang ada di masyarakat, juga yang tak kalah penting, kekuasaan dan perilaku modal. Anggapan bahwa gerakan sosial di Indonesia mengalami kelumpuhan nampaknya perlu dikoreksi kembali. Di bawah sejumlah tekanan, respon dan pergulatan sengit gerakan rakyat menggeliat, dengan tuntutan serta bentuk pengorganisasian yang beragam. Udara perubahan bahkan turut mendukung, memotivasi munculnya pemimpin rakyat yang berkarakter ideologi yang berbeda-beda. Buku ini merupakan himpunan sejumlah tema dan isu yang ditulis oleh para ilmuwan serta pelaku gerakan rakyat. Buku ini akan meyentuh Anda mengenai peta gerakan rakyat, yang kini sedang dan terus mengalami berbagai persoalan.

Seri Komik



Che untuk Pemula
Sergio Sinay dan Agung Arif Budiman (ilus.)
I, Agustus 2003
Rp 27.000,-

Che Guevara adalah simbol revolusi anak muda. Lahir untuk revolusi, Che mempelopori gerakan pembebasan di Amerika Latin. Kehadirannya selalu jadi duri dalam daging penguasa, bahkan pun ketika dia sudah meninggal dunia. Perjuangannya telah mengin
spirasi banyak orang di berbagai benua. Komik ini memuat perjalanan hidup Che, irisannya dengan tokoh-tokoh dunia, dan perjalanan pemikirannya. Coba tengok dan cermati isinya untuk menemukan jawaban: Andakah anak kandung revolusi itu? Jika ya, Anda benar-benar tak bisa berkelit lagi.

Seri Ideologi



Fasisme
Hugh Purcell
II, April 2003
Rp 25.000,-

Namanya adalah Benito Mussolini, seorang pemimpin yang menjadi tokoh besar yang berpengaruh di Eropa selama 20 tahun. Jika kita juga ingat, adalah Hitler yang namanya identik dengan kengerian dan ketakutan abadi dalam sejarah masyarakat Eropa. Keduanya mengusung ideologi Fasisme, yang seringkali disalahartikan berbagai kalangan. Terbunuhnya sekitar 6 juta orang membuat Fasisme hadir sebagai kekuatan yang menakutkan dan dijauhi. Sebetulnya apa yang dinamakan Fasisme dan siapa saja yang tergolong sebagai pengikutnya? Buku ini bertutur dengan bahasa yang mudah, serta memuat gambar dan foto, tentang apa dan bagaimana hidupnya ideologi fasisme. Buku yang menantang untuk dibaca, terutama bagi Anda yang ingin lebih memahami Fasisme.

Seri Penulis Muda



HAM versus Kapitalisme
Muh. Budairi Idjehar
I, September 2003
Rp 27.000,-

Negeri ini belum menjanjikan apa-apa bagi korban dan pejuang HAM. Lemari arsip kantor-kantor pengadilan masih dijejali berkas-berkas pelanggaran Ham. Seiring waktu tak juga berkurang, bahkan menggelembung menjadi tumpukan kertas yang lapuk dan bau. Siapa yang membantu menguranginya hanya satu: rayap. Bersama waktu, rayap-rayap pengadilan membuat kita melupakan pelanggaran HAM kasus per kasusnya. Karena PR-PR ini toh hanya menghalangi laju modal beroperasi di tanah air ini. Sedang persahabatan kapitalisme dan negara, telah terjalin dalam persahabatan yang indah oleh rona kekerasan dan kemiskinan. Jadi, mari... hentikan HAM yang HAMPA, tanpa keberpihakan HUKUM padanya.

Tanpa Seri



Bebas dari Neoliberalisme
Mansour Fakih
I, Nopember 2003
Rp 19.000,-

Globalisasi ternyata hanyalah sebuah mitos belaka. Pasar bebas yang dipercaya akan menjamin harga murah dan membawa berkah kesejahtaraan, ternyata malah menyebabkan terjadinya penggusuran, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang luar biasa. Buku ini berusaha membongkar berbagai mitos dan kebohongan kaum neo-liberal dengan analisis yang tajam dan lugas dengan pemahaman yang mudah dicerna oleh orang awam sekalipun.

INSIST Shirt merupakan bagian dari INSIST Press yang memproduksi dan menjual kaos-kaos. Selain menjual kaos sendiri, INSIST Shirt juga menerima pemesanan pembuatan kaos. Produk-produk INSIST Shirt terdiri dari dua ukuran: Medium (M) dan Large (L), serta tersedia beragam warna (hitam, putih, merah, biru, dan oranye) tergantung desain.



Kaos-kaos kami terbagi atas serial:
(1) Seri Tokoh
(2) SeriGerakan Sosial
(3) Seri Protes
(4) Seri Ideologi
(5) Seri Pembebasan

Harga:
Warna Putih, Lengan Pendek Rp 35.000,-
Warna Lain, Lengan Pendek Rp 38.000,-
Warna Putih, Lengan Panjang Rp 38.000,-
Warna Lain, Lengan Panjang Rp 40.000,-

Dapatkan produk INSIST Shirt di Toko Buku INSIST

CARA BERLANGGANAN JURNAL WACANA

Paket Berlangganan Jurnal **wacana** menawarkan kemudahan bagi Anda: setiap terbitan Jurnal **wacana** aan kami kirim, tak perlu Anda yang mencarinya. Pelanggan juga akan memperoleh informasi buku-buku terbaru INSIST Press (katalog buku baru) dan bisa melakukan pemesanan melalui pos, telepon, atau email.

Pilihan Paket Berlangganan ini:

- Jawa - Bali Rp 100.000,-(4 Edisi)
- Luar Jawa - Bali Rp 125.000,-(4 Edisi)

Biaya paket sudah termasuk ongkos kirim.

Biaya tersebut dapat Anda **bayar di muka** melalui:
Bank BCA KCU Yogyakarta No. Rek 037 204 9411
a.n. Astri Unun Pratiwi

Usai pembayaran, silakan kirim fotokopi bukti transfer berikut formulir di bawah kepada:

Sdri. Unun atau Sdr. Aan
(INSIST Press)
Pogung Lor C-145
Yogyakarta 55284, Indonesia
Telp./Faks. +62 274 519513
Email insistpress@eudoramail.com

Jurnal **wacana** yang dipesan akan segera kami kirim sesudah fotokopi bukti transfer diterima melalui pos atau Faks.

cut here - - -

Dapatkan Buku-buku INSIST Press dan Distribusi IPPI

Selain di toko-toko buku Gramedia, Gunung Agung, Toga Mas, dan Social Agency Baru cabang Yogyakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Malang, dan Jakarta, buku-buku INSIST Press dan buku-buku distribusi IPPI dapat diperoleh di tempat-tempat dalam daftar di bawah ini. Khusus produk INSIST Shirt, tersedia di tempat bertanda (*) dan Toga Mas Yogyakarta-Semarang-Jember-Malang.

Yogyakarta
Toko Buku Alfa Media
Jl. Monjali 75A
Telp./Faks. (0274) 584780

Quadrant Book House
Jl. Gejayan 3A Mrican
Telp./Faks. (0274) 524107

Jakarta
Dua Lentera Agency
Jl. Mampang Prapatan X
No. 37S RT/RW 01/01
Telp. (021) 9243005

Agromedia Agency
Bintaro Jaya Sektor IX
Jl. Rajawali IV Blok HD X
No. 3
Telp. (021) 7451644,
74863334

Bandung
Tobucil (Toko Buku Kecil)*
Jl. Kyai Gede Utama 8
Telp. (022) 2503404

Iwan Agency IAIN Bandung
Jl. Permai III No. 49A Cipadung

Semarang
Toko Buku Hengky
Jl. Purwoyoso I No. 15
Purwoyoso-Ngaliyan
HP 0856 269 4287

Solo
Toko Buku Cahaya Kentingan*
Jl. Ir. Sutami No. 88C Jurug
Telp. (0271) 638307

Purwokerto
Komunitas Warteg
Depan FISIP-UNSOED
Jl. HR. Bunyamin

Planet Buku*
Jl. Kampus No. 10B Grendeng

Bojonegoro
LSPM*
Jl. Gajah Mada No. 89
Telp. (0353) 885833

Malang
Galeri Buku Kijaru*
Jl. Kertoasri No. 122
Telp. (0341) 564954

Surabaya
Uranus Book Store*
Jl. Ngagel Jaya 89-91
Telp./Faks. (031) 5028255

Banten
Toko Buku Paradigma*
Jl. KH. Abdul Fatah Hasan
No. 14 Cijawi Masjid Serang

Bali
Wisnu Press
Jl. Pengubengan Kauh No. 94
Kerobokan-Kuta, Badung
Telp./Faks. (0361) 735320

Pontianak, Kalimantan Barat
Pancur Kasih Group
Jl. Budi Utomo Komp. Perum
Bumi Indah Khatulistiwa A3/3-4
Siantan Hulu

Palu, Sulawesi Tengah
Toko Buku INSIST Press Palu*
Jl. Lasoso No. 45
Telp. (0451) 427954

Papua Barat
Rony Ferdy Agency
Jl. Bunga Kembang Sepatu No. 3
Klademak III, Sorong
Telp. (0951) 331423



Atau langsung datang di **Toko Buku INSIST**
Blimbingsari CT IV/38
Yogyakarta 55281 Indonesia
✆ +62 274 544505
Faks. +62 274 519513